



Peraturan Wali Kota Pekalongan  
Nomor : 55 Tahun 2023  
Tanggal : 28 Juli 2023

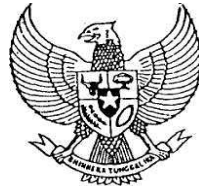
# PERUBAHAN

Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan  
Nomor 25 Tahun 2022 tentang

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023



PERUBAHAN RKPD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan serta guna pelaksanaanketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
  8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pekalongan tahun 2022 Nomor 25), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Juli 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,  
Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Juli 2023





LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
2023**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1. LATAR BELAKANG</b>	<b>1</b>
<b>1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN</b>	<b>1</b>
<b>1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN</b>	<b>3</b>
1.3.1. RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021	4
1.3.2. RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	6
1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2023	7
1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	8
1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023	8
<b>1.4. MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<b>8</b>
1.4.1. Maksud	8
1.4.2. Tujuan	8
<b>1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN</b>	<b>9</b>
<b>1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023</b>	<b>9</b>
<b>BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023</b>	<b>11</b>
<b>2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023</b>	<b>11</b>
2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah	11
2.1.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2023	23
2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022	82
2.1.4. Hasil Evaluasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Tahun 2022	91
<b>2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>125</b>
2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	125
2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	126
<b>2.3. ISU STRATEGIS</b>	<b>133</b>
2.3.1. Tata Kelola Pemerintahan	134
2.3.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	136

2.3.3.	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman _____	138
2.3.4.	Peningkatan Derajat Kesehatan _____	140
2.3.5.	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran _____	143
2.3.6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia _____	144
2.3.7.	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal _____	146
2.3.8.	Pelestarian Budaya Lokal _____	149
2.3.9.	Kondusivitas Wilayah _____	149
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH _____</b>		<b>151</b>
3.1.	<b>ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH _____</b>	<b>151</b>
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah _____	152
3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah _____	156
3.2.	<b>ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH _____</b>	<b>160</b>
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan _____	161
3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah _____	162
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH _____</b>		<b>169</b>
4.1.	<b>TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN _____</b>	<b>169</b>
4.1.1.	Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026 _____	169
4.1.2.	Misi _____	173
4.1.3.	Tujuan Dan Sasaran _____	177
4.2.	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023 _____</b>	<b>187</b>
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional _____	188
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 _____	198
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan _____	201
4.2.4.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 _____	246
4.2.5.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD _____	249
4.2.6.	Inovasi Kebijakan Pembangunan _____	250
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH _____</b>		<b>257</b>
5.1.	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023 _____</b>	<b>257</b>
5.1.1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar _____	257
5.1.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar _____	261
5.1.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan _____	268
5.1.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan _____	271
5.1.5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan _____	272
5.1.6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan _____	273
5.1.7.	Unsur Kewilayahan _____	274
5.1.8.	Unsur Pemerintahan Umum _____	274
5.1.9.	Non Urusan _____	275

5.2	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023	690
<b>BAB VI PENUTUP</b>		<b>693</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>695</b>



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2016-2021 .....	4
Tabel 1.2	Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	6
Tabel 1.3	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional.....	7
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2023.....	12
Tabel 2.2	Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	23
Tabel 2.3	Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	24
Tabel 2.4	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	26
Tabel 2.5	Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023.....	27
Tabel 2.6	Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	28
Tabel 2.7	Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	29
Tabel 2.8	Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023.....	31
Tabel 2.9	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2023.....	32
Tabel 2.10	Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	33
Tabel 2.11	Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	34
Tabel 2.12	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023.....	35
Tabel 2.13	Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	37
Tabel 2.14	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2023.....	38
Tabel 2.15	Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023.....	39
Tabel 2.16	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	40
Tabel 2.17	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2023.....	41
Tabel 2.18	Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	42

Tabel 2.19	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2023.....	43
Tabel 2.20	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	44
Tabel 2.21	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2023.....	45
Tabel 2.22	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2023.....	45
Tabel 2.23	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	47
Tabel 2.24	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	48
Tabel 2.25	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	48
Tabel 2.26	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	49
Tabel 2.27	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2023.....	50
Tabel 2.28	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2023.....	51
Tabel 2.29	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	53
Tabel 2.30	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2023.....	54
Tabel 2.31	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	55
Tabel 2.32	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023.....	56
Tabel 2.33	Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	57
Tabel 2.34	Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	58
Tabel 2.35	Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2023.....	59
Tabel 2.36	Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	59
Tabel 2.37	Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	60
Tabel 2.38	Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2023.....	61
Tabel 2.39	Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	62
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023.....	67
Tabel 2.41	Capaian Indikator Non Urusan Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	69
Tabel 2.42	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 .....	84
Tabel 2.43	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022.....	86

Tabel 2.44	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 .....	86
Tabel 2.45	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 .....	87
Tabel 2.46	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022.....	89
Tabel 2.47	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022.....	91
Tabel 2.48	Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2022.....	92
Tabel 2.49	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2022.....	105
Tabel 2.50	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2022.....	112
Tabel 2.51	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2022.....	120
Tabel 2.52	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	125
Tabel 2.53	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....	126
Tabel 2.54	Isu Strategis.....	134
Tabel 3.1	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (persen).....	153
Tabel 3.2	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022 .....	154
Tabel 3.3	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021.....	155
Tabel 3.4	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2022.....	156
Tabel 3.5	Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan.....	158
Tabel 3.6	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan.....	159
Tabel 3.7	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan.....	159
Tabel 3.8	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan.....	159
Tabel 3.9	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan .....	160
Tabel 3.10	Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan .....	160
Tabel 3.11	Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	164
Tabel 3.12	Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2023.....	166
Tabel 3.13	Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023.....	167
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026 Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius” .....	179

Tabel 4.2	Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 .....	183
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.....	186
Tabel 4.4	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023.....	203
Tabel 4.5	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	206
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	217
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023.....	218
Tabel 4.8	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional .....	246
Tabel 5.1	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	277
Tabel 5.2	Perubahan Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 .....	690



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen.....	4
Gambar 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022.....	152
Gambar 3.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022 .....	153
Gambar 3.3	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022 .....	155
Gambar 4.1	Ilustrasi Visi dan Misi.....	176

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

---

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023. Seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu, perubahan kebijakan juga disebabkan oleh perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dijelaskan bahwa RKPD dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan pertimbangan diatas, serta memperhatikan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2023, dan kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

---

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13).
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
31. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023.

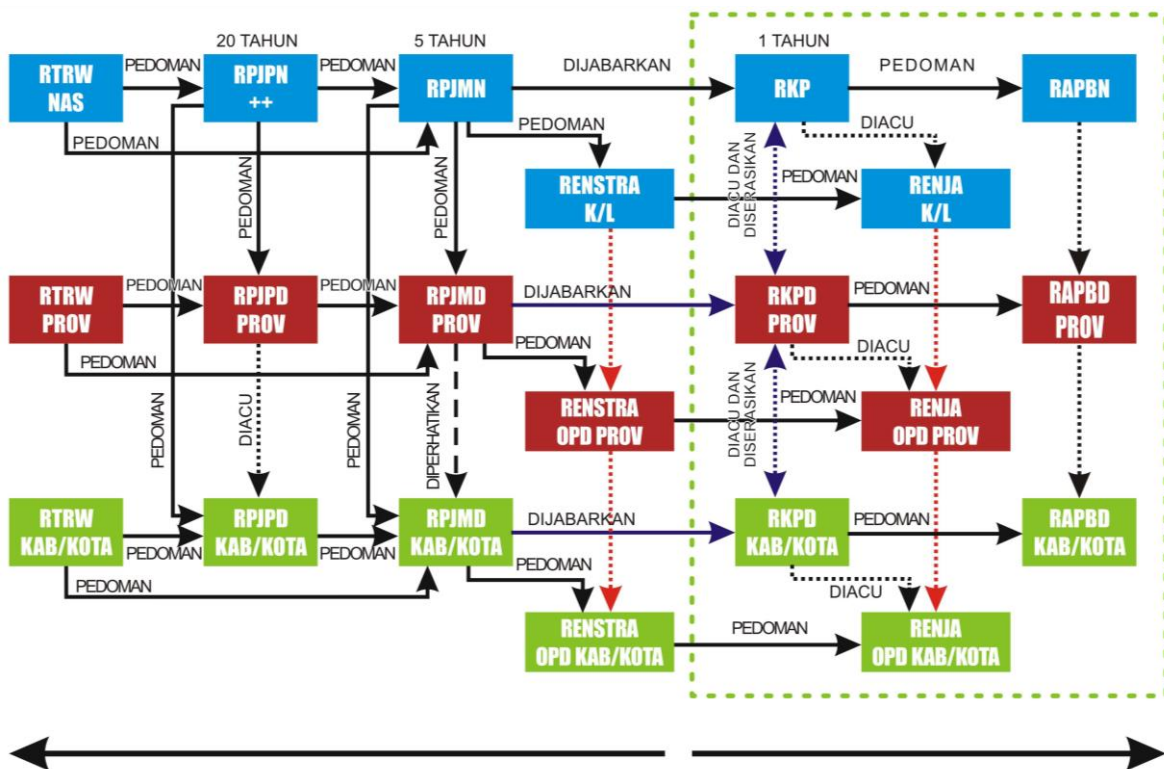
### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

---

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Bagan hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1 berikut.





**Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen**

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

### 1.3.1. RKPd dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPd adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPd memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPd Kota Pekalongan Tahun 2023 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dituangkan di dalam RKPd Tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun 2023.

**Tabel 1.1 Hubungan RKPd Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2016-2021**

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPd Kota Pekalongan Tahun 2023
<i>Tema</i>	<i>Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan</i>	<i>Tema</i>	<i>Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan</i>
1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPd Kota Pekalongan Tahun 2023
2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas	3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha	4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
6	Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	6	Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan	8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

### 1.3.2. RKPd Kota Pekalongan dengan RKPd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Sinergitas pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan. Sinergitas RKPd Tahun 2023 dilakukan dengan RKPd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui penyalarsan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Kota Pekalongan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penyalarsan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2 Hubungan RKPd Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RKPd Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
		8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
		9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
		10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
2	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
		4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM Berdaya Saing	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
		3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
4	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

### 1.3.3. RKPD dengan RKP Tahun 2023

Sebagaimana sinergitas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah, sinergitas pembangunan dengan Pusat juga dilakukan. RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RKP tahun 2023, dilakukan dengan penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dan Nasional. Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Pekalongan dengan Nasional disajikan dalam Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional**

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
		4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
		3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
		9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

### **1.3.4. RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2023. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

### **1.3.5. RKPD dengan RAPBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023**

RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota, menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan tersebut akan dievaluasi dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

## **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

---

### **1.4.1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah dengan memperhatikan:

- a. hasil evaluasi indikator kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023;
- b. kondisi perekonomian daerah;
- c. kebijakan yang bersifat mandatory.

### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2023;
- b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Wali Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- c. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022;
- d. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- e. Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
- f. Sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

## **1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN**

---

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan, meliputi:

- a. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer Pusat;
- b. Ketidaksihesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pergeseran anggaran, penghapusan dan penambahan kegiatan/sub kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

## **1.6. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023**

---

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.

### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023**

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi triwulan II RKPD Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
2. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2023 yang menjadi isu permasalahan daerah.
3. Isu Strategis berisi rumusan isu-isu berdasarkan data capaian pembangunan dan permasalahan pembangunan daerah.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2023, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2023, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan tahun 2023, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan daerah tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaan pada tahun 2023.

#### **BAB VI PENUTUP**

Berisi penegasan bahwa dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 telah dilakukan upaya agar sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.



# BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

## 2.1. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

### 2.1.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017, bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 memperhatikan hasil evaluasi RKPD triwulan II tahun 2023. Evaluasi capaian indikator kinerja ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terdiri atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi terbagi dalam 4 kategori, yaitu tercapai, akan tercapai, tidak tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 di tahun 2023 dari 101 indikator sebagai berikut:

<b>Evaluasi terhadap Penetapan RKPD Tahun 2023</b>	<b>Evaluasi terhadap Target Akhir RPJMD</b>
Tercapai : 17 Indikator (16,83%)	Tercapai : 13 Indikator (12,87%)
Akan Tercapai : 2 Indikator (1,98%)	Akan Tercapai : 4 Indikator (3,96%)
Belum Tercapai : 27 Indikator (26,73%)	Belum Tercapai : 30 Indikator (29,70%)
Belum Tersedia Data : 55 Indikator (54,46%)	Belum Tersedia Data : 54 Indikator (53,47%)

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>												
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,66	74,44	74,51	74,47	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
2	Angka Kemiskinan	Persen	5,89	7,59	7,00	6,71	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,03	75,40	75,90	75,32	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,99	6,89	4,98	6,66	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
5	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Persen	100,00	55,56	85,19	62,96	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
6	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	Persen	12,17	37,27	21,11	26,50	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
7	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Persen	91,04	n/a	79,02	88,77	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta/Jiwa/ Tahun	40,65	n/a	40,68	35,97 - 36,21	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
9	Jumlah konflik sosial	Kasus	0,00	3,00	0,00	0,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
10	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,50	n/a	0,28	0,25	0,31	124,00	Tercapai	0,31	62,00	Belum tercapai
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	80,01	188,23	124,53	128,28	155,16	82,68	Belum Tercapai	155,16	51,57	Belum tercapai
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7,00	8,90	9,96	8,21	13,96	58,81	Belum Tercapai	13,96	50,14	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9,00	10,27	12,28	10,23	17,07	59,93	Belum Tercapai	17,07	52,72	Belum tercapai
14	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	11,89	n/a	1,42	1,00	-2,48	-248,00	Belum Tercapai	-2,48	-20,86	Belum tercapai
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,00	57,87	n/a	58,78	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,34	75,77	70,35	70,28	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
17	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	100,00	n/a	93,97	90,96	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
18	Luas Genangan Banjir dan Rob	Hektar	565,00	1730,00	980,14	1230,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
19	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
20	Persentase pelayanan sampah	Persen	73,12	73,75	72,36	69,12	71,24	103,07	Tercapai	71,24	97,43	Akan tercapai
21	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,55	3,59	5,76	2,28 - 2,84	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
Aspek Pelayanan Umum												
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<i>Urusan Pendidikan</i>												
1	Persentase capaian SPM pendidikan serta kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100,00	59,51	90,94	100,00	86,51	86,51	Belum tercapai	86,51	86,51	Belum tercapai
2	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Urusan Kesehatan</i>												
3	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100,00	n/a	85,98	88,00	40,48	46,00	Belum Tercapai	40,48	40,48	Belum tercapai
<i>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>												
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Persen	99,40	n/a	99,69	98,60	100,00	101,42	Tercapai	100,00	100,60	Tercapai
5	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	87,83	n/a	33,93	73,50	33,93	46,16	Belum Tercapai	33,93	38,63	Belum tercapai
6	persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	92,115	n/a	86,07	87,092	100,00	114,82	Tercapai	100,00	108,56	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1,09	n/a	4,72	1,09	0,46	42,20	Belum Tercapai	0,46	42,20	Belum tercapai
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Regulasi	96,251	n/a	99,95	96,203	99,89	103,83	Tercapai	99,89	103,78	Tercapai
9	Pengembangan Sarana Persampahan	Persen	100,00	n/a	100,00	20,00	0,00	0,00	Belum Tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<i>Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman</i>												
10	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	95,58	97,93	97,47	93,12	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas</i>												
11	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	100,00	n/a	111,57	60,00	82,41	137,35	Tercapai	82,41	82,41	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100,00	11,77	95,79	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
13	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Urusan Sosial</i>												
14	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3,82	n/a	18,39	3,32	12,72	383,13	Tercapai	12,72	332,98	Tercapai
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<i>Urusan Tenaga Kerja</i>												
15	Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan	Persen	52,36	68,00	61,50	52,22	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</i>												
16	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,53	n/a	n/a	28,51	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
17	Skor Kota Layak Anak	Skor	636,00	602,00	637,6	628,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Pangan</i>												
18	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Pertanahan</i>												
19	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Lingkungan Hidup</i>												
20	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60,00	n/a	62,86	62,86	54,29	86,37	Belum tercapai	54,29	90,48	Akan tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,34	0,00	0,39	0,35	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
22	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	69,91	n/a	89,40	71,48	20,78	29,07	Belum tercapai	20,78	29,72	Belum tercapai
23	Tertib Hukum Lingkungan	Persen	60,10	20,00	25,81	25,30	17,09	67,55	Belum tercapai	17,09	28,44	Belum tercapai
<i>Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</i>												
24	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	91,38	82,37	81,84	87,59	82,52	94,21	Akan Tercapai	82,52	90,30	Akan tercapai
<i>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</i>												
25	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10,00	n/a	17,09	8,08	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>												
26	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,65	n/a	64,27	67,45	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Perhubungan</i>												
27	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	28,00	n/a	21,51	28,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Komunikasi Dan Informatika</i>												
28	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3,25	n/a	2,1	2,85	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
29	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88,31 – 100)	n/a	90,02	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Koperasi dan UKM</i>												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	9,02	n/a	5,90	7,82	11,54	147,57	Tercapai	11,54	127,94	Tercapai
<i>Usuran Penanaman Modal</i>												
31	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	216,78	410,60	570,79	200,28	33,92	16,94	Belum tercapai	33,92	15,65	Belum tercapai
<i>Usuran Kebudayaan</i>												
32	Persentase Peningkatan Kelompok Budaya	Persen	1,46	47,20	0,00	1,57	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<i>Usuran Perpustakaan</i>												
33	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	Indeks	20,73	n/a	33,46	19,92	5,35	26,86	Belum tercapai	5,35	25,81	Belum tercapai
<i>Usuran Kearsipan</i>												
34	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	Indeks	74,40	87,59	80,67	72,80	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Usuran Kepemudaan Dan Olahraga</i>												
35	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,37	n/a	1,43	1,15	0,01	0,87	Belum tercapai	0,01	0,73	Belum tercapai
36	Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15,00	4,00	13,00	13,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<i>Usuran Statistik</i>												
37	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80,00	n/a	90,22	68,00	98,91	145,46	Tercapai	98,91	123,64	Tercapai
<i>Usuran Persandian</i>												
38	Indeks Tata Kelola KAMI	Indeks	II	n/a	I+	I	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<b>URUSAN PILIHAN</b>												
<i>Usuran Kelautan dan Perikanan</i>												



No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15.600,00	n/a	10.535,05	14.991,00	1.643,95	10,97	Belum tercapai	1.643,95	10,54	Belum tercapai
<i>Urusan Pariwisata</i>												
40	Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	625.000	316.440	1.038.424	565.000	128.350	22,72	Belum tercapai	128.350	20,54	Belum tercapai
<i>Urusan Pertanian</i>												
41	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	259.492,90	n/a	694.861,638	243.762,11	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Perindustrian</i>												
42	Pertumbuhan Industri	Persen	0,07	2,38	4,26	0,10	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Urusan Perdagangan</i>												
43	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	27,51	n/a	18,15	26,44	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<b>URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
<i>Sekretariat Daerah</i>												
44	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	94,00	n/a	89,48	93,00	21,09	22,68	Belum tercapai	21,09	22,44	Belum tercapai
<i>Sekretariat DPRD</i>												
45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
<i>Perencanaan</i>												
46	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100,00	97,33	99,19	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Keuangan</i>												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
48	Rasio PAD	Persen	2,06	n/a	2,31	1,95	1,00	51,28	Belum tercapai	1,00	48,54	Belum tercapai
<b>Kepegawaian</b>												
49	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90,00	n/a	68,06	86,00	91,69	106,62	Tercapai	91,69	109,67	Tercapai
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>												
50	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Persen	40,00	n/a	113,25	40,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>												
51	Persentase Laporan Hasil Litbang	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
<b>Inspektorat Daerah</b>												
52	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	100,00	n/a	56,67	58,06	53,33	91,85	Akan tercapai	53,33	53,33	Belum tercapai
53	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	16,00	n/a	3,00	12,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>												
<b>Kecamatan</b>												
54	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec.Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	99,91	100,00	42,28	42,28	Belum tercapai	42,28	42,28	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	99,74	100,00	41,58	41,58	Belum tercapai	41,58	41,58	Belum tercapai
56	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	100,06	100,00	33,20	33,20	Belum tercapai	33,20	33,20	Belum tercapai
57	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,91	42,91	Belum tercapai	42,91	42,91	Belum tercapai
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>												
<i>Kesatuan Bangsa dan Politik</i>												
58	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
59	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<b>Aspek Daya Saing</b>												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50,90	54,31	54,36	50,86	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,69	69,66	71,04	71,69	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,92	9,18	9,20	9,27	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
5	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
6	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	35,39	13,29	45,33	35,35	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	23,61	5,17	23,77	23,60	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
9	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Regulasi	7,00	n/a	4,00	6,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
10	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	C	B	B	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
11	Persentase keterhubungan jalan	Persen	100,00	n/a	100,00	97,20	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
12	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persen	100,00	n/a	42,22	88,89	91,11	102,50	Tercapai	91,11	91,11	Akan tercapai
13	Indeks SPBE	Indeks	3,25	n/a	n/a	2,85	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
14	IKM Kota	Persen	84,09	80,83	90,44	83,49	85,65	102,59	Tercapai	85,65	101,86	Tercapai
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97,50	n/a	90,01	95,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
16	Indeks Merit System	Indeks	260,00	n/a	264,50	225,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
17	Nilai SAKIP Kota	Skor	76,07	73,16	73,31	74,07	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Kategori	WTP	WTP	n/a	WTP	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
19	Maturitas SPIP	Nilai	4,00	3,00	3,022	3,20	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
20	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	8,00	n/a	2,00	4,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	2,00	25,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2.1.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2023

### 2.2.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel 2.2 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>												
<i>Program Pengelolaan Pendidikan</i>												
1	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	100,00	64,56	90,94	83,97	100,00	119,09	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Pengembangan Kurikulum</i>												
1	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>												
1	Persentase ketercukupan pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persen	100,00	54,46	56,04	100,00	56,04	56,04	Belum tercapai	56,04	56,04	Belum tercapai
1. Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SPM terkendala banyaknya pendidik yang telah bersertifikasi pendidik yang memasuki masa pensiun maupun telah meninggal dunia.												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel 2.3 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>												
<i>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</i>												
1	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persen	92,00	n/a	66,19	90,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	31,20	33,91	Belum tersedia data
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Persen	90,00	n/a	70,43	80,00	71,76	89,70	Belum tercapai	71,76	79,73	Belum tercapai
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	Persen	72,50	n/a	100,00	65,00	100,00	153,85	Tercapai	100,00	137,93	Tercapai
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>												
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95,50	n/a	88,05	94,00	100,00	106,38	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	Persen	60,00	n/a	100,00	45,00	100,00	222,22	Tercapai	100,00	166,67	Tercapai
<i>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</i>												
1	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	31,43	31,43	Belum tercapai	31,43	31,43	Belum tercapai



No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	Persen	100,00	n/a	100,00	96,00	40,00	41,67	Belum tercapai	40,00	40,00	Belum tercapai
3	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	97,00	95,00	100,00	96,00	44,69	46,55	Belum tercapai	44,69	46,07	Belum tercapai
<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</i>												
1	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95,00	95,75	95,75	92,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<p>1. Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar Belum tercapai karena prasarana dan ketersediaan alat kesehatan di puskesmas belum memenuhi kebutuhan sesuai standar di ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan).</p> <p>2. Pemantauan sarana farmasi yang memenuhi standar dan pemantauan TPM dan DAM akan berlanjut pelaksanaannya di triwulan selanjutnya.</p> <p>3. Capaian Indikator Persentase rumah tangga sehat belum bisa dihitung dikarenakan kegiatan pemantauan Rumah Tangga Sehat belum dilaksanakan di TW I dan rencana akan dilaksanakan di TW IV.</p>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

### 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.4 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>												
<i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)</i>												
1	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	Persen	93,10	n/a	94,92	93,10	96,08	103,20	Tercapai	96,08	103,20	Tercapai
<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</i>												
1	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Persen	92,11	n/a	60,53	88,39	60,52	68,47	Belum tercapai	60,52	65,70	Belum tercapai
<i>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>												
1	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	Persen	100,00	n/a	0,00	40,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</i>												
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	Persen	12,87	n/a	5,11	11,07	0,14	1,26	Belum tercapai	0,14	1,09	Belum tercapai
<i>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</i>												
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	71,49	n/a	68,39	68,47	68,39	99,88	Akan tercapai	68,39	95,66	Akan tercapai
<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>												
1	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	Persen	18,74	n/a	16,95	17,84	17,01	95,35	Akan tercapai	17,01	90,77	Akan tercapai
<i>Program Penyelenggaraan Jalan</i>												
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	Persen	86,57	n/a	84,28	83,30	82,35	98,86	Akan tercapai	82,35	95,12	Akan tercapai
<i>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</i>												

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	21,20	n/a	7,15	13,20	7,15	54,17	Belum tercapai	7,15	33,73	Belum tercapai
<i>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>												
1	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	Persen	100,00	n/a	66,67	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
1. Indikator Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota belum tercapai, dikarenakan saat ini sedang dilaksanakan proses pembangunan TPS3R di Kel. Pringrejo												
2. Indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota belum tercapai, dikarenakan saat ini sedang memasuki tahap pengajuan persetujuan substansi di Kementerian ATR BPN												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

#### 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

**Tabel 2.5 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>												
<i>Program Pengembangan Perumahan</i>												
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	92,35	n/a	99,13	91,35	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Kawasan Permukiman</i>												
1	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Hektar	0,00	366,90	280,10	291,47	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</i>												

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	Hektar	2.147,88	n/a	1.348,81	1.856,41	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</i>												
1	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	Persen	14,55	n/a	46,73	14,48	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

**Tabel 2.6 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Linmas</b>												
<i>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</i>												
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Persen	70,00	n/a	65,00	64,00	80,00	125,00	Tercapai	80,00	114,29	Tercapai
<i>Program Penanggulangan Bencana</i>												
1	Persentase korban bencana alam yang ditangani	Persen	100,00	11,77	95,79	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>												

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

**Tabel 2.7 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>												
<i>Program Pemberdayaan Sosial</i>												
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75,00	n/a	100,00	58,00	94,34	162,66	Tercapai	94,34	125,79	Tercapai
<i>Program Rehabilitasi Sosial</i>												
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	100,00	n/a	25,16	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</i>												

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	52,49	n/a	10,32	56,69	21,97	38,75	Belum tercapai	21,97	41,86	Belum tercapai
<i>Program Penanganan Bencana</i>												
1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>												
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
1. Indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial Belum tercapai dikarenakan jumlah DTKS tiap tahun mengalami kenaikan. Jumlah KPM BPNT tahun 2021 = 18.981; Jumlah DTKS tahun 2021 = 183.841 dan Jumlah DTKS tahun 2022 = 186.870												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2.2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.8 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RPKD 2023
						Target Penetapan RPKD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RPKD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>												
<i>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>												
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	Persen	0,55	n/a	0,37	0,42	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Penempatan Tenaga Kerja</i>												
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	Persen	29,93	n/a	36,07	23,93	18,88	78,90	Belum tercapai	18,88	63,08	Belum tercapai
<i>Program Hubungan Industrial</i>												
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	Persen	49,02	n/a	84,06	46,80	46,23	98,78	Akan tercapai	46,23	94,31	Akan tercapai
1. Capaian indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome) belum tersedia, dikarenakan program masih dalam tahap pelaksanaan												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023



## 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.9 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>												
<i>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>												
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	11,09	96,77	5,55	5,55	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Perlindungan Perempuan</i>												
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	23,99	n/a	29,88	23,99	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)</i>												
1	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55,56	n/a	29,63	33,33	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Perlindungan Khusus Anak</i>												
1	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Belum tersedia data, perhitungan capaian akan dihitung pada triwulan IV.</li> <li>Indikator Rasio Kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) Belum tersedia data, untuk data jumlah perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 8 orang, namun untuk data jumlah penduduk perempuan tahun 2023 belum rilis, sehingga capaian belum dapat dihitung.</li> <li>Capaian Indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) Belum tersedia data dikarenakan pelaksanaan evaluasi Kelurahan Dekela rencana baru akan dilaksanakan pada Triwulan II</li> </ol>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

### 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel 2.10 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>												
<i>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>												
1	Persentase cadangan pangan daerah	Persen	4,80	n/a	2,92	4,40	4,45	101,14	Tercapai	4,45	92,71	Akan tercapai
<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>												
1	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i>												
1	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	Persen	88,00	n/a	100,00	83,20	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
1. Kegiatan pengawasan keamanan pangan akan dilaksanakan pada triwulan III.												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

#### 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel 2.11 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>												
<i>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</i>												
1	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum Tercapai
<i>Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee</i>												
1	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	50,00	n/a	n/a	50,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 2.12 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>												
<i>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</i>												
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100,00	n/a	80,00	20,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<i>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>												
1	Persentase limbah yang diolah	Persen	49,01	n/a	100,00	40,95	25,00	61,05	Belum tercapai	25,00	51,01	Belum tercapai
<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</i>												
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	2,949	n/a	2,900	2,919	2,91	99,69	Akan tercapai	2,91	98,68	Akan tercapai
<i>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</i>												
1	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	Persen	100,00	n/a	13,33	13,33	6,67	50,04	Belum tercapai	6,67	6,67	Belum tercapai
<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>												
1	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	Persen	100,00	n/a	20,17	16,67	12,00	71,99	Belum tercapai	12,00	12,00	Belum tercapai
<i>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>												
1	Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	Persen	50,00	n/a	100,00	50,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</i>												
1	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	Persen	75,00	n/a	100,00	75,00	50,00	66,67	Belum tercapai	50,00	66,67	Belum tercapai
<i>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</i>												
1	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Pengelolaan Persampahan</i>												
1	Persentase pengelolaan sampah	Persen	0,31	n/a	92,72	0,28	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
1.	<p>Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup Capaian indikator program Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup belum mencapai target, terdapat 2 dokumen yang belum disusun yaitu Dokumen KLHS RPJMD 2024-2029 dan KLHS RPJPD yang baru akan disusun pada tahun 2023 ini.</p>											
2.	<p>Persentase Ruang Terbuka Hijau Capaian indikator Program Persentase Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2023 sebesar 98,34% atau 2,91% dari target sebesar 2,919%. Luasan RTH Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 108,78 Hektar atau 2,900% jika dibandingkan dengan luas Kota Pekalongan dikurangi dikurangi sawah, tambak dan badan air yaitu seluas 3.742 Hektar. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 2,949% maka luas RTH pada Tahun 2026 sebesar 110, 35 Hektar atau kurang 1,83 Hektar dari luas RTH saat ini. Upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi target RPJMD tersebut diantaranya penyusunan database RTH untuk memvalidasi luasan RTH, penambahan luasan RTH dengan penanaman pohon, pembangunan taman dan pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah untuk kegiatan penghijauan.</p>											
3.	<p>Persentase pengelolaan sampah baru dapat dihitung di triwulan IV.</p>											

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.13 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>												
<i>Program Pendaftaran Penduduk</i>												
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	Persen	88,75	n/a	84,29	83,53	85,16	101,95	Tercapai	85,16	95,95	Akan tercapai
<i>Program Pencatatan Sipil</i>												
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	Persen	94,00	n/a	79,38	93,55	79,87	85,38	Belum tercapai	79,87	84,97	Belum tercapai
<i>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>												
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14,00	n/a	7,00	9,00	7,00	77,78	Belum tercapai	7,00	50,00	Belum tercapai
<ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk, jika dibanding dengan target akhir RPJMD tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2023 telah tercapai melebihi target. disebabkan adanya kerjasama terkait penerbitan Kartu Indonesia Anak (KIA) dengan Dinas Pendidikan dan PKK Kota Pekalongan.</li> <li>Tingkat capaian indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil tidak tercapai jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD disebabkan oleh kasus perceraian dan kematian di masyarakat berkurang, hal ini mengakibatkan ketercapaian kepemilikan akta kematian dan akta perceraian masih dibawah target yang telah ditentukan, meskipun targetnya Belum tercapai, kondisi demikian menunjukkan kondisi yang positif dikarenakan angkat kematian dan angka perceraian rendah.</li> <li>Target OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sampai akhir RPJMD adalah 14 OPD, namun sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sudah 7 OPD yang memanfaatkan data kependudukan.</li> </ol>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

**Tabel 2.14 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPd 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPd 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>												
<i>Program Peningkatan Kerja Sama Desa</i>												
1	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan Kelurahan	Persen	100,00	n/a	33,33	50,00	5,56	11,12	Belum tercapai	38,89	38,89	Belum tercapai
<i>Program Administrasi Pemerintahan Desa</i>												
1	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	Persen	70,37	n/a	74,07	59,26	81,48	137,50	Tercapai	81,48	115,79	Tercapai
<i>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</i>												
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	96,92	n/a	96,79	96,35	96,79	100,46	Tercapai	96,79	99,87	Akan tercapai
<p>1. Target Kelurahan yang difasilitasi kerjasama dengan TNI sampai akhir tahun RPJMD adalah 18 kelurahan (3 kelurahan tiap tahun mulai tahun 2021 s.d 2026).</p> <p>2. Indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat, jika dibanding dengan target akhir RPJMD tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan target tahun 2023 telah tercapai melebihi target.</p>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 2.15 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>												
<i>Program Pengendalian Penduduk</i>												
1	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/Updating data keluarga	Persen	100,00	n/a	99,68	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</i>												
1	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7,20	n/a	9,02	7,80	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</i>												
1	Unmeet need KB	Persen	12,00	n/a	13,08	15,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
1. Indikator pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baru dapat dihitung capaiannya pada Triwulan IV												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023



## 9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel 2.16 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPd 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPd 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>												
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>												
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	Persen	100,00	n/a	5,54	92,00	0,18	0,20	Belum tercapai	5,73	5,73	Belum tercapai
2	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0,44	0,49	0,39	0,44	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	Persen	0,74	n/a	-4,90	0,75	-0,54	-71,71	Belum tercapai	-0,54	-72,97	Belum tercapai
<p>1. Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ Belum tercapai dikarenakan pengadaan fasilitas LLAJ bertahap sampai dengan akhir tahun RPJMD (Target Jumlah fasilitas LLAJ Akhir Tahun RPJMD: 7.649 (Rambu MRL 1.085 unit, lampu PJU 5.369 unit).</p> <p>2. Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala, indikator ini merupakan indikator persentase peningkatan dan mendapatkan hasil negatif disebabkan angka kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya karena data perhitungan merupakan data sampai dengan bulan Juni tahun 2023, dimana dimungkinkan banyak kendaraan belum melakukan uji berkala karena belum jatuh tempo untuk uji berkala, serta belum pulihnya perekonomian masyarakat terutama masyarakat yg memiliki kendaraan barang sehingga belum melakukan uji berkala kendaraannya</p>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.17 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPd 2023	Realisasi s.d TW. IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPd 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>												
<i>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</i>												
1	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	81,25	81,25	Belum tercapai	81,25	81,25	Belum tercapai
<i>Program Aplikasi Informatika</i>												
1	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3,30	n/a	2,75	3,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
1. Capaian indeks Aspek teknologi informasi dan komunikasi memang belum mencapai target (nilai baru akan rilis dibulan November/desember), untuk itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aspek TIK: <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE pada unit kerja/OPD sebelum melakukan pembangunan aplikasi</li> <li>• memperkuat pelayanan pusat data pemerintah daerah</li> </ul>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 2.18 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPd 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPd 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>												
<i>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</i>												
1	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	Persen	33,23	n/a	31,21	30,94	10,28	33,23	Belum tercapai	10,28	30,94	Belum tercapai
<i>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</i>												
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Persen	59,68	n/a	15,96	58,31	16,84	28,88	Belum tercapai	16,84	28,22	Belum tercapai
<i>Program Pengembangan UMKM</i>												
1	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	Persen	12,37	n/a	11,71	12,06	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<p>1. Capaian Indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD memang tidak tercapai. jumlah koperasi tidak aktif bertambah karena adanya ketentuan 1 data menggunakan data ODS. Dimana ketentuan untuk koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan atau tidak melaporkan laporan keuangan minimal PHU dan neraca selama 3 tahun berturut-turut, maka akan langsung dikategorikan koperasi tidak aktif.</p> <p>2. Capaian Indikator Meningkatkan usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dan target RKPd tahun 2023 dikarenakan belum optimalnya akses permodalan yang dapat dimanfaatkan usaha mikro untuk meningkatkan skala usahanya, dikarenakan belum terdapat sinergi antara penyedia permodalan dengan usaha mikro.</p>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel 2.19 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>												
<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>												
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	n/a	1,00	1,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>												
1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>												
1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dokumen	2.500,00	n/a	3.847	2.500,00	2.427	97,08	Akan tercapai	2.427	97,08	Akan tercapai
<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>												
1	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40,53	n/a	101,52	6,68	33,92	507,78	Tercapai	33,92	83,69	Belum tercapai
<i>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>												
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Indikator Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota belum tercapai, dikarenakan penyelesaian proses penyusunan dokumen Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada triwulan IV 2. Pelaksanaan promosi penanaman modal rencana dilaksanakan pada bulan September di Surabaya.												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

### 13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

**Tabel 2.20 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>												
<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</i>												
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	95,24	n/a	83,97	93,69	10,57	11,28	Belum tercapai	10,57	11,10	Belum tercapai
<i>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</i>												
1	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	Persen	42,86	60,98	68,89	34,29	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

#### 14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel 2.21 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>												
<i>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>												
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

#### 15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel 2.22 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>												
<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>												
1	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	3,74	n/a	1,87	2,80	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengujian kerentanan dilakukan secara mandiri (self assessment); atau - pihak ketiga (kerjasama dengan BSSN atau penyedia). Hasil pengujian dalam bentuk dokumen yang berisi daftar kerentanan sistem elektronik yang diuji dan rekomendasi perbaikan</li> <li>Sistem elektronik: serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik</li> <li>Bentuk riil sistem elektronik: SIM, website, web application Sistem elektronik s.d. 2020: 107 terdiri dari web application: 71; website: 36 (semua OPD)</li> <li>Data dasar: 107 sistem elektronik <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2021: 0,93% (1 sistem elektronik)</li> <li>Tahun 2022: 1,87% (2 sistem elektronik)</li> <li>Tahun 2023: 2,80% (3 sistem elektronik)</li> <li>Tahun 2024: 2,80% (3 sistem elektronik)</li> <li>Tahun 2025: 3,73% (4 sistem elektronik)</li> <li>Tahun 2026: 3,73% (4 sistem elektronik)</li> <li>Kondisi awal: 0 sistem elektronik Kondisi akhir (akumulasi): 17 sistem elektronik</li> </ul> </li> <li>Tahun 2022 telah dilakukan pengujian kerentanan terhadap 2 (dua) sistem elektronik bekerja sama dengan BSSN dalam bentuk kegiatan Information Technology Security Assessment (ITSA)</li> <li>Sampai tahun 2022, capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sudah sesuai dengan target</li> <li>Untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai Target Akhir RPJMD atau bahkan percepatan pencapaian, Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah, sedang, dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Tahun 2021)</li> <li>Menerapkan ISO/IEC 27001:2022 (Tahun 2023 menyusun dokumen persyaratan SMKI dan kontrol, operasional SMKI, audit internal SMKI, dan reviu manajemen)</li> <li>Membentuk CSIRT</li> </ul> </li> </ul>											

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel 2.23 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>												
<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>												
1	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	24,29	24,29	Belum tercapai	24,29	24,29	Belum tercapai
<i>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</i>												
1	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Persen	100,00	30,00	100,00	100,00	20,00	20,00	Belum tercapai	20,00	20,00	Belum tercapai
<i>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</i>												
1	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	Persen	97,52	n/a	87,50	92,20	90,91	98,60	Akan tercapai	90,91	93,22	Akan tercapai
<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>												
1	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4,80	13,10	3,28	4,66	3,49	74,89	Belum tercapai	3,49	72,71	Belum tercapai
<i>Program Pembinaan Sejarah</i>												
1	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	100,00	n/a	n/a	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023



## 17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel 2.24 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>												
<i>Program Pembinaan Perpustakaan</i>												
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 – 60 tahun)	Indeks	16,58	18,27	24,97	16,09	5,14	31,95	Belum tercapai	5,14	31,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel 2.25 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>												
<i>Program Pengelolaan Arsip</i>												
1	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	Persen	66,67	n/a	80,00	46,67	100,00	214,27	Tercapai	100,00	149,99	Tercapai
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	52,50	n/a	80,23	45,00	75,00	166,67	Tercapai	75,00	142,86	Akan tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip</i>												
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,67	66,67	Belum tercapai	66,67	66,67	Belum tercapai
1. pengawasan Kearsipan OPD akan dilaksanakan di triwulan III dan IV												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

### 2.2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

**Tabel 2.26 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>												
<i>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</i>												
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	Persen	6,15	n/a	1,10	1,00	-81,16	-8.116,00	Belum tercapai	-81,16	-1.319,67	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	Persen	6,15	4,35	1,88	1,00	-63,83	-6.383,00	Belum tercapai	-63,83	-1.037,89	Belum tercapai
<i>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</i>												
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	6,15	n/a	-17,99	1,00	-71,10	-7.110,00	Belum tercapai	-71,10	-1.156,10	Belum tercapai
<i>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</i>												
1	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	Pelaku Usaha	12,00	n/a	2,00	2,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
2	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	Persen	12,20	n/a	n/a	12,20	8,68	71,15	Belum tercapai	8,68	71,15	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

**Tabel 2.27 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>												
<i>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</i>												
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen	12,50	n/a	12,67	11,00	7,57	68,82	Belum tercapai	7,57	60,56	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Program Pemasaran Pariwisata</i>												
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	Persen	46,98	n/a	228,16	31,98	-48,24	-150,84	Belum tercapai	-48,24	-102,68	Belum tercapai
<i>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i>												
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	Persen	59,52	n/a	13,20	30,30	9,10	30,03	Belum tercapai	9,10	15,29	Belum tercapai
<i>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</i>												
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Persen	100,00	n/a	40,70	40,00	24,30	60,75	Belum tercapai	24,30	24,30	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

### 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

**Tabel 2.28 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>												
<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</i>												
1	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55,84	n/a	50,82	55,67	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
2	Nilai produksi peternakan per tahun	Miliar Rupiah	188,15	n/a	644,18	191,91	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i>												
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>												
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	5,00	n/a	-63,46	5,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</i>												
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i>												
1	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	Persen	20,00	n/a	36,36	50,00	27,16	54,32	Belum tercapai	27,16	135,80	Tercapai
<i>Program Penyuluhan Pertanian</i>												
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	Persen	5,00	-14,29	8,70	5,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator nilai produksi pertanian per tahun dan nilai produksi peternakan per tahun Belum tercapai dikarenakan belum ada rilis data dari BPS.</li> <li>Indikator pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian Belum tercapai, dikarenakan kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (rencana pembangunan prasarana pertanian tahun 2023: Pembangunan Kantor RPH, Pembangunan Sarpras Pendukung Pengelolaan Limbah RPH dan Rehab Ricemill).</li> <li>Rencana pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota di triwulan III</li> <li>Penilaian kenaikan kelas kelompok tani akan dilaksanakan di triwulan III</li> </ol>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

#### 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel 2.29 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPd 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPd 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>												
<i>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</i>												
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	100,00	n/a	73,33	81,25	68,75	84,62	Belum tercapai	68,75	68,75	Belum tercapai
<i>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</i>												
1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	Persen	100,00	n/a	101,06	88,00	100,00	113,64	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Pengembangan Ekspor</i>												
1	Persentase peningkatan volume ekspor	Persen	8,19	n/a	-43,07	7,60	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</i>												
1	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	83,99	n/a	111,16	77,99	33,90	43,47	Belum tercapai	33,90	40,36	Belum tercapai
<i>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</i>												
1	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	Persen	7,50	n/a	1,18	4,26	0,92	21,60	Belum tercapai	0,92	10,95	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel 2.30 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>												
<i>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</i>												
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	Persen	21,04	n/a	66,60	20,43	70,43	344,74	Tercapai	70,43	334,74	Tercapai
<i>Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</i>												
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	Persen	26,00	n/a	100,00	24,00	12,41	51,71	Belum tercapai	12,41	47,73	Belum tercapai
<i>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</i>												
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	Persen	100,00	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00	Belum tercapai	70,00	70,00	Belum tercapai
<p>1. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) Belum tercapai. Dari 185 ijin yang dikeluarkan, hanya 51 yang dilakukan pemantauan. Dimana 51 usaha/industry ini memiliki resiko menengah tinggi sampai tinggi. Dilakukan pemantauan untuk mengetahui golongan industry yang sesuai KBLI.</p> <p>2. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome) belum tercapai, dikarenakan informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan baru akan disediakan di TW. III dan TW. IV</p>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2.2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

### 1. Sekretariat Daerah

**Tabel 2.31 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah</b>												
<i>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</i>												
1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	100,00	122,22	111,11	100,00	11,11	11,11	Belum tercapai	11,11	11,11	Belum tercapai
3	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	31,93	31,93	Belum tercapai	31,93	31,92	Belum tercapai
<i>Program Perekonomian Dan Pembangunan</i>												
1	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	63,64	63,64	Belum tercapai	63,64	63,64	Belum tercapai
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	6,00	n/a	-10,52	6,00	-64,08	-1.068,00	Belum tercapai	-64,08	-9,36	Belum tercapai
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100,00	100,00	87,50	100,00	38,33	38,33	Belum tercapai	38,33	38,33	Belum tercapai
<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif belum tercapai; saat ini sedang proses pembahasan 2 raperda, yaitu: Pajak Daerah dan retribusi daerah, Tanggungjawab sosial dan lingkungan Badan Usaha.</li> <li>Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat Belum tercapai, karena kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat baru akan dilanjutkan pelaksanaannya pada triwulan III dan IV.</li> <li>Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan Belum tercapai, dikarenakan beberapa kegiatan</li> </ol>												



No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
dilaksanakan di triwulan selanjutnya.												
4. Indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD belum tercapai, dikarenakan beberapa pengadaan belum selesai terlaksana dan beberapa kegiatan yang masih dalam proses pembayaran.												
5. Indikator persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa belum tercapai, dikarenakan ada beberapa paket yang metode pemilihannya berubah menjadi e-purchasing.												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2. Sekretariat DPRD

**Tabel 2.32 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD</b>												
<i>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd</i>												
1	Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	76,47	100,00	100,00	16,67	16,67	Belum tercapai	16,67	16,67	Belum tercapai
2	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	20,00	20,00	Belum tercapai	20,00	20,00	Belum tercapai
1. Indikator Persentase Perda yang ditetapkan Belum tercapai saat ini 2 Perda telah ditetapkan (Perda tentang pengelolaan pasar rakyat dan Perda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha) dan Raperda ttg pajak daerah dan retribusi masih dalam proses evaluasi di provinsi.												
2. Indikator Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu Belum tercapai dikarenakan pembahasan dokumen penganggaran baru akan dilaksanakan di TW. III.												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2.2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### 1. Perencanaan

**Tabel 2.33 Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
<b>Perencanaan</b>												
<i>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</i>												
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
3	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>												
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu Belum tercapai dikarenakan penyusunan dokumen dilaksanakan pada Triwulan III (Dokumen Perubahan RKPD 2023, Dokumen RKPD 2024) dan Triwulan IV (Dokumen Background Study, Dokumen Ranwal RKPD 2025 dan Dokumen Ranwal RPJPD)</li> <li>Indikator Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu Belum tercapai dikarenakan penyusunan dokumen per triwulan</li> <li>Indikator Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Belum tercapai, penyusunan dokumen baru selesai di Triwulan IV</li> </ol>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2. Keuangan

Tabel 2.34 Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keuangan</b>												
<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>												
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7,26	n/a	5,79	8,08	5,79	71,66	Belum tercapai	5,79	125,39	Tercapai
<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>												
1	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>												
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5,00	n/a	2,99	5,00	-51,84	-1.036,80	Belum tercapai	-51,84	-1.036,8	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

### 3. Kepegawaian

**Tabel 2.35 Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kepegawaian</b>												
<i>Program Kepegawaian Daerah</i>												
1	Persentase PNS berkembang karier	Persen	50,00	15,82	49,00	50,00	61,90	123,80	Tercapai	61,90	123,80	Tercapai
2	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	Persen	100,00	n/a	68,06	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase Keterisian Jabatan	Persen	90,00	n/a	98,96	90,00	97,41	108,23	Tercapai	97,41	108,23	Tercapai
4	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80,00	n/a	97,33	80,00	45,75	57,19	Belum tercapai	45,75	57,19	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

### 4. Pendidikan dan Pelatihan

**Tabel 2.36 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekalongan Tahun 2023**

z	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>												
<i>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>												

z	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
1	Persentase PNS berkembang kompetensinya	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	16,27	16,27	Belum tercapai	16,27	16,27	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 5. Penelitian Dan Pengembangan

**Tabel 2.37 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>												
<i>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</i>												
1	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
2	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
3	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	Skor	76,00	n/a	76,60	73,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
1. Indikator Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD dan Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan baru dapat dihitung capaiannya pada triwulan IV 2. Belum dilakukan perhitungan Skor capaian Nilai RiDA (SiDA), akan dilaksanakan di triwulan III												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2.2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

### 1. Inspektorat

Tabel 2.38 Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Inspektorat</b>												
<i>Program Penyelenggaraan Pengawasan</i>												
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	85,00	n/a	57,14	85,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<i>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</i>												
1	Level Kapabilitas APIP	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
1. pemeriksaan reguler baru dilaksanakan pada triwulan II sehingga belum ada tindak lanjut hasil pemeriksaan dari OPD terkait 2. Nilai Level Kapabilitas APIP akan dirilis pada Triwulan IV												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2.2.3.7. Unsur Kewilayahan

### 1. Kecamatan

**Tabel 2.39 Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kecamatan</b>												
<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</i>												
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>												
1	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kandang Panjang)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	57,80	57,80	Belum tercapai	57,80	57,80	Belum tercapai
3	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Panjang Wetan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	60,24	60,24	Belum tercapai	60,24	60,24	Belum tercapai
4	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Degayu)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	68,89	68,89	Belum tercapai	68,89	68,89	Belum tercapai
5	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Bandengan)	Persen	100,00	n/a	99,50	100,00	67,35	67,35	Belum tercapai	67,35	67,35	Belum tercapai
6	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Krapyak)	Persen	100,00	n/a	99,53	100,00	60,22	60,22	Belum tercapai	60,22	60,22	Belum tercapai
7	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Padukuhan Kraton)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	57,88	57,88	Belum tercapai	57,88	57,88	Belum tercapai
8	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Panjang Baru)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	57,37	57,37	Belum tercapai	57,37	57,37	Belum tercapai
9	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
10	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Jenggot)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	59,09	59,09	Belum tercapai	59,09	59,09	Belum tercapai



No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Buaran Kradenan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	53,56	53,56	Belum tercapai	53,56	53,56	Belum tercapai
12	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kuripan Kertoharjo)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	53,13	53,13	Belum tercapai	53,13	53,13	Belum tercapai
13	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kuripan Yosorejo)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	63,39	63,39	Belum tercapai	63,39	63,39	Belum tercapai
14	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Sokoduwet)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	67,01	67,01	Belum tercapai	67,01	67,01	Belum tercapai
15	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Banyurip)	Persen	100,00	n/a	92,31	100,00	51,31	51,31	Belum tercapai	51,31	51,31	Belum tercapai
16	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	100,30	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
17	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Medono)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	62,21	62,21	Belum tercapai	62,21	62,21	Belum tercapai
18	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Podosugih)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	71,74	71,74	Belum tercapai	71,74	71,74	Belum tercapai
19	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Tirto)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,21	66,21	Belum tercapai	66,21	66,21	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Sapuro Kebulen)	Persen	100,00	n/a	102,27	100,00	62,08	62,08	Belum tercapai	62,08	62,08	Belum tercapai
21	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Bendan Kergon)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	79,04	79,04	Belum tercapai	79,04	79,04	Belum tercapai
22	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Pasirkratonkramat)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	62,96	62,96	Belum tercapai	62,96	62,96	Belum tercapai
23	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kel. Pringrejo)	Persen	100,00	n/a	97,92	100,00	57,75	57,75	Belum tercapai	57,75	57,75	Belum tercapai
24	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
25	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kauman)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,27	66,27	Belum tercapai	66,27	66,27	Belum tercapai
26	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Poncol)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	67,62	67,62	Belum tercapai	67,62	67,62	Belum tercapai
27	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Klego)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	57,57	57,57	Belum tercapai	57,57	57,57	Belum tercapai
28	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Gamer)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,94	66,94	Belum tercapai	66,94	66,94	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Noyontaansari)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	63,15	63,15	Belum tercapai	63,15	63,15	Belum tercapai
30	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Setono)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	60,45	60,45	Belum tercapai	60,45	60,45	Belum tercapai
31	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kel. Kalibaros)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	69,95	69,95	Belum tercapai	69,95	69,95	Belum tercapai
<i>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</i>												
1	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
2	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
3	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Barat	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
4	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>												
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

### 2.2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

#### 1. Kesatuan Bangsa dan Politik

**Tabel 2.40 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>												
<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i>												
1	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	68,00	68,00	Belum tercapai	68,00	68,00	Belum tercapai
<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</i>												
1	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16,00	n/a	16,00	16,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>												
1	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Persen	100,00	n/a	95,65	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
<i>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</i>												
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	Belum tersedia data	n/a	n/a	Belum tersedia data
<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>												
1	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	0,00	0,00	Belum tercapai	0,00	0,00	Belum tercapai
<p>1. Indikator Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik belum tercapai dikarenakan kegiatan sosialisasi pertanggungjawaban hibah parpol rencana baru akan dilaksanakan di bulan Oktober, sedangkan untuk kegiatan Pendidikan politik di 30 sekolah akan dilaksanakan di triwulan III dan IV</p> <p>2. Indikator persentase penanganan konflik sosial belum tercapai, karena pada kurun waktu januari sampai dengan juni 2023 tidak terjadi konflik sosial.</p>												

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2.2.3.9. Non Urusan

### 1. Non Urusan

Tabel 2.41 Capaian Indikator Non Urusan Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Non Urusan</b>												
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>												
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi (Bag. Organisasi Setda)	Persen	100,00	n/a	101,61	100,00	84,26	84,26	Belum tercapai	84,26	84,26	Belum tercapai
2	Persentase pelayanan keprotokoleran (Bag. Prokompim Setda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	39,29	39,29	Belum tercapai	39,29	39,29	Belum tercapai
4	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	87,52	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100,00	n/a	99,56	100,00	42,48	42,48	Belum tercapai	42,48	42,48	Belum tercapai
4.1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,11	42,11	Belum tercapai	42,11	42,11	Belum tercapai
4.2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Bappeda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.3	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (BPKAD)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (BKPSDM)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	24,95	24,95	Belum tercapai	24,95	24,95	Belum tercapai
4.5	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (BPBD)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	40,78	40,78	Belum tercapai	40,78	40,78	Belum tercapai
4.6	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinarpus)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,45	42,45	Belum tercapai	42,45	42,45	Belum tercapai
4.7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dindagkop UKM)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	43,28	43,28	Belum tercapai	43,28	43,28	Belum tercapai
4.8	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dindukcapil)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.9	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinhub)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	40,78	40,78	Belum tercapai	40,78	40,78	Belum tercapai
4.10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinkes)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.11	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinkominfo)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	44,95	44,95	Belum tercapai	44,95	44,95	Belum tercapai
4.12	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinparbudpora)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	25,00	25,00	Belum tercapai	25,00	25,00	Belum tercapai
4.13	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinperinaker)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	41,82	41,82	Belum tercapai	41,82	41,82	Belum tercapai
4.14	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinperkim)	Persen	100,00	n/a	94,17	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.15	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinperpa)	Persen	100,00	n/a	98,67	100,00	41,19	41,19	Belum tercapai	41,19	41,19	Belum tercapai
4.16	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dinsos P2KB)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	43,28	43,28	Belum tercapai	43,28	43,28	Belum tercapai
4.17	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DKP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	47,03	47,03	Belum tercapai	47,03	47,03	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.18	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DLH)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	41,61	41,61	Belum tercapai	41,61	41,61	Belum tercapai
4.19	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DPMPPA)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.20	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DPMPTSP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	41,19	41,19	Belum tercapai	41,19	41,19	Belum tercapai
4.21	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (DPUPR)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.22	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Inspektorat)	Persen	100,00	n/a	93,34	100,00	42,44	42,44	Belum tercapai	42,44	42,44	Belum tercapai
4.23	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,10	42,10	Belum tercapai	42,10	42,10	Belum tercapai
4.24	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,86	42,86	Belum tercapai	42,86	42,86	Belum tercapai
4.25	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,71	42,71	Belum tercapai	42,71	42,71	Belum tercapai
4.26	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	42,71	42,71	Belum tercapai	42,71	42,71	Belum tercapai
4.27	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kesbangpol)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	43,28	43,28	Belum tercapai	43,28	43,28	Belum tercapai
4.28	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Dindik)	Persen	100,00	n/a	100,60	100,00	39,53	39,53	Belum tercapai	39,53	39,53	Belum tercapai
4.29	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Satpol P3KP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	40,78	40,78	Belum tercapai	40,78	40,78	Belum tercapai



No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.30	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	41,61	41,61	Belum tercapai	41,61	41,61	Belum tercapai
4.31	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (RSUD Bendan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	82,64	82,64	Belum tercapai	82,64	82,64	Belum tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100,00	n/a	93,17	100,00	40,18	40,18	Belum tercapai	40,18	40,18	Belum tercapai
5.1	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	84,71	100,00	43,50	43,50	Belum tercapai	43,50	43,50	Belum tercapai
5.2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Bappeda)	Persen	100,00	n/a	102,73	100,00	34,80	34,80	Belum tercapai	34,80	34,80	Belum tercapai
5.3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (BPKAD)	Persen	100,00	n/a	102,76	100,00	37,90	37,90	Belum tercapai	37,90	37,90	Belum tercapai
5.4	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (BKPSDM)	Persen	100,00	n/a	105,35	100,00	34,74	34,74	Belum tercapai	34,74	34,74	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (BPBD)	Persen	100,00	n/a	77,78	100,00	35,12	35,12	Belum tercapai	35,12	35,12	Belum tercapai
5.6	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinarpus)	Persen	100,00	n/a	66,08	100,00	33,02	33,02	Belum tercapai	33,02	33,02	Belum tercapai
5.7	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dindagkop UKM)	Persen	100,00	n/a	105,97	100,00	34,56	34,56	Belum tercapai	34,56	34,56	Belum tercapai
5.8	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dindukcapil)	Persen	100,00	n/a	89,33	100,00	51,81	51,81	Belum tercapai	51,81	51,81	Belum tercapai
5.9	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinhub)	Persen	100,00	n/a	100,35	100,00	32,65	32,65	Belum tercapai	32,65	32,65	Belum tercapai
5.10	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinkes)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	32,95	32,95	Belum tercapai	32,95	32,95	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinkominfo)	Persen	100,00	n/a	91,56	100,00	43,90	43,90	Belum tercapai	43,90	43,90	Belum tercapai
5.12	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinparbudpora)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	48,69	48,69	Belum tercapai	48,69	48,69	Belum tercapai
5.13	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinperinaker)	Persen	100,00	n/a	102,97	100,00	34,75	34,75	Belum tercapai	34,75	34,75	Belum tercapai
5.14	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinperkim)	Persen	100,00	n/a	70,40	100,00	34,20	34,20	Belum tercapai	34,20	34,20	Belum tercapai
5.15	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinperpa)	Persen	100,00	n/a	64,67	100,00	34,31	34,31	Belum tercapai	34,31	34,31	Belum tercapai
5.16	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dinsos P2KB)	Persen	100,00	n/a	98,67	100,00	33,55	33,55	Belum tercapai	33,55	33,55	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.17	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DKP)	Persen	100,00	n/a	102,83	100,00	31,95	31,95	Belum tercapai	31,95	31,95	Belum tercapai
5.18	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DLH)	Persen	100,00	n/a	105,88	100,00	55,05	55,05	Belum tercapai	55,05	55,05	Belum tercapai
5.19	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPMPPA)	Persen	100,00	n/a	101,82	100,00	39,14	39,14	Belum tercapai	39,14	39,14	Belum tercapai
5.20	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPMTSP)	Persen	100,00	n/a	98,96	100,00	36,33	36,33	Belum tercapai	36,33	36,33	Belum tercapai
5.21	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (DPUPR)	Persen	100,00	n/a	100,56	100,00	31,91	31,91	Belum tercapai	31,91	31,91	Belum tercapai
5.22	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Inspektorat)	Persen	100,00	n/a	99,33	100,00	43,57	43,57	Belum tercapai	43,57	43,57	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.23	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	66,96	100,00	32,78	32,78	Belum tercapai	32,78	32,78	Belum tercapai
5.24	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	33,63	33,63	Belum tercapai	33,63	33,63	Belum tercapai
5.25	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	91,58	100,00	34,28	34,28	Belum tercapai	34,28	34,28	Belum tercapai
5.26	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	100,20	100,00	31,53	31,53	Belum tercapai	31,53	31,53	Belum tercapai
5.27	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Kesbangpol)	Persen	100,00	n/a	101,68	100,00	32,83	32,83	Belum tercapai	32,83	32,83	Belum tercapai
5.28	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dindik)	Persen	100,00	n/a	100,60	100,00	34,42	34,42	Belum tercapai	34,42	34,42	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.29	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol P3KP)	Persen	100,00	n/a	83,84	100,00	53,38	53,38	Belum tercapai	53,38	53,38	Belum tercapai
5.30	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	77,46	100,00	34,26	34,26	Belum tercapai	34,26	34,26	Belum tercapai
5.31	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (RSUD Bendan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	120,00	120,00	Tercapai	120,00	120,00	Tercapai
6	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100,00	n/a	102,50	100,00	47,31	47,31	Belum tercapai	47,31	47,31	Belum tercapai
6.1	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Bag. Umum Setda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.2	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Bappeda)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.3	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (BPKAD)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	77,09	77,09	Belum tercapai	77,09	77,09	Belum tercapai
6.4	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (BKPSDM)	Persen	100,00	n/a	95,84	100,00	66,67	66,67	Belum tercapai	66,67	66,67	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.5	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (BPBD)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.6	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinarpus)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.7	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dindagkop UKM)	Persen	100,00	n/a	135,19	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.8	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dindukcapil)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	55,56	55,56	Belum tercapai	55,56	55,56	Belum tercapai
6.9	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinhub)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	44,45	44,45	Belum tercapai	44,45	44,45	Belum tercapai
6.10	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinkes)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	41,67	41,67	Belum tercapai	41,67	41,67	Belum tercapai
6.11	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinkominfo)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	77,78	77,78	Belum tercapai	77,78	77,78	Belum tercapai
6.12	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinprabudpora)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,67	66,67	Belum tercapai	66,67	66,67	Belum tercapai
6.13	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinperinaker)	Persen	100,00	n/a	108,34	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.14	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinperkim)	Persen	100,00	n/a	100,26	100,00	33,33	33,33	Belum tercapai	33,33	33,33	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.15	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinperpa)	Persen	100,00	n/a	96,08	100,00	25,01	25,01	Belum tercapai	25,01	25,01	Belum tercapai
6.16	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dinsos P2KB)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.17	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DKP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.18	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DLH)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	62,50	62,50	Belum tercapai	62,50	62,50	Belum tercapai
6.19	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DPMPPA)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.20	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DPMPTSP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.21	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (DPUPR)	Persen	100,00	n/a	125,00	100,00	35,63	35,63	Belum tercapai	35,63	35,63	Belum tercapai
6.22	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Inspektorat)	Persen	100,00	n/a	99,44	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.23	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100,00	n/a	102,08	100,00	41,67	41,67	Belum tercapai	41,67	41,67	Belum tercapai
6.24	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai



No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.25	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	33,34	33,34	Belum tercapai	33,34	33,34	Belum tercapai
6.26	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100,00	n/a	97,20	100,00	41,11	41,11	Belum tercapai	41,11	41,11	Belum tercapai
6.27	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Kesbangpol)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	66,67	66,67	Belum tercapai	66,67	66,67	Belum tercapai
6.28	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Dindik)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.29	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Satpol P3KP)	Persen	100,00	n/a	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
6.30	Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah (Set. DPRD)	Persen	100,00	n/a	102,10	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7	Persentase ketersediaan layanan BLUD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.1	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Puks. Bendan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.2	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Buaran)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.3	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Dukuh)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.4	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Jenggot)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.5	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Klego)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Penetapan RKPD 2023	Realisasi s.d TW. II Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. II Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Penetapan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.6	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Kramatsari)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.7	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Krapyak Kidul)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.8	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Kusuma Bangsa)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.9	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Medono)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.10	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Noyontaan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.11	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Pekalongan Selatan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.12	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Sokorejo)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.13	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Tirta)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.14	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Pusk. Tondano)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.15	Persentase ketersediaan layanan BLUD (Dinkes)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.16	Persentase ketersediaan layanan BLUD (RSUD Bendan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai
7.17	Persentase ketersediaan layanan BLUD (BPSJ)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	Belum tercapai	50,00	50,00	Belum tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

### 2.1.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu:

#### a. Pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan
2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

#### b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.
4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan:
  - miskin atau tidak mampu;
  - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - kondisi bencana; dan/atau
  - kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

#### c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD,
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan dasar diimut dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
  - membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
  - memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya

Pada tahun 2022 Kota Pekalongan telah menerapkan seluruh tahapan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan anggaran atas penerapan Standar Pelayanan Minimal sejak proses perencanaan, yang dimulai dari RPJMD sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2022.

#### 2.2.4.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidng pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Pada tahun 2022 Capaian SPM Pendidikan secara keseluruhan adalah 90,94% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar usia dini dengan capaian sebesar 86,04%;
2. Pendidikan dasar dengan capaian sebesar 94,96%;
3. Pendidikan kesetaraan dengan capaian sebesar 91,82%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.228 berikut.

**Tabel 2.42 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM  
Bidang Pendidikan Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	<p><b>Pengumpulan Data</b></p> <p>Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat</p> <p>Beberapa indikator data capaian belum dapat terisi dikarenakan terkendala pada rapor pendidikan yang isian nya belum lengkap dan belum mencantumkan nilai capaian pada tahun N (tahun pelaporan)</p> <p>Kota Pekalongan tidak termasuk sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga indikator "Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal" tidak dapat terisi</p>	<p>Proses update pada aplikasi Dapodik sekolah dilaksanakan di awal waktu sehingga terhindar dari permasalahan system akibat over kapasitas pengakses aplikasi menjelang <i>cut off</i></p> <p>Selalu mengikuti update informasi seputar releaserapor Pendidikan dari Kemendikbud.</p> <p>-</p>
2.	<p><b>Penghitungan Kebutuhan</b></p> <p>Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar maupun biaya personil</p> <p>Indikator "Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" tidak dapat terisi dengan lengkap, dikarenakan alokasi anggaran berada di OPD lain</p>	<p>Meningkatkan koordinasi dengan tim verifikator dari sekolah terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi siswa miskin sehingga dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu.</p> <p>Koordinasi dengan OPD terkait ( BKPSDM, Bappeda, BPKAD )</p>
3.	<p><b>Perencanaan dan Penganggaran</b></p> <p>Pengurangan target indikator SPM disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia</p> <p>Pemetaan sub kegiatan penunjang pencapaian SPM di DPA Dinas Pendidikan belum sesuai dengan Permendagri No.84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023</p>	<p>Alokasi anggaran yang tersedia lebih diprioritaskan untuk pencapaian / pemenuhan SPM</p> <p>Melakukan mapping sub kegiatan tahun 2022 beserta indikatornya disesuaikan dengan Permendagri No.84 Tahun 2022.</p>
4.	<p><b>Pelaksanaan</b></p> <p>Jumlah calon penerima bantuan yang lebih banyak dibandingkan jumlah anggaran yang tersedia, sehingga tidak semua siswa miskin dapat menerima bantuan</p>	<p>Calon penerima bantuan lebih diprioritaskan bagi siswa miskin yang belum mendapatkan bantuan dari sumber yang lain seperti PIP dan PKH.</p>
5.	<p><b>Lain-lain</b></p> <p>Masih terdapat beberapa indikator sub kegiatan ataupun target satuan SPM yang kurang dapat dipahami</p>	<p>Melakukan konsultasi kepada Tim pengelola SPM tingkat Pusat sehingga diperoleh penjelasan yang lebih komprehensif.</p>

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

#### 2.2.4.2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pada tahun 2022 Capaian SPM Kesehatan secara keseluruhan adalah 93,14% atau kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 97,68%;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,50%;
4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 96,66%;
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan capaian 100%;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 81,10%;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 89,45%;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 53,31%;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetis melitus dengan capaian 100,00%;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 100%;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan capaian 100%;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) dengan capaian 100%

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.229 berikut.

**Tabel 2.43 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022**

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1.	Internal	Sarana dan prasarana untuk pemeriksaan usia lanjut belum tersedia	Akan dilakukan perencanaan untuk pengadaan sarpras tersebut
2.	Eksternal	Rumus perhitungan sasaran untuk penderita hipertensi menurut permenkes 4 tahun 2019 terlalu tinggi	Untuk sasaran sebaiknya menggunakan data riil yang di temukan di Kota Pekalongan

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

### 2.2.4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Pada tahun 2022 Capaian SPM Pekerjaan Umum secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 100%;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.230 berikut.

**Tabel 2.44 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	<b>Pengumpulan Data</b>	
	Data yang dibutuhkan lebih rigid sampai ke identitas pribadi yang menurut wali data dari kominfo ada konsekuensi dari penyebaran data pribadi	Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengkap dan andal
2.	<b>Penghitungan Kebutuhan</b>	
	Penghitungan kebutuhan masih memerlukan koordinasi dengan OPD terkait	Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengkap dan andal
3.	<b>Perencanaan dan Penganggaran</b>	
	Perlu kerjasama yang aktif untuk CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM.	Komunikasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk menjadi CSR
4.	<b>Pelaksanaan</b>	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALD-T dan SPALD-S	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga
	lokasi untuk pembuatan instalasi pembuangan tinja yang sudah tidak layak, sedangkan untuk mencari lokasi baru ada keterbatasan lahan pemerintah kota	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023



#### 2.2.4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022 Capaian SPM urusan Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

Kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.231 berikut.

**Tabel 2.45 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	<b>PENGUMPULAN DATA</b>	
	Data TW 1 Belum ada	Belum ada kegiatan pelaksanaan SPM
	Pengumpulan Data masih tergantung dari Data OPD Lain	Melakukan kerjasama dan memuat satgas bersama tentang kebencanaan
	Kota Pekalongan tidak mempunyai lahan yang potensial untuk relokasi korban bencana/program pemerintah	Menempatkan korban bencana pada hunian sementara di rumah susun dan berkoordinasi dengan BPN atas tanah yang bisa dijadikan lahan perumahan
	Pembuatan site plan berada di DPUPR sedangkan dokumen bencan belum diterbitkan, sehingga bisa terajdi perumahn termasuk dalam daerah rawan bencana. sudah terverifikasi.	Syarat syarat pembangunan perumahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
	Data base /data sumber kegiatan kebencanaan belum terbuat sehingga penentuan lokasi kebencanaan belum bisa di buat	Pembuatan dokumen kebencanaan tahun 2023 serta penganggarannya
2.	<b>PENGHITUNGAN KEBUTUHAN</b>	
	Penghitungan Kebutuhan Masih global	Akan dibuatkan dokumen kebencanaan tahun 2023
	Belum menghitung kebutuhan	Akan dibuatkan dokumen kebencanaan tahun 2023
Jenis kebencanaan yang ada di Kota Pekalongan berupa Banjir Rob dan tidak termasuk dalam Jenis Kebencanaan	Akan kita konsultaiskan ke Perkim provinsi sebagai bahan diskusi dan aturan yang lebih detail	
3.	<b>PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b>	



No.	Permasalahan	Solusi
	Perencanaan Anggaran masih belum maksimal	Perencanaan akan kita sesuaikan dengan dokumenkebencanaan
	Perencanaan dan Penganggaran belum dapat berjalan dengan maksimal	Perencanaan akan dibuat berdasarkan prioritas kebencanaan
4.	<b>PELAKSANAAN</b>	
	Pelaksanaan Belum optimal	Akan dilaksanakan bersama oleh satgas
	Pelaksanaan masih menggunakan data dari Bansos dan BPBD	Akan dibuat dokumen perencanaan tersendiri
	Peraturan kebencanaan secara nasional tidak memfasilitasi kebencanaan lokal seperti banjir ROB	Perlunya aturan khusus mengenai kebencanaan lokal seperti banjir rob
5.	<b>LAIN – LAIN</b>	
	Sumber daya manusia masih kurang jumlah untuk pelaksanaannya	Akan merekrut Tenaga fasilitator lapangan
	SDM yang masih kurang	Akan merekrut Tenaga fasilitator lapangan
	Kurangnya Peningkatan kompetensi SDM/personil	Perlunya penambahan tenaga fasilitator pendamping yang berkompetensi

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

#### 2.2.4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pada tahun 2022 Capaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Urusan Ketertiban Umum dengan capaian 100%
2. Sub Urusan Bencana dengan capaian 100%
3. Sub Urusan Kebakaran dengan capaian 100%

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.232 berikut.

**Tabel 2.46 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM  
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	<p><b>PENGUMPULAN DATA</b></p> <p>Belum adanya dokumen KRB sehingga pengumpulan data yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal</p> <p>Berdasarkan UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri 57 tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data penduduk by name by address merupakan merupakan aset informasi yang dijamin kerahasiaan dan keutuhannya, sehingga dalam pemenuhan data tersebut belum dapat dipenuhi.</p>	<p>Melakukan penyusunan dokumen KRB pada tahun 2023 dan menggunakan data historis kebencanaan untuk melakukan pengumpulan data.</p> <p>Memberikan data kependudukan secara agregat dalam pelaporan dan melakukan pendataan langsung di wilayah terdampak bencana apabila memungkinkan.</p>
2.	<p><b>PENGHITUNGAN KEBUTUHAN</b></p> <p>Belum memiliki dokumen KRB yang sah dan legal sehingga belum bisa melakukan penghitungan secara rinci</p> <p>Ketersediaan data yang terbatas, sehingga perhitungan kebutuhan tidak dapat dilakukan secara rinci</p> <p>Pemetaan kebencanaan sudah dilakukan, namun dokumen KRB masih dalam proses penyusunan.</p> <p>Terkait penyediaan Alat untuk layanan response time pada tahun 2022 sudah tersedia dan kondisi baik. terkait sarana pusdalops damkar di Kota Pekalongan sudah ada fasilitas berupa command center kegawatdaruratan di nomor 112.</p>	<p>Melakukan penyusunan dokumen KRB di tahun 2023, namun untuk sementara penghitungan kebutuhan dilakukan dengan mengandalkan data historis kebencanaan</p> <p>Dilakukan pendataan secara lebih terinci</p> <p>Pemetaan kebencanaan yang sudah dilakukan dimasukkan kedalam dokumen KRB untuk memperkuat analisis dan penghitungan kebutuhan penanganan bencana.</p> <p>Perlunya dibentuk pusdalops untuk mengatur koordinasi serta respon cepat terhadap laporan yang diterima.</p>
3.	<p><b>PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b></p> <p>Perlunya penganggaran tambahan untuk peralatan pendukung bencana, Dokumen KRB, RPB, Rencana Kontijensi (untuk mendukung perencanaan kegiatan, penghitungan kebutuhan, resiko, dan Daya dukung wialyah dan masyarakat), dan JITUPASNA (untuk penghitungan kebutuhan rekonstruksi pasca bencana).</p> <p>Pada tahun 2022 kegiatan untuk penggantian ganti rugi bagi warga yang terdampak akibat penegakan PERDA dibiayai dari alokasi anggaran belanja tidak terduga.</p>	<p>Akan dilakukan penyusunan dokumen KRB, JITUPASNA pada tahun 2023 dan merencanakan penyusunan Dokumen RPB pada tahun 2024.</p> <p>Adanya anggaran belanja khusus bagi warga yang terdampak Penegakan Perda sehingga ganti rugi yang diberikan dapat tersalurkan secara efektif.</p>

No.	Permasalahan	Solusi
	Jumlah anggaran yang dianggarkan tidak sebanding dengan frekuensi kejadian bencana dan luasan dampak bencana namun pembiayaan anggaran tersebut dapat tercukupi dari sumber pendanaan yang lain seperti CSR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Partisipasi Masyarakat, dll	Melakukan optimalisasi fungsi pentahelix pada saat penanganan bencana agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
4.	<b>PELAKSANAAN</b>	
	Terbatasnya jumlah perlatan pendukung kebencanaan sehingga penanganan kebencanaan tidak dapat dilakukan dengan optimal	Berkoordinasi dengan instansi terkait agar dapat digunakan untuk melakukan penanganan bencana.
	Kejadian kebencanaan yang meluas sehingga dibutuhkan pemetaan ulang secara detail	Melakukan pembaruan pemetaan kebencanaan sekaligus Menyusun dokumen KRB di tahun 2023
	Perlunya peningkatan kompetensi SDM/personil Penegakan Perda.	Diselenggarakannya Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM/personil Penegakan Perda
	Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten di bidang kebencanaan sehingga pelaksanaan perencanaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal	Memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada personil penanganan kebencanaan untuk meningkatkan jumlah SDM yang berkompeten.
	Pada tahun 2022 tidak terjadi kondisi tanggap darurat bencana	-
5.	<b>LAIN – LAIN</b>	
	Frekuensi dan luasan area terdampak bencana semakin meluas	Pengkajian dan pemetaan ulang mengenai luasan wilayah yang terdampak bencana dan yang berpotensi terdampak bencana di kemudian hari.

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

#### 2.2.4.6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Pada tahun 2022 Capaian SPM urusan Sosial secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.233 berikut.

**Tabel 2.47 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	<b>PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b>	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
2.	<b>PELAKSANAAN</b>	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022, 2023

#### **2.1.4. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2022**

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

### 2.2.4.1. Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 30 target dan 106 indikator. Pada tahun 2022 terdapat 34 indikator yang telah tercapai, 13 indikator tidak tercapai dan sebanyak 15 indikator yang datanya tidak tersedia. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.48 berikut.

**Tabel 2.48 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2022**

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN</b>								
<b>Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	persen	6,71	7,00	Tidak Tercapai
<b>Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</b>								
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	DINKES	persen	95,00	86,35	Tidak Tercapai
1.3.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	DINPERINA KER	persen	PM	0,7974	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas miskin	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINSOS P2KB	persen	PM	0,19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	DINSOS P2KB	KPM	PM	11354	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</b>								
1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	DINKES	persen	100	97,41	Tidak Tercapai
1.4.1. (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINSOS P2KB	persen	67,45	95,00768665	Tercapai
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	DINPERKI M	persen	100	100	Tercapai
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	DINPERKI M	persen	100	100	Tercapai
1.4.1. (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	DINPERKI M	persen	NA	11,78	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	DINDIK	persen	PM	99,11	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	DINDIK	persen	PM	75,97	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	BPS	persen	PM	55,28	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.4.1. (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DINDUKCAPIL	persen	93,1	98,52	Tercapai
1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan	BPS	persen	NA	99,94	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	listrik baik dari PLN dan bukan PLN	dan bukan PLN	utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN					
<b>Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</b>								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	PM	8,55	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD		0	NA	Data tidak tersedia
1.5.1. (b)	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	DINSOS P2KB		0	NA	Data tidak tersedia
1.5.1. (c)	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial	DINSOS P2KB/DPM PPA		834	834	Tercapai
1.5.1. (d)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	BPBD		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD	%	PM	0,703703704	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rupiah	PM	309.891.396.400	Tidak ada target, tetapi data tersedia
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	BPBD	Dokumen	PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</b>								
1.a.1*	Proporsi sumber	Proporsi sumber	Proporsi sumber	BAPPEDA,		78,1	78,2	Tercapai



Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BPKAD				
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA, BPKAD		PM	6,101126029	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN</b>								
<b>Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</b>								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	Ketersediaan pangan utama beras ( ton)	Ketersediaan pangan utama beras ( ton)	DINPERPA	skor	78,1	78,2	Tercapai
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES		PM	6,101126029	Tidak ada target, tetapi data tersedia
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	DINPERPA	persen	100	100	Tercapai
2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	DINKES	persen	2,1	2,05	Tidak tercapai
<b>Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	DINKES	persen	< 12%	6,8	Tercapai



Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pada anak di bawah lima tahun/balita					
2.2.1. (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINKES	persen	PM	5,61	Tidak ada target, tetapi data tersedia
2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	DINKES	persen	<0,5	0,28	Tercapai
2.2.2. (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	DINKES	kasus	0	10,06	Tidak tercapai
2.2.2. (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	DINKES	persen	0	60	Tercapai
2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	DINPERPA	skor	80,05	81,2	Tercapai
<b>Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.</b>								
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS		NA	NA	Data tidak tersedia
<b>TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA</b>								
<b>Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</b>								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	Per 100.000 KH	128,28	124,87	Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahirannya terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahirannya terakhirnya ditolong oleh tenaga	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			kesehatan terlatih					
3.1.2. (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahirannya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahirannya di fasilitas kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
<b>Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.</b>								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	10,23	12,21	Tidak Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	0,00	1,77	Tidak tercapai
3.2.2. (a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	8,21	9,91	Tidak tercapai
3.2.2. (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Cakupan UCI desa	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	DINKES	persen	100	100	Tercapai
<b>Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</b>								
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV-AIDS	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINKES	orang	PM	0,84	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jumlah Insiden TB	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	kasus	PM	109,12	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINKES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.3. (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria.	Angka Kesakitan Malaria	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria.	DINKES	per 1.000 penduduk beresiko	PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.4. (a)	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	DINKES	kasus	PM	70	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang	Angka penemuan kasus baru kusta	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap	DINKES	per 100.000 penduduk	<10	1,36	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)		Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)					
3.3.5. (a)			Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	DINKES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.3.5. (b)	Jumlah kab/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	Angka kasus filaria yang ditangani	DINKES	per 100.000 penduduk	<1	0	Tercapai
<b>Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</b>								
3.4.1. (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	BPS	persen	0	NA	Data tidak tersedia
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	DINKES	persen	100	47,29	Tidak tercapai
3.4.1. (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	DINKES	persen	NA	NA	Data tidak tersedia
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	POLRES		0	0	Tercapai
3.4.2. (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINKES		100	100	Tercapai
<b>Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.</b>								
3.5.1. (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	KESBANGPOL	orang	PM	4	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.5.1. (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	KESBANGPOL	orang	PM	6	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.5.1. (c)	Jumlah korban penyalahgunaan	Jumlah korban penyalahgunaan	Jumlah korban penyalahgunaan	KESBANGPOL	orang	PM	4	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan					
3.5.1. (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	KESBANGPOL	Rumah sakit	PM	2	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.5.1. (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN/ Kesbangpol		-	-	Data tidak tersedia
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	BPS		0	NA	Data tidak tersedia

**Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.**

3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DINSOS P2KB		PM	69,17	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.7.1. (a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	DINSOS P2KB		67,45	64,27270002	Tidak Tercapai
3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DINSOS P2KB		20	12,15	Tidak tercapai
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific)	DINSOS P2KB		9,22	8,21	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Fertility Rate/ASFR)	Fertility Rate/ASFR)	Specific Fertility Rate/ASFR)					
3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	DINSOS P2KB	persen	2,16	2,18	Tercapai
<b>Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</b>								
3.8.1(a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	BPS	persen	NA	NA	Data tidak tersedia
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINKES		PM	99,45	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINKES	persen	95	88,32	Tidak tercapai
<b>Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.</b>								
3.9.3. (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Proporsi kematian akibat keracunan.	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINKES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</b>								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	persen	PM	0,24	Tidak ada target, tetapi data tersedia
3.b.1. (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINKES/BPS	persen	0	NA	Data tidak tersedia
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES	persen	PM	9,18	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT</b>								
<b>Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</b>								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINDIK		NA	NA	Data tidak tersedia
4.1.1.	Persentase SD/MI	Persentase SD/MI	Persentase	DINDIK	persen	PM	97,96	Tidak ada target,

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(a)	berakreditasi minimal B	berakreditasi minimal B	SD/MI berakreditasi A (2020) <b>2021: Persentase SD/MI berakreditasi B</b>					tetapi data tersedia
4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi B	DINDIK	persen	0	95	Tercapai
4.1.1. (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	DINDIK/CA BANG DINAS 13 KENDAL		NA	100	Tercapai
4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	DINDIK	persen	0	99,8	Tercapai
4.1.1. (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	DINDIK	persen	0	100,23	Tercapai
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	persen	PM	74,59	Tidak ada target, tetapi data tersedia
4.1.1. (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINDIK		0	9,2	Tercapai
<b>Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, penguasaan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</b>								
4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINDIK	persen	PM	62,8	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</b>								
4.3.1. (a)	Persentase APK SMA/SMK/MA/ sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA/ sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA/ sederajat	BPS	persen	PM	74,59	Tidak ada target, tetapi data tersedia
4.3.1. (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	persen	PM	NA	Data tidak tersedia
<b>Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.</b>								
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi	DINKOMIN FO	persen	0	NA	Data tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan komunikasi (TIK).	(TIK).	informasi dan komunikasi (TIK).					
<b>Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</b>								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat ; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	1) APM SD/MI/ sederajat 2) APM SMP/MTs/ Sederajat (2018-2020) <b>2021:</b> Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	DINDIK		PM PM	(1) 0,961 (2) 1,036	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</b>								
4.6.1. (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	PM	97,74	Tidak ada target, tetapi data tersedia
4.6.1. (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	BPS	persen	PM	100	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.</b>								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	% Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	Persentase Ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan	DINDIK	persen	PM	94,79	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</b>								
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Persentase pendidik SMA/SMALB/MA/S MK bersertifikat pendidik	Persentase pendidik TK-SD-SMP bersertifikat pendidik	Dindik	persen	PM	53,16	Tercapai
<b>TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN</b>								
<b>Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</b>								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPMPPA		PM	5	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</b>								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional ) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DPMPPA	persen	PM	8/110.146* 100= 0.007263	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	DPMPPA	persen	PM	1/12.134*1 00 = 0.008241	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DPMPPA		0	0	Tercapai
5.2.2. (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melaporkan terlayani	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melaporkan terlayani	DPMPPA	persen	100	100	Tercapai
<b>Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</b>								



Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	DINSOS P2KB	Kasus	31	33	Tidak Tercapai
5.3.1. (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BPS/DINSOS P2KB		0	NA	Data tidak tersedia
5.3.1. (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINSOS P2KB		9,22	8,21	Tercapai
5.3.1. (c)	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	BPS	persen	0	NA	Data tidak tersedia
<b>Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</b>								
5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Setwan	persen	PM	11,11	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	BKPSDM	Persen	PM	56,51	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.</b>								
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DINSOS P2KB		PM	64,27	Tidak ada target, tetapi data tersedia
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang	DINSOS P2KB	persen	0	13	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						T	R	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	terpenuhi)	tidak terpenuhi).						
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DINSOS P2KB		PM	NA	Tidak ada target, dan data tidak tersedia
5.b.1*			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	orang	NA	NA	Data tidak tersedia

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2.2.4.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 goals 54 target dan 72 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 18 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.49 berikut.

**Tabel 2.49 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2022**

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA</b>								
<b>Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern</b>								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	PLN	persen	100	100	Tercapai
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	PLN-ESDM-BPS	Kwh/Kapita	0	NA	Data Tidak tersedia
7.1.2. (a)	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
7.1.2. (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.</b>								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</b>								
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer.	BPS, BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak tersedia
<b>TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF &amp; MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA</b>								
<b>Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</b>								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Laju pertumbuhan	BPS, BAPPEDA	persen	0	5,76	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			PDRB					
8.1.1. (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	0	40,68	Tercapai
<b>Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya</b>								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	persen	0	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan</b>								
8.3.1*	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.3.1. (a)	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Persentase Tenaga kerja formal	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.3.1. (c)	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.</b>								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah	0	NA	Data Tidak tersedia
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	persen	PM	4,98	Tidak ada target, tetapi data tersedia
8.5.2. (a)	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan</b>								
8.6.1*	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	DINPERINA KER/BPS	orang	PM	504	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang</b>								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</b>								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	Dinparbudpora		0	16,68	Tercapai
8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinparbudpora	orang	600	72	Tidak Tercapai
8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinparbudpora	orang	565.000	984.518	Tercapai
8.9.1. (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinparbudpora		0	13,3	Tercapai
8.9.2*			Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinparbudpora		PM	1,161176046	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestic untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua</b>								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
8.10.1. (b)			Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINDAGKOP UMKM		0	0	Data Tidak tersedia
<b>TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI</b>								
<b>Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua</b>								
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi jalan baik	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	DPU PR	%	82,21	84,28	Tercapai
9.1.1. (b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Panjang pembangunan jalan tol.	Panjang pembangunan jalan tol.	DPU PR		NA	NA	Data Tidak tersedia
9.1.1. (c)	Panjang jalur kereta api.	Panjang jalur kereta api.	Panjang jalur kereta api.	DPU PR		NA	NA	Data Tidak tersedia
9.1.2. (b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	DINHUB		0,00	NA	Data Tidak tersedia
9.1.2. (c)	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan	DINHUB		0,00	NA	Data Tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			strategis					
<b>Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang</b>								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	persen	PM	4,26	Tidak ada target, tetapi data tersedia
9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	persen	PM	4,46	Tidak ada target, tetapi data tersedia
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS		PM	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.</b>								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</b>								
9.4.1*.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	DLH		NA	NA	Data Tidak tersedia
9.4.1. (a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	DLH		NA	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.</b>								
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BAPPEDA, BPS		PM	6,9	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.</b>								
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	DINKOMINF O	Persen	0	NA	Data Tidak tersedia
9.C.1.	Proporsi individu	Proporsi individu	Proporsi	BPS	Persen	0	NA	Data Tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(a)	yang menggunakan telepon genggam	yang menggunakan telepon genggam	individu yang menggunakan telepon genggam					
9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	DINKOMINF O/BPS	Persen	0	NA	Data Tidak tersedia
<b>TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA</b>								
<b>Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional</b>								
10.1.1*	Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS, BAPPEDA	-	0	0,337	Tidak tercapai
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	BPS, BAPPEDA	persen	6,71	7,00	Tidak Tercapai
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	DPMPPA		0	NA	Data Tidak tersedia
10.2.1*			Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	DINSOS P2KB		0	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut</b>								
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	DPMPPA/P OLRES		PM	61 orang	Tidak ada target, tetapi data tersedia
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		PM	53 orang	Tidak ada target, tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.3.1. (d)			Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	BAGIAN HUKUM		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar</b>								
10.4.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DINPERINA KER		PM	79,9	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik</b>								
10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	DINPERINA KER	kegiatan	PM	50 orang	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.</b>								
<b>Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada Negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya</b>								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BPKAD, BPS		984.981.114.000	989.013.074.926	Tercapai
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPKAD		94.600.000.000	101.303.223.640	Tercapai
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD		NA	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</b>								
17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	BPS/DINKO MINFO		0	NA	Data Tidak tersedia



Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.6.2. (c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	DINKOMINFO		0	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi</b>								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	DINKOMINFO/BPS		0	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi Negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020</b>								
17.11.1. (a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Jumlah ekspor non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS		NA	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama</b>								
17.17.1 (a)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	BAPPEDA		NA	NA	Data Tidak tersedia
17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	BAPPEDA		NA	NA	Data Tidak tersedia
<b>Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional</b>								
17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	BPS	persen	0	NA	Data Tidak tersedia
17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS		0	75	Tercapai



Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.18.1. (c)			Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS		0	19	Tercapai
17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	BPS	indikator	0	NA	Data Tidak tersedia
17.19.2. (b)			Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DINDUKCA PIL		0	0	Tercapai
17.19.2. (c)			Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS		19.600	36.331	Tercapai
17.19.2. (d)			Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS		0	97,22	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

### 2.2.4.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 6 goals 29 target dan 64 indikator. Terdapat 25 indikator yang telah tercapai, 25 data tidak tersedia, 8 indikator provinsi serta 3 indikator nasional sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.50 berikut.

**Tabel 2.50 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2022**

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA</b>								
<b>Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</b>								
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKIM	Persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	layak							
6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Kapasitas Prasarana air baku	DINPERKIM	m3	PM	12.196.014	Tidak ada target, tetapi data tersedia
6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DINKES		0	100	Tercapai
<b>Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</b>								
6.2.1. (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINKES		0	NA	Data tidak tersedia
6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Cakupan pelayanan sanitasi	DINPERKIM	Persen	100	100	Tercapai
6.2.1. (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINPERKIM	Kelurahan	27	27	Tercapai
6.2.1. (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	27	27	Tercapai
6.2.1. (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Persen	PM	4	Tidak ada target, tetapi data tersedia
6.2.1. (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DLH		0	0	Tercapai
<b>Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan</b>								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</b>								
6.3.1. (a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH		PM	1	Tidak ada target, tetapi data tersedia
6.3.1. (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH			0,3	0,3 Tercapai
6.3.2. (a)	Kualitas air danau.	Kualitas air danau.	Kualitas air danau.	DLH			0	NA Data Tidak Tersedia
6.3.2. (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLH			0	NA Data Tidak Tersedia
<b>Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.</b>								
6.4.1. (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH	Perusahaan		40	42 Tercapai
6.4.1. (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DLH/DINPE RPA			0	NA Data Tidak Tersedia
<b>Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.</b>								
6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	BAPPEDA PSDAIW			0	NA Data Tidak Tersedia
6.5.1. (b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	DLH			0	NA Data Tidak Tersedia
6.5.1. (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang	BAPPEDA PSDAIW,			0	NA Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dibentuk	dibentuk	yang dibentuk	DPU-PR				
6.5.1. (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	BAPPEDA PSDAIW		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.5.1. (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.</b>								
6.6.1. (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
6.6.1. (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH		0	NA	Data Tidak Tersedia
<b>TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN</b>								
<b>Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.</b>								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	DINPERKIM	Persen	93,122	97,470	Tercapai
11.1.1. (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.1.1. (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
<b>Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.</b>								
11.2.1. (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DINHUB		PM	425,01	Tidak ada target, tetapi data tersedia
11.2.1. (b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Indikator Nasional
<b>Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penangan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.</b>								
11.3.1. (a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.3.1. (b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.3.2. (a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
11.3.2. (b)	Jumlah lembaga pembiayaan	Jumlah lembaga pembiayaan	Jumlah lembaga	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	infrastruktur.	infrastruktur.	pembiayaan infrastruktur.					
<b>Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.</b>								
11.4.1. (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Indikator Provinsi
<b>Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</b>								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	PM	26.469	Tidak ada target, tetapi data tersedia
11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD		PM	NA	Tidak ada target dan data tidak tersedia
11.5.1. (b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD		PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD		2	2	Tercapai
11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD		PM	309.891.396.400	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</b>								
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	71,48	92,72	Tercapai
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah bank sampah skala kota dan kelurahan	DLH		PM	24	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.</b>								
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Persen	2.909	2.900	Tidak tercapai
<b>Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan</b>								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.</b>								
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD		PM	NA	Data Tidak Tersedia
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	dokumen	PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKENAJUTAN</b>								
<b>Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</b>								
12.4.1. (a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLH	buah	PM	1	Tidak ada target, tetapi data tersedia
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Ton/tahun	PM	304,27	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.</b>								
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	%	17,23	18,93	Tercapai
<b>Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.</b>								
12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.</b>								
12.7.1. (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</b>								
12.8.1. (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar	BAGIAN ORGANISASI	OPD	15	31	Tercapai



Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Masyarakat (SPM) dan teregister.	Masyarakat (SPM) dan teregister.	Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.					
<b>TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA</b>								
<b>Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara</b>								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	PM	19	Tidak ada target, tetapi data tersedia
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	orang	PM	26.469	Tidak ada target, tetapi data tersedia
<b>Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional</b>								
13.2.1. (a)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLH		3 lokasi	3 lokasi	Tercapai
<b>TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN</b>								
<b>Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia</b>								
14.5.1*	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan &amp; tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang &amp; negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)</b>								
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DINDAGKO P UKM		0	0	Data Tidak Tersedia
<b>Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar</b>								
14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi)	DKP		240	240	Tercapai
<b>TUJUAN 15: PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN</b>								
<b>Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</b>								
15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DLH		108,86 Ha	108,17 Ha	Tidak tercapai
<b>Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.</b>								
15.2.1. (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
15.2.1.	Luas usaha pemanfaatan	Luas usaha pemanfaatan	Luas usaha pemanfaatan	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia



Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(b)	hasil hutan kayu restorasi ekosistem	hasil hutan kayu restorasi ekosistem	hasil hutan kayu restorasi ekosistem					Tersedia
15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi</b>								
15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLH		NA	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.</b>								
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.</b>								
15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

#### 2.2.4.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 *goals* 8 target dan 32 indikator. Terdapat 13 indikator yang tercapai, 2 indikator yang tidak tercapai serta 17 indikator yang datanya tidak tersedia sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.51 berikut.

**Tabel 2.51 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2022**

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>TUJUAN 16: PERDAMIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh</b>								
<b>Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun</b>								
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES		0	0	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES		PM	0	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	POLRES		0	0	Tercapai
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS		0	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiiksaan terhadap anak</b>								
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DPMPA	Anak	0	0	Tercapai
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DPMPA		0	0	Tercapai
<b>Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua</b>								
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLRES		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Bagian Hukum	Perkara	6	6	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.3.1. (c)	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya</b>								
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS		0	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat</b>								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD		100% APBD: Rp.1.090.187.786.000,- Realisasi : Rp.1.090.187.786.000,-	94,58% APBD: Rp.1.090.187.786.000,- Realisasi: Rp.1.031.090.188.444,02	Tidak Tercapai
16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD	Persen	100	100	Tercapai
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kota Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI	Indeks	BB	BB	Tercapai
16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	%	100	80	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI	Indeks	71.69 (BB)	(BB)	Tercapai
16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik	BAGIAN ORGANISASI	Indeks (Zona Merah/Kuning/Hijau)	Zona Hijau	94.62 (Zona Hijau)	Tercapai
<b>Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan</b>								
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	SETWAN	Persen	PM	11,11	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II	BKPSDM	Persen	PM	10,71	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.7.2. (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	INDIKATOR PROVINSI		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.7.2. (b)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	INDIKATOR PROVINSI		0	NA	Data Tidak Tersedia
16.7.2. (c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	INDIKATOR PROVINSI		0	NA	Data Tidak Tersedia
<b>Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</b>								
16.9.1.*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DINDUKCAPIL	persen	PM	99,91	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	DINDUKCAPIL DAN DINSOS		PM	35,50	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKCAPIL	Persen	93,10	98,52	Tercapai
<b>Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional</b>								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.10.1. (a)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
16.10.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DPMPPA		PM	53 pengaduan	Tidak ada target, tetapi data tersedia
16.10.2 *	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stauri dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	DINKOMINFO	Persen	100	107	Tercapai
16.10.2. (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	DINKOMINFO	Persen	50	50	Tercapai
16.10.2. (b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	INDIKATOR PROVINSI		NA	NA	Data Tidak Tersedia
16.10.2. (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan capaian tahun 2022		Keterangan
						Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.b.1. (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	INDIKATOR NASIONAL		NA	NA	Data Tidak Tersedia

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 2.2.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.239 berikut.

**Tabel 2.52 Permasalahan Pembangunan Daerah**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
AKABA (Angka Kematian Balita)	Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat
AKB (Angka Kematian Bayi)	
AKI (Angka Kematian Ibu)	
Indeks Keluarga Sehat	
Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Masih tingginya angka kemiskinan
Rata-Rata Lama Sekolah	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Kategori Kota Layak Anak	
Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Luas Genangan Banjir dan Rob	Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Lahan	
Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	
Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Persentase pelayanan sampah	
Tingkat pelayanan jalan ( <i>Level Of Service</i> )	
Persentase keterhubungan jalan	
Pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah
Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya
Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Masih adanya konflik sosial
Indeks SPBE	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
IKM Kota	
Nilai KIP Tingkat Kota	
Nilai SAKIP Kota	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	
Indeks Merit System	
Maturitas SPIP	
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

## 2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.240 berikut.

**Tabel 2.53 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

URUSAN	PERMASALAHAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</i>	Belum optimalnya capaian SPM pendidikan
	Belum optimalnya kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas
	Belum optimalnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</i>	Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat
	Belum optimalnya Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Belum optimalnya RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi
	Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar

URUSAN	PERMASALAHAN
	<p>Belum optimalnya tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek</p> <p>Belum optimalnya sarana farmasi yang memenuhi standar</p> <p>Belum optimalnya Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran</p> <p>Belum optimalnya Rumah Tangga Sehat</p> <p>Belum optimalnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat</p> <p>Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar</p> <p>Belum optimalnya Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i></p>	<p>Belum optimalnya tingkat Kemantapan Jalan kota</p> <p>Belum optimalnya Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kota</p> <p>Belum optimalnya drainase dalam kondisi baik</p> <p>Belum optimalnya Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik</p> <p>Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (<i>IKK Outcome</i>)</p> <p>Belum optimalnya Rasio Persetujuan Bangunan Gedung</p> <p>Belum optimalnya Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi</p> <p>Belum optimalnya Penetapan Rencana Tata Ruang kota</p> <p>Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p> <p>Belum optimalnya Ketersediaan Sarana Persampahan Regional</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i></p>	<p>Belum optimalnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga</p> <p>Belum optimalnya Luas kawasan permukiman kumuh</p> <p>Belum optimalnya Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</p> <p>Belum optimalnya penanganan kumuh</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</i></p>	<p>Belum optimalnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM</p> <p>Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</p> <p>Belum optimalnya penanganan korban bencana alam</p>
<p><i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</i></p>	<p>Masih tingginya angka kemiskinan</p> <p>Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</p>



<b>URUSAN</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
	Belum optimalnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
	Belum optimalnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan
	Belum optimalnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
	Belum optimalnya keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</i>	Belum optimalnya pemenuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi
	Belum optimalnya Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota
	Belum optimalnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>	Belum optimalnya kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan
	Belum optimalnya kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB
	Belum optimalnya Dekelra (desa/kelurahan layak anak)
	Belum optimalnya anak korban kekerasan yang ditangani (IKK Outcome)
	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</i>	Belum optimalnya Skor pola pangan harapan ketersediaan
	Belum optimalnya implementasi kelurahan tahan pangan di Kota Pekalongan
	Belum optimalnya penerapan pangan segar
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</i>	Belum optimalnya pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur kota
	Belum optimalnya pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
	Koordinasi dalam proses pensertifikatan tanah masih perlu ditingkatkan
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</i>	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya jumlah limbah yang diolah
	Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau
	Belum optimalnya pengelolaan sampah

URUSAN	PERMASALAHAN
	<p>Belum optimalnya usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH</p> <p>Belum optimalnya perolehan penghargaan bidang LH</p> <p>Belum optimalnya persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan</p> <p>Belum optimalnya pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>Belum optimalnya masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup</p>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</i>	<p>Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk</p> <p>Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil</p> <p>Belum optimalnya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK <i>Outcome</i>)</p>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i>	<p>Belum optimalnya ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan</p> <p>Belum optimalnya kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang)</p> <p>Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</p>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</i>	<p>Belum optimalnya pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)</p> <p>Belum optimalnya Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun</p> <p>Belum optimalnya penurunan angka Unmeet need KB</p>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</i>	<p>Belum optimalnya ketersediaan fasilitas LLAJ</p> <p>Belum optimalnya Kinerja Lalu lintas kota</p> <p>Belum optimalnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala</p> <p>Belum optimalnya Rasio konektivitas kota</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan parkir yang berizin</p>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>	<p>Belum optimalnya Pelayanan Informasi Publik</p> <p>Belum optimalnya pencapaian Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</i>	<p>Belum optimalnya Koperasi yang berkualitas</p> <p>Belum optimalnya koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat</p> <p>Belum optimalnya koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p> <p>Belum optimalnya koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota</p> <p>Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan</p>

<b>URUSAN</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
	Belum optimalnya peningkatan usaha Mikro yang menjadi wira usaha
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</i>	Belum optimalnya penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
	Belum optimalnya peningkatan Investasi baru
	Belum optimalnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</i>	Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan
	Belum optimalnya Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor
	Belum optimalnya Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</i>	Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan ( <i>penetration testing</i> )
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</i>	Belum optimalnya <i>Event</i> kesenian dan kebudayaan yang disiapkan
	Belum optimalnya Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Belum optimalnya pelestarian Cagar Budaya
	Belum optimalnya pengunjung museum batik
	Belum optimalnya pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</i>	Belum optimalnya Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)
	Belum optimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</i>	Belum optimalnya nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik
	Belum optimalnya Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
	Belum optimalnya Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Belum optimalnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</i>	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan Tangkap bersumber dari TPI
	Belum optimalnya Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan
	Belum optimalnya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

<b>URUSAN</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
	Belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI
	Belum optimalnya Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</i>	Belum optimalnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Belum optimalnya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk bereksprosi, berpromosi dan berinteraksi
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</i>	Belum optimalnya Produktivitas pertanian per hektar per tahun
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
	Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani
	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Belum optimalnya penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Belum optimalnya kenaikan nilai produk peternakan
	Belum optimalnya usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</i>	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya pemantauan obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Belum optimalnya alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Belum optimalnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
	Belum optimalnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK <i>Outcome</i> ))
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</i>	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
	Belum optimalnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>	Belum optimalnya pelayanan hukum dalam penetapan Perda

<b>URUSAN</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
	Belum optimalnyakoordinasi kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan
	Belum optimalnya deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
	Belum optimalnya Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa
	Belum optimalnya capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat
<i>SEKRETARIAT DPRD</i>	Belum optimalnya pembahasan dokumen penganggaran yang tepat waktu
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<i>PERENCANAAN</i>	Belum optimalnya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud
	Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian
	Belum optimalnya penyediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah
<i>KEUANGAN</i>	Belum optimalnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)
	Belum optimalnya Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
	Belum optimalnya Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
<i>KEPEGAWAIAN</i>	Belum optimalnya pengembangan karier PNS
	Belum optimalnya Tingkat Pelaporan Kinerja ASN
	Belum optimalnya Keterisian Jabatan
	Belum optimalnya Keterpenuhan Formasi ASN
<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</i>	Belum optimalnya PNS berkembang kompetensinya (Latsar)
<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>	Belum optimalnya Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD
	Belum optimalnya Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)
	Belum optimalnya Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
<i>INSPEKTORAT DAERAH</i>	Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya Level Kapabilitas APIP
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
<i>KECAMATAN</i>	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

URUSAN	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Trantibum
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan
	Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum
	Belum optimalnya ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	
<i>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>	Masih adanya konflik sosial
	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
	Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Belum optimalnya penanganan konflik ormas
	Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial
	Belum optimalnya pendidikan politik bagi parpol dan lembaga pendidikan
<b>Non Urusan</b>	
<i>Non Urusan</i>	Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD
	Belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Belum optimalnya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
	Belum optimalnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2022

### 2.3. ISU STRATEGIS

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.5, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.241 berikut.

**Tabel 2.54 Isu Strategis**

Permasalahan	Isu Strategis
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan
Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	
Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian indeks keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Selanjutnya, isu strategis dijelaskan sebagai berikut:

### 2.3.1. Tata Kelola Pemerintahan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu: transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif.

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 71,4. Upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Beberapa aspek terkait yang masih menjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 2,82. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat, serta peningkatan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE dan perkuatan pelayanan



pusat data Pemerintah Daerah; b) Layanan publik telah dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan, berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022, Kota Pekalongan mendapat nilai 90,44 dengan kategori Sangat Baik, persentase OPD dengan IKM Sangat Baik sebesar 62 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 48,88; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 73,31 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal; e) Akuntabilitas keuangan tetap perlu ditingkatkan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3,022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya *merit system* secara penuh, walaupun dari tahun ketahun terdapat peningkatan nilai dan pada tahun 2022 nilai *merit system* Kota Pekalongan sebesar 264,5; h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3,00; i) Belum optimalnya nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu sebesar 90,01, masih perlu ditingkatkan; dan j) Masih minimnya jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM, sehingga perlu didorong lagi agar bertambah.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan tiap tahunnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Beberapa upaya perubahan yang dilakukan yaitu: Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD; Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO; Penataan sistem manajemen SDM aparatur; Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD; Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penataan peraturan perundang-undangan dan Perubahan Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan).

Dalam aspek Pengawasan, yang dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih maka pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala. Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan bertujuan untuk Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota; Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; dan Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Selain itu, peran



perguruan tinggi juga diperlukan. Perguruan tinggi di Kota Pekalongan lebih menguasai permasalahan dan isu strategis tetapi belum optimal dalam memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

### **2.3.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup**

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan maupun pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas lingkungan yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (*land subsidence*). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Sampai dengan tahun 2022, luas genangan di Kota Pekalongan seluas 980,13 hektar atau 21,11 persen dari luas wilayah kota. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, dimana persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 69,41 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), sekitar 8-13 cm per tahun; c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 6,89 persen; d) Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa; e) Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga; dan f) Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa

kawasan justeru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun *water storage* guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman.

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi eksploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu Kualitas Lingkungan Hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 54,36, yang walaupun sedikit secara angka mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu 54,31. IKLH yang belum baik tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Salah satu komponen dalam IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Kondisi RTH di Kota Pekalongan masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi persyaratan pemenuhan RTH sesuai dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sehingga Pemerintah Kota Pekalongan berupaya untuk pengembangan RTH untuk dapat memenuhi kebutuhan RTH yang disyaratkan, yaitu 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% untuk RTH public dan 10% untuk RTH privat. Namun upaya ini masih belum dapat dilaksanakan secara kontinyu dan kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air, belum terbangun. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Selain itu penanganan terhadap pengelolaan limbah B3 juga perlu mendapat perhatian, terutama dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan. Perlu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, antara lain: Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).

### **2.3.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman**

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (*built up area*), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan

perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (*resilience city*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Pekalongan tahun 2022 adalah sebesar 66,90 persen, mengalami penurunan dari tahun 2021 (cakupan tahun 2021 sebesar 84,77 persen). Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum. Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Cakupan pelayanan persampahan pun juga belum optimal, dimana pada tahun 2020 sebesar 76,07 persen dan tahun 2021 menurun menjadi 73,75 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2021, jalan kota kondisi mantap sebesar 80,58 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Memasuki era *new normal* dimana PPKM sudah mulai longgar dan pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali dan bermunculan yang baru, menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung sehingga mobilitas di perkotaan cenderung ramai kembali. Pada tahun 2022 VC Ratio menjadi 0,39 menurun dibanding tahun 2021 (VCR tahun 2021 0,49). Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin merata pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio menurun, dimana artinya tidak terdapat kemacetan kendaraan pada ruas jalan-jalan kota. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,39), namun untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan. Penyediaan titik dan kantong-kantong parkir

juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Isu Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastruktur lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2021, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru, luas kawasan kumuh mencapai 6,89 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Luasan ini mengalami pengurangan dari tahun 2020 sebesar 10,74 persen. Persentase tersebut merupakan luasan yang masih cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 204,11 hektar. Sehingga masih tersisa luasan sebanyak 294,66 hektar dari total luasan kumuh seluas 498,77 hektar.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

#### **2.3.4. Peningkatan Derajat Kesehatan**

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Di sisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita



penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan di berbagai tempat, derajat kesehatan memiliki korelasi yang signifikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan salah satu komponen yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator makro atau indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, derajat kesehatan masyarakat memiliki korelasi dengan pencapaian kinerja pembangunan lainnya, sehingga derajat kesehatan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan Kota Pekalongan. Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat berdampak sistemik terhadap aspek-aspek pembangunan lainnya.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan: a) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2022 AKI masih bernilai 124,53 per 100.000 kelahiran hidup; b) Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2022 AKB masih bernilai 9,96 per 1.000 kelahiran hidup; c). Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2022 AKABA masih bernilai 12,28 per 1.000 KH; d). Tingginya angka kesakitan dan nilainya masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan nilai 8,38 persen di tahun 2021; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,28 persen dan Balita Stunting sebanyak 6,80 persen pada tahun 2022; f) masih rendahnya sistem ketahanan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang cenderung mengecil dan pada tahun 2022 memiliki skor sebesar 81,2 persen; serta g) Tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 mencapai sebesar 35,73 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2020 sebesar 74,38, pada tahun 2021 meningkat menjadi 74,44 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 74,51. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah maupun UHH Provinsi Jawa Tengah, capaian UHH Kota Pekalongan masih berada pada posisi terbawah. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana terus meningkatkan UHH secara optimal sehingga tidak tertinggal dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun kota-kota setara lainnya di Jawa Tengah. Upaya tersebut adalah melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus

ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Selain hal tersebut, perlu dilakukan penguatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perumusan rencana intervensi, sinkronisasi program penurunan AKI, AKB dan AKABA antara RSUD dan Puskesmas, pemberdayaan kader dan optimalisasi kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

Selain permasalahan AKI, AKB dan AKABA, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah stunting, dimana masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting bisa terjadi dan terus meningkat, bahkan pada saat teknologi dan ketersediaan fasilitas kesehatan sudah “dekat” dan “mudah” diakses masyarakat. Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Penyebabnya multidimensi, tidak hanya faktor kesehatan, melainkan juga faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya asupan gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, faktor keluarga, mulai dari ketidaktahuan praktik pemberian makan, praktik pemberian ASI, infeksi penyakit serta pola pengasuhan anak. Faktor eksternal yang turut berpengaruh yaitu akses air bersih dan sanitasi lingkungan.

Pemerintah Pusat terus mendorong penurunan stunting melalui strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023, Kota Pekalongan menjadi salah satu kota yang perlu mendapat penanganan dengan skema percepatan khusus. Hal ini ditunjukkan dengan angka prevalensi stunting tahun 2021 berdasarkan SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) sebesar 20,6 persen dan berdasarkan E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 7,82 persen. Target prevalensi stunting Kota Pekalongan ditargetkan turun setiap tahun, sehingga diperlukan upaya percepatan diantaranya: penguatan cakupan intervensi spesifik kunci, pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko stunting, pendampingan bagi pemerintah daerah, pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk air minum dan sanitasi, penguatan intervensi dukungan, terutama cakupan surveilans, koordinasi tim percepatan penurunan stunting daerah, dan pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah.

Masih rendahnya skor PPH menunjukkan bahwa konsumsi pangan beragam, bergizi dan seimbang belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan skor PPH melalui pelatihan olahan pangan dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat. Pembangunan pertanian serta kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan juga harus diarahkan untuk diversifikasi produk-produk bahan makanan maupun kerjasama dengan daerah lain, sehingga tersedia beragam pilihan bahan makanan di wilayah Kota Pekalongan.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

### 2.3.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Beberapa indikator perkembangan kesejahteraan tersebut adalah dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita maupun semakin menurunnya angka kemiskinan Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.

Dari data tahun jamak, angka kemiskinan Kota Pekalongan hingga tahun 2019, menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Namun demikian, sebagai dampak pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,17 persen pada tahun 2020 dan semakin meningkat menjadi 7,59 persen pada tahun 2021. Upaya pemulihan kondisi sosia dan ekonomi, sebagai dampak pandemi Covid-19 menunjukkan hasil, yaitu dengan capaian angka kemiskinan tahun 2022 adalah 7,00 persen, sehingga sudah menunjukkan pola kembali menurun.

Dengan perkembangan indikator tersebut, maka masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan belum optimal. Penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah maupun secara nasional bahwa ketika angka kemiskinan semakin rendah maka akan dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan DTKS tahun 2021 sebanyak 184.247 jiwa dari semula 108.436 jiwa pada tahun 2020, atau kenaikan sebanyak 75.811 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) kembali meningkat yaitu menjadi 188.445 jiwa. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen dalam penanganan upaya pengentasan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai



ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Tantangan pembangunan Kota Pekalongan lainnya adalah bagaimana menurunkan angka pengangguran secara optimal. Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berfluktuasi. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan analisis korelasi, dengan menggunakan data tahun jamak, antara pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan angka pengangguran, ketiga indikator tersebut tidak memiliki korelasi yang signifikan antar indikator. Temuan ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan belum berimplikasi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan maupun penurunan angka pengangguran. Angka kemiskinan dan angka pengangguran pun juga tidak memiliki korelasi yang signifikan. Jika angka kemiskinan menurun, juga tidak ditandai dengan penurunan angka pengangguran.

Angka pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 sebesar 6,89 persen dan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,98 persen. Meskipun angkanya menurun, tetap perlu adanya upaya dengan berbagai kebijakan yang tepat sasaran dan terarah. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, *link and match* dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehingga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus diintegrasikan dengan pembangunan perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi yang didorong harus pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan target-target pembangunan tersebut.

### **2.3.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumberdaya manusia yang tidak optimal. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 75,40 dan tahun 2022 meningkat menjadi 75,90. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah sebesar 12,86 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,86 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah sampai semester 1 atau 10 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan

bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.

- b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 adalah 9,20 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 9,20 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP, dan masuk kelas 10 SMA namun tidak sampai lulus. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.
- c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 sebesar 57,87. Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga dapat lebih optimal.

Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan, salah satunya pada tahun 2022 disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan IPM. RAD ini akan menjadi dasar rencana aksi pada tahun berikutnya. Urgensi RAD Peningkatan IPM tersebut adalah sebagai upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi agar IPM Kota Pekalongan dapat meningkat secara optimal. Selama ini, IPM Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, bahkan dengan beberapa kabupaten pun, IPM Kota Pekalongan capaiannya masih tertinggal.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Upaya peningkatan sumber daya manusia juga harus didukung dengan peningkatan *soft skill* masyarakat. *Soft skill* adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan sebagainya. Dalam hal ini, *soft skill* adalah karakter *bawaan* individu. *Soft skill* bisa saja dipelajari, akan tetapi tidak dengan cara belajar formal layaknya di bangku sekolah atau perkuliahan. Hal itu dapat dipelajari dengan lebih banyak melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, serta dengan melatih kepekaan sosial. Dengan begitu, individu itu dapat menerapkannya pada perilaku yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan *soft skill*. Seiring berkembangnya zaman, di samping individu memiliki kemampuan *hard skill*, ia juga dituntut untuk harus memiliki *soft*

*skill*. Hal itu karena dalam suatu organisasi dan lingkungan sosial lainnya, banyak dijumpai kasus kekerasan yang disebabkan ketidakmampuan individu dalam mengendalikan emosi, pikiran, tindakan, juga tuntutan organisasi atau lingkungan sosial yang semakin pelik. Maka dari itu, kemampuan *soft skill* dinilai sangat penting karena bisa dikatakan seorang individu itu akan terlihat lebih menonjol dan kompeten dibandingkan dengan individu lain.

Penanganan anak tidak sekolah (ATS) Kota Pekalongan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran lintas sektor dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan ATS sangat diperlukan karena penyebab dan penanganan ATS memerlukan sinergitas semua pihak baik pemerintah kota, masyarakat maupun lembaga non pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS antara lain pembangunan Sanggar Kelompok Belajar (SKB). SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal. Sampai tahun 2021 ada tiga belas PKBM di Kota Pekalongan yang memberikan layanan pendidikan non formal. Keberadaan SKB diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan non formal.

### **2.3.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal**

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen, pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,59 persen dan pada tahun 2022 menjadi 5,76 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2021 sebesar Rp.37,07 juta per tahun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.40,68 juta per tahun, namun belum menunjukkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang optimal; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisata pada tahun 2021 sebanyak 316.440 orang, dan meningkat menjadi 1.038.424 orang. Walaupun meningkat tajam, namun masih perlu dioptimalkan; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp.390,348 Milyar dan meningkat menjadi Rp 3.188,411 Milyar pada tahun 2022; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2021

dan 2022 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2021 sebesar 2,38 persen dan tahun 2022 sebesar 4,26 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2021 sebesar 5,46 dan menurun menjadi 3,29 persen pada tahun 2022; dan f) Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan *event* budaya tahun 2021 dan tahun 2022 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru sebagai bagian dari TOD (*Transit Oriented Development*). Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan disisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahnya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Pekalongan, dari ke-14 sub sektor dalam ekonomi kreatif, hanya 8 (delapan) sub sektor yang masuk dalam *roadmap* Kota Pekalongan, yaitu: 1) Kerajinan; 2) Desain; 3) Fashion; 4) Film, video dan fotografi; 5) Musik; 6) Seni pertunjukan; 7) Radio dan televisi; dan 8) Kuliner. Dari kedelapan sub sektor yang ada maka dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) kluster yaitu: Kuliner, Seni Kriya

dan Seni Pertunjukan. Kondisi Ekraf saat ini secara umum masih sangat minim, dapat dilihat dengan tidak dimilikinya daftar kebutuhan, pasar yang tidak terpetakan, permodalan yang tidak tersalurkan dengan baik. Dengan kata lain dapat dikatakan kondisi ekraf di Kota Pekalongan masih belum didukung data yang baik. Dalam ekosistem lama ekraf dilaksanakan dengan model *'single fighter'* atau perorangan, masih terlalu terikat dengan tradisi/tradisional, masih berupa pelayanan dasar dan merupakan sambilan. Sehingga perlu adanya perubahan cara pandang atau *'Re-Branding'* dengan mulai menjalankan Ekraf melalui/berbasis komunitas, memberikan nilai tambah pada karyanya, ada pelayanan tambahan dan bersifat profesional.

Selain perubahan dengan me-re-branding ekosistem Ekraf juga perlu adanya pembuatan Database Dinamis yang dapat menjawab kebutuhan pengembangan, pemetaan dan akses pasar serta penyaluran modal. Dalam kebutuhan pengembangan perlu didasari oleh regulasi/peraturan, adanya kelembagaan dan didukung infrastruktur. Sedangkan pemetaan dan akses pasar dibedakan menjadi even dan segmentasi. Untuk permodalan dapat dibagi menjadi profit, non profit dan stimulan.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Dalam Pariwisata terdapat 5 (lima) hal penting yang saling terkait, yang biasa dikenal dengan 3A dan 2P, yaitu: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Promosi dan Pelaku Usaha. Kelima hal tersebut harus ada dan mendukung satu dengan lainnya untuk menciptakan pariwisata yang unggul. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi (RIPPARPROV) Tahun 2017-2027, Kota Pekalongan termasuk dalam salah satu Destinasi Pariwisata Provinsi / DPP yaitu DPP Tegal – Pekalongan dan sekitarnya. DPP ini merupakan destinasi pariwisata berskala Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 DPP. DPP dibagi lagi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi / KSPP dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi/ KPPP. Untuk DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya, terdiri dari 2 KSPP dan 4 KPPP yaitu: a) KSPP Tegal dan sekitarnya; b) KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya; c) KPPP Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya; d) KPPP Batang dan sekitarnya; e) KPPP Pemalang dan sekitarnya; dan f) KPPP Kaligua-Malahayu dan sekitarnya. Sedangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPP) Kota Pekalongan Tahun 2013-2028, telah ditentukan 4 DPD dan 9 KSPP serta 14 KPPP, dengan kriteria: a) Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah daerah yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata seperti KSPD dan KPPD; b) Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas serta membentuk jejaring produk dan pola kunjungan wisata; c) Memiliki tema yang mendukung penguatan daya saing; d) Memiliki



dukungan aksesibilitas dan infrastruktur mendukung pariwisata; dan e) Keterpaduan rencana sektor terkait.

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023). Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, pengembangan atraksi wisata, peningkatan kualitas amenities, perkuatan promosi wisata, dan penyusunan standar prosedur manajemen pariwisata, termasuk dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan sektor pariwisata di Kota Pekalongan.

### **2.3.8. Pelestarian Budaya Lokal**

Pemerintah Kota Pekalongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting, harus diintegrasikan dengan pembangunan kepariwisataan, sehingga dapat berkembang pariwisata budaya. Pengembangan pariwisata budaya dapat menjadi potensi tersendiri bagi pariwisata tersebut karena masing-masing daerah pasti memiliki kearifan budaya lokal yang khas dan unik bagi wisatawan. Strategi pengembangan pariwisata budaya dapat dilakukan antara lain dengan cara pengembangan atraksi budaya yang tetap mempertahankan jati diri kawasan, pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah menjadi bangunan cagar budaya, peningkatan infrastruktur, peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **2.3.9. Kondusivitas Wilayah**

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondusivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah akan sangat tergantung kondisi kondusivitas wilayah ini.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2020 berjumlah satu kasus, tahun 2021 bertambah menjadi tiga kasus dan pada tahun 2022 tidak terjadi kasus konflik sosial. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dimana pada tahun 2021 sebesar 3,60 (per 10.000 penduduk) dan menurun menjadi 1,47 (per 10.000 penduduk) di tahun 2022, namun angka tersebut harus terus dioptimalkan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tahun 2021 sebesar 46 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 39 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat, menjadi tanggung jawab bersama, seluruh pemangku kepentingan, bukan menjadi kewenangan pemerintah semata. Dengan kondusivitas wilayah yang baik maka akan menjamin perwujudan penanaman modal yang semakin meningkat sehingga perekonomian akan semakin berkembang, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

# BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

---

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 didasarkan atas berbagai asumsi dasar, antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Kondisi ekonomi Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan ekonomi regional Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Di tingkat regional, ekonomi Jawa Tengah tumbuh positif pada triwulan I 2023 sebesar 5,04 persen secara Year on Year (Y-o-Y). Kondisi ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,03 persen YoY dan empat provinsi besar di pulau Jawa. Sejumlah peristiwa yang berpengaruh pada kondisi ini di antaranya, panen raya padi yang mencapai puncak pada Maret 2023. Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung padi mengalami peningkatan produksi beras sebesar 216,60 persen secara q to q (dibanding triwulan sebelumnya), dan meningkat 5,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal lain yang mempengaruhi yaitu jumlah kendaraan baru yang diperdagangkan di level retail, yang meningkat 13,69 persen dibanding triwulan I tahun 2022. Jumlah penumpang moda transportasi yang naik, dan peningkatan hunian kamar yang meningkat 9,76 persen. Momen Ramadan juga ikut mengerek peningkatan konsumsi masyarakat. Yang meliputi makanan, minuman, transportasi, hotel, dan restoran. Selain itu, terjadi peningkatan konsumsi pemerintah yang didukung oleh peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja sosial.

Sebagai salah satu kota yang berada di jalur strategis Pantura, ekonomi Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan 5,76 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan

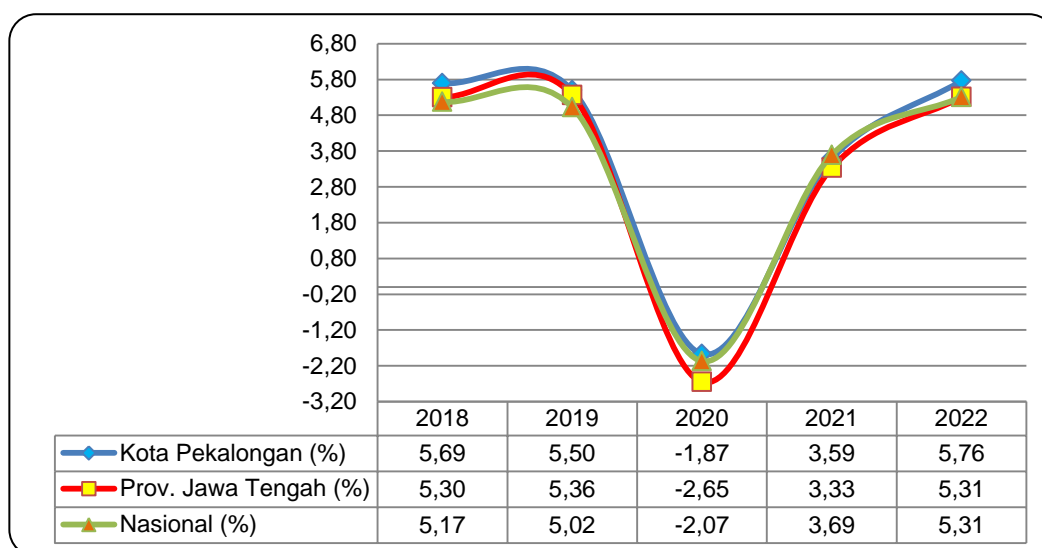


yaitu 2,28 - 2,84 persen. Melihat kondisi demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksikan tumbuh positif dari realisasi tahun 2022.

### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

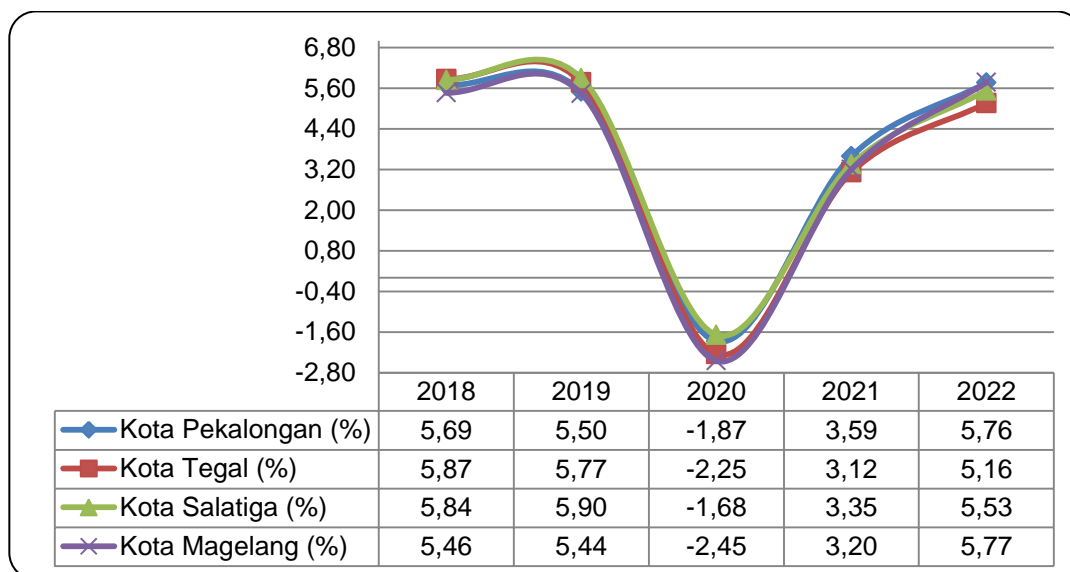
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, tetapi masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respons kebijakan yang ditempuh.



**Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022**

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 (diolah), 2023

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Sementara pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 3.2 berikut.



**Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2018 – 2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

#### b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2018-2022. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2022, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,08 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,79 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,10 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (persen)**

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,67	4,66	5,09	4,79	4,71
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,94	20,85	21,34	21,15	20,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,10	0,12	0,12	0,11
F	Konstruksi	14,60	14,64	14,54	15,46	15,10

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,76	21,80	21,38	21,59	21,08
H	Transportasi dan Pergudangan	6,28	6,40	5,02	5,06	7,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,44	5,31	5,36	5,67
J	Informasi dan Komunikasi	4,21	4,36	5,13	5,07	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,27	6,13	6,21	6,22	6,14
L	Real Estat	2,71	2,71	2,73	2,66	2,58
M,N	Jasa Perusahaan	0,42	0,44	0,43	0,42	0,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,58	4,47	4,49	4,17	3,93
P	Jasa Pendidikan	4,75	4,65	4,72	4,54	4,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,29	1,44	1,40	1,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,87	1,90	1,90	1,83	1,82
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2018 hingga 2022 cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 33,14 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 40,68 juta rupiah. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah, dan meningkat sebesar 5,25 persen menjadi sebesar 37,07 juta rupiah pada tahun 2021. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2018 – 2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Nilai PDRB</b>					
- ADHB (Miliar Rp)	10.089,25	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.599,93
- ADHK (Miliar Rp)	7.087,92	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46
<b>PDRB Per Kapita</b>					
- ADHB (Juta Rp)	33,14	35,41	35,32	37,17	40,68
- ADHK (Juta Rp)	23,28	24,35	23,89	24,66	25,96
<b>Pertumbuhan PDRB per Kapita</b>					

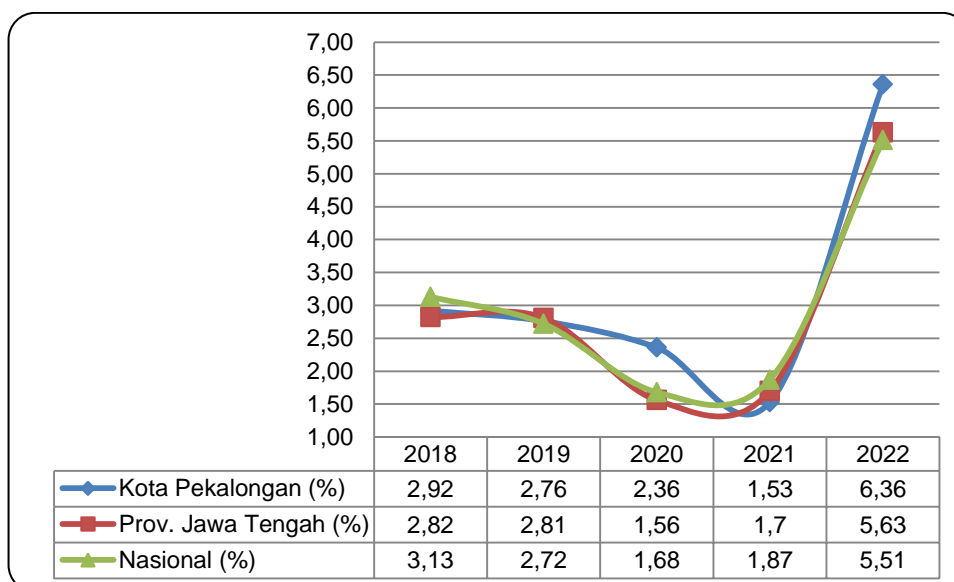
Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
- ADHB (persen)	7,86	6,86	-0,25	5,24	9,43
- ADHK (persen)	4,79	4,60	-1,88	3,20	5,27

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2023

### c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2018 – 2022, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 3.3 berikut.



**Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

Sumber: www.bps.go.id, 2023

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan pada tahun 2021 adalah kelompok rekreasi, perawatan pribadi, makanan jadi, dan sandang. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021**

Kelompok Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Umum	3,61	2,92	2,76	-	-
Bahan Makanan	4,63	3,66	8,00	-	-
Makanan Jadi	2,46	3,05	1,60	-	2,14

Kelompok Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
Perumahan	4,02	3,47	0,40	0,33	1,42
Sandang	5,40	2,51	3,31	4,01	2,01
Kesehatan	1,15	0,54	4,75	2,89	0,56
Pendidikan	3,26	1,33	3,74	-2,71	0,06
Transport	3,96	2,43	0,31	1,33	1,01
Perlengkapan	-	-	-	2,70	1,13
Infokom	-	-	-	1,20	-0,64
Rekreasi	-	-	-	6,27	2,62
Restoran	-	-	-	1,76	1,61
Perawatan Pribadi	-	-	-	4,20	2,35

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Pada tahun 2022 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2022**

Kelompok Pengeluaran	2022
Makanan, Minuman dan Tembakau	8,96
Pakaian dan Alas Kaki	2,45
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,47
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	4,89
Kesehatan	2,50
Transportasi	16,42
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,74
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	4,50
Pendidikan	3,21
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	4,81
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	9,64
Umum	6,31

Sumber: Kota Tegal Dalam Angka 2023, 2023

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Proyeksi lembaga-lembaga keuangan dunia bahwa perekonomian global akan menghadapi tantangan berat di tahun 2023 mulai terbukti. Saat ini, negara-negara maju masih harus berjibaku dengan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka.

Di tengah pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia tetap resilien. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2023 tumbuh sebesar 5,03%, melampaui sebagian besar perkiraan analisis pasar dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada pada level 4,5% pada triwulan yang sama.

Kondisi ekonomi global yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

1) *Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur global melemah.*

Aktivitas manufaktur global kembali berkontraksi di penghujung triwulan I 2023. Purchasing manager's index (PMI) manufaktur di hampir 60% negara G-20 dan ASEAN-6 masih melemah. Bahkan Vietnam yang selama ini cukup resilien pun telah mengalami hantaman perlemahan dari PMI manufaktur sebagai imbas perlemahan negara-negara tujuan ekspor Vietnam. Sementara 27,3% negara lainnya termasuk Thailand, Rusia, dan Tiongkok berada di zona ekspansi namun melambat. Di tengah perlambatan PMI global tersebut, Indonesia bersama India dan Turki menjadi sebagian kecil (13,6%) negara yang PMI manufakturnya ekspansif dan terus melesat.

2) Harga komoditas global menurun.

Kondisi perekonomian dunia juga masih dipengaruhi oleh volatilitas dan gejolak harga komoditas. Meskipun secara umum tren penurunan terjadi, dibandingkan tahun 2022 terutama pada pertengahan tahun, yang sempat mengalami boom komoditas. Harga gas alam dan batu bara terkoreksi tajam yaitu menurun sebesar 48,5% dan 52,8%. Sebaliknya, harga minyak mentah menunjukkan kenaikan sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan pemangkasan produksi minyak oleh organisasi pengeksport minyak bumi (OPEC). Sementara, harga komoditas pangan juga menunjukkan penurunan, kecuali *Crude Palm Oil (CPO)* yang sedikit mengalami penguatan. Kedelai masih berada di level yang cukup tinggi. Sedangkan jagung dan gandum sedikit menurun. Volatilitas harga komoditas masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi laju inflasi serta kebijakan moneter dan kinerja ekonomi semua negara.

3) *Higher for longer.*

Harga komoditas mempengaruhi tingkat inflasi. Berbagai negara kemudian merespons kenaikan inflasi tersebut melalui kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan agregat. Tingkat inflasi di Eropa dan Jepang misalnya mengalami kenaikan dan masih relatif jauh di atas suku bunga acuan. Sementara, inflasi Amerika Serikat walaupun menurun namun secara historis juga masih berada pada level yang lebih tinggi, saat ini di level 5%. Hal ini memukul perekonomian negara-negara tersebut, sehingga mengalami perlemahan yang cukup tajam pada tahun ini. Risiko global lainnya yang masih cukup dominan antara lain tekanan di sektor keuangan, potensi krisis utang di berbagai negara, eskalasi perang di Ukraina, serta adanya fragmentasi geoekonomi. Alhasil, pemulihan ekonomi global tersendat. International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun ini pada *World Economic Outlook (WEO)* April 2023, yaitu sebesar 2,8% (yoy). Meski tahun ini perekonomian global melambat, namun IMF memprakirakan pertumbuhan global akan membaik di tahun 2024 yaitu sebesar 3,0% (yoy). Sementara itu, IMF memprediksi inflasi global masih tinggi di 2023 yaitu di level 7,0%. Sedangkan negara berkembang diproyeksi mengalami inflasi sebesar 8,6% dan negara maju 4,7%. Inflasi diprediksi baru akan mulai menurun tahun depan. Namun, secara historis masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun, bahkan sebelum terjadinya pandemi. Hal tersebut menggambarkan inflasi masih akan berlangsung pada level yang tinggi dalam jangka yang cukup panjang atau kemudian disertai dengan suku bunga tinggi dan agak panjang, "*higher for longer*". Perlambatan kondisi perekonomian di negara maju tentu akan memberikan dampak bagi negara-negara berkembang yang sangat mengandalkan ekspor. Kebijakan *reopening* Tiongkok belum mampu mendorong pemulihan ekonomi. Sehingga sumber pertumbuhan ekonomi dunia masih sangat lemah tahun ini. Begitu pula dengan volume perdagangan antarnegara yang akan mengalami penurunan. Di samping itu, dengan



adanya kenaikan inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan pengetatan likuiditas, telah menimbulkan dampak kepada sektor keuangan perbankan. Sri Mulyani mengatakan berdasarkan hasil pertemuan Spring Meeting IMF-World Bank 2023 di Washington DC, Amerika Serikat pada 10-16 April 2023, krisis perbankan yang terjadi di Eropa dan Amerika masih harus diwaspadai.

Sementara itu, kondisi ekonomi nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan, diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif stabil, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prospek perekonomian domestik baik dari sisi produksi maupun konsumsi masih cukup kuat. Hal ini ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 19 bulan berturut-turut dengan capaian di Maret 2023 sebesar 51,9. Sejak awal 2023, PMI Manufaktur Indonesia meneruskan penguatan, antara lain didukung ekspektasi permintaan menjelang lebaran.

Di samping itu, penguatan dari sisi produksi juga ditunjukkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik bisnis yang tinggi dan listrik industri yang relatif stabil meski sedikit berkontraksi. Aktivitas konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren positif. Penjualan mobil dan motor jauh di atas rata-rata tahun 2019. Penjualan mobil secara wholesale tahunan tumbuh sebesar 2,6%. Begitupun penjualan motor yang bahkan mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 40,5%.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sangat kuat di angka 123,3. Hal ini tidak lepas dari dukungan pengendalian inflasi yang mumpuni dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Indeks penjualan ritel juga mencatat kenaikan tajam, yaitu sebesar 4,8% (yoy), dikarenakan momen Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Inflasi yang terkendali menjadi hal positif dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah optimis tren positif tersebut akan tetap terjaga dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi bagi momentum pemulihan serta menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi.

Di sisi lain, sektor pariwisata perlahan menunjukkan pemulihan. Terlihat dari jumlah kunjungan wisman yang mengalami peningkatan sebesar 567,3% (yoy).

Memperhatikan kondisi global, nasional dan tantangan tersebut, pembangunan di Kota Pekalongan diharapkan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut:

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Di tahun 2022, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,59	5,76	3,70 – 4,20	5,50-5,80	5,4 – 5,8	2,53 - 3,32

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2022 bergerak naik dari 75,40 di tahun 2021, menjadi 75,90 di tahun 2022. Capaian di tahun 2022 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 75,60. Dengan upaya optimalisasi vaksinasi *COVID-19* dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi  
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,40	75,90	75,60	76,30	76,70	75,88

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

## c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 57,87 di tahun 2021. Angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan yaitu 58,43. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,87	61,37	59,14	59,14	59,59	60,28

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## d. Tingkat Kemiskinan

Pandemi *COVID-19* yang terjadi sejak tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat pembatasan kegiatan dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri. Tingkat kemiskinan tahun 2021 mencapai 7,59 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,94 persen. Begitu juga di tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai 7,00 persen, masih di atas angka yang diharapkan yaitu 6,71 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi  
Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Tingkat kemiskinan (persen)	7,59	7,00	6,50 – 6,45	6,50 – 6,45	6,3 - 5,93	6,09

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023



### e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi di Kota Pekalongan, penyerapan tenaga kerja juga turut membaik. Hal ini terlihat dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 6,89 persen di tahun 2021 menjadi 4,98 persen di tahun 2022 atau menurun 1,91 persen. Capaian ini juga telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 6,66 persen di tahun 2022. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,89	4,98	6,48 – 6,10	6,48 – 6,10	4,5 – 4,7	6,15

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

### f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3±1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi pada tahun 2022 berada diatas range tersebut yaitu 6,36 persen, turun 4,83 persen dari capaian tahun 2021 yaitu 1,53 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.10 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target Penetapan 2023	Target Perubahan 2023	Target 2024	Proyeksi 2025 (berdasarkan RPJMD)
Inflasi (persen)	1,53	6,36	3±1	3±1	3±1	3±1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

## 3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, bantuan keuangan Provinsi, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Resposibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dihitung berdasarkan:
  - a. perkiraan potensi yang masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
  - b. memperhatikan realisasi pendapatan Pajak Daerah pada semester I tahun anggaran 2023;
2. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan:
  - a. perkiraan potensi yang masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
  - b. memperhatikan realisasi pendapatan Retribusi Daerah pada semester I tahun anggaran 2023;
3. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dihitung berdasarkan perolehan laba dari BUMD tahun 2022 audited.
4. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan:
  - a. dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada semester I tahun anggaran 2023;
  - b. perkiraan suku Bunga BI;
  - c. potensi aset yang disewakan;
  - d. estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
  - e. estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
5. Asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID), disesuaikan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.
6. Dana Bagi Hasil Pajak Prvinsi disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- 1) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah (Retribusi Daerah) seperti yang sudah tertuang pada Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 2021-2025.
- 2) Implementasi *Sak Rego* (Satu Harga), penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
- 3) *E-monitoring* pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
  - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
  - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
  - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
  - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
  - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
  - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 4) Pemberian Reward dan Punishment, antara lain:
  - a) *Reward*:
    - Gebyar Pajak Restoran, pemberian reward masyarakat yang berkenan melaporkan *struck* pembelian makanan minimal Rp. 25.000,00 dengan cara mengakses web yang telah disediakan dan mengisi data diri serta melampirkan *struck* pembayarannya untuk periode 15 Juli – 30 September 2023.
    - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
    - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
  - b) *Punishment*:
    - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
    - Bagi WP yang telah mendapat Tapping Box tetapi tidak menggunakan alat tapping box tersebut, sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun

2022 Tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (E-SPTPD) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak maka akan dikirimkan Surat Peringatan sampai 3 kali dan apabila tidak mengindahkan maka akan dilakukan pensegelan/ penutupan usaha WP.

- Pemasangan Sticker belum lunas pajak daerah.
  - Dengan berkordinasi dengan Satpol PP melakukan pembongkaran konstruksi reklame bagi WP Reklame yang tidak memenuhi kewajibannya.
- 5) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
  - 6) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
  - 7) Implementasi QRIS Untuk mempermudah akses Wajib Pajak dalam pembayaran pajak maka penggunaan metode pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dirasa perlu. QRIS merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank (OVO, Gopay, Dana, LinkAja, dll) yang digunakan masyarakat, dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak.
  - 8) Digitalisasi Layanan Perpajakan; Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang kemudahan akses layanan perpajakan. Untuk memanfaatkan potensi tersebut BPKAD Kota Pekalongan melakukan terobosan dengan menciptakan inovasi sistem informasi: E-SPTPD, E-BPHTB, SPPT Elektronik PBB, PBB Online, Web SIG PBB, Aplikasi Pendataan Mobile
  - 9) Host to host e-BPHTB dengan Layanan ATR BPN. Integrasi Aplikasi e-BPHTB BPKAD dengan Kantor ATR BPN Kota Pekalongan adalah upaya peningkatan pendapatan daerah dari perolehan BPHTB dengan meminimalisir pemalsuan BPHTB serta mempercepat proses pelayanan pertanahan
  - 10) House to house dengan DPMPTSP terkait perijinan reklame dan ijin usaha lainnya, house to house dengan BPN terkait BPHTB dengan update data objek PBB.
  - 11) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
  - 12) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - 13) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
  - 14) Persiapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 15) Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data

simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;

- 16) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 17) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 18) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
- 19) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
- 20) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- 21) Perbaikan kinerja yang merupakan indikator dasar perhitungan Dana Insentif Daerah.
- 22) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak..

Adapun perubahan target pendapatan Kota Pekalongan tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

**Tabel 3.11 Perubahan Target Pendapatan Kota Pekalongan Tahun 2023**

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>990.014.024.000</b>	<b>967.818.978.000</b>	<b>1.008.849.238.000</b>	<b>18.835.214.000</b>	<b>41.030.260.000</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>242.248.392.000</b>	<b>240.805.592.000</b>	<b>249.829.667.710</b>	<b>7.581.275.710</b>	<b>9.024.075.710</b>
Pajak Daerah	97.750.000.000	99.450.000.000	100.200.000.000	2.450.000.000	750.000.000
Retribusi Daerah	24.867.002.000	21.674.202.000	21.983.402.000	-2.883.600.000	309.200.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.473.378.000	6.473.378.000	6.604.200.000	130.822.000	130.822.000
Lain-lain PAD yang Sah	113.158.012.000	113.208.012.000	121.042.065.710	7.884.053.710	7.834.053.710
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>747.765.632.000</b>	<b>724.763.386.000</b>	<b>756.769.570.290</b>	<b>9.003.938.290</b>	<b>32.006.184.290</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>637.762.334.000</b>	<b>652.383.034.000</b>	<b>651.645.019.290</b>	<b>13.882.685.290</b>	<b>-738.014.710</b>
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28.676.925.000	29.844.124.000	31.088.726.000	2.411.801.000	1.244.602.000
Dana Alokasi Umum	426.399.738.000	447.688.903.000	447.688.903.000	21.289.165.000	0
Dana Alokasi Khusus	177.989.411.000	164.905.768.000	162.923.151.290	-15.066.259.710	-1.982.616.710
Dana Insentif Daerah	4.696.260.000	9.944.239.000	9.944.239.000	5.247.979.000	0
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>110.003.298.000</b>	<b>72.380.352.000</b>	<b>105.124.551.000</b>	<b>-4.878.747.000</b>	<b>32.744.199.000</b>

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	74.045.298.000	72.380.352.000	82.064.551.000	8.019.253.000	9.684.199.000
Bantuan Keuangan Provinsi	35.958.000.000	0	23.060.000.000	-12.898.000.000	23.060.000.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>0</b>
Pendapatan Hibah	0	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	0

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp.41.030.260.000 dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2023 yang terdiri dari kenaikan Pajak Daerah sebesar Rp.750.000.000, Retribusi Daerah sebesar Rp.309.200.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.130.822.000 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.7.834.053.710.

Untuk Pendapatan Transfer, secara total bertambah sebesar Rp.32.006.184.290. kenaikan terbesar bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.23.060.000.000, Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi sebesar Rp.9.684.199.000 dan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp.1.244.602.000. kenaikan tersebut juga diikuti dengan penurunan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.1.982.616.710.

#### b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023. Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada:

- 1) Penyesuaian belanja pegawai yang terdiri dari:
  - a. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN berdasarkan realisasi belanja bulan Juni 2023.
  - b. Penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK tahun 2022.
  - c. Penyesuaian kebutuhan belanja tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD.
  - d. Penyesuaian penggunaan rincian rekening belanja pegawai.
  - e. Penyesuaian kebutuhan belanja pegawai BLUD sesuai dengan hasil SiLPA audited.
- 2) Penyesuaian rekening belanja atas hasil SiLPA audited yang bersifat transitoris (DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, dan BLUD).
- 3) Penyesuaian belanja atas perubahan pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.



- 4) Penyesuaian belanja atas Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 21 A tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023.
- 5) Pemenuhan belanja kebutuhan rutin operasional perangkat daerah yang belum teralokasikan 12 bulan.
- 6) Rasionalisasi atas belanja yang tidak mendesak dan urgen.
- 7) Pergeseran anggaran antar organisasi/unit organisasi/program/kegiatan/sub kegiatan/kelompok dan jenis belanja.

Adapun perubahan belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

**Tabel 3.12 Perubahan Belanja Kota Pekalongan Tahun 2023**

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
<b>BELANJA</b>	<b>1.029.014.024.000</b>	<b>1.008.395.478.000</b>	<b>1.060.070.466.000</b>	<b>31.056.442.000</b>	<b>51.674.988.000</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>844.598.845.529</b>	<b>853.904.211.000</b>	<b>880.901.275.000</b>	<b>36.302.429.471</b>	<b>26.997.064.000</b>
Belanja Pegawai	405.194.236.500	402.374.077.000	401.689.577.000	-3.504.659.500	-684.500.000
Belanja Barang dan Jasa	413.908.124.887	419.190.116.000	438.694.127.000	24.786.002.113	19.504.011.000
Belanja Hibah	21.574.310.142	29.205.077.000	38.069.966.000	16.495.655.858	8.864.889.000
Belanja Bantuan Sosial	3.922.174.000	3.134.941.000	2.447.605.000	-1.474.569.000	-687.336.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>179.440.178.471</b>	<b>150.661.267.000</b>	<b>174.169.191.000</b>	<b>-5.270.987.471</b>	<b>23.507.924.000</b>
Belanja Modal Tanah	3.132.548.000	3.205.785.000	3.375.350.000	242.802.000	169.565.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.196.533.471	40.259.231.000	40.313.856.000	10.117.322.529	54.625.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.614.107.150	57.851.865.000	55.854.513.000	-2.759.594.150	-1.997.352.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.794.159.206	46.413.735.000	72.330.088.000	-10.464.071.206	25.916.353.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.702.830.644	2.930.651.000	2.295.384.000	-2.407.446.644	-635.267.000
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.975.000.000</b>	<b>3.780.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1.220.000.000</b>
Belanja Tidak Terduga	4.975.000.000	3.780.000.000	5.000.000.000	25.000.000	1.220.000.000
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000.000</b>
Belanja Bantuan Keuangan	0	50.000.000	0	0	-50.000.000

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

### c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023, maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah yang berasal dari pelampauan target pendapatan asli daerah baik bersumber dari pelampauan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun pelampauan target pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perubahan penerimaan pembiayaan dilakukan dengan menyesuaikan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 yang telah di audit oleh BPK. SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.51.826.500.000. Berdasarkan hasil audit BPK, perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah sisa dana DAK Fisik dan Non Fisik, sisa dana DBHCHT, sisa kas di BLUD RSUD dan Sisa Kas di BLUD Puskesmas yang akan dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing.

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 bertambah sebesar Rp. 650.100.575 sehingga menjadi Rp.6.650. 100.575, yaitu penambahan jasa giro pada pembentukan dana cadangan.

**Tabel 3.13 Anggaran Pembiayaan Pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023**

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>39.000.000.000</b>	<b>40.576.500.000</b>	<b>51.221.228.000</b>	<b>12.221.228.000</b>	<b>10.644.728.000</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.000.000.000</b>	<b>51.826.500.000</b>	<b>63.121.328.575</b>	<b>15.121.328.575</b>	<b>11.294.828.575</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.000.000.000	51.826.500.000	63.120.549.575	15.120.549.575	11.294.049.575
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	779.000	779.000	779.000
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>11.250.000.000</b>	<b>11.900.100.575</b>	<b>2.900.100.575</b>	<b>650.100.575</b>
Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000	6.000.000.000	6.650.100.575	650.100.575	650.100.575
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000	2.250.000.000	0

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2023





# BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan *Tahta Untuk Rakyat* sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

### 4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *brand image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivasinya sangat rentan terdorong untuk mengeksploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat

pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan berkurang secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi *Transit Oriented Development* (TOD). Dengan selesainya konstruksi Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana di akhir tahun 2021, Kota Pekalongan mempunyai wahana wisata baru yang menjadi magnet bagi wisatawan. Hal ini menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota

Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya – upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi kedelapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan ruh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

## **1. Lebih Sejahtera**

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, makna sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka

Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

## 2. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

## 3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJPD yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang

sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

#### **4.1.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian ibu, bayi dan balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan kecukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sarannya adalah Meningkatkan Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.



## **2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan**

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya pengarusutamaan hak anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

## **3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman**

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadai.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatkan kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

## **4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan**

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus

dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan/RTH, dan terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, dengan sasaran meliputi: optimalnya layanan air minum, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi perkotaan.

## **5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal**

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

## **6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah**

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi sedekah laut (nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujudkan melalui upaya mendorong peningkatan intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

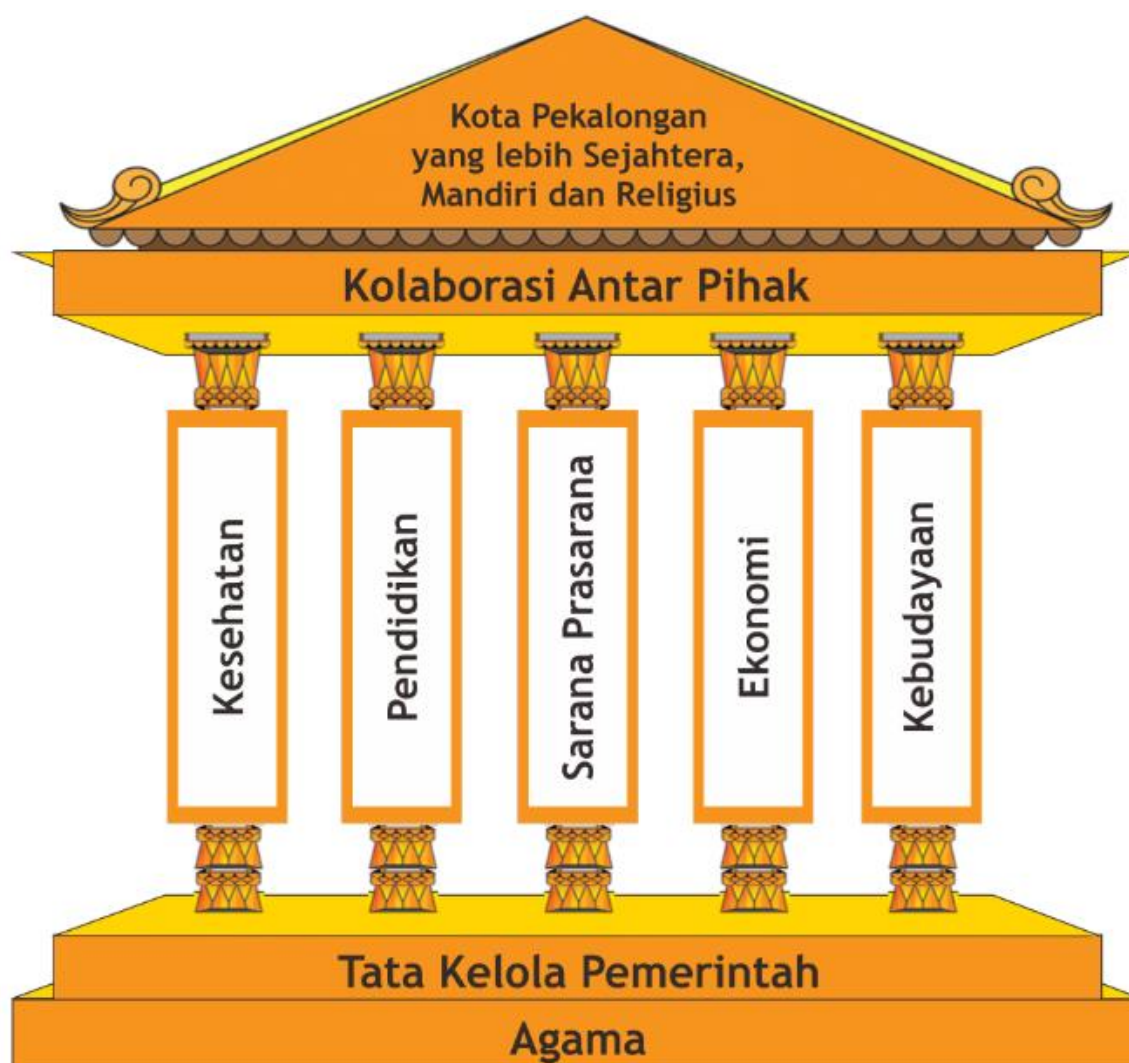


Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

#### **7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government***

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



**Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi**

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2021

### **4.1.3. Tujuan Dan Sasaran**

#### **4.1.3.1. Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat**

##### **TUJUAN**

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

##### **SASARAN**

- a. Meningkatnya indeks keluarga sehat
- b. Meningkatnya penanganan kemiskinan

#### **4.1.3.2. Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan**

##### **TUJUAN**

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif

##### **SASARAN**

- a. Meningkatnya akses pendidikan
- b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
- c. Optimalnya pengarusutamaan gender
- d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
- e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

#### **4.1.3.3. Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman**

##### **TUJUAN**

- a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

##### **SASARAN**

- a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

#### **4.1.3.4. Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan**

##### **TUJUAN**

- a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

##### **SASARAN**

- a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
- b. Menurunnya tingkat pencemaran air
- c. Optimalnya kualitas lahan
- d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- e. Optimalnya layanan air minum
- f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
- g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

#### **4.1.3.5. Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal**

##### **TUJUAN**

- a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

##### **SASARAN**

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

#### **4.1.3.6. Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah**

##### **TUJUAN**

- a. Melestarikan Seni Budaya
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

##### **SASARAN**

- a. Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan
- b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

#### **4.1.3.7. Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government***

##### **TUJUAN**

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

##### **SASARAN**

- a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)
- b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)
- c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
- f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

**Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026**  
**Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat</b>												
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
		Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00	
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan			persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
<b>Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan</b>												
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
		2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	Tingkat Pengangguran Terbuka			persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
<b>Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman</b>												
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen		persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
<b>Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan</b>												
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob		persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17	
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90	
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
	3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar			persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04
		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan ( <i>Level Of Service</i> )	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
	Persentase keterhubungan jalan		persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal</b>												
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita			Rp. Juta/jiwa/tahun	35,22	35,47 - 35,51	35,97 - 36,21	36,56 - 36,92	37,16 - 37,82	39,21	40,65	40,65
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
<b>Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah</b>												
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial			kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government</b>												
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69
		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( <i>Smart Governance</i> )	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik ( <i>Smart Governance</i> )	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
		3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i> )	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM		OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2026. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

**Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan	
<b>Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat</b>						
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan	
				Skor PPH konsumsi	Pangan	
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial	
<b>Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan</b>						
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Pendidikan
				Skor Kota Layak Anak	Perpustakaan	
Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak			
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja	
<b>Misi 3: Mewujudkan lingkungan permukiman yang nyaman</b>						
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang	Persentase jumlah rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman	



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
	kumuh kurang dari 10 persen	tidak kumuh	tidak kumuh	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan</b>					
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kapasitas Jalan Perkotaan	Perhubungan
			Persentase keterhubungan jalan	Persentase jalan kota dalam keadaan Mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal</b>					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UKM
				Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Pertanian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK Outcome)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
<b>Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah</b>					
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/or mas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
<b>Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government</b>					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Tingkat kematangan layanan data terbuka pada satu data terpadu daerah	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks Profesionalitas ASN	Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
				Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i> )	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2023

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

**Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"**

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat</b>		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
<b>Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan</b>		
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	
<b>Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman</b>		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan
<b>Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan</b>		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan	

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
	optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	
<b>Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal</b>		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
<b>Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah</b>		
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas <i>event</i> budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan <i>event</i> budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
<b>Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government</b>		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

## 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2023 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2023 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

#### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
  - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
  - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
  - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem perlindungan sosial;
- MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
- MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.

2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Prevalensi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
  - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
  - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
  - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
  - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
  - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
  - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi kesehatan nasional; dan

- MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
    - a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
    - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
    - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
    - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
  4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
    - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
    - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
    - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
    - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
    - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
    - MP destinasi pariwisata prioritas; dan
    - MP pengelolaan terpadu UMKM.
  5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
    - a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
    - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
    - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
    - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
    - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,556,6,08%; dan
    - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
    - MP kawasan industri prioritas dan smelter.
  6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
    - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
    - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
    - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar
    - d. Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
    - e. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
    - MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
    - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.

7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m<sup>3</sup> /detik;
  - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
  - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
  - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
  - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem kesehatan nasional;
- MP transformasi digital;
- MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
- MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
  - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.



9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan  
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery* industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
  - 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - 5) Pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
  - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - 3) Penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air



- 6) dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan
  - 7) infrastruktur hijau; dan
  - 8) Pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
  - 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
  - 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
  - 5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
  - 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
  - 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
  - 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
  - 6) Pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
  - 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - 3) Pengelolaan Impor;
  - 4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
  - 5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
  - 6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
  - 7) Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
  - 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
  - 3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
  - 4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri
  - 5) Pengolahan dan Pariwisata; dan
  - 6) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi
  - 7) Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman,
  - 8) Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.  
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
  - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
  - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
  - d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
  - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f) Pengentasan kemiskinan; dan
  - g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
  - 1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
  - 2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
  - 3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
  - 4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
  - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
  - 3) Kesejahteraan Sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
  - 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
  - 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
  - 4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
  - 5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
  - 2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
  - 3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - 4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
  - 5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
  - 2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - 3) Kualitas Pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
  - 2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
  - 3) Reforma Agraria; dan
  - 4) Perhutanan Sosial.
- g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
  - 2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
  - 3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
  - 4) Prestasi Olahraga.

#### 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
- d) meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
  - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
  - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
  - 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
  - 5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
  - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
- b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
  - 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
  - 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
  - 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
  - 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
  - 2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
  - 3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
  - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan

- 5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Peningkatan Budaya Literasi;
  - 2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
  - 3) Pengembangan budaya lptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
  - 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
  - 2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
  - 3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
  - 4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
  - 5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
  - 6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Konektivitas Jalan;
  - 2) Konektivitas Kereta Api;
  - 3) Konektivitas Laut;
  - 4) Konektivitas Udara; dan
  - 5) Konektivitas Darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Transportasi Perkotaan; dan
  - 2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
  - 2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
  - 3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penuntasan Infrastruktur TIK;

- 2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
  - 3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
    - 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
    - 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
    - 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) Penanggulangan Bencana; dan
    - 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
  - c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
    - 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
    - 3) Pengembangan Industri Hijau.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
  - 2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
  - 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
  - 2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
  - 2) Transformasi pelayanan publik;
  - 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
  - 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
  - 2) Penguatan Keamanan Laut; dan
  - 3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

#### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari**" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, difokuskan pada:
  - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi pertanian (termasuk subsektor peternakan), peningkatan kualitas kelembagaan petani dan peternak berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan melalui subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan database (termasuk data peternakan dan kesehatan hewan), peningkatan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan kawasan peternakan, program Banter Melaju (Paguyuban Peternak Menuju Keluarga Maju), pengendalian penyakit hewan menular strategis, Sekolah Usaha Peternakan Rakyat/SUPRA, serta penyuluhan peternakan;
  - b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, peningkatan kelayakan usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro, peningkatan angka konsumsi ikan, pengembangan budidaya perikanan berbasis kawasan, pengembangan pelabuhan perikanan dan loka budidaya ikan, pembinaan dan penyediaan sarana usaha garam rakyat, serta pengelolaan kawasan konservasi;
  - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
  - d. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan berkelanjutan sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan



pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;

- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
  - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
  - g. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepemilikan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
  - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pangsela;
  - i. Peningkatan daya dukung dan daya tampung melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air, pengendalian pemanfaatan air, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, konservasi energi, pemulihan lingkungan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup;
  - j. Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, kajian dan inovasi, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana.
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:
- a. Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik murah), serta pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, dan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif;
  - b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*) serta berbasis pada potensi lokal secara berkelanjutan, utamanya melalui penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pelatihan, fasilitasi kemudahan akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan perlindungan;
  - c. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di



- tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor;
- d. Pengurangan pengangguran dengan membangun kesatuan sistem *demand* dan *supply side* tenaga kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas calon tenaga kerja, dan penciptaan atau perluasan kesempatan kerja.
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, difokuskan pada:
- a. Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;
  - b. Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga;
  - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
  - d. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, difokuskan pada:
- a. Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif; sarana pelayanan publik yang inklusif; *open government* melalui perkuatan keterbukaan informasi publik; dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi;
  - c. Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja;
  - d. Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh

lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;

- e. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD..

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai di tahun 2023 melalui arah kebijakan, prioritas daerah dan fokusnya meliputi:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51-9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63-4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00-5,60 persen;
7. Inflasi pada angka  $3,0 \pm 1$  persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

#### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 ditujukan untuk **“Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan”**, dengan arah kebijakan meliputi:

1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan fokus pada peningkatan layanan dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai upaya mitigasi terhadap kematian ibu, bayi dan balita, penurunan angka stunting serta pembudayaan GERMAS guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha, dengan fokus pada perluasan jangkauan jaminan sosial bagi penduduk miskin.
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendampingan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah;
  - b. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha, dengan fokus pada optimalisasi kurikulum pelatihan dan penentuan sasaran pelatihan kerja di

- BLK serta peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perluasan kesempatan kerja.
5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dengan fokus pada:
    - a. Peningkatan peran perempuan dalam memberikan kontribusi pendapatan keluarga;
    - b. Peningkatan dan optimalisasi fungsi kelurahan layak anak.
  6. Pemantapan kerjasama dengan *stakeholder* potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada revitalisasi kawasan kumuh prioritas di wilayah Pekalongan Utara.
  7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan fokus pada:
    - a. Penataan infrastruktur drainase di wilayah Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, operasional dan pemeliharaan sistem pengendali banjir dan rob, serta penataan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
    - b. *Pilot project* penerapan produksi bersih pada sentra industri batik;
    - c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.
  8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:
    - a. Pembangunan jaringan distribusi dan perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
    - b. Pengoptimalan sarpras dan kelembagaan pengelolaan persampahan di TPS3R dan perluasan TPA secara bertahap yang disertai dengan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
    - c. Lanjutan pembangunan skeleton kawasan Pekalongan Baru dan rintisan akses jalan ke pelabuhan *onshore*.
  9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing, dengan fokus pada optimalisasi kelembagaan destinasi wisata laut dan destinasi wisata berbasis masyarakat.
  10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan *event* seni dan budaya, dengan fokus pada penguatan dan pengembangan kelompok seni dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan pelibatan stake holder yang diwujudkan dalam penyelenggaraan event budaya sebagai bagian dari peningkatan industri pariwisata.
  11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada edukasi keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.
  12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada:
    - a. Pemantapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada aspek-aspek integrasi penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengadaan

barang/jasa, manajemen kepegawaian, serta penguatan kualitas pelayanan di bidang perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan;

- b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;
- c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- d. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM;
- e. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, implementasi roadmap *merit system*.

Memperhatikan kondisi global, nasional, regional, tantangan dan upaya pencegahan dan penanganan *COVID-19* serta pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi semula 3,70 – 4,20 persen disesuaikan menjadi 5,50-5,80 persen;
- b) Laju inflasi sebesar  $3 \pm 1$  persen;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,50 – 6,45 persen;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semula 75,60 disesuaikan menjadi 76,30;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,48 – 6,10 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2023. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

**Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023**

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2023	
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan	12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan		8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan

<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Prioritas Tahun 2023</b>	
Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian indeks keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja		4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Prioritas Tahun 2023</b>	
Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2023, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2023 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

**Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit				
Peningkatan layanan dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai upaya mitigasi terhadap kematian ibu, bayi dan balita, penurunan angka stunting serta pembudayaan GERMAS guna pencegahan dan pengendalian penyakit	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,92 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,91 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 116,21 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinsos P2KB
			Program Pengendalian Penduduk	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha				
Perluasan jangkauan jaminan sosial bagi penduduk miskin	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2,00%	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Pemberdayaan Sosial	
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas				
a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendampingan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah; b. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,43 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha				
Optimalisasi kurikulum pelatihan dan penentuan sasaran pelatihan kerja di BLK serta peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,54%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)				
a. Peningkatan peran perempuan dalam memberikan kontribusi pendapatan keluarga; b. Peningkatan dan optimalisasi fungsi kelurahan layak anak.	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,14	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
			Program Perlindungan Perempuan	
	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh				
Revitalisasi kawasan kumuh prioritas di wilayah Pekalongan Utara	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	93,72%	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup				
a. Penataan infrastruktur drainase di wilayah Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, operasional dan pemeliharaan sistem pengendali banjir dan rob, serta penataan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat; b. Pilot project penerapan produksi bersih pada sentra	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	1.072,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	2. Indeks Kualitas Air	35,36	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
industri batik; c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	3. Indeks Kualitas Lahan	23,603	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
			Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			
<b>8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan</b>				
a. Pembangunan jaringan distribusi dan perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	b. Pengoptimalan sarpras dan kelembagaan pengelolaan persampahan di TPS3R dan perluasan TPA secara bertahap yang disertai dengan penguatan literasi	2. Persentase pelayanan sampah	70,12%	Program Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				DPUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
<p>pengelolaan persampahan kepada masyarakat;</p> <p>c. Lanjutan pembangunan skeleton kawasan Pekalongan Baru dan rintisan akses jalan ke pelabuhan onshore.</p>	3. Tingkat pelayanan jalan ( <i>Level Of Service</i> )	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
	4. Persentase keterhubungan jalan	97,20%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing			
<p>Optimalisasi kelembagaan destinasi wisata laut dan destinasi wisata berbasis masyarakat.</p>	Pertumbuhan ekonomi	5,50-5,80%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
Program Pengembangan Ekspor				

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya				
Penguatan dan pengembangan kelompok seni dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan pelibatan stake holder yang diwujudkan dalam penyelenggaraan event budaya sebagai bagian dari peningkatan industri pariwisata.	Persentase Penyelenggaraan <i>Event</i> Budaya	91,11%	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman	Dinparbudpora
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah				
Edukasi keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Satpol PP
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik				
<p>a. Pemantapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada aspek-aspek integrasi penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, manajemen kepegawaian, serta penguatan kualitas pelayanan di bidang perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan;</p> <p>b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;</p> <p>c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;</p> <p>d. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>e. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, implementasi roadmap <i>merit system</i>.</p>	1. Indeks SPBE	2,95	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	2. IKM Kota	83,64	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sekretariat DPRD
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora			

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DPMPPA
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	DLH
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	96,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	74,57	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i> )	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	6. Indeks Merit System	240,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
	7. Maturitas SPIP	3,40	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka target indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator program pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023**

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,30	0,30	Tetap
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116,21	116,21	Tetap
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,91	7,91	Tetap
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,92	9,92	Tetap
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,00	2,00	Tetap
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,43	9,43	Tetap
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,14	59,14	Tetap
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	Tetap
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Tetap
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,54	70,54	Tetap
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93,72	93,72	Tetap
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1.027,00	1.027,00	Tetap
13	Indeks Kualitas Air	indeks	35,36	35,36	Tetap
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	Tetap
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	7,00	Tetap
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	Tetap
17	Persentase pelayanan sampah	persen	70,12	70,12	Tetap
18	Tingkat pelayanan jalan ( <i>Level Of Service</i> )	kategori	B	B	Tetap
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	Tetap
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	3,70 – 4,20	5,50-5,80	Berubah
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	91,11	91,11	Tetap
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap
23	Indeks SPBE	indeks	2,95	2,95	Tetap
24	IKM Kota	persen	83,64	83,64	Tetap

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,00	96,00	Tetap
26	Indeks Merit System	indeks	240,00	240,00	Tetap
27	Nilai SAKIP Kota	skor	74,57	74,57	Tetap
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	WTP	Tetap
29	Maturitas SPIP	nilai	3,4	3,4	Tetap
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	5	5	Tetap

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2023

**Tabel 4.7 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023**

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
<b>A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>						
- Usia Harapan Hidup	Tahun	74,52	74,52	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Angka Kemiskinan	persen	6,50 – 6,45	6,50 – 6,45	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,60	76,30	Berubah	Tujuan Kota	Kota
- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,48 – 6,10	6,48 – 6,10	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	74,07	74,07	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	22,12	22,12	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	89,11	89,11	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,56 - 36,92	35,56 - 36,92	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Jumlah konflik sosial	kasus	0,00	0,00	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,30	0,30	Tetap	IKU Kota	Kota
- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116,21	116,21	Tetap	IKU Kota	Kota
Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,91	7,91	Tetap	IKU Kota	Kota
Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,92	9,92	Tetap	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,00	2,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,14	59,14	Tetap	IKU Kota	Kota
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,54	70,54	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93,72	93,72	Tetap	IKU Kota	Kota
- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1027,00	1027,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase pelayanan sampah	persen	70,12	70,12	Tetap	IKU Kota	Kota
- Pertumbuhan ekonomi	persen	3,70 – 4,20	5,50-5,80	Berubah	IKU Kota	Kota
- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<i>URUSAN PENDIDIKAN</i>						
- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
<i>URUSAN KESEHATAN</i>						
- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	90,00	90,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
<i>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>						
- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	persen	98,80	98,80	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	77,88	77,88	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	88,389	88,389	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	1,09	1,09	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	96,211	96,211	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	40,00	40,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
<b>URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
- Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	persen	93,74	93,74	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS</b>						
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	70,00	70,00	Tetap	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Satpol PP
<b>URUSAN SOSIAL</b>						
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3,43	3,43	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>URUSAN TENAGA KERJA</b>						
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,26	52,26	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
<i>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</i>						
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,51	28,51	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	630,00	630,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<i>URUSAN PANGAN</i>						
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan
<i>URUSAN PERTANAHAN</i>						
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
<i>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</i>						
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	62,86	62,86	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,34	0,34	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	71,07	71,07	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	34,42	34,42	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
<i>URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</i>						
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	88,54	88,54	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
<i>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i>						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	8,55	8,55	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67,50	67,50	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>						
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28,00	28,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	2,95	2,95	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
<b>URUSAN KOPERASI DAN UKM</b>						
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	8,12	8,12	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>						
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	204,28	204,28	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>						
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	1,53	1,53	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>						
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	indeks	20,12	20,12	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
<b>URUSAN KEARSIPAN</b>						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	73,20	73,20	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,21	1,21	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	14,00	14,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
<b>URUSAN STATISTIK</b>						
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	70,00	70,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
<b>URUSAN PERSANDIAN</b>						
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	I	I	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian
<b>URUSAN PILIHAN</b>						
<b>URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>						
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	15.141,00	15.141,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
<b>URUSAN PARIWISATA</b>						
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	580.000	580.000	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
<b>URUSAN PERTANIAN</b>						
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Miliar	247,58	247,58	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>						
- Pertumbuhan Industri	persen	0,09	0,09	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>						
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,71	26,71	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan



ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSN PEMERINTAHAN</b>						
<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>						
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	94,00	94,00	Tetap	IKU Renstra	Setda
<i>SEKRETARIAT DPRD</i>						
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Set DPRD
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
<i>PERENCANAAN</i>						
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
<i>KEUANGAN</i>						
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	1,98	1,98	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
<i>KEPEGAWAIAN</i>						
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	87,00	87,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</i>						
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	40,00	40,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan
<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>						
- Persentase laporan hasil litbang	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
<i>INSPEKTORAT DAERAH</i>						
- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	67,74	67,74	Tetap	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	13,00	13,00	Tetap	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						
<i>KECAMATAN</i>						

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
<i>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>						
- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
<b>C. ASPEK DAYA SAING</b>						
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,87	50,87	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	100,00	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	72,69	72,69	Tetap	Tujuan Kota	Kota
- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,43	9,43	Tetap	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET		KETR.	JENIS INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023			
- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Tetap	IKU Kota	Kota
- Indeks Kualitas Air	indeks	35,36	35,36	Tetap	IKU Kota	Kota
- Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	Tetap	IKU Kota	Kota
- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	7,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	Tetap	IKU Kota	Kota
- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	91,11	91,11	Tetap	IKU Kota	Kota
- Indeks SPBE	indeks	2,95	2,95	Tetap	IKU Kota	Kota
- IKM Kota	persen	83,64	83,64	Tetap	IKU Kota	Kota
- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,00	96,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Indeks Merit System	indeks	240,00	240,00	Tetap	IKU Kota	Kota
- Nilai SAKIP Kota	skor	74,57	74,57	Tetap	IKU Kota	Kota
- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	WTP	Tetap	IKU Kota	Kota
- Maturitas SPIP	nilai	3,40	3,40	Tetap	IKU Kota	Kota
- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	5,00	5,00	Tetap	IKU Kota	Kota

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2023

**Tabel 6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023**

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
<b>Dinas Pendidikan</b>					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	83,97	83,97	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Kesehatan</b>					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	persen	90,00	90,00	Tetap
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	persen	80,00	80,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	persen	94,00	94,00	Tetap
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	persen	96,00	96,00	Tetap
	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	persen	96,00	96,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	persen	92,00	92,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>RSUD</b>					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	65,00	65,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	45,00	45,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	persen	93,10	93,10	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	persen	88,39	88,39	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	40,00	40,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	11,07	11,07	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	68,47	68,47	Tetap
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	17,84	17,84	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	83,30	83,30	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	13,20	13,20	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50,00	50,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	91,35	91,35	Tetap
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	291,47	291,47	Tetap
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	1.856,41	1.856,41	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14,48	14,48	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	persen	64,00	64,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>					
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	persen	58,00	58,00	Tetap
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	persen	56,69	56,69	Tetap
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	persen	7,80	7,80	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	persen	15,00	15,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	0	20	Berubah
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	persen	40,95	40,95	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2,92	2,92	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	13,33	13,33	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	16,67	16,67	Tetap



NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50,00	50,00	Tetap
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75,00	75,00	Tetap
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	persen	0,28	0,28	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	83,53	83,53	Tetap
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	93,55	93,55	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	9,00	9,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	persen	5,55	5,55	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	persen	23,99	23,99	Tetap
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	persen	33,33	33,33	Tetap
	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	persen	50,00	50,00	Tetap
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	persen	59,26	59,26	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	persen	96,35	96,35	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Perhubungan</b>					
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	92,00	92,00	Tetap
	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0,44	0,44	Tetap
	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0,75	0,75	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>					
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3,00	3,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	persen	2,80	2,80	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	1,00	Tetap
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2.500,00	2.500,00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	6,68	6,68	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>					
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	16,09	16,09	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	persen	46,67	46,67	Tetap
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	45,00	45,00	Tetap
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	1,00	1,00	Tetap
	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	1,00	1,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	1,00	1,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12,20	12,20	Tetap
	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	2,00	2,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga</b>					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	persen	93,69	93,69	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	34,29	34,29	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	persen	92,20	92,20	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	persen	4,66	4,66	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	persen	11,00	11,00	Tetap
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	persen	31,98	31,98	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	30,30	30,30	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	40,00	40,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4,40	4,40	Tetap
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100,00	100,00	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	83,20	83,20	Tetap
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian per tahun	Miliar Rupiah	55,67	55,67	Tetap
	Nilai produksi peternakan per tahun	Miliar Rupiah	191,91	191,91	Tetap
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5,00	5,00	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	50,00	50,00	Tetap
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5,00	5,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	30,94	30,94	Tetap
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	58,31	58,31	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12,06	12,06	Tetap
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	75,42	75,42	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	81,25	81,25	Tetap
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	persen	88,00	88,00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	7,60	7,60	Tetap
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	77,99	77,99	Tetap
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	4,26	4,26	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>					
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	persen	0,42	0,42	Tetap
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	23,93	23,93	Tetap
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	46,80	46,80	Tetap
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	20,43	20,43	Tetap
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	24,00	24,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap



NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6,00	6,00	Tetap
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Sekretariat DPRD</b>					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
DAN FUNGSI DPRD	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>					
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100,00	100,00	Tetap
	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	73,00	73,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	82,23	82,23	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah</b>					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	persen	8,08	8,08	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	persen	5,00	5,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS berkembang karier	persen	50,00	50,00	Tetap
	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90,00	90,00	Tetap
	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	80,00	80,00	Tetap
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
<b>Inspektorat Daerah</b>					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85,00	85,00	Tetap
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	nilai	3,00	3,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Kecamatan Pekalongan Utara</b>					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Kecamatan Pekalongan Selatan</b>					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Kecamatan Pekalongan Barat</b>					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Kecamatan Pekalongan Timur</b>					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen	100,00	100,00	Tetap
<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>					
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16,00	16,00	Tetap

NAMA OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
			RKPD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100,00	100,00	Tetap
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	100,00	Tetap
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100,00	100,00	Tetap

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2023

#### 4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan arah kebijakan Nasional tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.6 berikut.

**Tabel 4.8 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional**

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
				4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM Berdaya Saing	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
				3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
				5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
				9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing



PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
				7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
				12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2022

Keterkaitan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pekalongan juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Peraturan Presiden ini ditetapkan didasarkan kondisi bahwa percepatan pembangunan ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan terpadu antar sektor, antar program, dan antar wilayah.

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 19 usulan program/kegiatan di Kawasan Petanglong dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp 6.430 M. Adapun dari 19 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 15 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp 4.100 M; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp 630 M; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp 200 M; dan (4) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp1.500 M. Program/kegiatan di Kawasan Petanglong yang terkait atau berdampak langsung dengan wilayah Kota Pekalongan, meliputi:

- a. Pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan
- b. Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/ Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan

- c. Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab.Pekalongan dan Kota Pekalongan
- d. Pengendalian banjir dan rob, Kota Pekalongan dan Kab. Batang
- e. Penyempurnaan sistem banjir dan rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan
- f. Pengembangan SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan
- g. Pembangunan TPST Regional, Kab. Pekalongan
- h. Pengembangan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan, Kota Pekalongan
- i. Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak, Kota Pekalongan.

Upaya penanganan banjir dan rob di wilayah Kota Pekalongan telah, sedang dan akan terus dilaksanakan. Pada beberapa tahun lalu, Pemerintah Pusat telah membangun tanggul laut di wilayah Kota Pekalongan. Upaya penanganan banjir dan rob oleh Pemerintah Pusat saat ini terus dilanjutkan, terutama pembangunan bendung gerak, pembangunan *seawall* dan pembangunan parapet, yang diintegrasikan rencana pembangunan pelabuhan onshore. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Pusdataru, Pemerintah Kota Pekalongan dan Program KOTAKU juga terus diarahkan dalam penanganan banjir dan rob yang disinkronkan dengan Pemerintah Pusat.

Pembangunan SPAM Regional Petanglong terus dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air minum Kota Pekalongan karena keterbatasan sumber air baku di wilayah Kota Pekalongan.

Pengembangan TOD Stasiun Pekalongan saat ini telah disusun Desain Pengembangan TOD Center dan menunggu untuk tahapan selanjutnya yang rencananya akan dilaksanakan oleh BUMN. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PT. KAI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian PUPR. Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak, Kota Pekalongan saat ini telah disusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), selanjutnya menunggu untuk tahapan berikutnya.

Seluruh rencana implementasi program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tersebut, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, sekaligus mendorong penanganan banjir dan rob serta penyediaan prasarana sarana perkotaan yang semakin berkualitas di Kota Pekalongan. Penanganan banjir dan rob serta peningkatan infrastruktur dasar perkotaan merupakan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan. Peran Kota Pekalongan, dalam lingkup internal maupun eksternal, sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi program dan kegiatan tersebut.

#### 4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses, selanjutnya ditelaah dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam aspek politis. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pekalongan untuk RKPD Tahun 2023 meliputi :

1. Bidang Pendidikan
  - a. Peningkatan kualitas
  - b. Penyesuaian sistem pendidikan pasca *COVID-19*
  - c. Pengembangan pendidikan
  - d. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah (rob)
2. Bidang Kesehatan
  - a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan

- b. Peningkatan pelayanan RSUD Bendan
  - c. Peningkatan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat
  - d. Menekan jumlah bayi gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi/balita
  - e. Kewaspadaan penyakit menular
3. Bidang Ekonomi Sosial
- a. Pelatihan dan *workshop* berbasis IT
  - b. Penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial
  - c. Pengembangan sektor ekonomi kreatif
  - d. Menyediakan kesempatan kerja
  - e. Penanggulangan bahaya narkoba
  - f. Penegakan peraturan perundang-undangan
  - g. Tanggap & paska bencana
4. Bidang Infrastruktur
- a. Peningkatan keamanan akses jalan
  - b. Pembangunan pasar Banjarsari
  - c. Pembangunan drainase, normalisasi sungai
  - d. Fungsi infrastruktur lingkungan permukiman
  - e. Pelayanan pengolahan air limbah domestik
5. Bidang Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum
- a. Penertiban pengamen dkk
  - b. Pelayanan pencegahan banjir
  - c. Penataan perparkiran
  - d. Penataan pedagang K5
  - e. Penertiban praktik judi
6. Bidang Permukiman
- a. Program pembersihan permukiman
  - b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah
  - c. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi relokasi
  - d. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
- a. Penyusunan APBD dilakukan dengan tepat waktu
  - b. Peningkatan kapasitas ASN

#### 4.2.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan Daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Walikota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Perencanaan, Kelembagaan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Sanksi Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Peraturan Walikota tersebut akan mendorong inovasi kebijakan Pembangunan dengan merumuskan ruang lingkup Sistem Inovasi Daerah yang lebih terarah. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Kota Pekalongan telah merumuskan Road Map SIDA yang melingkupi Kondisi SIDA saat ini, Tantangan dan peluang SIDA, Kondisi SIDA yang akan dicapai, Strategi dan Arah Kebijakan SIDA dan Rencana aksi penguatan SIDA.

Selanjutnya, telah dirumuskan juga kelembagaan SIDA yang mengatur pembentukan Tim Penguatan SIDA, dengan ruang lingkup tugas antara lain, mengintegrasikan program inovatif SIDA dengan RPJMD,, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA, mempersiapkan rumusan kebijakan penyelenggaraan SIDA, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan SIDA, melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan SIDA.

Dalam hal penyelenggaraan SIDA, Peraturan Walikota memperkuat munculnya Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Adanya kebijakan tersebut akan mendorong munculnya inovasi kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah dan keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat.

Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan) dan pengelolaan fungsi manajemen (sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja).

Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi. Inovasi ini dimaksud untuk mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Lebih lanjut, seluruh rangkaian inovasi ini akan dilakukan proses evaluasi penyelenggaraan SIDA secara rutin. Evaluasi Penyelenggaraan SIDA dilakukan melalui penilaian kapasitas inovatif daerah. Penilaian kapasitas inovatif dilaksanakan guna mengetahui capaian implementasi program inovatif SIDA dan sebagai tolak ukur kemajuan SIDA. Pelaksanaan penilaian kapasitas inovatif daerah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, industri/UMKM, dan masyarakat.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga focus menyelenggarakan fungsi kelitbang pada tema-tema strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan kota. Penyelenggaraan fungsi litbang ini dilakukan melalui tema yang dikompetisikan dalam Riset Unggulan Daerah dengan mengambil isu strategis pada Tahun Perencanaan N+1. Pada Tahun 2022, telah dikompetisikan tema riset tentang penanganan banjir dan rob,

peningkatan kualitas air hidup, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Diharapkan dengan tema tersebut, kebijakan yang diambil telah berdasarkan riset yang cukup aktual.

Inovasi Kebijakan Pembangunan juga sedang dirintis melalui kegiatan riset bersama, yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Seiring dengan penyusunan perencanaan Tahun 2023 tentang berbagai program infrastruktur, Pemerintah Kota Pekalongan sedang menjajagi riset tentang mitigasi lahan pertanian pasca banjir dan rob, adaptasi dan mitigasi masyarakat kawasan terdampak banjir dan rob, pengolahan limbah batik melalui teknologi inovatif, dan lain-lain. Hal ini diperlukan sehingga ketika program infrastruktur telah dilaksanakan secara maksimal, proses selanjutnya bersama masyarakat telah siap diimplementasikan karena telah didukung dengan riset yang matang. Tidak hanya melalui riset unggulan dan riset bersama, dorongan inovasi kebijakan pembangunan juga dilakukan dalam perwujudan program unggulan atau program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026.

Kota Pekalongan juga berusaha mendukung inovasi yang sudah disusun dengan menerapkannya secara berkelanjutan, dimana inovasi yang masih relevan akan terus digunakan dan dikembangkan lebih lanjut di tahun 2023, antara lain:

1. SIMANTAP BISA (Sistem Informasi Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis E-Presensi dan E-Kinerja) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, yang dikembangkan BKPSDM di Tahun 2021 masih relevan digunakan pada Tahun 2023 dengan pengembangan fitur-fitur lainnya serta penyesuaian pada aturan kepegawaian yang berlaku.
2. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa (SIM PBJ), yang disusun oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2020, masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan serta disesuaikan dengan update peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku saat ini.
3. Omahe Ndewe, Inovasi yang disusun di Tahun 2022 dan telah digunakan dalam pendataan rumah khususnya pada data infrastruktur, rencananya akan dikembangkan lebih lanjut di tahun 2023 untuk pendataan sosio-ekonomi dengan menggunakan basis data rumah yang telah didata di tahun 2022. Selanjutnya, secara bertahap pendataan mikro pada jenis data lainnya dapat dikembangkan melalui penambahan variable.
4. Aplikasi e-UMK (e-Uang Muka Kegiatan) yang pengembangannya dilakukan di tahun 2021, masih akan digunakan dan dikembangkan fitur-fiturnya lebih lanjut sesuai kebutuhan dan peraturan keuangan yang berlaku. Diharapkan juga aplikasi ini dapat digunakan oleh OPD lain untuk memudahkan bendahara dan bendahara pembantu dalam hal pengadministrasian kegiatan, dan memudahkan PPTK dan PA dalam monitoring capaian anggaran kegiatan.
5. Tools Cascading Kinerja, yang pada Tahun 2021 dalam rangka penyusunan struktur kinerja dari Visi-Misi Walikota sampai dengan sub kegiatan pada OPD, masih akan dikembangkan lebih lanjut pada fitur evaluasinya, tidak hanya pada aspek perencanaan. Hal ini akan mempermudah proses evaluasi atas kinerja dalam laporan kinerja kepala daerah ataupun kepala OPD.
6. Aplikasi Peminjaman Ruang Setda, yang disusun Bagian Umum Setda, masih relevan untuk pengelolaan peminjaman ruang di lingkungan Setda dan akan dikembangkan lebih lanjut pada peminjaman kendaraan, dan aset-aset setda lainnya sehingga dapat menunjang pelaksanaan koordinasi antar OPD menjadi lebih baik.
7. Aplikasi SISTRAMAS yakni aplikasi Pelayanan Tramtibumlinmas yang disusun Satpol PP pada tahun 2021 untuk memfasilitasi koordinasi, komunikasi dan sinergi

antar stakeholder tramtibumlinmas (Satpol PP, Kasi TRamtib Kecamatan, Kasi Tramtib Kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, Kader Siaga Tramtib, Linmas Kelurahan, Polsek, Koramil, dll), akan dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas, misalnya terkait pelaporan gangguan anak-anak punk, anak jalanan, ODGJ serta diintegrasikan dengan sistem pengaduan tingkat kota ( call center 112). .

8. SIMPOKAL (Sistem Manajemen Parkir Online Kota Pekalongan), yang disusun di tahun 2021 oleh Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan bank Jateng masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan di tahun 2023. Hal ini dilakukan karena system ini sudah mempermudah pelayanan dan terintegrasi dengan baik secara teknologi informasi maupun fasilitas perbankannya.
9. SIPEPOKMAS, merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2021. Inovasi ini mempermudah penyebaran dan pemantauan harga pokok ke masyarakat. Inovasi ini masih relevan untuk dipertahankan dan diperluas jangkauan layanannya di tahun 2023, sesuai dengan kebutuhan dan target pelayanannya.
10. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Pekalongan, merupakan inovasi perluasan fitur JDIH di Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan di Tahun 2021. Inovasi ini cukup membantu pelayanan penyebaran informasi hukum pada masyarakat sehingga inovasi ini relevan untuk dipertahankan/dikembangkan serta diintegrasikan dengan system informasi lain di Bagian Hukum Setda.
11. SIEMON-KIR / SIM-PKB, merupakan inovasi dari Dinas Perhubungan pada tahun 2021. Layanan ini mempermudah proses KIR atau Pengujian Kendaraan Bermotor bagi masyarakat Kota Pekalongan. Layanan ini penggunaanya cukup luas dan berpengaruh terhadap PAD sehingga inovasi ini relevan untuk dipertahankan di tahun 2023 serta dapat dikembangkan atau diperluas lagi sasaran sesuai dengan kebutuhan pada tahun-tahun mendatang.
12. Klinik SPIP adalah klinik konsultasi di Inspektorat yang disusun di tahun 2022, masih akan dikembangkan dengan memperluas cakupan dan materi layanan inspektorat selain SPIP.
13. Pelayanan Jasa Kependidikan Bagi Guru TPQ dan Madin di Kota Pekalongan merupakan inovasi pelayanan oleh bagian kesejahteraan umum sekretariat daerah Kota Pekalongan. Pelayanan jasa kependidikan bagi guru TPQ dan Madin di Kota Pekalongan dapat dilakukan secara online sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan. Guru TPQ dan Madin dapat mengajukan proposal permohonan intensif jasa secara online, yang kemudian akan diproses oleh petugas.
14. SAPA ORGANISASI adalah inovasi dari bagian organisasi untuk pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait tata laksana organisasi perangkat daerah dan kegiatan teknis lainnya dari bagian organisasi dengan tidak bertatap muka langsung namun melalui aplikasi website.
15. Sistem Informasi Nomor Register (sinoreg) adalah sistem pemberian nomor regulasi produk hukum di kota pekalongan, digunakan oleh internal bagian hukum, sistem ini juga akan bisa melacak proses penyusunan SK, perwal dan perda oleh OPD, sehingga dapat ditelusur status pemrosesan dokumen.
16. E-TPI merupakan aplikasi yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan bekerjasama dengan Bank Jateng. Dengan aplikasi e-tpi pembayaran retribusi kapal dan peserta lelang di TPI kota Pekalongan menjadi lebih teratur dan



lebih tercatat, sehingga tidak hanya mempermudah pembayaran tapi juga meminimalkan penyalahgunaan.

17. e-Monitoring Pajak Daerah (EMot PakDe) yang merupakan inovasi dari BPKAD di tahun 2020 untuk monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti: tapping box dan sejenisnya. Inovasi ini masih relevan dan masih akan dikembangkan untuk penambahan fitur dan peraturan yang lebih tinggi sehingga keterjangkauan layanan dapat menjadi lebih luas.
18. Layanan Konseling Pendidikan (LAKONDIK) yang merupakan salah satu inovasi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tahun 2020 untuk memberikan layanan untuk membantu pemenuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus, masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut melalui perluasan stakeholder dan tambahan sasaran penggunaannya. Dengan pelibatan sumber daya manusia berupa tenaga pegawai sebagai Guru Pendamping Khusus, mitra psikolog, lembaga kesehatan, dan dinas terkait yang lebih luas. juga sumber daya fasilitas berupa ruang konseling, ruang baca masyarakat dan ruang laktasi.
19. Dolan PAUD (Wadol Anak PAUD) merupakan Inovasi dari Dinas Pendidikan, yang artinya berkunjung atau bermain ke PAUD, yakni Kunjungan Bunda PAUD, Tim PAUD tingkat kota dan OPD ke sekolah PAUD di Kota Pekalongan untuk menerima keluhan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran di tingkat PAUD.
20. Wadul Aladin (Wadul Aaf Salahudin) yang merupakan layanan pengaduan langsung ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dikembangkan Diskominfo pada Tahun 2021 masih dinilai sangat relevan untuk digunakan di Tahun 2023. Hal ini disebabkan popularitas penggunaannya yang cukup tinggi.
21. Si BEMBI naik BEMO merupakan aplikasi yang disusun RSUD pada tahun 2021, melalui pengembangan terbaru adanya penambahan menu panggilan darurat yang langsung terhubung ke call center BEMBI (*Bendan Emergency Mobile*) yaitu merupakan layanan penjemputan pasien gawat darurat oleh tenaga yang berkompeten dimana pasien dijemput dengan ambulance BEMBI, langsung ditangani kegawatan ditempat untuk selanjutnya dibawa ke IGD RSUD Bendan. Aplikasi ini masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan lebih lanjut mengingat respon penerima manfaat cukup baik dan jumlahnya cukup banyak.
22. Tombol Panik Ambulance Rakyat (*Panic Button*) yang dibangun tahun 2021 merupakan aplikasi berbasis android untuk peningkatan layanan kegawatdaruratan medis dengan menggunakan tombol panik yang keberadaannya merupakan Sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta di Kota Pekalongan. Aplikasi ini masih relevan untuk digunakan dan dikembangkan melalui penambahan fitur sesuai dengan kebutuhan
23. E-Rekam Medis, yang merupakan aplikasi yang dikembangkan RSUD Bendan pada tahun 2021 sebagai upaya pelayanan kepada pasien dan dokter di lingkungan RSUD Bendan. Inovasi ini digunakan pada seluruh pasien sehingga kemanfaatan penggunaannya cukup luas. Hal ini relevan untuk dipertahankan serta dikembangkan fitur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
24. Saber AKI-AKB (Sapu Bersih Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi), yang merupakan inovasi kebijakan yang dibangun di Tahun 2020, merupakan inovasi yang cukup membantu pengurangan kasus kematian ibu dan bayi melalui screening atau pemeriksaan yang terintegrasi antar stakeholder. Inovasi ini masih relevan untuk

- dipertahankan dan dikembangkan serta diperluas jaringannya, sehingga kemanfaatan yang diterima masyarakat lebih luas jangkauannya.
25. Aplikasi Siulan Mas (Sistem Informasi Usulan dan Pengaduan Masyarakat), yang dikembangkan di Tahun 2021 untuk meringkas alur birokrasi penanganan pengaduan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Sosial. Aplikasi ini masih relevan dipertahankan penggunaan dan pengembangan fitur-fitur baru sesuai kebutuhan.
  26. Layanan APEL JOS yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2021 untuk Layanan jemput bola KTP Elektronik untuk Anak Sekolah/ Pelajar, Jompo dan Orang Sakit/Difabel) ini untuk membantu penduduk yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan KTP Elektronik. Layanan ini masih relevan untuk dipelihara keberlanjutannya untuk mempermudah pelayanan public bagi semua kalangan.
  27. Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas & Ekonomis (SAKPORE) yang dibangun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekalongan akan dikembangkan menjadi new SAKPORE (mulai tahun 2022) dengan fitur-fitur baru yang bermanfaat seperti: Peta Tata Ruang, Peta Reklame, Survey Online, Notifikasi Whatsapp gateway, terintegrasi dengan SisDMK Kementerian Kesehatan RI, Pengaduan Online dan Tanda Tangan Elektronik.
  28. Si AaP yang merupakan inovasi Siap Antar Pelayanan (Si\_aAP ) dari Kecamatan Pekalongan Barat di tahun 2021 masih akan digunakan dan diperluas lagi jangkauan pelayanannya.
  29. Ra Kesel M'laku (ApaRAt KEcamatan SELatan Memberikan LAYanan Antar DoKUMen) yang dikembangkan di Tahun 2021, merupakan layanan dari kecamatan Pekalongan Selatan dalam mengantar jemput dokumen administrasi bagi masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan masih akan digunakan dan diperluas lagi jangkauan pelayanannya.
  30. SeBaR\_in merupakan inovasi non digital dari Kecamatan Pekalongan Barat di tahun 2021 untuk menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Pekalongan Barat dan kelurahan-kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat selama sepekan. Penyebarluasan informasi ini sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam tugas-tugas kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan publik. Inovasi ini masih akan digunakan dan diperluas lagi jangkauan pelayanannya.
  31. Silancar = SI AAP Lacak & Antar adalah inovasi pelayanan oleh Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2022 untuk mempermudah layanan adminduk dan non adminduk bagi warga di Kecamatan Pekalongan Utara dan memantau progress layanan secara online. Inovasi masih relevan dan akan dikembangkan lebih lanjut fitur-fiturnya di Tahun 2023.
  32. Rekom BBM, yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Tahun 2022 merupakan inovasi non digital yang mempermudah dan mempercepat nelayan untuk mendapat pelayanan mendapatkan surat Rekom Pembelian Jenis BBM Tertentu dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku tanpa dipungut biaya (gratis). Inovasi ini relevan untuk dikembangkan lebih lanjut.
  33. Oops Mami (Omah Olah Pilah Sampah MANDiri dan berekonoMi), yang dikembangkan di Tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah sekaligus mengembangkan nilai ekonomi atas sampah. Inovasi ini sangat penting untuk dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut mengingat problematika sampah di Kota Pekalongan sudah krusial.



34. Esa Pertama Kuljar merupakan inovasi kebijakan untuk penerapan kultur jaringan di Kota Pekalongan di tahun 2020 yang dikembangkan di Dinas Pertanian dan Pangan. Inovasi ini masih relevan untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
35. Bank Pekalongan sebagai salah satu BUMD Kota Pekalongan terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan sistem android untuk mempercepat pelayanan dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Salah satunya yaitu dengan Virtual Account (VA) Bank Pekalongan untuk mempermudah transaksi nasabah dari Bank Umum dan penggunaan QRIS Bank Pekalongan untuk pembayaran non tunai diberbagai macam tempat.
36. E-ticketing Museum Batik adalah sistem penjualan tiket secara online, menggunakan aplikasi sehingga penjualan tiket museum batik lebih terpantau dan dapat meningkatkan jumlah pengunjung karena kemudahan membeli tiket.
37. QRIS ticket Museum Batik adalah metode pembayaran non tunai untuk pembelian tiket di museum batik, dapat meminimalkan penyalahgunaan penjualan tiket dan mempermudah pengunjung untuk pembelian tiket.
38. E-catalog Museum Batik merupakan upaya dari museum batik untuk membuat data base koleksi benda – benda yang terdapat didalam museum batik Kota Pekalongan. E-katalog ini dapat mempermudah akses bagi pengunjung untuk melihat koleksi museum batik secara online.
39. SIPOLOMAS (Sistem Informasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membuat database Partai Politik dan Organisasi Masyarakat (sebagai sarana interkoneksi beberapa SKPD) dan meningkatkan pelayanan proses pembuatan ijin pendirian partai politik dan organisasi masyarakat.

Sebagai sebuah inovasi kebijakan, dukungan atas pelaksanaan ini dilakukan secara terencana dimana setiap tahun OPD terkait mendapatkan dukungan pendanaan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, ataupun koordinasi lainnya. Diharapkan inovasi ini terus ditingkatkan ruang lingkup data yang diintegrasikan, sehingga dapat terwujud data yang berkualitas, single, dapat dipertanggung jawabkan dan bernilai manfaat yang luas.

# BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Indikasi rencana program Tahun 2023 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2023, yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

## 5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023

---

### 5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### 5.1.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase capaian SPM pendidikan sebesar 83,97 persen.

##### 2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100 persen.

##### 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100 persen.

#### 5.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan ketersediaan sarpras dan alat kesehatan di RSUD, penyediaan layanan kesehatan masyarakat di Puskesmas, dan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP

rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 90 persen, persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen, dan persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar sebesar 80 persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 65 persen, persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota sebesar 100 persen.

## **2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 94 persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 45 persen.

## **3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

Fokus program adalah pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 persen, persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran sebesar 96 persen, dan persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 96 persen.

## **4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Fokus program adalah peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase rumah tangga sehat sebesar 92 persen.

### **5.1.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Fokus program adalah pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air dalam rangka pengendalian banjir dan rob, serta pembentukan, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan pengelola sumber daya air di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 93,10 persen.

#### **2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Fokus program adalah penguatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan perluasan SPAM Jaringan Perpipaian di kota, untuk memperluas pelayanan Sambungan Rumah (SR). Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 88,39 persen.

#### **3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**

Fokus program adalah pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan persampahan dalam rangka menaikkan penanganan dan pengurangan sampah, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan sarana persampahan regional sebesar 40 persen.

#### **4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Fokus program adalah pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah dalam rangka menaikkan cakupan layanan layak dan cakupan layanan aman, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola air limbah di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*) sebesar 11,07 persen.

#### **5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Fokus program adalah pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi system drainase perkotaan dan drainase lingkungan, dalam rangka mengurangi luasan genangan, serta pembentukan, pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan pengelola drainase di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 68,47 persen.

#### **6. Program Penataan Bangunan Gedung**

Fokus program adalah penyelenggaraan perijinan bangunan gedung, guna terpenuhinya keandalan konstruksi bangunan gedung dan kelaikan fungsi bangunan gedung, dengan didukung oleh SDM penyelenggara bangunan gedung yang profesional. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio kepatuhan PBG kab/kota sebesar 17,84 persen.

#### **7. Program Penyelenggaraan Jalan**

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan kota untuk menaikkan tingkat kemantapannya. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kemantapan jalan kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 83,30 persen.

#### **8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan tenaga konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio tenaga bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 13,20 persen.

#### **9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Fokus program adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) dan legalisasi melalui Peraturan Walikota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penetapan rencana tata ruang kab/kota sebesar 100 persen.

##### **5.1.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pengembangan Perumahan**

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), masyarakat terdampak bencana dan terdampak pembangunan infrastruktur kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan rumah layak huni sebesar 91,35 persen.

#### **2. Program Kawasan Permukiman**

Fokus program adalah pengurangan luasan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu luas kawasan permukiman kumuh sebesar 291,47 hektar.

### **3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**

Fokus program adalah pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru diluar kawasan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 1.856,41 hektar.

### **4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

Fokus program adalah penyediaan PSU perumahan untuk mendukung aktifitas sehari-hari penghuni perumahan. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 14,48 persen.

#### **5.1.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perda dan perkara yang ditegakkan (IKK *Outcome*) sebesar 64 persen.

##### **2. Program Penanggulangan Bencana**

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

##### **3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

#### **5.1.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pemberdayaan Sosial**

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 58 Persen.

##### **2. Program Rehabilitasi Sosial**

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

##### **3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Fokus program adalah peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial sebesar 56,69 persen.

#### **4. Program Penanganan Bencana**

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100 persen.

#### **5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pemeliharaan taman makam pahlawan sebesar 100 persen.

### **5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

#### **5.1.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Fokus program adalah peningkatan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan penganggur dan perawatan alat-alat pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 0,42 persen.

##### **2. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 23,93 persen.

##### **3. Program Hubungan Industrial**

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 46,80 persen.

#### **5.1.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan kabupaten/kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 5,55 persen.

##### **2. Program Perlindungan Perempuan**

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.

Indikator yang akan dicapai yaitu rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 23,99 persen.

### **3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) sebesar 33,33 persen.

### **4. Program Perlindungan Khusus Anak**

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 persen.

#### **5.1.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,40 persen.

##### **2. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

##### **3. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 83,20 persen.

#### **5.1.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 persen.

##### **2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**

Fokus program adalah koordinasi dan tindak lanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tindak lanjut penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebesar 50 persen.

#### **5.1.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



### **1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Fokus program adalah penyusunan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) atas dokumen perencanaan jangka panjang/menengah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebesar 20 persen.

### **2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Fokus program adalah peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah limbah yang diolah sebesar 40,95 persen.

### **3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Fokus program adalah peningkatan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,919 persen.

### **4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 13,33 persen.

### **5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Fokus program adalah fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 16,67 persen.

### **6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi lingkungan hidup sebesar 50 persen.

### **7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 75 persen.

### **8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.



## **9. Program Pengelolaan Persampahan**

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengelolaan sampah sebesar 0,28 persen.

### **5.1.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pendaftaran Penduduk**

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai yaitu rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 83,53 persen.

#### **2. Program Pencatatan Sipil**

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai yaitu rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 93,55 persen.

#### **3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebanyak 9 OPD.

### **5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 50 persen.

#### **2. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang) sebesar 59,26 persen.

#### **3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96,35 persen.

### **5.1.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pengendalian Penduduk**

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100 persen.

## **2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai yaitu penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 7,80 persen.

## **3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai yaitu *Unmeet Need* KB sebesar 15 persen.

### **5.1.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Fokus program adalah peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 92 persen, kinerja lalu lintas kab/kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,44, persentase peningkatan jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 0,75 persen.

### **5.1.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik**

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 persen.

#### **2. Program Aplikasi Informatika**

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerintahan, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai yaitu indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi dengan indeks sebesar 3,00.

### **5.1.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 30,94 persen.

#### **2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 58,31 persen.

### **3. Program Pengembangan UMKM**

Fokus program adalah pengembangan UMKM menjadi lebih mandiri dan peningkatan omzet UMKM. Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya usaha mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 12,06 persen.

#### **5.1.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu penambahan peraturan fasilitas/insentif di Bidang penanaman modal yang Menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sebesar 1 dokumen.

##### **2. Program Promosi Penanaman Modal**

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sebesar 100 persen.

##### **3. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 2.500 dokumen.

##### **4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai investasi baru pertahun sebesar Rp.6.680.000.000.

##### **5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota sebesar 100 persen.

#### **5.1.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase organisasi kepemudaan yang dibina sebesar 93,69 persen.

##### **2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan sarpras olahraga sesuai jenis cabor sebesar 34,29 persen.

#### **5.1.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor**

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 persen.

#### **5.1.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan sebesar 2,80 persen.

#### **5.1.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pengembangan Kebudayaan**

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase *event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

##### **2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

##### **3. Program Pembinaan Sejarah**

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya sebesar 100 persen.

##### **4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat pelestarian cagar budaya (IKK *Outcome*) sebesar 92,20 persen.

##### **5. Program Pengelolaan Permuseuman**

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengunjung museum batik sebesar 4,66 persen.

#### **5.1.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pembinaan Perpustakaan**

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan

khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio pengunjung perpustakaan per tahun (penduduk usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 16,09.

#### **5.1.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pengelolaan Arsip**

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 46,67 Persen dan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 45,00.

##### **2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

#### **5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

##### **5.1.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Fokus program adalah peningkatan produksi perikanan tangkap, dengan menaikkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, pemberdayaan nelayan kecil, serta kesiapan berperan serta dalam pembangunan Pelabuhan Perikanan *on shore*. Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI sebesar 1 persen dan peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar 1 persen.

##### **2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Fokus program adalah peningkatan produksi perikanan budidaya, dengan penyediaan sarana-prasarana pembudidayaan ikan, pemberdayaan pembudi daya kecil, serta penyiapan diversifikasi produk perikanan. Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 1 persen.

##### **3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan jumlah pengusaha perikanan sebesar 12,20 persen dan pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2 pelaku usaha.

### 5.1.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah peningkatan pengelolaan destinasi, serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 11 persen.

#### 2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 31,98 persen.

#### 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspressi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 30,30 persen.

#### 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 40 persen.

### 5.1.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55.671.720.000 dan nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 191.907.000.000.

#### 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

#### 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5 persen.

#### 4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100 persen.

## **5. Program Perizinan Usaha Pertanian**

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 50 persen.

## **6. Program Penyuluhan Pertanian**

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

### **5.1.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 75,42 persen.

#### **2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 81,25 persen.

#### **3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya sebesar 88 persen.

#### **4. Program Pengembangan Ekspor**

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan volume ekspor sebesar 7,60 persen.

#### **5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**

Fokus program adalah pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 77,99 persen.

#### **6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK *Output*) sebesar 4,26 persen.

### **5.1.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



### **1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 20,43 persen.

### **2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 24 persen.

### **3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui sistem informasi industri nasional. Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

## **5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

### **5.1.4.1. Sekretariat Daerah**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai yaitu penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100 persen, persentase raperda menjadi peraturan daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100 persen, dan persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen.

#### **2. Program Perekonomian Dan Pembangunan**

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, pertanian, perikanan, kelautan, ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100 persen, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 6 persen, dan persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa sebesar 100 persen.

### **5.1.4.2. Sekretariat DPRD**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitas anggota legislatif dan fasilitasi penjangkauan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perda yang ditetapkan sebesar 100 persen dan persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen.



## **5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **5.1.5.1. Perencanaan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 persen, persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100 persen, dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 persen.

#### **2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemsosbud sebesar 100 persen, persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian sebesar 100 persen, dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur wilayah sebesar 100 persen.

### **5.1.5.2. Keuangan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, Indikator yang akan dicapai yaitu rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 8,08 persen.

#### **2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu indeks pengelolaan aset baik (persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

### **3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 5 persen.

#### **5.1.5.3. Kepegawaian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Kepegawaian Daerah**

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan *assessment center*, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase PNS berkembang karier sebesar 50 persen, tingkat pelaporan kinerja ASN sebesar 100 persen, persentase keterisian jabatan sebesar 90 persen, dan persentase keterpenuhan formasi ASN sebesar 80 persen.

#### **5.1.5.4. Pendidikan Dan Pelatihan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100 persen.

#### **5.1.5.5. Penelitian Dan Pengembangan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**

Fokus program adalah pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbangan, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase litbang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD sebesar 100 persen, skor capaian nilai RiDA (SiDA) sebesar 73 persen, dan persentase pemberdayaan *stakeholder* kelitbangan sebesar 100 persen.

### **5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

#### **5.1.6.1. Inspektorat Daerah**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85 persen.

## **2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu level kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 3,00.

### **5.1.7. Unsur Kewilayahan**

#### **5.1.7.1. Kecamatan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah timur sebesar 100 persen.

##### **2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah timur sebesar 100 persen, serta persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

##### **3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja trantibum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja trantibum wilayah timur sebesar 100 persen.

##### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan di kecamatan). indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah timur sebesar 100 persen.

### **5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum**

#### **5.1.8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

### **2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16 lembaga.

### **3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen.

### **4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 100 persen.

### **5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100 persen.

## **5.1.9. Non Urusan**

### **5.1.9.1. Non Urusan**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD. indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 persen, persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan,

operasional dan kerumahtanggan sekretariat daerah sebesar 100 persen dan persentase pelayanan keprotokoleran sebesar 100 persen.

Tabel 5.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							247.492.279.000	232.740.615.000	227.268.150.000						279.562.877.000		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	159.435.929.000	156.836.320.000	150.523.492.000					100 persen	167.327.264.000		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	90.550.000	91.750.000	91.750.000					100 persen	149.683.000		
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	2 dokumen	3.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	2 dokumen	2.683.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	84.550.000	85.750.000	85.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	144.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen perhitungan capaian SPM Pendidikan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	157.665.631.000	155.043.922.000	148.726.352.000					100 persen	165.773.986.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		perangkat daerah																
1.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	157.132.881.000	154.506.372.000	148.190.802.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	14 kali	165.241.236.000	Dinas Pendidikan
1.01.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	529.000.000	533.800.000	532.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	529.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3.750.000	3.750.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	1 dokumen	3.750.000	Dinas Pendidikan
1.01.01. 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 persen	<b>88.767.000</b>	<b>101.167.000</b>	<b>101.167.000</b>						100 persen	<b>86.312.000</b>	
1.01.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan				93 laporan	93 laporan	88.767.000	101.167.000	101.167.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	93 laporan	86.312.000	Dinas Pendidikan
1.01.01. 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>9.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>						100 persen	<b>8.632.000</b>	
1.01.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	1 kali	8.632.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	647.272.000	638.472.000	648.777.000					100 persen	559.124.000		
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	10.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	151.772.000	171.772.000	171.772.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	110.124.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				23 unit	18 unit									18 unit		
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	11.000.000	11.000.000	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	11.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	72.000.000	82.000.000	82.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	11 bulan	72.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	13.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	3.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				145 orang/kali	189 orang/kali	145.000.000	145.000.000	159.155.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	189 orang/kali	150.000.000	Dinas Pendidikan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi dukungan SPBE yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	240.000.000	201.200.000	197.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	190.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>664.941.000</b>	<b>686.741.000</b>	<b>666.741.000</b>						100 persen	<b>558.078.000</b>	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	7.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	320.841.000	320.841.000	300.841.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	272.778.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	337.100.000	358.900.000	358.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	278.300.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>269.268.000</b>	<b>269.268.000</b>	<b>283.705.000</b>						100 persen	<b>191.449.000</b>	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	69.268.000	69.268.000	83.705.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	50.449.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				4 unit	4 unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	4 unit	91.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara				12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Dindik	12 bulan	50.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Bangunan Lainnya	rutin/berkala									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen		76,37 persen	83,97 persen	83,97 persen	73.763.780.000	61.554.525.000	61.977.501.000					83,97 persen	96.484.096.000		
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	100 persen		93,49 persen	97,5 persen	97,5 persen	35.767.496.000	26.954.898.000	27.505.299.000					97,5 persen	38.861.916.000		
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas yang dibangun				5 ruang	5 ruang	550.000.000	700.000.000	700.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	5 ruang	0	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah KM/WC SD/MI yang dibangun				4 ruang	3 ruang	573.000.000	342.006.000	342.006.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	3 ruang	1.373.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD/MI yang direhab				7 ruang	8 ruang	6.600.000.000	1.026.552.000	1.026.552.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	3. Pemerataan & pnnktn kompetensi penddk & tenaga	SD	8 ruang	5.749.467.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang kepala SD/MI yang direhab				1 ruang	1 ruang	371.330.000	47.522.000	47.522.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pndkn utk mndkng pndkn kualitas penddkn disrtai pnguatan srtai pndkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	1 ruang	1.660.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SD/MI yang direhab				3 ruang	3 ruang	2.150.000.000	215.000.000	215.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pndkn utk mndkng pndkn kualitas penddkn disrtai pnguatan srtai pndkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	3 ruang	1.500.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah halaman sekolah yang diperbaiki				2 Pekerja an	2 Pekerja an	266.592.000	533.740.000	533.740.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	3. Pemerataan & pndkn	SD	2 Pekerja	555.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
	Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah KM/WC SD/MI yang direhab				5 ruang	5 ruang				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		n			
												DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				5 ruang			
1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga sekolah				71 SD	71 SD	88.750.000	88.750.000	88.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 SD	177.500.000	Dinas Pendidikan	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				71 SD	71 SD	143.650.000	223.650.000	223.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 SD	355.000.000	Dinas Pendidikan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				71 SD	2000 siswa	205.330.000	205.330.000	205.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srt prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	2000 siswa	300.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah SD yang difasilitasi pemeliharaan rutin bangunan gedung sekolah				71 SD	71 SD	710.000.000	710.000.000	710.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srt prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 SD	710.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah				71 SD	5 SD	50.675.000	50.675.000	50.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srt prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter	SD	5 SD	106.500.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
												berlandaskan nilai2 religiusitas.						
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan				3 paket	3 paket	2.156.305.000	375.000.000	375.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrtai pngkatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	3 paket	2.156.305.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD Inklusi yang difasilitasi				4 SD	4 SD	306.000.000	342.200.000	342.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrtai pngkatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	4 SD	306.000.000	Dinas Pendidikan
Jumlah SD/MI yang difasilitasi penyelenggaraan AKM		146 SD	0 SD	0 SD														
Jumlah SD yang difasilitasi penyelenggaraan AKM		0 SD	103 SD	103 SD														
Jumlah siswa yang difasilitasi Assesmen ABK		0 siswa	150 Siswa	150 Siswa														
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan RAPBS				103 SD	103 SD	125.000.000	105.000.000	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrtai pngkatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan,	SD	103 SD	142.000.000	Dinas Pendidikan
Jumlah sekolah yang difasilitasi pemanfaatan rapat pendidikan		103 SD	103 SD	103 SD														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
																kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah ajang apresiasi minat, bakat dan kreatifitas siswa yang diselenggarakan Jumlah lomba pesta siaga tingkat kecamatan yang dilaksanakan Jumlah lomba pesta siaga tingkat kota yang dilaksanakan Jumlah siswa berprestasi yang diberi apresiasi Jumlah siswa dan pelatih yang difasilitasi pelatihan khusus minat, bakat dan kreatifitas				6 kegiatan	5 kegiatan	430.000.000	430.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndng pnnngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	5 kegiatan	580.000.000	Dinas Pendidikan
					10 lomba	10 lomba										10 lomba		
					10 lomba	10 lomba										10 lomba		
					50 siswa	50 siswa										50 siswa		
					30 siswa	30 siswa										30 siswa		
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru pendamping khusus yang difasilitasi jasa pendidik Jumlah pendidik BTQ SD/MI yang difasilitasi bantuan transport Jumlah pengawas BTQ SD/MI yang difasilitasi bantuan transport				4 orang	4 orang	2.356.350.000	2.361.150.000	2.783.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndng pnnngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	4 orang	2.684.800.000	Dinas Pendidikan
					1055 orang	1055 orang										1055 orang		
					32 orang	32 orang										32 orang		
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen sekolah yang diselenggarakan Jumlah Rakor/Raker Pengawas SD yang difasilitasi pelaksanaannya Jumlah SD Penggerak yang difasilitasi Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan PPDB				3 kegiatan	3 kegiatan	256.200.000	258.600.000	258.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndng pnnngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan	SD	3 kegiatan	303.500.000	Dinas Pendidikan
					2 kegiatan	2 kegiatan										2 kegiatan		
					8 sekolah	8 sekolah										8 sekolah		
					103 sekolah	103 sekolah										103 sekolah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah SD yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				103 sekolah	103 sekolah								103 sekolah			
		Jumlah Sekolah yang difasilitasi kegiatan Akreditasi				15 sekolah	103 sekolah								103 sekolah			
		Jumlah Siswa yang difasilitasi Pelatihan Batik				2300 siswa	2300 siswa								2300 siswa			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri yang difasilitasi BOS				103 Sekolah	0 Sekolah	18.370.314.000	18.212.100.000	18.370.501.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	0 Sekolah	12.922.744.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi BOS				0 sekolah	103 Sekolah								103 Sekolah			
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah bimtek/sosialisasi BOS SD yang diselenggarakan				1 kali	1 kali	58.000.000	48.000.000	48.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	1 kali	58.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan laporan BOS				103 sekolah	103 sekolah								103 sekolah			
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang dibangun				3 Ruang	3 Ruang	-	679.623.000	679.623.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsna	SD	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	100.00 persen		82.04 persen	90 persen	90 persen	25.285.768.000	20.390.054.000	20.371.429.000								90 persen	32.814.991.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun				3 ruang	3 ruang	2.000.000.000	1.600.000.000	1.560.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpdndkn utk mndkng pnnngktn kualitas penddkn disrtai pnguatan srt prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 ruang	1.565.000.000	Dinas Pendidikan		
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab				8 ruang	8 ruang	4.477.700.000	1.330.529.000	1.515.079.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpdndkn utk mndkng pnnngktn kualitas penddkn disrtai pnguatan srt prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	8 ruang	5.200.000.000	Dinas Pendidikan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah ruang kelas yang direhab (Bankeu)				0 Ruang	3 ruang									3 ruang		
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhab				1 ruang	1 ruang	500.000.000	199.827.000	199.827.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnktn komptensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pnnktn kualts pendkn disttai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 ruang	500.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium SMP/MTs yang direhab				1 ruang	1 ruang	300.923.000	299.457.000	299.457.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnktn komptensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pnnktn kualts pendkn disttai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 ruang	900.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah dokumen DED/perencanaan yang dihasilkan				0 Unit	1 Paket	609.600.000	1.910.000.000	1.680.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnktn komptensi penddk & tenaga kpndkn utk mndkng pnnktn kualts pendkn disttai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan,	SMP	1 Paket	580.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah halaman yang ditinggikan				1 pekerjaan	0 pekerjaan									0 pekerjaan		
		Jumlah KM/WC SMP/MTs yang direhab				4 paket	4 paket									4 paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
														3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kndkn utk mndkng pngktn kualts pendkn disrtai pngkatan srt prsna pendkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & pendkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga sekolah				17 sekolah	17 sekolah	34.400.000	34.400.000	34.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kndkn utk mndkng pngktn kualts pendkn disrtai pngkatan srt prsna pendkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & pendkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	17 sekolah	170.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah laptop yang diadakan				14 unit	14 unit	170.449.000	170.449.000	168.499.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kndkn utk mndkng pngktn kualts pendkn disrtai pngkatan srt prsna pendkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & pendkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	14 unit	425.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah SMP yang difasilitasi pemeliharaan bangunan gedung dan ruangan				3 sekolah	2 sekolah	135.200.000	135.200.000	94.825.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Pemerataan & pngktn kompetensi	SMP	2 sekolah	850.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah				3 sekolah	3 sekolah	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpdndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 sekolah	170.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang difasilitasi perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah				1325 siswa	1325 siswa	210.000.000	210.000.000	210.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpdndkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1325 siswa	625.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah alat peraga siswa yang diadakan				0 Paket	1 Paket	-	125.000.000	309.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pndgkn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pndgkn kualts penddkn disrtai pnguatan srt prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 Paket	1.332.144.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah alat TIK yang diadakan				1 Paket	1 Paket					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				1 Paket		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan penyusunan instrumen evaluasi yang dilaksanakan				0 kegiatan	3 Kegiatan	134.850.000	174.850.000	132.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pndgkn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pndgkn kualts penddkn disrtai pnguatan srt prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 Kegiatan	172.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah mapel SMP yang difasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya				13 mapel	0 mapel									0 mapel		
		Jumlah siswa inklusi yang difasilitasi asesmen ABK					80 siswa									80 siswa		
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan AKM				28 sekolah	29 sekolah									29 sekolah		
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan survei karakter				28 sekolah	29 sekolah									29 sekolah		
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan EDS				17 sekolah	0 sekolah	50.000.000	50.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pndgkn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pndgkn kualts penddkn disrtai pnguatan srt prsrna penddkn &	SMP	0 sekolah	51.000.000	Dinas Pendidikan
		jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan IRB (identifikasi, refleksi, benahi)					29 sekolah									29 sekolah		
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan RAPBS				28 sekolah	29 sekolah									29 sekolah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah ajang apresiasi minat, bakat dan kreatifitas siswa yang diselenggarakan				6 kegiatan	6 kegiatan	400.000.000	385.000.000	320.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & punggkn kompetensi penddk & tenaga kpenddkn utk mndkng punggkn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	6 kegiatan	580.000.000	Dinas Pendidikan	
		Jumlah PTK yang difasilitasi pelatihan khusus pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa				15 orang	0 orang										0 orang		
		Jumlah siswa berprestasi yang diberi apresiasiasi				50 siswa	50 siswa										50 siswa		
		Jumlah siswa yang difasilitasi pelatihan khusus minat,bakat dan kreatifitas				30 siswa	15 siswa										15 siswa		
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru pendamping inklusi yang difasilitasi honor jasa pendidik				1 orang	1 orang	232.625.000	233.825.000	273.025.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & punggkn kompetensi penddk & tenaga kpenddkn utk mndkng punggkn	SMP	1 orang	332.200.000	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik BTQ SMP/MTS yang difasilitasi bantuan transport				93 orang	93 orang										93 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jenjang sekolah peserta PPDB Online SMP				28 sekolah	24 sekolah	151.442.000	151.442.000	156.242.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	24 sekolah	496.000.000	Dinas Pendidikan	
		Jumlah aplikasi penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang dikembangkan (Aplikasi PPDB Online)				1 aplikasi	1 aplikasi												
		Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen sekolah yang diselenggarakan				4 kegiatan	4 kegiatan												
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 kegiatan	0 kegiatan												
		Jumlah pelaksanaan Rakor / Raker Pengawas SMP yang difasilitasi				2 kegiatan	2 kegiatan												
		jumlah sekolah penggerak yang difasilitasi				0 sekolah	4 sekolah												
		Jumlah SMP yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				28 sekolah	0 sekolah												
		Jumlah SMP yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				28 sekolah	0 sekolah												
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri yang difasilitasi dana BOS				17 sekolah	0 sekolah	14.396.686.000	13.271.900.000	13.271.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, &	SMP	0 sekolah	10.127.372.000	Dinas Pendidikan	
		Jumlah SMP yang difasilitasi dana BOS				0 sekolah	29 Sekolah					DAK Non Fisik - BOS Reguler							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah bimtek/sosialisasi BOS yang diselenggarakan				1 kali	1 kali	23.175.000	23.175.000	20.325.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 kali	23.175.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan SPJ BOS				28 sekolah	29 sekolah									29 sekolah		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	100 persen		96.23 persen	98.4 persen	98.4 persen	9.619.516.000	9.578.027.000	9.513.027.000						98.4 persen	17.760.032.000	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sarana dan prasarana pendidikan				1 Lembaga	1 Lembaga	-	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	1 Lembaga	250.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang bermain anak yang dibangun				3 ruang	3 ruang	794.072.000	574.088.000	574.088.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsrna	PAUD PNF	3 ruang	555.123.000	Dinas Pendidikan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sarana dan prasarana pendidikan				9 Lembaga	9 Lembaga	1.095.035.000	1.194.365.000	1.194.365.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	9 Lembaga	900.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab				6 ruang	6 ruang					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		6 ruang			
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sarana dan prasarana pendidikan				2 Lembaga	2 Lembaga	-	95.000.000	95.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	2 Lembaga	340.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah TK Negeri yang menerima bantuan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD				4 TK	4 TK	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn	PAUD PNF	4 TK	40.000.000	Dinas Pendidikan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan	Umum	Saing	mndkng pngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah laptop yang diadakan Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sarprasnya Jumlah printer yang diadakan				5 Unit 0 lembaga 7 Unit	5 Unit 1 Lembaga 7 Unit	80.000.000	95.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	5 Unit 1 Lembaga 7 Unit	80.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	jumlah lembaga di fasilitasi kunjungan dolan paud Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				12 lembaga 800 siswa	0 lembaga 800 siswa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	0 lembaga 800 siswa	127.500.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah APE PAUD/TK yang diadakan				3 paket	3 paket	429.435.000	270.000.000	270.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Pemerataan & pngktn kompetensi	PAUD PNF	3 paket	80.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Jumlah TK yang difasilitasi pengadaan alat TIK				3 TK	3 TK				Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Berkualitas Dan Berdaya Saing	penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		3 TK		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	jumlah lembaga difasilitasi pendampingan IKM				0 sekolah	265 Sekolah	125.000.000	125.000.000	101.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	265 Sekolah	5.912.909.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah lembaga yang difasilitasi workshop guru pendamping khusus				50 Lembaga	50 Lembaga									50 Lembaga		
		Jumlah lomba gebyar kreasi anak yang dilaksanakan				2 Lomba	4 Lomba									4 Lomba		
		Jumlah PAUD inklusi yang difasilitasi				4 TK	4 TK									4 TK		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyelenggaraan survey karakter dan survey tumbuh-kembang anak				250 TK	0 TK									0 TK		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyelenggaraan survey karakter dan survey tumbuh-kembang anak				0 Peserta Didik	200 Sekolah									200 Sekolah		
		Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi penerapan pendidikan karakter				100 Lembaga	100 Lembaga									100 Lembaga		
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	jumlah lembaga yang difasilitasi pendampingan EDS				0 Satuan Pendidikan	265 Satuan Pendidikan	68.250.000	68.250.000	68.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, &	PAUD PNF	265 Satuan Pendidikan	125.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan EDS				100 Sekolah	0 Sekolah									0 Sekolah		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan RAPBS				250 Sekolah	265 Sekolah									265 Sekolah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
												penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.						
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah guru pendamping inklusi yang difasilitasi honor jasa pendidik dan memenuhi kualifikasi				2 Orang	2 Orang	50.424.000	52.824.000	52.824.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	2 Orang	48.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen PAUD yang diselenggarakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	487.500.000	514.900.000	553.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 Kegiatan	780.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan											
		Jumlah lembaga / organisasi mitra PAUD yang difasilitasi kegiatannya				4 Lembaga	4 Lembaga											
		Jumlah PAUD yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				2 Lembaga	0 Lembaga											
		Jumlah PAUD yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				250 Lembaga	265 Lembaga											
		Jumlah Rakor/Raker Pengawas/Penilik PAUD yang difasitiasi pelaksanaannya				2 Kegiatan	2 Kegiatan											
		Jumlah sekolah penggerak yang difasilitasi pembinaan kelembagaan manajemen sekolah				0 Satuan Pendidik an	5 Lembaga											
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang menerima dana hibah BOP PAUD				260 lembaga	256 lembaga	6.139.800.000	6.183.600.000	6.183.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn	PAUD PNF	256 lembaga	7.600.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah bimtek/sosialisai BOP PAUD yang diselenggarakan				1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	100.000.000	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Alokasi Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpndkkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	1 kegiatan	129.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan laporan BOP				265 lembaga	256 lembaga							3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpndkkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		256 lembaga		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)	100 persen		25.49 persen	50 persen	50 persen	3.091.000.000	4.631.546.000	4.587.746.000						50 persen	7.047.157.000	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang kelas yang dibangun				1 ruang	1 ruang	-	910.000.000	910.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpndkkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan,	PNF Kesetaraan	1 ruang	400.000.000	Dinas Pendidikan
		jumlah ruang TIK yang dibangun				0 Unit	1 ruang					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB				1 ruang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah KM/WC yang dibangun				1 pekerjaa n	1 pekerjaan	-	97.680.000	148.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	1 pekerjaa n	380.000.000	Dinas Pendidikan
												DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn distrai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah ruang kelas yang direhab				3 Ruang	3 Ruang	-	489.066.000	489.066.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	3 Ruang		0 Dinas Pendidikan
		Jumlah Ruang TIK yang dibangun				1 Ruang	0 Ruang					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn distrai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		0 Ruang		
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah mebeleir yang diadakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	3 Paket	105.000.000	Dinas Pendidikan





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		peraga kesetaraan									an-Reguler-SKB							
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah fasilitasi penyusunan instrumen evaluasi yang dilaksanakan				0 Peserta Didik	3 Kegiatan	350.000.000	350.000.000	225.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	3 Kegiatan	1.957.757.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Mapel Kesetaraan yang terfasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya				14 mapel	0 mapel											
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan Survai Karakter				14 lembaga	14 lembaga											
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan AKM dan UK				0 lembaga	14 Lembaga											
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan AKM dan UPK				14 lembaga	0 lembaga											
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah lembaga yang difasilitasi pendampingan EDS				0 Satuan Pendidikan	14 Lembaga	19.500.000	19.500.000	19.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas	PNF Kesetaraan	14 Lembaga	19.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan EDS				14 lembaga	0 lembaga											
		Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan RAPBS				14 lembaga	14 lembaga											
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru pendamping inklusi PNF yang difasilitasi honor jasa pendidik				2 orang	3 orang	175.000.000	203.600.000	203.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distai pnguatan srn prsrna	PNF Kesetaraan	3 orang	248.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SKB yang difasilitasi penyediaan PTK nya				1 SKB	1 SKB											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.					
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen PNF yang diselenggarakan				4 kegiatan	4 kegiatan	180.000.000	180.000.000	90.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	4 kegiatan	420.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
		Jumlah PNF yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				14 lembaga	14 lembaga									14 lembaga		
		Jumlah PNF yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				14 lembaga	14 lembaga									14 lembaga		
		Jumlah Rakor/Raker Penilik PNF yang difasiitasi pelaksanaannya				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan PNF yang menerima dana hibah BOP				14 lembaga	13 lembaga	2.089.000.000	1.879.200.000	2.066.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	13 lembaga	2.600.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bimtek/ sosialisasi BOP kesetaraan yang diselenggarakan				1 kegiatan	1 kegiatan	17.500.000	17.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn	PNF Kesetaraan	1 kegiatan	20.400.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah satuan PNF yang difasilitasi penyusunan laporan BOP				14 lembaga	13 lembaga							13 lembaga				
1.01.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen		100 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>238.044.000</b>	<b>238.044.000</b>	<b>198.044.000</b>				100,00 persen	<b>299.315.000</b>			
1.01.03.2.01	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>148.044.000</b>	<b>148.044.000</b>	<b>108.044.000</b>				100 persen	<b>144.861.000</b>			
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun (perwa/sk kadin)				2 dokumen	2 dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD dan SMP	2 dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen silabus muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan,	SD dan SMP	2 dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal yang diadakan				1000 buku	500 buku	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srt prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD dan SMP	500 buku	60.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang disusun				2 dokumen	1 dokumen	48.044.000	48.044.000	8.044.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srt prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD dan SMP	1 dokumen	44.861.000	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.02	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000</b>						100 persen	<b>154.454.000</b>	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang Tersusun				1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn	PAUD PNF	1 dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.					
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang disusun (sk kadin)				1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	1 dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang diadakan				1000 Buku	500 Buku	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	500 Buku	124.454.000	Dinas Pendidikan
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>14.054.526.000</b>	<b>14.111.726.000</b>	<b>14.569.113.000</b>						100,00 persen	<b>15.452.202.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	100 persen		54.75 persen	76.75 persen	76.75 persen	14.054.526.000	14.111.726.000	14.569.113.000					76.75 persen	15.452.202.000		
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang disusun				1 Dokumen		997.480.000	1.017.480.000	1.017.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Dokumen	941.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah dokumen kepegawaian ( Sk, gaji berkala, kenaikan pangkat, dll ) yang diterbitkan				1200 orang									1200 orang			
		Jumlah guru PAUD yang difasilitasi kegiatan diklat guru berjenjang (dasar/lanjut/mahir)				100 orang	50 orang								50 orang			
		Jumlah guru yang difasilitasi kegiatan pemilihan/seleksi guru berprestasi				50 orang	25 orang								25 orang			
		jumlah guru yang difasilitasi pendidikan profesi guru					4 Orang								4 Orang			
		Jumlah guru yang difasilitasi program guru penggerak				250 orang	150 orang								150 orang			
		Jumlah Kompetensi Kepala Sekolah yang ditingkatkan				10 orang	30 orang								30 orang			
		Jumlah Kompetensi Pengawas/Penilik yang ditingkatkan				25 orang	25 orang								25 orang			
		Jumlah penerbitan dokumen kepegawaian (SK gaji berkala, kenaikan pangkat, dll)				1200 orang	0 orang								0 orang			
		Jumlah penyelesaian kasus disiplin PTK				3 orang	3 orang								3 orang			
		Jumlah PTK Penerima bantuan S1/S2				25 orang	25 orang								25 orang			
		Jumlah PTK yang difasilitasi dalam apresiasi PTK PAUD dan Dikmas				50 orang	25 orang								25 orang			
		Jumlah PTK yang difasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi				200 orang	550 orang								550 orang			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah PTK yang difasilitasi KMD dan atau KML				90 orang	75 orang								75 orang			
1.01.04. 2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru terfasilitasi PAK nya				750 orang	750 orang	13.057.046.000	13.094.246.000	13.551.633.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngktn kualts penddkn distai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pntahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	750 orang	14.511.202.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah pengawas/penilik yang difasilitasi PAK nya				30 orang	28 orang								28 orang			
		Jumlah PTK difasilitasi harilindung				1501 orang	1426 orang								1426 orang			
		Jumlah PTK yang difasilitasi penerbitan dokumen kepegawaian nya ( SK kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, dokumen kontrak				1200 orang	0 orang								0 orang			
		Jumlah SD/MI swasta penerima bantuan jasa kinerja				75 SD/MI	76 SD/MI								76 SD/MI			
		Jumlah SMP/MTs swasta penerima bantuan jasa kinerja				21 SMP/MTs	23 SMP/MTs								23 SMP/MTs			
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>98.531.785.000</b>	<b>107.006.231.000</b>	<b>112.513.606.000</b>						<b>103.624.644.030</b>		
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>58.030.839.000</b>	<b>57.726.564.000</b>	<b>59.256.852.000</b>					100 persen	<b>58.537.365.005</b>		
1.02.01. 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>					100 persen	<b>24.850.000</b>		
1.02.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	2 dokumen	2.750.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinkes	2 dokumen	1.650.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	20.450.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>55.748.383.000</b>	<b>55.426.708.000</b>	<b>57.345.750.000</b>						100 persen	<b>56.635.683.000</b>	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	55.668.288.000	55.341.813.000	57.260.855.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	14 Bulan	56.553.633.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	78.595.000	83.395.000	83.395.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	80.400.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	1 dokumen	1.650.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>9.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>						100 persen	<b>10.000.000</b>	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 Kali	1 Kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	1 Kali	10.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>382.876.000</b>	<b>382.876.000</b>	<b>383.730.000</b>						100 persen	<b>542.091.005</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		daerah																
1.02.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	5.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan	12 bulan	132.067.000	132.067.000	132.067.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	208.436.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	8.455.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	90.809.000	90.809.000	79.459.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	11 bulan	95.700.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	22.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	2.500.005	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 orang/kali	100 orang/kali	125.000.000	125.000.000	137.204.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	100 orang/kali	200.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01. 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.176.956.000</b>	<b>1.098.856.000</b>	<b>909.648.000</b>						100 persen	<b>780.782.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	<b>Pemerintahan Daerah</b>	Urusan Pemerintahan Daerah																
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	400.000	400.000	400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	400	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	725.383.000	625.383.000	435.383.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	327.409.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	451.173.000	473.073.000	473.865.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	452.973.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>687.124.000</b>	<b>787.124.000</b>	<b>586.724.000</b>						100 persen	<b>543.959.000</b>	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	400.094.000	400.094.000	290.094.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	241.749.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	3 unit	222.030.000	322.030.000	231.630.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	3 unit	222.030.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 bulan	80.180.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN</b>	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90,00 persen		70,00 persen	80,00 persen	80,00 persen	<b>39.623.581.000</b>	<b>47.393.348.000</b>	<b>51.376.335.000</b>						80,00 persen	<b>42.394.147.025</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>																	
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	12.921.747.000	19.341.186.000	19.350.351.000					100 persen	10.007.751.275		
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	-	4.763.320.000	4.763.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					0 Unit	5.092.299.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Unit	1.439.119.725	Dinas Kesehatan
		Jumlah unit puskesmas yang direhab				1 unit	0 unit					DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				0 unit		
		Jumlah unit puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar				1 unit	0 unit									0 unit		
		Jumlah unit Pustu yang dikembangkan					1 Unit									1 Unit		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah lokasi puskesmas/pustu yang direhab				6 lokasi	6 lokasi	500.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	6 lokasi	1.478.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah instalasi pengolahan limbah yang dilakukan pemeliharaan				1 Unit	0 Unit	530.064.000	284.214.000	284.214.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Unit	100.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				1 Unit	2 Unit					DAK Fisik-Bidang				2 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAK)				1 paket	44 unit/set	2.401.893.000	4.887.602.000	4.887.602.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	44 unit/set	2.256.950.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAU)				6 jenis	0 jenis					DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB				0 jenis		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					0 Unit					DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				0 Unit		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah BMHP yang diadakan (DAU)				1 paket	0 pekerjaan	1.602.000.000	2.252.500.000	2.252.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 pekerjaan	2.152.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah jasa pemusnahan obat kadaluarsa yang diadakan				1 paket	1 pekerjaan					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 pekerjaan		
		Jumlah mobil distribusi berpendingin yang diadakan				1 unit	0 unit									0 unit		
		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan					0 Paket									0 Paket		
		Jumlah obat-obatan yang diadakan (DAK)				1 paket	1 pekerjaan									1 pekerjaan		
		Jumlah obat-obatan yang diadakan (DAU)				1 paket	1 pekerjaan									1 pekerjaan		
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan					0 Paket	2.595.491.000	4.762.254.000	4.771.419.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Paket	2.121.681.550	Dinas Kesehatan
		Jumlah BMHP gula darah yang diadakan(DAK)				1 pekerjaan	1 pekerjaan					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 pekerjaan		
		Jumlah BMHP yang diadakan (DAK)				1 pekerjaan	1 pekerjaan									1 pekerjaan		
		Jumlah Catride TCM yang diadakan (DAK)				1 pekerjaan	0 pekerjaan									0 pekerjaan		
		Jumlah RO dan BHP Skrinning HIV dengan Reagen Sifilis yang diadakan(DAK)				1 pekerjaan	1 pekerjaan									1 pekerjaan		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					60 Unit	200.000.000	222.496.000	222.496.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	60 Unit	460.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda, Dinkes) yang dikalibrasi				60 Unit	0 Unit									0 Unit		
		Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda) yang diservice				38 Jenis	0 Jenis									0 Jenis		
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Paket	0 Paket	-	68.800.000	68.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Paket	0	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar (IKK Output)				52 Pak Kartu MTBS	31642 set								31642 set			
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				56000 Anak	28286 Anak	132.189.000	132.189.000	132.189.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	28286 Anak	129.666.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk anak usia pendidikan dasar (IKK Output)				5000 Set	28286 Set								28286 Set			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif (IKK Output) (IKK Output)					207789 Orang	127.293.000	127.293.000	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pence gahan dan pengan dalian penyakit.	Masyarakat	207789 Orang	44.950.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah penduduk usia produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				207789 orang	207789 orang								207789 orang			
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara usia 60 tahun ke atas (IKK Output)				1095 unit	34492 set	36.071.000	36.071.000	36.071.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	34492 set	33.609.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				30994 Orang	34492 Orang								34492 Orang			
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi (IKK Output) (IKK Output)					76872 set	8.830.000	8.830.000	8.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	76872 set	8.830.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				76872 orang	76872 orang								76872 orang			
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (IKK Output)					6446 set	8.550.000	8.550.000	8.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Masyarakat	6446 set	8.550.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah penderita DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				6446 Orang	6446 Orang								6446 Orang			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (IKK Output) (IKK Output)					785 set	15.380.000	15.380.000	15.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	785 set	15.380.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah penderita ODGJ mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				785 orang	785 orang								785 orang			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (IKK Output) (IKK Output)				0 Orang	5391 set	41.305.000	41.305.000	41.305.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	5391 set	41.305.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				5391 Orang	5391 Orang								5391 Orang			
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (IKK Output) (IKK Output)				0 Orang	12563 set	33.105.000	33.105.000	33.105.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12563 set	33.105.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				12563 Orang	12563 Orang								12563 Orang			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah anak stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita yang ditangani				1450 Anak	846 Anak	230.000.000	2.003.025.000	2.003.025.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	846 Anak	544.218.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah balita gizi buruk yang ditangani				38 Anak	59 Anak					DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan			59 Anak			
		Jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif				2440 Anak	2620 Anak								2620 Anak			
		Jumlah bumil KEK yang mendapatkan suplemen gizi				720 Orang	776 Orang								776 Orang			
		Jumlah Dokumen Hasil					0								0			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Dokumen					Penguatan Intervensi Stunting				Dokumen		
		Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal				70 Orang	41 Orang									41 Orang		
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Calon Jamaah Haji yang diukur Kebugaran Jasmaninya				280 orang	280 orang	65.500.000	65.500.000	65.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	280 orang	78.750.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan Pembinaan Kesehatan Kerja di Perkantoran yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah lokasi yang dilakukan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Puskesmas				14 lokasi	14 lokasi									14 lokasi		
		Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan Kesehatan Kerja di Perusahaan (GP2SP)				10 Lokasi	10 Lokasi									10 Lokasi		
		Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan Kesehatan Kerja Informal (Pos UKK)				15 Lokasi	15 Lokasi									15 Lokasi		
		Jumlah orang yang diukur Kebugaran Jasmaninya				60 Orang	60 Orang									60 Orang		
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pembinaan Hygiene Sanitasi TUPM yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	720.000.000	720.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Kegiatan	228.212.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan Pengelolaan Sampah Medis yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				12 Kali		
		Jumlah kegiatan Pengendalian alat di TPA yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah kegiatan Penggerakan Implementasi STBM yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah kegiatan Survei Kualitas Air Minum RT (SKAMRT) yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah lokasi desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)				27 Lokasi	27 Lokasi									27 Lokasi		
		Jumlah lokasi Fasyankes Ramah Lingkungan				23 Lokasi	23 Lokasi									23 Lokasi		
1.02.02.	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil					0	1.321.645.000	1.423.010.000	1.423.010.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Masyarakat	0	1.347.034.750	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
2.02.18	Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Dokumen					Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		Dokumen		Kesehatan	
		Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen						DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen			
		Jumlah kasus Covid 19 yang dikunjungi				100 Kasus	0 Kasus											0 Kasus		
		Jumlah kegiatan BOK kefarmasian yang dilaksanakan				1 Kegiatan	0 Kegiatan											0 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang dilaksanakan				3 Kegiatan	0 Kegiatan											0 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				29 Kegiatan	4 Kegiatan											4 Kegiatan		
		Jumlah Kelurahan ODF/SBS				27 Kelurahan	0 Kelurahan											0 Kelurahan		
		Jumlah kelurahan yang dilakukan Surveilans Kualitas Air Minum RT (SKAMRT)				27 Kelurahan	27 Kelurahan											27 Kelurahan		
		Jumlah lokasi yang dilakukan Penyehatan Lingkungan Fasyankes				24 Lokasi	24 Lokasi											24 Lokasi		
		Jumlah lokasi yang ditinjau Kualitas Makanan Minuman Masyarakat (Pilar 3 STBM)				280 Lokasi	280 Lokasi											280 Lokasi		
Jumlah penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan				17 Kali	14 Kegiatan											14 Kegiatan				
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan				53 Kasus	34 Kasus	670.735.000	470.735.000	470.735.000		Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	34 Kasus	1.056.020.000	Dinas Kesehatan	
		Jumlah kasus Hepatitis B				45 Kasus	45 Kasus										45 Kasus			
		Jumlah kasus HIV/AIDS				100 Kasus	115 Kasus										115 Kasus			
		Jumlah kasus obesitas pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Fasyankes				59385 Jiwa	2633 Jiwa										2633 Jiwa			
		Jumlah kasus TB Paru BTA (+)				890 Kasus	1000 Kasus										1000 Kasus			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular yang dilaksanakan				14 Lokasi	14 Lokasi								14 Lokasi			
		Jumlah kegiatan penyemprotan Fogging Focus di wilayah Kota Pekalongan				100 Kali	100 Kali								100 Kali			
		Jumlah monev program penyakit tidak menular yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali								4 Kali			
		Jumlah penduduk umur > atau = 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg				76872 Jiwa	76872 Jiwa								76872 Jiwa			
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat yang dilaksanakan Bias MR				213 Kelas	203 Kelas								203 Kelas			
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat yang dilaksanakan Bias Td				255 Kelas	203 Kelas								203 Kelas			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV				179 Orang	211 Orang								211 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM				161 Orang	211 Orang								211 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi				161 Orang	211 Orang								211 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita ODGJ berat				161 Orang	211 Orang								211 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC				161 Orang	211 Orang								211 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun				291 Orang	0 Orang								0 Orang			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-59 tahun					329 Orang								329 Orang			
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					0 Dokumen	20.500.000.000	21.069.693.000	25.419.518.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Dokumen	25.850.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah masyarakat penerima bantuan Premi				55716 Orang	180000 Orang					DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				180000 Orang		
		Jumlah Rapat Koordinasi Program JKN				4 Kali	4 Kali					Dana Insentif Daerah				4 Kali		
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS				12 Bulan	12 Bulan	51.483.000	51.483.000	51.483.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	82.840.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bulan penyediaan belanja operasional Puskesmas, IFK dan Labkesda				12 Bulan	12 Bulan	1.380.039.000	1.477.353.000	1.263.443.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	1.323.713.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				4 Orang	4 Orang									4 Orang		
		Jumlah jasa tenaga PSC 119 dan tenaga PUSDALU				28 Orang	28 Orang									28 Orang		
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan & Penilaian Mutu Eksternal (PPME)				14 Puskesmas	14 Puskesmas	806.132.000	0	460.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	14 Puskesmas	802.626.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kegiatan Program Haji				2 Kali	2 Kali	42.650.000	42.650.000	42.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	2 Kali	76.420.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah sakit				52 Kali	52 Kali									52 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000				100 persen	74.200.000			
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIMKES				12 Bulan	12 Kali	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	12 Kali	74.200.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	72.900.000	72.900.000	72.900.000					100 persen	133.940.000		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pelaksanaan visitasi perijinan fasyankes				10 Kali	15 Kali	72.900.000	72.900.000	72.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	15 Kali	133.940.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah pelaksana kegiatan P3K dan bencana				800 Orang	800 Orang									800 Orang		
		Jumlah pembinaan fasyankes baik milik pemerintah maupun swasta				69 Kali	150 Kali									150 Kali		
		Jumlah pertemuan fasilitasi peningkatan mutu fasyankes				11 Kali	11 Kali									11 Kali		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	60,00 persen		35,00 persen	45,00 persen	45,00 persen	91.932.000	1.024.333.000	1.024.333.000					45,00 persen	228.782.000		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	91.932.000	1.024.333.000	1.024.333.000					100 persen	228.782.000		
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen SDM yang disusun (Profil SDM Kesehatan dan Renbut)				3 Dokumen	3 Dokumen	91.932.000	1.024.333.000	1.024.333.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkes	0 Dokumen	228.782.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah penerbitan rekomendasi ijin tenaga kesehatan tepat waktu (sesuai SOP)				540 orang	800 orang					DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				800 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100,00 persen		92,00 persen	96,00 persen	96,00 persen	662.653.000	689.206.000	683.306.000					96,00 persen	680.722.000		
		Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen									100,00 persen			
		Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	97,00 persen		95,00 persen	96,00 persen	96,00 persen								96,00 persen			
1.02.04.2.01	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	106.630.000	86.734.000	83.234.000					100 persen	115.562.000		
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasyanfar yang dilakukan pembinaan dan pengawasan				109 Lokasi	109 Lokasi	106.630.000	86.734.000	83.234.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT	109 Lokasi	115.562.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat daerah berdasarkan SK Walikota				2 Orang	2 Orang								2 Orang			
1.02.04.2.03	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	491.023.000	537.472.000	537.472.000					100 persen	491.023.000		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT				140 Lokasi	160 Lokasi	491.023.000	537.472.000	537.472.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Industri Rumah Tangga	160 Lokasi	491.023.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan post market				100 Lokasi	60 Lokasi								60 Lokasi			
		Jumlah peserta Bimtek Kader Keamanan Pangan				100 orang	60 orang								60 orang			
		Jumlah peserta bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP				0 Dokumen	160 orang								160 orang			
		Jumlah peserta bimtek penilaian mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku usaha					75 orang								75 orang			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah peserta KIE Keamanan Pangan				300 Orang	0 Orang								0 Orang			
		Jumlah sampling dan pengujian PIRT				40 Sampel	40 Sampel								40 Sampel			
1.02.04.2.04	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan	97 persen		95 persen	95 persen	95 persen	65.000.000	65.000.000	62.600.000					95 persen	74.137.000		
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengawasan dan Pemeriksaan Makanan / Jajanan di Sekolah dan Masyarakat Pengawasan Penerbitan SLHS TPM				200 Lokasi	200 Lokasi	65.000.000	65.000.000	62.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	TPM & DAM	200 Lokasi	74.137.000	Dinas Kesehatan
						40 Lokasi	40 Lokasi								40 Lokasi			
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase Rumah Tangga Sehat	95,00 persen		90,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	122.780.000	172.780.000	172.780.000					92,00 persen	1.783.628.000		
1.02.05.2.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri	35 persen		30 persen	32 persen	32 persen	60.000.000	110.000.000	110.000.000					32 persen	1.662.912.000		
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah bimtek program promosi dan pemberdayaan kesehatan Jumlah lokasi movev poskestren Jumlah movev program promosi dan pemberdayaan kesehatan				14 Lokasi	2 kali	60.000.000	110.000.000	110.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	2 kali	1.662.912.000	Dinas Kesehatan
						7 Lokasi	7 Lokasi								7 Lokasi			
						6 Kegiatan	10 Kali								10 Kali			
1.02.05.2.02	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	62.780.000	62.780.000	62.780.000					100 persen	120.716.000		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Lomba PHBS Tingkat Kota Pekalongan yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	62.780.000	62.780.000	62.780.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya pngktn	Masyarakat	1 Kali	120.716.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	keualitas pelayanan publik.				
		Jumlah Pembuatan film dalam rangka promosi kesehatan dan peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Penyebarluasan informasi kesehatan dalam rangka peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat melalui berbagai media yang dilaksanakan				22 Kali	22 Kali									22 Kali		
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							0	107.116.441.000	118.826.868.000							110.884.927.200	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	0	85.090.100.000	96.813.985.000						100 persen	88.717.938.000	
1.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen		100 persen	0	11.000.000	9.800.000						100 persen	11.000.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	2 dokumen	1.500.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	2 dokumen	1.500.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	6.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	12 bulan	8.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP				2	2									2		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen		100 persen	0	54.100.000	54.100.000					100 persen	50.055.000		
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan			12 bulan	12 bulan	47.800.000	52.600.000	52.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	12 bulan	48.555.000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	1 dokumen	1.500.000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen		100 persen	0	25.000.000	21.100.000					100 persen	810.883.000		
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah			20 orang/kali	24 orang/kali	25.000.000	25.000.000	21.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	24 orang/kali	810.883.000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen		100 persen	0	85.000.000.000	96.728.985.000					100 persen	87.846.000.000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	85.000.000.000	85.000.000.000	96.728.985.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	RSUD Bendan	0 Unit Kerja	87.846.000.000	Dinas Kesehatan	
		Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD			12 bulan	12 bulan									12 bulan			
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	72,50 persen		60,00 persen	65,00 persen	65,00 persen	0	21.953.650.000	21.941.992.000					65,00 persen	22.104.553.200		
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100 persen		100 persen		100 persen	0	21.799.900.000	21.799.910.000					100 persen	21.769.903.200		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan				1 Unit	1 Unit	9.238.750.000	13.698.000.000	13.698.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	1 Unit	13.617.400.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan				1 Unit	1 Unit	1.200.000.000	410.000.000	410.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	1 Unit	410.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan				2 paket	92 unit	9.000.000.000	7.691.900.000	7.691.910.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Fisik-Bidang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	92 unit	7.742.503.200	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen		100 persen		100 persen	0	43.750.000	32.632.000		Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan			100 persen	224.650.000		
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah audit maternal/neonatal yang dilaksanakan				4 kali	3 kali	43.750.000	43.750.000	32.632.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	3 kali	43.750.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah audit near miss maternal/neonatal yang dilaksanakan				4 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah drill emergency / refresh ilmu maternal/neonatal yang dilaksanakan				4 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah kegiatan jejaring pembinaan rujukan yang dilaksanakan				2 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
		Jumlah kegiatan Penyuluhan Laktasi dan Senam Nifas yang dilaksanakan				6 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah sosialisasi SPO maternal/neonatal yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
1.02.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan	100 persen		100 persen		100 persen	0	110.000.000	109.450.000					100 persen	110.000.000		
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	110.000.000	110.000.000	109.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	2 dokumen	110.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER</b>	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang	60,00 persen		35,00 persen	45,00 persen	45,00 persen	0	72.691.000	70.891.000					45,00 persen	62.436.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	dipersyaratkan																
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase perawat dan bidan yang terakreditasi	100 persen		100 persen	0 persen	100 persen	0	51.191.000	50.291.000					100 persen	48.663.500		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan				12 bulan	12 bulan	34.891.000	36.191.000	36.245.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	34.891.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti kredensial/rekredensial				100 orang	100 orang	15.000.000	15.000.000	14.046.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	100 orang	13.772.500	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	20 persen		20 persen		40 persen	0	21.500.000	20.600.000					40 persen	13.772.500		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi				100 orang	100 orang	21.500.000	21.500.000	20.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	100 orang	13.772.500	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.541.345.000	3.527.052.000	3.677.688.000					3.541.345.000			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	2.765.245.000	2.635.245.000	2.785.881.000					100 persen	2.765.245.000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	2.765.245.000	2.635.245.000	2.785.881.000					100 persen	2.765.245.000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	2.765.245.000	2.635.245.000	2.785.881.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih Kota Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	2.765.245.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	776.100.000	891.807.000	891.807.000					90,00 persen	776.100.000		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	776.100.000	891.807.000	891.807.000					100 persen	776.100.000		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	776.100.000	891.807.000	891.807.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	2 kegiatan	776.100.000	Dinas Kesehatan
						1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
						2 kegiatan	2 kegiatan								2 kegiatan			
						9 kegiatan	9 kegiatan								9 kegiatan			
						1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 kegiatan	7 kegiatan								7 kegiatan			
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							1.453.691.000	1.581.473.000	1.887.836.000						1.291.809.000		
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	825.791.000	825.791.000	1.132.154.000					100 persen	846.436.000		
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	825.791.000	825.791.000	1.132.154.000					100 persen	846.436.000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	825.791.000	825.791.000	1.132.154.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkr amat	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	846.436.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	627.900.000	755.682.000	755.682.000					90,00 persen	445.373.000		
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	627.900.000	755.682.000	755.682.000					100 persen	445.373.000		
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	627.900.000	755.682.000	755.682.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkr amat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	2 kegiatan	445.373.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan								2 kegiatan			
		Jumlah kegiatan upaya				9	9								9			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				Kegiatan	Kegiatan											
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 Kegiatan	8 Kegiatan									8 Kegiatan		
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							1.878.816.000	2.006.634.000	2.414.976.000						1.633.806.000		
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.035.916.000	1.035.916.000	1.444.258.000					100 persen	1.035.916.000		
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.035.916.000	1.035.916.000	1.444.258.000					100 persen	1.035.916.000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	1.035.916.000	1.035.916.000	1.444.258.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	1.035.916.000	Dinas Kesehatan
										Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo								
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	842.900.000	970.718.000	970.718.000					90,00 persen	597.890.000		
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	842.900.000	970.718.000	970.718.000					100 persen	597.890.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	842.900.000	970.718.000	970.718.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	2 kegiatan	597.890.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo					1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				9 Kegiatan	9 Kegiatan									9 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 Kegiatan	7 Kegiatan									7 Kegiatan		
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							1.415.848.000	1.623.894.000	2.039.533.000							1.198.626.000	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	615.666.000	700.000.000	1.115.639.000						100 persen	631.058.000	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	615.666.000	700.000.000	1.115.639.000						100 persen	631.058.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	615.666.000	700.000.000	1.115.639.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	631.058.000	Dinas Kesehatan
											Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen							



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	<b>800.182.000</b>	<b>923.894.000</b>	<b>923.894.000</b>						90,00 persen	<b>567.568.000</b>	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>800.182.000</b>	<b>923.894.000</b>	<b>923.894.000</b>						100 persen	<b>567.568.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan	800.182.000	923.894.000	923.894.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	3 kegiatan	567.568.000	Dinas Kesehatan
	Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan				1 kegiatan								
	Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan				3 kegiatan								
	Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				19 kegiatan	19 kegiatan				19 kegiatan								
	Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 kegiatan	7 kegiatan				7 kegiatan								
	Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				12 kegiatan	12 kegiatan				12 kegiatan								
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>1.556.554.000</b>	<b>1.572.375.000</b>	<b>1.777.849.000</b>							<b>1.556.554.000</b>	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>930.854.000</b>	<b>930.854.000</b>	<b>1.136.328.000</b>						100 persen	<b>930.854.000</b>	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>930.854.000</b>	<b>930.854.000</b>	<b>1.136.328.000</b>						100 persen	<b>930.854.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	930.854.000	930.854.000	1.136.328.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	930.854.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	<b>625.700.000</b>	<b>641.521.000</b>	<b>641.521.000</b>						90,00 persen	<b>625.700.000</b>	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>625.700.000</b>	<b>641.521.000</b>	<b>641.521.000</b>						100 persen	<b>625.700.000</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	625.700.000	641.521.000	641.521.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	2 kegiatan	625.700.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				9 kegiatan	9 kegiatan									9 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 kegiatan	7 kegiatan									7 kegiatan		
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>1.518.723.000</b>	<b>1.588.518.000</b>	<b>1.815.950.000</b>							<b>1.540.681.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	878.323.000	878.323.000	1.105.755.000						100 persen	900.281.000	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	878.323.000	878.323.000	1.105.755.000						100 persen	900.281.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	878.323.000	878.323.000	1.105.755.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	900.281.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	640.400.000	710.195.000	710.195.000						90,00 persen	640.400.000	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	640.400.000	710.195.000	710.195.000						100 persen	640.400.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat				2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 9 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan	2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 9 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan	640.400.000	710.195.000	710.195.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 9 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan	640.400.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		tingkat puskesmas yang dilaksanakan																
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						1.666.823.000	1.610.280.000	1.918.839.000				1.666.823.000					
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	878.323.000	878.323.000	1.186.882.000			100 persen	878.323.000				
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	878.323.000	878.323.000	1.186.882.000			100 persen	878.323.000				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	878.323.000	878.323.000	1.186.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	878.323.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	788.500.000	731.957.000	731.957.000			90,00 persen	788.500.000				
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	788.500.000	731.957.000	731.957.000			100 persen	788.500.000				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upaya				2 kegiatan	2 kegiatan	788.500.000	731.957.000	731.957.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	2 kegiatan	788.500.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				kegiatan	kegiatan							kegiatan				
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan				
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				8 kegiatan	8 kegiatan							8 kegiatan				
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							1.915.641.000	2.033.618.000	2.455.488.000					1.946.792.000			
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.246.041.000	1.246.041.000	1.667.911.000				100 persen	1.277.192.000			
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.246.041.000	1.246.041.000	1.667.911.000				100 persen	1.277.192.000			
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	1.246.041.000	1.246.041.000	1.667.911.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	1.277.192.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	669.600.000	787.577.000	787.577.000				90,00 persen	669.600.000			
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	669.600.000	787.577.000	787.577.000				100 persen	669.600.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan	669.600.000	787.577.000	787.577.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	3 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 16 kegiatan 6 kegiatan 10 kegiatan	669.600.000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							1.680.385.000	1.712.997.000	1.919.547.000							1.502.415.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	983.385.000	983.385.000	1.189.935.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	1.007.970.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	697.000.000	729.612.000	729.612.000						90,00 persen	494.445.000	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan</b>	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	697.000.000	729.612.000	729.612.000						100 persen	494.445.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama																
1.02.02. 2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan  Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan  Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan  Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan  Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan  Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB tingkat dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan	697.000.000	729.612.000	729.612.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton  Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	3 kegiatan  1 kegiatan 3 kegiatan 53 kegiatan  21 kegiatan  19 kegiatan	494.445.000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>1.904.699.000</b>	<b>1.877.024.000</b>	<b>2.244.452.000</b>						<b>1.933.223.000</b>		
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.140.979.000</b>	<b>1.140.979.000</b>	<b>1.508.407.000</b>					100 persen	<b>1.169.503.000</b>		
1.02.01. 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.140.979.000</b>	<b>1.140.979.000</b>	<b>1.508.407.000</b>					100 persen	<b>1.169.503.000</b>		
1.02.01. 2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	1.140.979.000	1.140.979.000	1.508.407.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	1.169.503.000	Dinas Kesehatan





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	2.086.541.000	2.037.207.000	2.176.564.000					100 persen	2.086.541.000			
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	2.086.541.000	2.037.207.000	2.176.564.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	2.086.541.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	914.680.000	939.880.000	939.880.000				90,00 persen	914.512.000			
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	914.680.000	939.880.000	939.880.000				100 persen	914.512.000			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	914.680.000	939.880.000	939.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	3 Kegiatan	914.512.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan				1 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru				3 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				52 Kegiatan	52 Kegiatan								52 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				16 Kegiatan	16 Kegiatan								16 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang				23 Kegiatan	23 Kegiatan								23 Kegiatan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		dilaksanakan																
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.981.866.000	2.029.499.000	2.161.068.000					1.865.467.000				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.456.166.000	1.416.166.000	1.547.735.000				100 persen	1.492.570.000			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.456.166.000	1.416.166.000	1.547.735.000				100 persen	1.492.570.000			
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	1.456.166.000	1.416.166.000	1.547.735.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	1.492.570.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	525.700.000	613.333.000	613.333.000				90,00 persen	372.897.000			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	525.700.000	613.333.000	613.333.000				100 persen	372.897.000			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	525.700.000	613.333.000	613.333.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	2 kegiatan	372.897.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan								2 kegiatan			
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan				9 Kegiatan	9 Kegiatan								9 Kegiatan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		respon penyakit yang dilaksanakan																
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan							1 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				7 Kegiatan	7 Kegiatan							7 Kegiatan				
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							2.763.416.000	2.842.152.000	3.534.903.000						2.552.457.000		
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.876.416.000	1.827.082.000	2.519.833.000					100 persen	1.923.327.000		
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.876.416.000	1.827.082.000	2.519.833.000					100 persen	1.923.327.000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	12 bulan	1.876.416.000	1.827.082.000	2.519.833.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan, Kertoarjo	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 bulan	1.923.327.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	887.000.000	1.015.070.000	1.015.070.000					90,00 persen	629.130.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	887.000.000	1.015.070.000	1.015.070.000				100 persen	629.130.000			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan	887.000.000	1.015.070.000	1.015.070.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	2 kegiatan	629.130.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan				Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo				1 kegiatan			
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				2 kegiatan	2 kegiatan								2 kegiatan			
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				9 kegiatan	9 kegiatan								9 kegiatan			
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				8 kegiatan	8 kegiatan								8 kegiatan			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.332.766.000	1.575.744.000	2.078.423.000						1.139.648.000		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	615.666.000	800.000.000	1.302.679.000					100 persen	631.058.000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	615.666.000	800.000.000	1.302.679.000					100 persen	631.058.000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	615.666.000	800.000.000	1.302.679.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	631.058.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan		Pelayanan Publik	(pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.				
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	717.100.000	775.744.000	775.744.000						90,00 persen	508.590.000	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	717.100.000	775.744.000	775.744.000						100 persen	508.590.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan fungsi manajemen puskesmas yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 Aktifitas	717.100.000	775.744.000	775.744.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyuwirip Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	3 Aktifitas	508.590.000	Dinas Kesehatan
		jumlah kegiatan Insentif Tenaga UKM Puskesmas yang dilaksanakan					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah kegiatan kalibrasi alat medis yang dilaksanakan				1 kegiatan	21 Alat medis									21 Alat medis		
		Jumlah kegiatan PMT lokal yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 Aktifitas									3 Aktifitas		
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				23 Kegiatan	23 Aktifitas									23 Aktifitas		
		Jumlah kegiatan upaya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) tingkat puskesmas yang dilaksanakan				9 Kegiatan	9 Aktifitas									9 Aktifitas		
		Jumlah kegiatan upaya penurunan AKI AKB dan perbaikan gizi masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				12 Kegiatan	12 Aktifitas									12 Aktifitas		
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							466.200.000	475.800.000	491.890.000							1.193.045.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	266.200.000	266.200.000	282.290.000					100 persen	292.820.000		
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	266.200.000	266.200.000	282.290.000					100 persen	292.820.000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	266.200.000	266.200.000	282.290.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarnya	12 Bulan	292.820.000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	90,00 persen	200.000.000	209.600.000	209.600.000					90,00 persen	900.225.000		
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	200.000.000	209.600.000	209.600.000					100 persen	900.225.000		
		Persentase Layanan BPSJ	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen							100 persen				
		Persentase Layanan BPSJ	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen							100 persen				
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di PSPJ				12 bulan	12 bulan	200.000.000	209.600.000	209.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	12 bulan	900.225.000	Dinas Kesehatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							109.531.595.000	46.948.698.000	71.974.405.000						145.166.660.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	11.984.198.000	12.117.064.000	13.826.351.000					100 persen	11.749.789.000		
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen								100 persen			
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen								100 persen			
1.03.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	16.000.000					100 Persen	17.312.000		
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	2 Dokumen	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	2 dokumen	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	14.312.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun			4 dokumen	4 dokumen				4 dokumen								
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)			2 dokumen	2 dokumen				2 dokumen								
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun			5 dokumen	5 dokumen				5 dokumen								
1.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	6.359.383.000	6.364.183.000	6.303.990.000					100 Persen	7.538.224.000		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	6.262.883.000	6.262.883.000	6.202.690.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya pngktn	DPUPR	14 kali	7.437.724.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.03.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	95.000.000	99.800.000	99.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	95.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	1 dokumen	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>35.578.000</b>	<b>35.578.000</b>	<b>35.578.000</b>							<b>34.862.000</b>	
1.03.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kertas kerja aset yang disusun				2 laporan	2 laporan	35.578.000	35.578.000	35.578.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	2 laporan	34.862.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>22.254.000</b>	<b>17.754.000</b>	<b>17.754.000</b>						100 persen	<b>22.300.000</b>	
1.03.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	1 kali	9.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan yang dilaksanakan				2 Kali	3 Kali	12.754.000	12.754.000	12.754.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	3 Kali	12.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>590.000.000</b>	<b>640.000.000</b>	<b>659.480.000</b>						100 persen	<b>417.544.000</b>	
1.03.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DPUPR	12 bulan	3.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
1.03.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan 7 unit	12 bulan 23 unit	215.000.000	265.000.000	265.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan 23 unit	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	5.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	134.000.000	134.000.000	134.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	11 bulan	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	3.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				50 orang/kali	150 orang/kali	200.000.000	200.000.000	219.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	150 orang/kali	106.044.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01. 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.295.864.000</b>	<b>1.295.864.000</b>	<b>1.295.864.000</b>						100 persen	<b>0</b>	
1.03.01. 2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan				2 Unit	1 Unit	1.295.864.000	1.295.864.000	1.295.864.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	DPUPR	1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Penataan Ruang	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	2.769.691.000	2.963.143.000	4.713.143.000					100 persen	2.950.818.000		
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	3.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	2.535.346.000	2.535.346.000	4.285.346.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	2.552.280.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	231.345.000	424.797.000	424.797.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	395.538.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	895.428.000	784.542.000	784.542.000					100 persen	768.729.000		
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	609.428.000	559.292.000	559.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	497.758.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat -alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala				10 Unit	10 Unit	86.000.000	86.000.000	86.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPUPR	10 Unit	70.971.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	150.000.000	89.250.000	89.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya pngktn	DPUPR	1 Unit	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	kegiatan pelayanan publik.				
1.03.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya pngktn kualitas pelayanan publik.	DPUPR	12 bulan	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	27 unit		18 unit	96,4 Persen	96,4 Persen	<b>19.085.319.000</b>	<b>13.875.756.000</b>	<b>13.915.851.000</b>						96,4 Persen	<b>26.167.227.000</b>	
		Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 persen		82,76 persen	93,10 persen	93,10 persen									93,10 persen		
1.03.02. 2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	27 unit		18 unit	27 unit	33 unit	<b>17.564.010.000</b>	<b>12.018.847.000</b>	<b>12.062.822.000</b>						33 unit	<b>23.895.847.000</b>	
1.03.02. 2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah lahan yang dibebaskan					19 bidang	3.021.763.000	3.095.000.000	3.095.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	19 bidang	3.095.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah lokasi Tanggul Sungai yang dibangun				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
1.03.02. 2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang Terbangun				2 Lokasi	2 Lokasi	200.000.000	200.000.000	370.163.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	2 Lokasi	3.600.847.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02. 2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun				3 Lokasi	1 Lokasi	8.400.000.000	2.500.000.000	2.499.975.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1 Lokasi	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah bulan pemeliharaan / rehabilitasi bangunan perkuatan tebing					12 bulan	1.350.000.000	1.550.000.000	2.046.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	12 bulan	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah lokasi Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				3 lokasi	5 lokasi					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				5 lokasi		
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah bulan pemeliharaan / rehabilitasi stasiun pompa pengendali banjir					12 Bulan	1.000.000.000	1.663.197.000	632.172.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	12 Bulan	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Stasiun Pompa Pengendali Banjir yang terpelihara				5 Lokasi	30 Unit									30 Unit		
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah bulan operasional stasiun pompa banjir					12 Bulan	3.592.247.000	3.010.650.000	3.419.227.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	12 Bulan	5.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara					30 Unit									30 Unit		
1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	85.03 persen		78.74 persen	82.57 persen	82.57 persen	<b>1.521.309.000</b>	<b>1.856.909.000</b>	<b>1.853.029.000</b>						82.57 persen	<b>2.271.380.000</b>	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah bulan pemeliharaan jaringan irigasi					12 Bulan	1.521.309.000	1.856.909.000	1.853.029.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob,	Kota Pekalongan	12 Bulan	2.271.380.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah lokasi jaringan irigasi				800	3 Lokasi									3 Lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
														Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
		yang direhab				Meter					Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.		200 M		
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					200 M											
1.03.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	92,11 persen		85,77 persen	88,39 persen	88,39 persen	1.375.000.000	265.000.000	315.000.000					88,39 persen	1.379.855.000		
1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota dilaksanakan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.375.000.000	265.000.000	315.000.000					100 Persen	1.379.855.000		
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sarpras air bersih yang direvitalisasi				3 Lokasi	3 Lokasi	1.375.000.000	265.000.000	315.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	3 Lokasi	1.379.855.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	100,00 persen		20 persen	40,00 persen	40,00 persen	610.000.000	675.000.000	725.000.000					40,00 persen	2.811.969.000		
1.03.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	100 Persen		20 persen	40 Persen	40 Persen	610.000.000	675.000.000	725.000.000					40 Persen	2.811.969.000		
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Lokasi Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Lokasi	1 Lokasi	610.000.000	675.000.000	725.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Lokasi	2.306.969.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				0 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga									200 Rumah Tangga		
1.03.05	<b>PROGRAM</b>	Persentase rumah tangga	12,87		9,87 persen	11,07	11,07	4.130.000.000	1.176.798.000	1.382.305.000					11,07	545.131.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen			persen	persen							persen					
1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	60051 unit		59751 unit	59751 unit	59751 unit	<b>4.130.000.000</b>	<b>1.176.798.000</b>	<b>1.382.305.000</b>				59751 unit	<b>545.131.000</b>				
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk pelayanan dasar menggunakan SPALD-T (IKK Output)				2 Unit	2 Unit	3.575.000.000	1.095.000.000	1.291.507.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kota Pekalongan	2 Unit	545.131.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja				1 Unit	0 Unit	555.000.000	81.798.000	90.798.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kota Pekalongan	0 Unit		0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase drainase dalam kondisi baik	71,49 persen		66,45 persen	68,47 persen	68,47 persen	<b>31.612.433.000</b>	<b>5.865.233.000</b>	<b>16.753.456.000</b>					68,47 persen	<b>9.313.169.000</b>			
1.03.06.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	177142,18 meter		169642,18 meter	169642,18 meter	178504,65 meter	<b>31.612.433.000</b>	<b>5.865.233.000</b>	<b>16.753.456.000</b>					178504,65 meter	<b>9.313.169.000</b>			
1.03.06	Pembangunan Sistem	Jumlah Drainase yang				500	3 Lokasi	1.304.933.000	1.404.933.000	11.851.147.000	Kota	Dana	Membangun	7. Pembangunan	Kota	3 Lokasi	1.955.169.000	Dinas Pekerjaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.01.05	Drainase Perkotaan	dibangun/ditingkatkan				Meter					Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Pekalongan			Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah lokasi drainase yang dibangun (bankeu)				0 lokasi	2 Lokasi									2 Lokasi		
		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 meter	500 Meter									500 Meter		
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi					683 M	22.200.000.000	2.200.000.000	2.120.604.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	683 M	4.158.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah bulan operasional dan pemeliharaan sistem drainase					12 Bulan	1.688.500.000	2.260.300.000	2.781.705.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	12 Bulan	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah subsistem drainase yang dipelihara				8 Sistem	8 Sistem									8 Sistem		
		Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara					260277.98 M									260277.98 M		
1.03.08.2.01	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,74 persen		17,24 persen	17,84 persen	17,84 persen	<b>1.308.310.000</b>	<b>1.555.710.000</b>	<b>2.006.739.000</b>						17,84 persen	<b>1.858.898.000</b>	
1.03.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	1950 dokumen		300 dokumen	320 dokumen	320 dokumen	<b>1.308.310.000</b>	<b>1.555.710.000</b>	<b>2.006.739.000</b>						320 dokumen	<b>1.858.898.000</b>	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan	Jumlah Aplikasi Bangunan Gedung yang dibuat				1 Aplikasi	1 Aplikasi	236.000.000	236.000.000	314.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan	Kota Pekalongan	1 Aplikasi	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Data Bangunan Gedung ber-IMB yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
															Perubahan Iklim	ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.		
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kab/kota yang (IKK Output)			2 Bangunan	2 Bangunan	997.310.000	1.194.710.000	1.568.463.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	2 Bangunan	1.598.898.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang dipelihara/dirawat (IKK Output)			1 Bangunan	1 Bangunan	75.000.000	125.000.000	124.276.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1 Bangunan	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	86,57 persen		81,12 persen	83,30 persen	83,30 persen	<b>38.720.773.000</b>	<b>10.708.975.000</b>	<b>22.369.103.000</b>					83,30 persen	<b>91.122.570.000</b>		
1.03.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	132.809 KM		124.448 KM	127.792 KM	127.792 KM	<b>38.720.773.000</b>	<b>10.708.975.000</b>	<b>22.369.103.000</b>					127.792 KM	<b>91.122.570.000</b>		
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Jalan dan Jembatan Usulan DAK Tahun 2024 yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	64.500.000	64.500.000	64.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Dokumen	64.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Laporan Survey Jalan dan Jembatan yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	126.100.000	126.100.000	126.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Dokumen	64.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun			0.5 Km	0.288 Km	1.300.000.000	1.300.000.000	705.124.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	8. Perluasan dan pening katan kualitas pembangunan layanan air	Kota Pekalongan	0.288 Km	52.698.870.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPDP 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan	Umum	n Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.				
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah lokasi jalan yang ditingkatkan (BANKEU)					2 lokasi	11.465.000.000	3.364.000.000	15.069.086.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	2 lokasi	16.316.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur dan fungsi) (IKK Output)				1.5 km	2.378 km				Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi					2.378 km		
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi				0.5 Km	0.26 Km	1.646.545.000	1.186.975.000	832.518.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	0.26 Km	2.885.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (IKK Output)				152.603 Km	2.5 Km	2.913.000.000	2.920.200.000	3.855.710.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	2.5 Km	6.546.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang saluran dan trotoar yang dipelihara				305.206 Km	0.282 Km									0.282 Km		
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti				11 Meter	11 Meter	1.200.000.000	1.200.000.000	1.172.765.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	11 Meter		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara (IKK Output)				1384.6 Meter	200 Meter	544.800.000	547.200.000	543.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi	Kota Pekalongan	200 Meter	546.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
												Dasar	perkotaan.					
1.03.11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	21,20 persen		7,87 persen	13,20 persen	13,20 persen	330.562.000	330.562.000	218.005.000					13,20 persen	158.996.000		
1.03.11.2.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	Persentase terselenggaranya pelatihan dan pembinaan lembaga konstruksi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	255.562.000	255.562.000	165.385.000					100 Persen	108.996.000		
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan					14 Orang	133.741.000	133.741.000	29.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	14 Orang	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota				40 Orang	14 Orang								14 Orang			
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah pembinaan untuk tenaga konstruksi wilayah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	121.821.000	121.821.000	136.335.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	50 Orang	48.996.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11.2.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	75.000.000	75.000.000	52.620.000					100 Persen	50.000.000		
1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi					0 Dokumen	75.000.000	75.000.000	52.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 Dokumen	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		jumlah dokumen penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang meliputi Analisa Standar Belanja Bangunan, data dan informasi jasa konstruksi, data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				1 Dokumen	4 Dokumen								4 Dokumen			
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	375.000.000	378.600.000	462.595.000					100,00 persen	59.056.000		
1.03.12.	<b>Penetapan Rencana</b>	Persentase ketercapaian	100		100 Persen	100	100	25.000.000	25.000.000	25.000.000					100	25.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.01	Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR	Persen			Persen	Persen											
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi Perwal RDTR Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 Kali	1 Kali	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1 Kali	25.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12.2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>350.000.000</b>	<b>353.600.000</b>	<b>437.595.000</b>						100 Persen	<b>34.056.000</b>	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					0 Dokumen	350.000.000	353.600.000	437.595.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	0 Dokumen	34.056.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen SPPR				1 Dokumen	1 Dokumen					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Dokumen		
		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							<b>19.497.985.000</b>	<b>42.514.961.000</b>	<b>48.163.797.000</b>							<b>28.761.288.000</b>	
1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>4.655.359.000</b>	<b>4.671.459.000</b>	<b>4.469.295.000</b>						100 persen	<b>4.839.842.000</b>	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>						100 persen	<b>17.350.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	<b>Perangkat Daerah</b>	perangkat daerah																
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	2 Dokumen	2.750.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	2 Dokumen	1.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 bulan 4 dokumen 2 dokumen 5 dokumen	12.950.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>3.102.461.000</b>	<b>3.107.261.000</b>	<b>2.566.279.000</b>						100 persen	<b>3.352.671.000</b>	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	3.070.811.000	3.070.811.000	2.509.129.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	14 kali	3.321.021.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	34.800.000	55.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	1 Dokumen	1.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>9.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>						100 persen	<b>9.500.000</b>	
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	1 kali	9.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>234.000.000</b>	<b>234.000.000</b>	<b>332.868.000</b>						100 persen	<b>209.686.000</b>	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	5.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	12 Bulan	52.000.000	52.000.000	100.268.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	48.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				35 unit	35 unit									35 unit		
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	2.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman				11 Bulan	11 Bulan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur	12. Penerapan MRI secara	Dinperkim	11 Bulan	49.186.000	Dinas Perumahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	5.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	2.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 orang/ Kali	100 orang/ Kali	100.000.000	100.000.000	150.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	100 orang/ Kali	98.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>954.000.000</b>	<b>962.600.000</b>	<b>1.187.600.000</b>					100 persen	<b>964.278.000</b>		
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	1.800.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	757.200.000	757.200.000	982.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Dinperkim	12 Bulan	758.200.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
												Dan Pelayanan Dasar	pelayanan publik.					
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 Bulan	12 Bulan	195.000.000	203.600.000	203.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	204.278.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>339.398.000</b>	<b>346.598.000</b>	<b>361.548.000</b>					100 persen	<b>286.357.000</b>		
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	12 Bulan	113.398.000	114.598.000	114.598.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	90.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	126.000.000	132.000.000	141.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	1 unit	76.357.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				1 unit	12 bulan	100.000.000	100.000.000	105.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 bulan	120.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	92,35 persen		91,35 persen	91,35 persen	91,35 persen	<b>4.949.196.000</b>	<b>2.142.396.000</b>	<b>2.367.396.000</b>					91,35 persen	<b>1.714.461.000</b>		
1.04.02.2.01	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<b>75.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>					1 dokumen	<b>120.000.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Persentase ketersediaan dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 persen		100 persen		100 persen							100 persen				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen							100 Persen				
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani, data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	1 dokumen	60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.02.2.02	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Persentase Ketercapaian Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	90.000.000	90.000.000	90.000.000					100 Persen	50.000.000		
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana yang dilaksanakan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	2 Kegiatan	10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator			2 kegiatan	2 kegiatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial	Rumah Korban Bencana	2 kegiatan	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	





Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah bagi korban bencana yang dibangun				5 Unit	5 Unit	2.621.696.000	156.696.000	156.696.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban bencana	5 Unit	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.05	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.542.560.000</b>	<b>1.767.560.000</b>						100 persen	<b>1.200.000.000</b>	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rusunawa yang dipelihara Jumlah unit villa/pesanggrahan (Pondok Boro) yang dipelihara				3 Unit 1 unit	3 Unit 1 unit	1.200.000.000	1.542.560.000	1.767.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Susun	3 Unit 1 unit	1.200.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Luas kawasan permukiman kumuh	0 hektar		498,47 hektar	291,47 hektar	291,47 hektar	<b>2.645.400.000</b>	<b>27.608.076.000</b>	<b>32.609.076.000</b>						291,47 hektar	<b>17.004.276.000</b>	
1.04.03.2.01	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>236.400.000</b>	<b>236.400.000</b>	<b>136.400.000</b>						100 persen	<b>236.400.000</b>	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DE Konsultansi Perencana yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	168.000.000	168.000.000	68.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan	Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	168.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali	68.400.000	68.400.000	68.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	12 Kali	68.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.02	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>550.000.000</b>	<b>550.000.000</b>	<b>325.000.000</b>						100 persen	<b>320.000.000</b>		
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DE Konsultasi Perencana yang disusun Jumlah lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang disurvei dan ditetapkan				0 Dokumen 4 lokasi	2 Dokumen 1 lokasi	400.000.000	400.000.000	270.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	2 Dokumen 1 lokasi	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah program pemerintah pusat atau provinsi yang difasilitasi				2 program	2 program	50.000.000	50.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	2 program	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	508,47 hektar		10 hektar	128 hektar	128 hektar	<b>1.859.000.000</b>	<b>26.821.676.000</b>	<b>32.147.676.000</b>						128 hektar	<b>16.447.876.000</b>	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	74.000.000	74.000.000	74.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	74.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah jalan lingkungan dan saluran lingkungan yang ditingkatkan  Jumlah rumah di kawasan permukiman kumuh yang dibangun				0 Ha	253 Lokasi	-	26.747.676.000	32.073.676.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	253 Lokasi  0 Unit	15.373.876.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2147,88 hektar		1649,41 hektar	1856,41 hektar	1856,41 hektar	<b>6.620.000.000</b>	<b>7.310.000.000</b>	<b>7.490.000.000</b>						1856,41 hektar	<b>4.588.188.000</b>	
1.04.04.2.01	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	1,31 persen		0,52 persen	0,52 persen	0,52 persen	<b>6.620.000.000</b>	<b>7.310.000.000</b>	<b>7.490.000.000</b>						0,52 persen	<b>4.588.188.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	<b>Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh yang diPerbaiki				650 Unit	650 Unit	6.620.000.000	7.310.000.000	7.490.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	RTLH	650 Unit	4.588.188.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	14,55 persen		14,44 persen	14,48 persen	14,48 persen	<b>628.030.000</b>	<b>783.030.000</b>	<b>1.228.030.000</b>						14,48 persen	<b>614.521.000</b>	
1.04.05.2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	79,35 persen		25 persen	46,74 persen	46,74 persen	<b>628.030.000</b>	<b>783.030.000</b>	<b>1.228.030.000</b>						46,74 persen	<b>614.521.000</b>	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah aplikasi infrastruktur perumahan dan permukiman yang dibangun dan dikelola				1 Aplikasi	1 Aplikasi	240.000.000	240.000.000	505.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan	1 Aplikasi	230.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah fasilitas jalan lingkungan yang ditangani				330 meter	330 meter	280.000.000	380.000.000	560.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	PSU Perumahan	330 meter	280.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah fasilitas RTNH yang ditangani				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				4 Lokasi	4 Lokasi									4 Lokasi		
1.04.05	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil				1	1	108.030.000	163.030.000	163.030.000	Kota	Dana	Memperkuat	6. Pemantapan	PSU	1	104.521.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.01.03	Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi tentang PSU Perumahan (Unit Rumah yang Terfasilitasi Air Minum, Jalan Lingkungan, Akses Sanitasi, RTNH, dan PJU) yang disusun  Jumlah perumahan yang aset PSUnya telah diserahkan				Dokumen	Dokumen				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Perumahan	Dokumen		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
						10 Unit	10 Unit									10 Unit			
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
2.10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>							329.285.000	329.285.000	329.285.000							1.099.348.000		
2.10.05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	320.000.000	320.000.000	320.000.000							100 persen	1.090.262.000	
2.10.05.2.01	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya  Presentase tercapainya kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah yang tertangani	73.35 persen  73.35 persen		73.35 persen  73.35 persen	73.35 persen  100 persen	73.35 persen  100 persen	320.000.000	320.000.000	320.000.000							73.35 persen  100 persen	1.090.262.000	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/Kota yang disusun  Jumlah Dokumen Proses Legalisasi Pengadaan Tanah  Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah  Jumlah Lokasi Tanah /Bangunan yang diGanti Rugi karena adanya proyek Pemerintah				4 Dokumen  2 Dokumen  5 lokasi  2 lokasi	0 Dokumen  1 Dokumen  0 lokasi  6 lokasi	320.000.000	320.000.000	320.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Dokumen  1 Dokumen  0 lokasi  6 lokasi		1.090.262.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.06	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,</b>	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	9.285.000	9.285.000	9.285.000							100 persen	9.086.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	<b>DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen		50 persen	50 persen	50 persen							50 persen				
2.10.06.2.01	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen		50 persen	50 persen	50 persen	9.285.000	9.285.000	9.285.000				50 persen	9.086.000			
		Persentase tercapainya kegiatan redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen							100 persen				
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang dilaksanakan				0 Dokumen	4 kali	9.285.000	9.285.000	9.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Masyarakat Kota Pekalongan	4 kali	9.086.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		persentase ketercapaian penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				25 persen	0 persen							0 persen				
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							11.894.848.000	12.135.048.000	13.107.528.000					12.737.740.000			
1.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	5.117.274.000	5.142.574.000	5.112.132.000				100 persen	5.439.494.000			
1.05.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	16.000.000	16.000.000	7.647.000				100 persen	62.450.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	2 Dokumen	10.750.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	2 Dokumen	1.650.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	6 bulan	12.000.000	12.000.000	3.647.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	6 bulan	50.050.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen									
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen									
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
1.05.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>4.257.134.000</b>	<b>4.261.934.000</b>	<b>4.260.934.000</b>						100 persen	<b>4.376.416.000</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	4.203.484.000	4.203.484.000	4.203.484.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	14 kali	4.322.766.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	52.000.000	56.800.000	55.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	52.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Satpol P3KP	1 Dokumen	1.650.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
												Publik	pelayanan publik.					
1.05.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	9.500.000	30.000.000	17.500.000				100 persen	93.265.000			
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	30.000.000	17.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	1 kali	9.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah pakaian tahan api yang diadakan				2 set	1 set								1 set			
1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	239.439.000	239.439.000	238.881.000				100 persen	220.498.000			
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	7.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	34.939.000	34.939.000	26.385.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	30.998.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				3 unit	2 unit								2 unit			
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	12 bulan	97.000.000	97.000.000	97.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	97.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	7.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Satpol P3KP	12 bulan	2.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan																
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				50 orang/kali	85 orang/kali	80.000.000	80.000.000	87.996.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	85 orang/kali	65.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>130.458.000</b>	<b>130.458.000</b>	<b>131.620.000</b>					100 persen	<b>127.651.000</b>		
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	128.458.000	128.458.000	130.620.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	125.651.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>464.743.000</b>	<b>464.743.000</b>	<b>455.550.000</b>					100 persen	<b>559.214.000</b>		
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	444.743.000	444.743.000	436.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol P3KP	12 bulan	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	70,00 persen		60,00 persen	64,00 persen	64,00 persen	<b>5.850.299.000</b>	<b>6.047.099.000</b>	<b>7.145.411.000</b>					64,00 persen	<b>6.123.324.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	100 persen		80 persen	90 persen	90 persen	1.647.410.000	1.647.410.000	2.814.041.000					90 persen	1.819.110.000		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan operasi gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan				48 kali	20 kali	106.000.000	106.000.000	35.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	20 kali	106.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan sarasehan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali	275.000.000	275.000.000	239.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	6 kali	446.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Penindakan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan				200 Kasus	350 Kasus								350 Kasus			
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan				365 hari	365 hari	1.020.410.000	1.020.410.000	2.395.610.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	365 hari	1.020.410.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan				120 hari	120 hari								120 hari			
		Jumlah kegiatan Operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, Jambore)				25 kali	25 kali								25 kali			
		Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan				48 kali	48 kali								48 kali			
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Bari yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah seragam, sepatu dan topi linmas yang diadakan				0 Dokumen	2250 set								2250 set			
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan pemberdayaan linmas yang dilaksanakan				3 kali	2 kali	25.000.000	25.000.000	13.131.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	2 kali	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Satlinmas yang dilatih dan dikukuhkan				35 orang	35 orang								35 orang			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan Bintel Peundang-Undangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP yang dilaksanakan Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya				6 kali	1 kali	48.000.000	48.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	1 kali	48.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						155 Orang	155 Orang									155 Orang		
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan yang disusun Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan				2 Dokumen	1 Dokumen	148.000.000	148.000.000	118.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	1 Dokumen	148.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						4 kali	2 kali									2 kali		
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada terlayani yang disusun Jumlah surat pernyataan pelanggaran yang dikeluarkan				2 Laporan	0 Laporan	25.000.000	25.000.000	300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	0 Laporan	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
							30 dokumen									30 dokumen		
1.05.02.2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	120 perda		20 perda	20 perda	20 perda	<b>4.182.926.000</b>	<b>4.379.726.000</b>	<b>4.329.470.000</b>						20 perda	<b>4.284.680.000</b>	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan intelejen/deteksi dini yang dilaksanakan				48 kali	36 kali	20.000.000	20.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	36 kali	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal yang dilaksanakan Jumlah operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan kantor wilayah Tegal yang dilaksanakan Jumlah operasi penegakan				48 kali	48 kali	3.949.661.000	4.359.726.000	4.314.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	48 kali	4.045.981.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						48 kali	48 kali									48 kali		
						96 kali	96 kali									96 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	21 persen		8 persen	13 persen	13 persen	19.963.000	19.963.000	1.900.000					13 persen	19.534.000		
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada yang disusun				3 Laporan	2 Laporan	19.963.000	19.963.000	1.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	PPNS	2 Laporan	19.534.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	927.275.000	945.375.000	849.985.000					100,00 persen	1.174.922.000		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	723.000.000	741.100.000	696.300.000					100 persen	975.040.000		
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi relawan damkar yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	53.000.000	53.000.000	49.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	2 kali	53.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang ditangani Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawal, Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan Jumlah Perlengkapan Damar yang diadakan				185 kali	250 kali	600.000.000	618.100.000	607.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	250 kali	837.040.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan Barat,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Masyarakat	3 kali	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Podosugih	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				Penyelamatan
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah HT yang diadakan				4 unit	4 unit	10.000.000	10.000.000	7.145.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 unit	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Pelatihan Gabungan Damkar Kab/Kota Lain yang Dilaksanakan				3 kali	1 kali	40.000.000	40.000.000	12.555.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Rakor dengan Damkar Kab/Kota Lain yang diselenggarakan				3 kali	1 kali			1 kali								
1.05.04.2.02	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>46.426.000</b>	<b>46.426.000</b>	<b>25.000.000</b>						100 persen	<b>45.428.000</b>	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah kegiatan pendataan sarpras proteksi kebakaran di lokasi /instansi/badan yang dilaksanakan				48 Dokumen	28 Dokumen	46.426.000	46.426.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Instansi/badan	28 Dokumen	45.428.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah Pitot Pressure Gauge (Penguji Tekanan Hidran) yang diadakan				0 Dokumen	1 unit			1 unit								
1.05.04.2.04	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>83.567.000</b>	<b>83.567.000</b>	<b>56.403.000</b>						100 persen	<b>81.770.000</b>	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kampanye pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang dilaksanakan				12 kali	12 kali	50.000.000	50.000.000	34.836.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 kali	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah pelayanan penanggulangan kebakaran yang dibantu relawan damkar yang dilaksanakan				48 kali	35 kali	33.567.000	33.567.000	21.567.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	35 kali	31.770.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.05	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan</b>	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>74.282.000</b>	<b>74.282.000</b>	<b>72.282.000</b>						100 persen	<b>72.684.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	<b>Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>																	
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia yang disusun				48 Laporan	48 Laporan	74.282.000	74.282.000	72.282.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	48 Laporan	72.684.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							3.383.046.000	3.408.746.000	3.578.731.000						3.275.314.000		
1.05.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.877.189.000	1.879.889.000	1.989.646.000						100 persen	1.880.009.000	
1.05.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	25.450.000						100 Persen	17.707.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	2 dokumen	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	2 dokumen	1.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	21.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	BPBD	12 bulan	13.707.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
1.05.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	1.428.241.000	1.433.041.000	1.471.361.000						100 Persen	1.444.315.000	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	1.395.191.000	1.395.191.000	1.432.961.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	14 kali	1.411.265.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	31.550.000	36.350.000	36.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	31.550.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	1 dokumen	1.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	20.520.000	16.020.000	5.000.000						100 Persen	46.654.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	1 kali	34.054.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				40 orang	0 orang	11.020.000	11.020.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	BPBD	0 orang	12.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kuualitas pelayanan publik.				
1.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	153.303.000	153.303.000	203.303.000					100 Persen	135.420.000		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos  Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan	12 bulan	58.400.000	58.400.000	103.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	58.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	1.203.000	1.203.000	1.203.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	5.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	12 bulan	29.700.000	29.700.000	29.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	29.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	9.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				25 orang/kali	30 orang/kali	50.000.000	50.000.000	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	BPBD	30 orang/kali	28.320.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kuualitas pelayanan publik.				
1.05.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>106.858.000</b>	<b>109.258.000</b>	<b>111.366.000</b>						100 Persen	<b>100.213.000</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	1.800.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	60.516.000	60.516.000	60.516.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	58.313.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	44.842.000	47.242.000	49.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	40.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>152.267.000</b>	<b>152.267.000</b>	<b>173.166.000</b>						100 Persen	<b>135.700.000</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	93.443.000	93.443.000	110.311.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	79.859.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	1 unit	9.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	49.324.000	49.324.000	53.355.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD	12 bulan	46.341.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang					1 Paket									1 Paket		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Dipelihara/Direhabilitasi																
1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>1.505.857.000</b>	<b>1.528.857.000</b>	<b>1.589.085.000</b>			100,00 persen	<b>1.395.305.000</b>				
1.05.03.2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>256.597.000</b>	<b>261.597.000</b>	<b>205.000.000</b>			100 Persen	<b>156.725.000</b>				
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun			1 dokumen	1 dokumen		100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos) Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan			3 jenis	3 jenis		156.597.000	161.597.000	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 jenis 1 kali 3 kali	56.725.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>381.365.000</b>	<b>346.365.000</b>	<b>317.137.000</b>			100 Persen	<b>162.400.000</b>				
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar/masyarakat yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana			200 orang	200 orang		62.400.000	62.400.000	62.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	200 orang	62.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan			4 unit	4 unit		268.965.000	233.965.000	233.965.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 unit	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi penanganan pasca bencana			12 bulan	6 bulan		50.000.000	50.000.000	20.772.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	6 bulan	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan</b>	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>867.895.000</b>	<b>920.895.000</b>	<b>1.066.948.000</b>			100 Persen	<b>985.325.000</b>				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	<b>Evakuasi Korban Bencana</b>	penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)																
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi				12 bulan	12 bulan	717.895.000	770.895.000	916.948.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	835.325.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan				3 kejadian	3 kejadian	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 kejadian	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1.06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							<b>9.321.565.000</b>	<b>9.753.310.000</b>	<b>9.182.758.000</b>							<b>9.381.193.667</b>	
1.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>3.514.577.000</b>	<b>3.720.877.000</b>	<b>3.660.855.000</b>						100 persen	<b>4.493.228.667</b>	
1.06.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>19.425.000</b>						100 persen	<b>17.850.000</b>	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	2 dokumen	2.750.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	2 dokumen	1.650.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	15.425.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Dinsos P2KB	12 bulan	13.450.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen				Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		4 dokumen		Keluarga Berencana
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
1.06.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	2.633.324.000	2.638.124.000	2.456.085.000						100 persen	3.663.169.667	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	2.583.374.000	2.583.374.000	2.404.760.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	14 kali	3.613.219.667	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	48.300.000	53.100.000	49.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	48.300.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	1 dokumen	1.650.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	9.500.000	5.000.000	5.000.000						100 persen	9.500.000	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	1 kali	9.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	250.250.000	250.250.000	367.480.000						100 persen	339.800.000	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan pembangunan kantor				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinsos P2KB	12 bulan	10.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.			Berencana	
1.06.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	55.250.000	55.250.000	133.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	90.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 unit	17 unit									17 unit		
1.06.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	7.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	75.000.000	75.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	11 bulan	75.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	10.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	2.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				200 orang/kali	150 orang/kali	90.000.000	90.000.000	134.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	150 orang/kali	144.800.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01. 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>259.789.000</b>	<b>264.589.000</b>	<b>239.409.000</b>						100 persen	<b>195.885.000</b>	
1.06.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dinsos P2KB	12 bulan	2.400.000	Dinas Sosial, Pengendalian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	162.589.000	162.589.000	137.409.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	128.285.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	94.800.000	99.600.000	99.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	65.200.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>345.714.000</b>	<b>546.914.000</b>	<b>573.456.000</b>					100 persen	<b>267.024.000</b>		
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	256.564.000	257.764.000	262.864.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	223.124.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	70.250.000	270.250.000	291.692.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	1 unit	25.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	18.900.000	18.900.000	18.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinsos P2KB	12 bulan	18.900.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan	75 persen		58 persen	58 persen	58 persen	<b>478.171.000</b>	<b>487.071.000</b>	<b>517.051.000</b>					58 persen	<b>392.613.000</b>		
1.06.02.2.01	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen		10 persen	10 persen	10 persen	<b>148.056.000</b>	<b>155.756.000</b>	<b>169.406.000</b>					10 persen	<b>164.235.000</b>		
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah bulan pendampingan program KUBE				12 bulan	12 bulan	148.056.000	155.756.000	169.406.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	2. Peningkatan ketersediaan dan	Warga Miskin	12 bulan	164.235.000	Dinas Sosial, Pengendalian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
																		Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.06.02.2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen		75 persen	75 persen	75 persen	<b>330.115.000</b>	<b>331.315.000</b>	<b>347.645.000</b>					75 persen	<b>228.378.000</b>			
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS				12 bulan	12 bulan	99.115.000	99.115.000	124.115.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	12 bulan	91.788.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Jumlah rakor pembinaan psks yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali				
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS				12 bulan	12 bulan	150.000.000	157.200.000	148.530.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	12 bulan	136.590.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Jumlah TKSK yang difasilitasi				6 orang	5 orang								5 orang				
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Karang Taruna				1 kali	1 kali	81.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	1 kali		0	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>1.565.354.000</b>	<b>1.601.055.000</b>	<b>1.602.420.000</b>					100,00 persen	<b>2.403.604.000</b>			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		(SPM/IKK outcome)																
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.500.357.000	1.130.503.000	1.164.010.000				100 Persen	1.965.070.000			
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah pemberian permakanan yang diberikan				60 orang	60 orang	249.004.000	365.520.000	365.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	60 orang	618.720.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM Jumlah kegiatan dalam peringatan harlun yang difasilitasi Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI ( Hari Disabilitas Internasional )				12 bulan	12 bulan	1.096.003.000	764.983.000	798.490.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	12 bulan 0 kegiatan 0 kali	1.191.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3,98 persen		3,55 persen	3,55 Persen	3,55 Persen	64.997.000	470.552.000	438.410.000				3,55 Persen	438.534.000			
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 oktober yang mendapat bantuan sembako Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako Jumlah lansia yang mendapat bantuan sembako				83 Orang	83 Orang	249.004.000	249.005.000	249.005.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	83 Orang 225 Orang 600 Orang	213.184.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah kegiatan pelayanan anak rentan kesejahteraan sosial Jumlah PMKS yang				1 Kegiatan	1 Kegiatan	95.350.000	95.350.000	71.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar	PPKS	1 Kegiatan 11	95.350.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		mendapat alat bantu Jumlah wanita rawan sosial yang mendapat pelatihan				10 Orang	10 Orang				Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.		Orang 10 Orang		Berencana
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah massal				10 pasang	10 pasang	64.997.000	64.997.000	58.657.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	10 pasang	70.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				83 Orang	83 Orang	60.000.000	61.200.000	59.028.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PPKS	83 Orang	60.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	52.49 persen		56.69 persen	56.69 persen	56.69 persen	<b>1.332.587.000</b>	<b>1.679.031.000</b>	<b>1.619.146.000</b>						56.69 persen	<b>1.085.100.000</b>	
1.06.05.2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase graduasi KPM PKH	10 Persen		10 Persen	10 Persen	10 Persen	<b>1.332.587.000</b>	<b>1.679.031.000</b>	<b>1.619.146.000</b>						10 Persen	<b>1.085.100.000</b>	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi BPNT Jumlah bulan pelayanan SLRT Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun				12 bulan	12 bulan	686.650.000	733.094.000	671.709.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PKH	12 bulan 12 bulan 1 dokumen	736.600.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan pendampingan PKH				12 bulan	12 bulan	645.937.000	945.937.000	947.437.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui	PKH	12 bulan	348.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
		Jumlah KPM PKH yang mendapatkan sosialisasi				200 orang	200 orang					DBH Cukai Tembakau (CHT)		kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.		200 orang			
		Jumlah Penerima DBHCHT				500 orang	500 orang									500 orang			
1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.887.689.000	1.720.089.000	1.690.304.000							100,00 persen	536.000.000	
1.06.06.2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.887.689.000	1.720.089.000	1.690.304.000							100 persen	536.000.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah kegiatan bantuan untuk korban bencana alam yang difasilitasi				1 kegiatan	1 kegiatan	470.000.000	472.400.000	445.304.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Masyarakat	1 kegiatan	500.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan				12 bulan	12 bulan	1.417.689.000	1.247.689.000	1.245.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Masyarakat	12 bulan	36.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.06.07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	543.187.000	545.187.000	92.982.000							100 persen	470.648.000	
1.06.07.2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	543.187.000	545.187.000	92.982.000							100 persen	470.648.000	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					1 Dokumen	488.187.000	488.187.000	26.830.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat,	Taman Makam Pahlawan Nasional	1 Dokumen	385.648.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Jumlah Sarpras Taman Makam Pahlawan yang				1 lokasi	0 lokasi									0 lokasi			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	<b>Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	Output)																
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan informasi pembangunan keluarga kependudukan dan KB melalui penyuluhan langsung				51 kelompok	51 kelompok	110.000.000	111.200.000	98.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	51 kelompok	110.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB				12 bulan	12 bulan	2.731.938.000	3.423.782.000	3.419.857.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	12 bulan	1.744.994.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,8 persen		20,2 persen	20,2 persen	20,2 persen	<b>470.917.000</b>	<b>2.190.613.000</b>	<b>2.125.708.000</b>						20,2 persen	<b>720.046.000</b>	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan yang diadakan				20 unit	81 unit	184.442.000	1.901.738.000	1.917.233.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	81 unit	433.571.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB				480 orang	480 orang	286.475.000	288.875.000	208.475.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	480 orang	286.475.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	<b>PROGRAM</b>	Unmeet need KB	12,00		17,00 persen	15,00	15,00	<b>162.909.000</b>	<b>165.309.000</b>	<b>178.324.000</b>						15,00	<b>175.450.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>		persen			persen	persen								persen			
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	162.909.000	165.309.000	178.324.000						100 persen	175.450.000	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan PPKBD, KKB, kelompok kegiatan, rumah data kependudukan dan PPKS yang difasilitasi				5 kegiatan	5 kegiatan	162.909.000	165.309.000	178.324.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan	5 kegiatan	175.450.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
2.11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>							32.878.084.000	33.729.875.000	33.395.817.000							34.897.042.000	
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	13.870.676.000	13.875.137.000	14.277.769.000						100 persen	15.039.400.000	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	16.000.000						100 Persen	23.032.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	DLH	2 dokumen	2.750.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	2 dokumen	1.650.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Utara Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan 4 dokumen 2 dokumen 5 dokumen	18.632.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>10.098.974.000</b>	<b>10.108.286.000</b>	<b>9.732.039.000</b>						100 Persen	<b>11.932.596.000</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	9.997.324.000	9.997.324.000	9.621.077.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	14 kali	11.824.946.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	100.000.000	109.312.000	109.312.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	106.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	1 dokumen	1.650.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>52.532.000</b>	<b>48.032.000</b>	<b>48.032.000</b>						100 Persen	<b>21.875.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik Jumlah pakaian dinas yang diadakan				1 kali	1 kali	52.532.000	48.032.000	48.032.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	1 kali	21.875.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>371.750.000</b>	<b>445.750.000</b>	<b>462.017.000</b>					100 Persen	<b>280.900.000</b>		
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	5.700.000	5.700.000	5.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	5.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan	12 bulan	122.350.000	180.350.000	181.542.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	57.900.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	8.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	115.700.000	131.700.000	131.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	11 bulan	82.300.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	24.500.000	24.500.000	33.091.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	24.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	4.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	2.500.000	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				80 orang/kali	80 orang/kali	100.000.000	100.000.000	104.984.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	80 orang/kali	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>575.894.000</b>	<b>556.539.000</b>	<b>599.039.000</b>						100 Persen	<b>590.266.000</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	2.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	267.600.000	267.600.000	310.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	263.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	305.794.000	286.439.000	286.439.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	324.866.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>2.755.526.000</b>	<b>2.700.530.000</b>	<b>3.420.642.000</b>						100 Persen	<b>2.190.731.000</b>	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	225.846.000	225.846.000	176.646.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	162.982.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah bulan pemeliharaan dan Perizinan alat besar				12 bulan	12 bulan	2.392.580.000	2.311.566.000	3.091.616.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	1.897.449.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara				1 unit	1 unit	112.100.000	138.118.000	132.330.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	DLH	1 unit	105.300.000	Dinas Lingkungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
	Bangunan Lainnya	rutin/berkala									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Hidup		
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	20.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH	12 bulan	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	20 persen		20 persen	0 persen	20 persen	<b>75.000.000</b>	<b>221.500.000</b>	<b>194.455.000</b>						20 persen	<b>0</b>		
2.11.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen	<b>75.000.000</b>	<b>221.500.000</b>	<b>194.455.000</b>						2 dokumen	<b>0</b>		
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	221.500.000	194.455.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 Dokumen		0	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang terverifikasi				1 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen			
2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase limbah yang diolah	49,01 persen		33,37 persen	40,95 persen	40,95 persen	<b>1.385.099.000</b>	<b>1.511.842.000</b>	<b>1.494.831.000</b>						40,95 persen	<b>4.442.547.000</b>		
2.11.03.2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	53,57 persen		42,51 persen	52,38 persen	52,38 persen	<b>969.099.000</b>	<b>1.048.194.000</b>	<b>1.026.054.000</b>						52,38 persen	<b>920.999.000</b>		
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah monitoring terhadap kegiatan / usaha pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan				50 titik	50 titik	635.000.000	711.914.000	683.564.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Pelaku Usaha	50 titik	552.299.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan				30 kali	30 kali									30 kali			
		Jumlah sampah yang diambil dari sungai				3000 m3	3000 m3									3000 m3			
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Jumlah kampung iklim yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi	25.000.000	25.000.000	20.410.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Membangun Lingkungan Hidup,	7. Pembangunan sistem penanganan	Pelaku Usaha	1 lokasi	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim										Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.				
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah parameter yang diakreditasi				10 parameter	20 parameter	309.099.000	311.280.000	322.080.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Pelaku Usaha	20 parameter	343.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah sampel yang diuji				170 sampel	170 sampel									170 sampel		
		Jumlah Uji Profesiensi/uji banding				1 hasil uji	1 hasil uji									1 hasil uji		
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen		70.59 persen	76.47 persen	76.47 persen	416.000.000	463.648.000	468.777.000						76.47 persen	3.521.548.000	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah DIKPLHD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	66.000.000	102.000.000	93.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyarakat	1 dokumen	66.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah limbah cair yang dikelola				240000 M3	240000 M3	350.000.000	361.648.000	375.227.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyarakat	240000 M3	3.455.548.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,949 persen		2,889 persen	2,919 persen	2,919 persen	6.631.276.000	6.644.390.000	6.540.311.000						2,919 persen	3.933.751.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik	110.355 Ha		108.484 Ha	109.233 Ha	109.233 Ha	6.631.276.000	6.644.390.000	6.540.311.000						109.233 Ha	3.933.751.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan				4 lokasi	4 lokasi	6.256.276.000	6.247.330.000	6.194.151.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob,	RTH	4 lokasi	3.683.751.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/ berkala makam				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
														Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.			
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/ berkala Taman Kota Jumlah pengadaan konstruksi Taman Kota (SIDa)				1 lokasi	1 lokasi				Semua Kelurahan	Alokasi Umum			1 lokasi			
						4 lokasi	2 lokasi								2 lokasi			
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah TAHURA yang dipelihara				6 lokasi	6 lokasi	375.000.000	397.060.000	346.160.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	RTH	6 lokasi	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	100 persen		31,11 persen	13,33 persen	13,33 persen	<b>2.321.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.321.000</b>					13,33 persen	<b>2.271.000</b>		
2.11.05.2.01	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	Jumlah usaha / kegiatan yang diverifikasi untuk mengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundangan	45 usaha / kegiatan		6 usaha / kegiatan	6 usaha / kegiatan	6 usaha / kegiatan	<b>2.321.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.321.000</b>					6 usaha / kegiatan	<b>2.271.000</b>		
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan ke usaha / kegiatan yang memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3				14 usaha/kegiatan	14 usaha/kegiatan	2.321.000	2.321.000	2.321.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penangan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3	14 usaha/kegiatan	2.271.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	100 persen		16,67 persen	16,67 persen	16,67 persen	<b>160.774.000</b>	<b>49.750.000</b>	<b>32.350.000</b>					16,67 persen	<b>66.461.000</b>		
2.11.06.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh</b>	Persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>160.774.000</b>	<b>49.750.000</b>	<b>32.350.000</b>					100 persen	<b>66.461.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah inventarisasi data perusahaan di Kota Pekalongan berbasis aplikasi				1 kegiatan	0 kegiatan	117.624.000	16.500.000	11.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalongan	0 kegiatan	23.311.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Izin Lingkungan				30 perusahaan	10 perusahaan									10 perusahaan		
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berizin  Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi				2 kali	0 kali	38.150.000	30.750.000	18.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalongan	0 kali	38.150.000	Dinas Lingkungan Hidup
						65 perusahaan	65 perusahaan									65 perusahaan		
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD  Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH					0 Dokumen	5.000.000	2.500.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalongan	0 Dokumen	5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
						5 kali	5 kali									5 kali		
2.11.08.2.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen		50,00 persen	50,00 persen	50,00 persen	453.906.000	663.906.000	507.552.000						50,00 persen	404.307.000	
	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</b>	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	453.906.000	663.906.000	507.552.000						100 persen	404.307.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	<b>untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan																
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan capacity building ASN dan Non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan				3 kegiatan	3 kegiatan	100.000.000	310.000.000	289.691.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 kegiatan	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina				80 orang	80 orang	110.000.000	110.000.000	79.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	80 orang	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota Pekalongan				10 kegiatan	0 kegiatan	243.906.000	243.906.000	138.861.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 kegiatan	234.307.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan				2 event	1 event									1 event		
		Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup				2 kelompok	4 kelompok									4 kelompok		
		Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 event	0 event									0 event		
		Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan				4 lomba	4 lomba									4 lomba		
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				5 komunitas	5 komunitas									5 komunitas		
2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75 persen		75 persen	75 persen	75 persen	<b>88.209.000</b>	<b>88.209.000</b>	<b>72.229.000</b>						75 persen	<b>113.570.000</b>	
2.11.09.2.01	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup</b>	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	18 penghargaan		3 penghargaan	3 penghargaan	3 penghargaan	<b>88.209.000</b>	<b>88.209.000</b>	<b>72.229.000</b>						3 penghargaan	<b>113.570.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian Adiwiyata Tingkat Kota yang diselenggarakan Jumlah Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Daerah yang diselenggarakan Jumlah penilaian Sekolah Adiwiyata yang diusulkan ke Tingkat Provinsi dan Nasional				1 event	1 event	88.209.000	88.209.000	72.229.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 event 1 event 2 event	113.570.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	18.570.000	12.500.000	5.210.000						100 persen	18.171.000	
2.11.10.2.01	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	36 kasus		6 kasus	6 kasus	6 kasus	18.570.000	12.500.000	5.210.000						6 kasus	18.171.000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan belum berizin yang dilaksanakan				18 kali	18 kali	18.570.000	12.500.000	5.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	18 kali 0 kali	18.171.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase pengelolaan sampah	0,31 persen		2,19 persen	0,28 persen	0,28 persen	10.192.253.000	10.660.320.000	10.268.789.000						0,28 persen	10.876.564.000	
2.11.11.2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Persentase pengurangan sampah	18,19 persen		17,01 persen	17,46 persen	17,46 persen	10.192.253.000	10.660.320.000	10.268.789.000						17,46 persen	10.876.564.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional pengelolaan kebersihan dan pelayanan sampah Jumlah ruas jalan yang diawasi kebersihannya Jumlah ruas jalan yang dibersihkan/disapu Jumlah TPS3R yang difasilitasi (SIDa)				12 bulan	12 bulan	7.003.303.000	7.493.918.000	7.329.248.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 bulan 55 ruas jalan 55 ruas jalan 21 TPS3R	6.289.342.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.11.11. 2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bulan fasilitasi operasional bank sampah induk				12 Bulan	12 Bulan	744.562.000	685.912.000	658.402.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 Bulan	757.222.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah bulan operasional pengangkutan sampah				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi dan fasilitas pengelolaan sampah yang dipantau				30 Kali	0 lokasi									0 lokasi		
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				0 Kelompok	28 Kelompok									28 Kelompok		
2.11.11. 2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah bahan habis pakai yang dibeli				12 jenis	12 jenis	2.444.388.000	2.480.490.000	2.281.139.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 jenis	3.830.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dumptruk yang dibeli				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah gerobak sampah yang diadakan				67 unit	67 unit									67 unit		
		Jumlah jembatan timbang yang di tera				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah kendaraan unit roda 3 yang dibeli				12 unit	13 unit									13 unit		
		Jumlah mesin pilah sampah yang diadakan				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang dibeli				4 jenis	4 jenis									4 jenis		
		Jumlah TPS/TPS3R yang dipelihara				3 unit	3 unit									3 unit		
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
2.12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							5.522.221.000	5.885.389.000	5.637.054.000							5.851.121.000	
2.12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	4.708.998.000	5.027.246.000	4.834.408.000						100 persen	5.070.953.000	
2.12.01. 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran,	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	13.062.000						100 Persen	31.194.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	1.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	2 dokumen	2.750.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	2 dokumen	1.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	10.262.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	26.794.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen				4 dokumen											
	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen	2 dokumen				2 dokumen											
	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen	5 dokumen				5 dokumen											
2.12.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 Persen	100 Persen	<b>3.276.455.000</b>	<b>3.281.255.000</b>	<b>3.156.128.000</b>					100 Persen	<b>3.289.824.000</b>			
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN			14 kali	14 kali	3.218.455.000	3.218.455.000	3.097.228.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	14 kali	3.225.174.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan			12 bulan	12 bulan	56.500.000	61.300.000	57.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	63.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dindikcapil	1 dokumen	1.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
2.12.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	65.252.000	60.752.000	53.783.000						100 Persen	109.088.000	
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	1 kali	9.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelatihan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan				1 kali	2 kali	11.752.000	11.752.000	7.783.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	2 kali	12.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan pelaksanaan publikasi				12 bulan	12 bulan	44.000.000	44.000.000	41.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	87.588.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	908.500.000	1.196.000.000	1.151.181.000						100 Persen	1.247.083.000	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	1.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan	12 bulan	750.000.000	1.027.500.000	954.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	1.062.083.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	4.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	35.000.000	45.000.000	43.400.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dindikcapil	11 bulan	35.000.000	Dinas Kependudukan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	40.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	4.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				45 kali	47 kali	75.000.000	75.000.000	104.981.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	47 kali	100.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>297.588.000</b>	<b>328.036.000</b>	<b>325.151.000</b>						100 Persen	<b>293.278.000</b>	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	2.646.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	3.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	110.100.000	110.100.000	130.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	110.100.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	184.488.000	214.936.000	192.405.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	180.178.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.	<b>Pemeliharaan Barang</b>	Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100	<b>145.203.000</b>	<b>145.203.000</b>	<b>135.103.000</b>						100	<b>100.486.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.09	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen			Persen	Persen											
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	63.203.000	63.203.000	73.103.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	56.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	3 unit	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	3 unit	23.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	59.000.000	59.000.000	39.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	12 bulan	21.486.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,75 persen		80,00 persen	83,53 persen	83,53 persen	<b>339.760.000</b>	<b>362.320.000</b>	<b>333.186.000</b>						83,53 persen	<b>330.857.000</b>	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	1453824 dokumen		235446 dokumen	394529 dokumen	394529 dokumen	<b>339.760.000</b>	<b>362.320.000</b>	<b>333.186.000</b>						394529 dokumen	<b>330.857.000</b>	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	jumlah penerbitan KK				28000 KK	20000 KK	272.260.000	294.820.000	298.270.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	20000 KK	263.357.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)				95,4 persen	95,4 persen									95,4 persen		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen audit dan surveillance ISO				1 dokumen	1 dokumen	31.500.000	31.500.000	31.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 dokumen	31.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome)				65 persen	65 persen	36.000.000	36.000.000	3.416.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	65 persen	36.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	94,00 persen		93,25 persen	93,55 persen	93,55 persen	274.221.000	296.581.000	306.381.000							93,55 persen	275.826.000	
2.12.03.2.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	574182 dokumen		92438 dokumen	6981 dokumen	6981 dokumen	274.221.000	296.581.000	306.381.000							6981 dokumen	275.826.000	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kepemilikan Akta Kelahiran (IKK Outcome) Penerbitan akta kematian (IKK Output)				93,2 persen 3225 akta kematian	93,2 persen 3225 akta kematian	262.221.000	284.581.000	289.381.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalongan		93,2 persen 3225 akta kematian	263.826.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	penerbitan Akta Perceraian (IKK Output) penerbitan Akta Perkawinan (IKK Output)				10 akta perceraian 50 akta perkawinan	10 akta perceraian 50 akta perkawinan	12.000.000	12.000.000	17.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalongan	10 akta perceraian 50 akta perkawinan	12.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	14,00 OPD		5,00 OPD	9,00 OPD	9,00 OPD	199.242.000	199.242.000	163.079.000							9,00 OPD	173.485.000	
2.12.04.2.03	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali		2 kali	2 kali	2 kali	199.242.000	199.242.000	163.079.000							2 kali	173.485.000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan) Jumlah pengadaan aplikasi pelayanan adminduk				110 buku 1 aplikasi	110 buku 1 aplikasi	77.330.000	77.330.000	74.543.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	110 buku 1 aplikasi	76.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	91.912.000	91.912.000	58.536.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	1 kali	75.485.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah arsip Permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan) Jumlah arsip register akta				273 buku 10 buku	273 buku 10 buku	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil	273 buku 10 buku	22.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		catatan sipil yang diperbaiki penjilidannya (berupa penjilidan)																
		Jumlah Fumigasi Arsip				1 kali	1 kali							1 kali				
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
2.08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							1.263.294.000	812.694.000	725.524.000						765.576.000		
2.08.02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	11,09 persen		1,85 persen	5,55 persen	5,55 persen	172.034.000	172.034.000	158.634.000				5,55 persen		96.534.000		
2.08.02.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16,67 persen		16,67 persen	16,67 persen	16,67 persen	17.034.000	17.034.000	16.634.000				16,67 persen		46.564.000		
2.08.02.01.02	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen PPRG yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	17.034.000	17.034.000	16.634.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguat sistem pnyediaan, pmtakhran & pnmfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indivdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	OPD	1 Dokumen	46.564.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan Desk GAP GBS yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah koordinasi pokja PUG yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah koordinasi tim teknis PPRG yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
2.08.02.02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	40,00 persen		6,67 persen	20 persen	20 persen	140.000.000	140.000.000	139.600.000				20 persen		36.342.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	<b>Kewenangan Kabupaten/Kota</b>																	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan advokasi PUG yang dilaksanakan Jumlah kegiatan FGD PUG yang dilaksanakan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kelompok ekonomi perempuan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pelatihan Forkom Puspa yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi Forkom Puspa yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi Kelompok Ekonomi Perempuan yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	140.000.000	140.000.000	139.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan sistem penyediaan, pmtakhran & pemanfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indivdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan	1 Kali 1 Kali 27 Kali 1 Kali 4 Kali 4 Kali 1 Kali 1 Kali	36.342.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100,00 persen		50,00 persen	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	2.400.000					100 persen	13.628.000		
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan HUT Dharmawanita yang dilaksanakan Jumlah koordinasi pengurus dharmawanita kota yang dilaksanakan Jumlah movev Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali	15.000.000	15.000.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Penguatan sistem penyediaan, pmtakhran & pemanfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indivdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan	0 Kali 0 Kali 20 Kali	13.628.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2.08.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 persen		23,99 persen	23,99 persen	23,99 persen	329.172.000	129.102.000	128.302.000								
2.08.03.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	97.748.000	27.500.000	27.100.000								
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kelas Pendidikan Keluarga yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Kelas Persiapan Pranikah yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang dilaksanakan Jumlah koordinasi Puspaga dengan Tim HIMPSI yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	97.748.000	27.500.000	27.100.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indivdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaa n Gender (PUG) & Pengarusutamaa n Hak Anak (PUHA)	korban kekerasan perempuan	1 Kali	56.476.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	100 persen	231.424.000	101.602.000	101.202.000								
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Case Conference Kasus Perempuan yang dilaksanakan Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga yang diberikan Jumlah pendampingan kasus kekerasan yang dilaksanakan				12 Kali	25 Kali	231.424.000	101.602.000	101.202.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indivdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha	Perempuan, Masyarakat	25 Kali	64.421.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	55,56 persen		25,93 persen	33,33 persen	33,33 persen	428.985.000	428.985.000	360.312.000								
2.08.06.2.01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase SRA (Sekolah Ramah Anak)	10,96 persen		9,98 persen	10,37 persen	10,37 persen	132.201.000	132.201.000	105.495.000								
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan				27 Kelurahan	27 Kelurahan	132.201.000	132.201.000	105.495.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmfaatan data pilah gender & anak serta pngngkn pngthuan & pmhmn indivdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyarakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaa n Gender (PUG) & Pengarusutamaa n Hak Anak (PUHA).	Sekolah Ramah Anak (SRA), Kelurahan, APSAI	27 Kelurahan	111.630.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak yang dilaksanakan				3 Kali	6 Kali									6 Kali		
		Jumlah Koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali									1 Kali		
		Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA				10 Sekolah	15 Sekolah									15 Sekolah		
2.08.06.2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase forum anak yang aktif	40,63 persen		3,13 persen	15,63 persen	15,63 persen	296.784.000	296.784.000	254.817.000								
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan KHA yang dilaksanakan				4 Kali	2 Kali	41.850.000	41.850.000	35.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmfaatan data pilah gender & anak serta pngngkn pngthuan & pmhmn indivdu	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	2 Kali	38.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu				4 Kelompok	3 Kelompok									3 Kelompok		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Festival Anak yang dilaksanakan Jumlah kegiatan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan Jumlah kegiatan Pelatihan Forum Anak yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi dengan Pendamping Forum Anak Kelurahan yang dilaksanakan Jumlah koordinasi peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi Peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi Program Kerja Forum Anak Tingkat Kota yg dilaksanakan Jumlah sekolah yang mendapatkan pembekalan agen perubahan di Sekolah Ramah Anak				1 Kali	1 Kali	204.934.000	204.934.000	197.546.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indivdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyarakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaa n Gender (PUG) & Pengarusutamaa n Hak Anak (PUHA).	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	1 Kali	52.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
						2 Kali	1 Kali									1 Kali		
						1 Kali	1 Kali									1 Kali		
						8 Kali	8 Kali									8 Kali		
						27 Kelurahan	1 Kali									1 Kali		
						1 Kali	1 Kali									1 Kali		
						1 Kali	1 Kali									1 Kali		
						8 Kali	15 Kali									15 Kali		
						9 Sekolah	9 Sekolah									9 Sekolah		
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan FGD Kader Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pelatihan Kader Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB				1 Kali	0 Kali	50.000.000	50.000.000	21.921.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indivdu	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	0 Kali	40.170.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
						1 Kali	0 Kali									0 Kali		
						4 Kelompok	5 Kelompok									5 Kelompok		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak yang dilaksanakan				2 Kali	1 Kali											
2.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>333.103.000</b>	<b>82.573.000</b>	<b>78.276.000</b>					100,00 persen	<b>305.445.000</b>		
2.08.07.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>103.245.000</b>	<b>52.783.000</b>	<b>31.246.000</b>					100 persen	<b>152.393.000</b>		
		Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen		100 persen		100 persen								100 persen			
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi PPKBM yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali	103.245.000	52.783.000	31.246.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pnmfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indivdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaaa n Gender (PUG) & Pengarusutamaaa n Hak Anak (PUHA).	Anak, Masyarakat	0 Kali	103.245.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Program Roots yang dilaksanakan				2 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah Kelurahan yang mendapatkan penghargaan Evaluasi PATBM yang dilaksanakan				3 Kelurahan	3 Kelurahan								3 Kelurahan			
2.08.07.2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat</b>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota ( IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>153.052.000</b>	<b>22.030.000</b>	<b>22.030.000</b>					100 persen	<b>153.052.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
2.08.07. 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan case conference kasus anak yang dilaksanakan  Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga yang dilaksanakan  Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan				48 Kali	78 Kali	153.052.000	22.030.000	22.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indivdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaa n Gender (PUG) & Pengarusutamaa n Hak Anak (PUHA)	Anak korban kekerasan usia <18 tahun	78 Kali	153.052.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
						35 Kali	65 Kali											
						25 Kali	45 Kali											
2.08.07. 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>76.806.000</b>	<b>7.760.000</b>	<b>25.000.000</b>						100 persen	<b>0</b>	
2.08.07. 2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen naskah akademik UPTD PPA yang disusun  Jumlah kegiatan pelatihan manajemen kasus yang dilaksanakan					1 Dokumen	76.806.000	7.760.000	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indivdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaa n Gender (PUG) & Pengarusutamaa n Hak Anak (PUHA).	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 Dokumen		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
						1 Kali	0 Kali									0 Kali		
<b>2.13</b>	<b>URUSAN</b>							<b>5.601.231.000</b>	<b>5.015.331.000</b>	<b>5.327.513.000</b>							<b>5.501.353.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	<b>PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																	
2.13.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	3.242.033.000	3.249.533.000	3.091.059.000				100 persen	3.279.021.000			
2.13.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	12.604.000				100 Persen	18.625.000			
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	1.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	2 Dokumen	3.625.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	804.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	2 Dokumen	1.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	13.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen								4 Dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen								5 Dokumen			
2.13.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	2.579.108.000	2.583.908.000	2.454.240.000				100 Persen	2.700.740.000			
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	2.542.658.000	2.542.658.000	2.413.490.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	DPMPPA	14 kali	2.652.590.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
												Publik	elayanan publik.					
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	34.950.000	39.750.000	39.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	46.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	1 Dokumen	1.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>9.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>						100 Persen	<b>8.631.000</b>	
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 Kali	1 Kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	1 Kali	8.631.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>214.810.000</b>	<b>214.810.000</b>	<b>294.100.000</b>						100 Persen	<b>198.052.000</b>	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	1.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	12 Bulan	33.500.000	33.500.000	48.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	25.052.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				2 Unit	5 Unit									5 Unit		
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	1.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	11 Bulan	24.060.000	24.060.000	24.060.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	DPMPPA	11 Bulan	22.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
										Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	6.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	2.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				159 Orang/ Kali	220 Orang/ Kali	145.000.000	145.000.000	209.290.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	220 Orang/ Kali	140.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>226.727.000</b>	<b>233.927.000</b>	<b>233.927.000</b>						100 Persen	<b>175.079.000</b>	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	2.400.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	81.600.000	81.600.000	81.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	68.979.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 Bulan	12 Bulan	142.727.000	149.927.000	149.927.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	103.700.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.	<b>Pemeliharaan Barang</b>	Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100	<b>195.888.000</b>	<b>195.888.000</b>	<b>91.188.000</b>						100	<b>177.894.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.09	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen			Persen	Persen											
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 Bulan	12 Bulan	65.088.000	65.088.000	65.388.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	65.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	1 Unit	120.000.000	120.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	1 Unit	102.094.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 Bulan	12 Bulan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA	12 Bulan	10.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan Kelurahan	100,00 persen		16,67 persen	50,00 persen	50,00 persen	<b>1.221.405.000</b>	<b>618.405.000</b>	<b>1.198.405.000</b>						50,00 persen	<b>1.240.453.000</b>	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	66.67 persen		11,11 persen	11,11 persen	11,11 persen	<b>1.221.405.000</b>	<b>618.405.000</b>	<b>1.198.405.000</b>						11,11 persen	<b>1.240.453.000</b>	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang di fasilitasi kegiatan Karya Bhakti TNI Jumlah Kelurahan yang di fasilitasi kegiatan TMMD				1 Kelurahan	0 Kelurahan	1.221.405.000	618.405.000	1.198.405.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 Kelurahan	1.240.453.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	70,37 persen		51,85 persen	59,26 persen	59,26 persen	<b>55.900.000</b>	<b>55.900.000</b>	<b>62.820.000</b>						59,26 persen	<b>50.878.000</b>	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	100 persen	<b>55.900.000</b>	<b>55.900.000</b>	<b>62.820.000</b>						100 persen	<b>50.878.000</b>	
2.13.04.	Fasilitasi Evaluasi	Jumlah dokumen evaluasi				1	1	55.900.000	55.900.000	62.820.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Kelurahan	1	50.878.000	Dinas



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.01.18	Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	perkembangan kelurahan yang disusun Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan				Dokumen	Dokumen				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		Dokumen		Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,92 persen		95,97 persen	96,35 persen	96,35 persen	1.081.893.000	1.091.493.000	975.229.000						96,35 persen	931.001.000	
2.13.05.2.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	100 persen	1.081.893.000	1.091.493.000	975.229.000						100 persen	931.001.000	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen evaluasi pemberdayaan LKK yang disusun Jumlah kegiatan sosialisasi program LEK RISANI (LKK Mandiri Menuju Masyarakat Madani) yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	210.540.000	214.140.000	149.048.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	2 Dokumen	266.415.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kegiatan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator pemberdayaan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LKK yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali	88.753.000	89.953.000	68.517.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	1 Kali	248.936.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.05	Fasilitasi Pemerintah	Jumlah inovator TTG yang				3	3 Inovator	102.000.000	102.000.000	59.591.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Lembaga	3	102.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.01.06	Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	terfasilitasi Jumlah keikutsertaan dalam event TTG tingkat nasional Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand gelar karya TTG				Inovator 1 Kali 3 Kelurahan	0 Kali 0 Kali 0 Kelurahan				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	Inovator 0 Kali 0 Kelurahan		Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat				3 Kelurahan	3 Kelurahan	71.000.000	71.000.000	47.753.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	3 Kelurahan	71.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan TP PKK Kota Pekalongan Jumlah kegiatan Bintek pengelolaan UP2K-PKK yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Capacity Building TP PKK yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pelatihan digital marketing yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah plastik yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pelatihan TP3 PKK yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Gagah (Tanggap dan Tangguh) Bencana tingkat kecamatan yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Ramah Anak yang dilaksanakan Jumlah Kelompok Bank Sampah yang mendapat penghargaan lomba Bank Sampah				12 Bulan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kecamatan 1 Kali 3 Kelompok	12 Bulan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kecamatan 1 Kali 3 Kelompok	609.600.000	614.400.000	650.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Masyarakat	12 Bulan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kecamatan 1 Kali 3 Kelompok	242.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Kelompok UP2K PKK				3 TP	3 TP PKK									3 TP		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K PKK				PKK Kelurahan	Kelurahan								PKK Kelurahan			
		Jumlah TP PKK Kelurahan binaan yang dibina				8 Kelurahan	8 Kelurahan								8 Kelurahan			
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK				3 TP PKK Kelurahan	3 TP PKK Kelurahan								3 TP PKK Kelurahan			
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Beberan dan Simulasi Pola Asuh				3 TP PKK Kelurahan	3 TP PKK Kelurahan								3 TP PKK Kelurahan			
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Hatinya PKK				3 TP PKK Kelurahan	3 TP PKK Kelurahan								3 TP PKK Kelurahan			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							27.829.005.000	28.254.653.000	28.773.337.000						27.200.753.000		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	20.172.325.000	20.185.325.000	21.071.678.000					100 persen	19.442.136.000		
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen								100 persen			
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen								100 persen			
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	16.000.000	16.000.000	15.180.000					100 persen	21.500.000		
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	2 Dokumen	3.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.	Koordinasi dan	Jumlah dokumen RKA dan				2	2	1.500.000	1.500.000	1.200.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Dinas	2	2.500.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.01.02	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	perubahan RKA yang disusun				dokumen	dokumen				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perhubungan	dokumen		Perhubungan
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	11.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	16.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	4.563.834.000	4.568.634.000	4.129.923.000					100 persen	5.273.434.000		
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	4.478.449.000	4.478.449.000	4.040.023.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	14 kali	5.185.434.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	83.385.000	88.185.000	87.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya pngktn kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	86.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	1 dokumen	2.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 persen	26.200.000	26.200.000	24.945.000					100 persen	40.000.000		
2.15.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan monev aset dinas perhubungan				12 bulan	12 bulan	26.200.000	26.200.000	24.945.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinas Perhubungan	12 bulan	40.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
2.15.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	9.500.000	5.000.000	5.000.000					100 persen	150.000.000		
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	1 kali	150.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	655.581.000	655.581.000	726.110.000					100 persen	672.500.000		
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	5.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan 13 unit	12 bulan 13 unit	74.100.000 13 unit	74.100.000	96.674.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan 13 unit	75.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	12.881.000	12.881.000	12.881.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	7.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	12 bulan	307.900.000	307.900.000	307.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	325.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	168.200.000	168.200.000	158.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	170.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan																
2.15.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	12 bulan	2.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 orang/kali	100 orang/kali	85.000.000	85.000.000	142.955.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perhubungan	100 orang/kali	87.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>14.125.056.000</b>	<b>14.137.756.000</b>	<b>15.548.116.000</b>						100 persen	<b>12.474.702.000</b>	
2.15.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.800.000	1.800.000	1.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinhub	12 bulan	2.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	13.803.056.000	13.803.056.000	15.213.656.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinhub	12 bulan	12.151.702.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	320.200.000	332.900.000	332.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinhub	12 bulan	321.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.01. 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>776.154.000</b>	<b>776.154.000</b>	<b>622.404.000</b>						100 persen	<b>810.000.000</b>	
2.15.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	317.554.000	317.554.000	347.404.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Dinas Perhubungan	12 bulan	270.000.000	Dinas Perhubungan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		persentase ketersediaan perlengkapan jalan	100 persen		100 persen		91 persen								91 persen			
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu Penerangan Jalan Umum bermeterisasi yang dipasang Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang dibangun				215 unit	196 unit	884.000.000	1.024.000.000	1.224.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	196 unit 16 Lokasi	611.305.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jasa Konsultan Perencanaan Marka Jalan yang difasilitasi Jumlah Cermin Tikungan yang diadakan Jumlah Lampu flashing yang dipasang Jumlah panjang pengecatan marka jalan yang dilaksanakan Jumlah Vehicle Detector ATCS yang dipasang				1 Pekerjaan 15 unit 5 unit 7500 meter 2 unit	1 Pekerjaan 15 unit 5 unit 0 meter 2 unit	632.500.000	632.500.000	434.833.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	1 Pekerjaan 15 unit 5 unit 0 meter 2 unit	1.150.700.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum yang dilaksanakan Jumlah Lampu penerangan jalan umum yang diganti LED				12 bulan 120 unit	12 bulan 141 unit	1.214.000.000	1.323.600.000	1.324.277.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	12 bulan 141 unit	1.214.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pemeliharaan rambu dan instalasi lalu lintas Jumlah Lampu LED Aspek 30 cm				12 bulan 3 Unit	12 bulan 0 Unit	294.000.000	294.000.000	193.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	12 bulan 0 Unit	300.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.03	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 kali		1 kali	1 kali	1 kali	<b>104.100.000</b>	<b>54.100.000</b>	<b>54.100.000</b>					1 kali	<b>155.000.000</b>		
		Persentase ketercapaian Pengelolaan Terminal Penumpang	100 persen		100 persen		100 persen								100 persen			
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah halte yang dipelihara				3 unit	3 unit	29.400.000	54.100.000	54.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air	Pengguna Jalan	3 unit	30.000.000	Dinas Perhubungan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan	Umum	n Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.				
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir baru yang diterbitkan izinnnya	10 titik per tahun		2 titik per tahun	2 titik per tahun	2 titik per tahun	381.000.000	381.000.000	309.664.000					2 titik per tahun	410.000.000		
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian potensi parkir yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	381.000.000	381.000.000	309.664.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan dan Juru Parkir	1 dokumen	410.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan juru parkir yang diadakan				96 kegiatan	96 kegiatan								96 kegiatan			
		Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang difasilitasi				1 Paket	1 Paket								1 Paket			
		Jumlah pelaksanaan operasi gabungan parkir yang diadakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah Pemeliharaan Aplikasi yang diadakan				6 paket	3 paket								3 paket			
		Jumlah sosialisasi juru parkir yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	25.06 persen		70.33 persen	65.26 persen	65.26 persen	898.461.000	899.661.000	805.461.000					65.26 persen	734.656.000		
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang diadakan				4 unit	4 unit	630.941.000	630.941.000	630.941.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kendaraan Wajib Uji	4 unit	444.656.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tanda bukti lulus uji yang diadakan				6771 buah	0 buah	150.695.000	150.695.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kendaraan Wajib Uji	0 buah	170.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bulan Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor yang diadakan				12 Bulan	12 Bulan	103.325.000	104.525.000	174.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan	Kendaraan Wajib Uji	12 Bulan	105.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
												Pelayanan Dasar	dan transportasi perkotaan.					
		Jumlah Pemeliharaan Aplikasi yang dilaksanakan				4 Paket	4 Paket								4 Paket			
		Jumlah Pemeliharaan dan Kalibrasi yang dilaksanakan				1 Paket	1 Paket								1 Paket			
		Jumlah pengadaan kursi pelayanan					10 Set								10 Set			
		Jumlah pengadaan running teks					2 Unit								2 Unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara				9 Unit	9 Unit								9 Unit			
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan kunjungan pembinaan usaha perbengkelan yang diadakan				5 bulan	0 bulan	13.500.000	13.500.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kendaraan Wajib Uji	0 bulan	15.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	92 persen		90 persen	92 persen	92 persen	<b>470.219.000</b>	<b>482.219.000</b>	<b>460.166.000</b>					92 persen	<b>550.000.000</b>		
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan operasional ATCS yang difasilitasi				12 bulan	12 bulan	408.219.000	420.219.000	418.136.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pelajar	12 bulan	480.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah CCTV ATCS yang diadakan				6 Unit	6 Unit								6 Unit			
		Jumlah Monitor Komputer ATCS yang diadakan				1 Unit	1 Unit								1 Unit			
		Jumlah Tenaga Operator ATCS yang difasilitasi				120 orang/bulan	120 orang/bulan								120 orang/bulan			
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelajar Pelopor yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	32.000.000	32.000.000	21.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pelajar	1 Kegiatan	35.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan								3 Kegiatan			
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Kegiatan Forum LLAJ yang dilaksanakan				3 kali	3 kali	30.000.000	30.000.000	20.355.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur	8. Perluasan dan peningkatan	Pelajar	3 kali	35.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Kabupaten/Kota										Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.				
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	83 persen		75 persen	83 persen	83 persen	65.500.000	65.500.000	15.500.000					83 persen	20.000.000		
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Dokumen Andalalin Pelabuhan On Shore yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	65.500.000	65.500.000	15.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyarakat	0 Dokumen	20.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Kegiatan Tinjauan Lapangan Rekomendasi Andalalin yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Tinjauan Lapangan yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	12 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	65.200.000	65.200.000	40.020.000					2 kegiatan	47.000.000		
		persentase pelaksanaan kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	100 persen		100 persen		100 persen								100 persen			
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah SDM tenaga LLAJ yang dibina				78 orang	0 orang	16.700.000	16.700.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Perusahaan Angkutan Umum	0 Orang	17.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah awak angkutan umum yang dibina dan diseleksi				35 orang	30 orang	39.100.000	39.100.000	30.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Perusahaan Angkutan Umum	30 orang	20.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Monitoring Pada Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan				8 kunjungan	8 kunjungan	9.400.000	9.400.000	9.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi	Perusahaan Angkutan Umum	8 kunjungan	10.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
												Dasar	perkotaan.					
		Jumlah pengusaha angkutan umum yang dibina				25 orang	25 orang								25 orang			
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah angkutan umum yang difasilitasi tahun N	30.7 Persen		30.7 Persen	30.7 Persen	30.7 Persen	67.400.000	67.400.000	46.550.000					30.7 Persen	40.000.000		
		Persentase pembinaan awak angkutan umum	30.73 persen		30.73 persen		30.73 persen								30.73 persen			
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Kota yang difasilitasi				73 armada	0 armada	67.400.000	67.400.000	46.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	0 armada	40.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah armada becak yang difasilitasi dan dibina				100 armada	100 armada								100 armada			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							12.935.567.000	13.650.411.000	13.489.014.000						13.434.107.000		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	4.704.292.000	4.987.592.000	5.144.371.000					100 persen	4.856.045.000		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	16.000.000	16.000.000	15.800.000					100 persen	35.750.000		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	2 dokumen	10.750.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinkominfo	2 dokumen	1.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.					
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 Bulan	23.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen			
						2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
						1 dokumen	5 dokumen								5 dokumen			
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	3.278.757.000	3.283.557.000	3.373.693.000					100 persen	3.298.729.000		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	3.235.957.000	3.235.957.000	3.326.393.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	14 kali	3.237.229.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	41.300.000	46.100.000	45.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	1 dokumen	1.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	9.500.000	67.000.000	71.000.000					100 persen	75.380.000		
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	1 kali	10.380.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi cukai hasil tembakau melalui media				3 kali	3 kali	-	62.000.000	66.000.000	Kota Pekalongan,	DBH Cukai	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dinkominfo	3 kali	65.000.000	Dinas Komunikasi dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		cetak/elektronik yang diselenggarakan									Pekalongan Barat, Podosugih	Hasil Tembakau (CHT)	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Informatika	
2.16.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	387.660.000	387.660.000	397.230.000					100 persen	430.763.000		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	5.300.000	5.300.000	5.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	5.450.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	112.000.000	112.000.000	112.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	114.760.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				29 unit	29 unit								29 unit			
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	115.000.000	115.000.000	115.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	11 bulan	126.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	43.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	15.360.000	15.360.000	15.360.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	15.232.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				60 orang/kali	75 orang/kali	100.000.000	100.000.000	109.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	75 orang/kali	125.821.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	586.420.000	591.220.000	613.751.000					100 persen	563.600.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	<b>Pemerintahan Daerah</b>	Urusan Pemerintahan Daerah																
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	2.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	481.320.000	481.320.000	503.851.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	455.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	102.700.000	107.500.000	107.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	106.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>425.955.000</b>	<b>642.155.000</b>	<b>672.897.000</b>						100 persen	<b>451.823.000</b>	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					27 Unit	171.255.000	172.455.000	203.197.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	27 Unit	210.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	3 unit	89.000.000	304.000.000	304.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	3 unit	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah ruang aula yang terbangun				1 ruang	1 ruang									1 ruang		
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	165.700.000	165.700.000	165.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinkominfo	12 bulan	131.823.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>5.234.061.000</b>	<b>5.376.561.000</b>	<b>5.241.561.000</b>						100 persen	<b>5.898.917.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	92,50 persen		80 persen	85 persen	85 persen	5.234.061.000	5.376.561.000	5.241.561.000					85 persen	5.898.917.000		
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Perda KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	15.755.000	15.755.000	15.755.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten laman dan media sosial yang diunggah				960 konten	1060 konten	120.800.000	125.700.000	125.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1060 konten	121.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jam siaran RKB per hari				18 jam	18 jam	2.815.804.000	2.837.804.000	2.947.804.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	18 jam	4.023.447.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah jam tayangan Batik TV per hari				13 jam	13 jam								13 jam			
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah bulan Layanan PPID Utama				12 Bulan	12 Bulan	480.072.000	483.672.000	238.172.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan	387.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Diseminasi KIP yang diselenggarakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah dokumen pengelolaan KIP yang disusun				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah kegiatan verifikasi KIP dari Komisi Informasi Jateng yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Lomba Kreativitas Teknologi dan Inovasi yang dilaksanakan				4 jenis	0 jenis								0 jenis			
		Jumlah penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah) yang dilaksanakan				1 kali	0 kali								0 kali			
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah advertorial yang dimuat di media massa dalam setahun				1000 kali	1000 kali	1.341.775.000	1.345.375.000	1.395.375.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1000 kali	924.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dana hibah yang disalurkan				2 lembaga	3 lembaga	81.405.000	181.405.000	131.905.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	ASN dan Masyarakat	3 lembaga	33.300.000	Dinas Komunikasi dan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		Jumlah kegiatan pendampingan FK Metra yang dilakukan				4 kali	4 kali				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		4 kali		Informatika
		Jumlah keikutsertaan lomba FK mitra dengan Pemangku Kepentingan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah KIM yang dibentuk/didampingi				5 Kelurahan	0 Kelurahan									0 Kelurahan		
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Bulan Pengelolaan pelayanan kegawatdaruratan (Call Center 112)				12 Bulan	12 Bulan	354.030.000	362.430.000	362.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 Bulan	360.170.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Bulan Pengelolaan pengaduan pelayanan (LaporGub)				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pengelolaan pengaduan pelayanan publik (SP4N Lapor)				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Bulan Pengelolaan pengaduan pelayanan (Wadul Aladin)				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Desiminasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang diselenggarakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan pengelolaan pengaduan pelayanan publik				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pelatihan Fotografi yang dilaksanakan					1 kali	24.420.000	24.420.000	24.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 kali	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Pelatihan Jumalistik yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Press Conference yang diadakan				3 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Sosialisasi Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
2.16.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,30 indeks		2,80 indeks	3,00 indeks	3,00 indeks	<b>2.997.214.000</b>	<b>3.286.258.000</b>	<b>3.103.082.000</b>						3,00 indeks	<b>2.679.145.000</b>	
2.16.03.2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	66,06 persen		56,97 persen	60,61 persen	60,61 persen	<b>2.076.900.000</b>	<b>1.836.240.000</b>	<b>2.082.500.000</b>						60,61 persen	<b>1.699.920.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dalam layanan Pengembangan dan Operasionalisasi Domain dan Subdomain Pemerintah Kota Pekalongan				12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	6.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD dan masyarakat	12 bulan	20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan jaringan Net				12 Bulan	12 Bulan	2.069.900.000	1.829.240.000	2.075.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD dan masyarakat	12 Bulan	1.679.920.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah kapasitas Bandwidth Internet yang disewa				1500 Mbps	1750 Mbps									1750 Mbps		
		Jumlah titik jaringan berbasis Fiber Optic yang dibangun				3 titik	5 titik									5 titik		
		Jumlah titik layanan akses wifi gratis yang disediakan untuk masyarakat				37 titik	37 titik									37 titik		
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	51,40 persen		4,67 persen	9,35 persen	9,35 persen	920.314.000	1.450.018.000	1.020.582.000						9,35 persen	979.225.000	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen panduan manajemen spbe yang disusun				4 dokumen	0 dokumen	206.025.000	506.025.000	219.330.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	0 dokumen	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah faasilitasi Kegiatan Saka Milenial				1 Lembaga	1 Lembaga									1 Lembaga		
		Jumlah forum koordinasi pejerapan SPBE yang dilaksanakan				3 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Perwal Kebijakan SPBE yang dilaksanakan				2 Perwal	2 Perwal									2 Perwal		
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan DC dan DRC				12 bulan	12 bulan	106.600.000	353.260.000	331.619.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	12 bulan	129.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah capacity building tehnik pelayanan jaringan diselenggarakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah unit penambahan DRC				3 Unit	3 Unit									3 Unit		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Aplikasi	4 Aplikasi	377.250.000	360.294.000	347.294.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Perangkat Daerah dan ASN	4 Aplikasi	437.725.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Aplikasi PBE yang dilaksanakan				10 Aplikasi	10 Aplikasi									10 Aplikasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Jumlah website yang dikembangkan dan dipelihara				65 website	65 website											
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aplikasi smartcity yang dikembangkan (SIDa)				1 aplikasi	0 aplikasi	177.904.000	177.904.000	73.404.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	0 aplikasi	185.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Fasilitas kegiatan yang mendukung Komunitas TIK (SIDa)				3 komunitas	3 komunitas									3 komunitas		
		Jumlah fitur aplikasi smartcity yang dibeli				1 aplikasi	0 aplikasi									0 aplikasi		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan TIK bagi ASN dan Masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)				8 kali	8 kali	32.850.000	32.850.000	29.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	8 kali	42.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen pelaporan monitoring evaluasi penyelenggaraan SPBE				1 dokumen	1 dokumen	19.685.000	19.685.000	19.685.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah dan ASN	1 dokumen	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah monev SPBE yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
2.20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							<b>107.118.000</b>	<b>143.118.000</b>	<b>133.925.000</b>							<b>109.027.000</b>	
2.20.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>107.118.000</b>	<b>143.118.000</b>	<b>133.925.000</b>						100,00 persen	<b>109.027.000</b>	
2.20.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 persen		100 persen		100 persen	<b>107.118.000</b>	<b>143.118.000</b>	<b>133.925.000</b>						100 persen	<b>109.027.000</b>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah aplikasi satu data yang dikembangkan				1 aplikasi	1 aplikasi	107.118.000	143.118.000	133.925.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 aplikasi	109.027.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah dokumen database indikatro TIK yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah dokumen data SDTD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah dokumen publikasi statistik yang dicetak				6 Dokumen	6 Dokumen									6 Dokumen		
2.21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>							<b>108.127.000</b>	<b>108.127.000</b>	<b>75.027.000</b>							<b>102.819.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.21.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen		0,93 persen	2,80 persen	2,80 persen	108.127.000	108.127.000	75.027.000						2,80 persen	102.819.000	
2.21.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	56,07 persen		9,35 persen	9,35 persen	9,35 persen	82.897.000	82.897.000	69.797.000						9,35 persen	74.819.000	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola dan manajemen kemandirian informasi yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	16.075.000	16.075.000	16.075.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah	2 dokumen	15.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah leaflet promosi keamanan informasi yang dicetak				4 rim	0 rim	42.245.000	42.245.000	36.245.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah	0 rim	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah lisensi Endpoint Security (Antivirus) yang dibeli				1 lisensi	1 lisensi									1 lisensi		
		Jumlah lisensi Sertifikat Elektronik TLS *pekalongankota.go.id yang dibeli				1 lisensi	0 lisensi									0 lisensi		
		Jumlah penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah sosialisasi Keamanan Informasi yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Assessment keamanan informasi yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	24.577.000	24.577.000	17.477.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah	2 kali	29.819.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah pendampingan integrasi Tanda Tangan Elektronik yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
2.21.02.2.02	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	25.230.000	25.230.000	5.230.000						100 persen	28.000.000	
2.21.02.	Operasionalisasi Jaring	Jumlah dokumen prosedur				2	2	25.230.000	25.230.000	5.230.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	ASN	2	28.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.02.01	Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persandian yang disusun				dokumen	dokumen				Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		dokumen		Komunikasi dan Informatika
		Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah naskah dinas yang dikirim / diterima				76 dokumen	76 dokumen									76 dokumen		
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
2.18	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>							6.797.893.000	7.269.889.000	7.379.871.000							6.296.489.000	
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	5.127.747.000	5.662.399.000	5.741.721.000						100 persen	4.626.705.000	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	23.632.000						100 Persen	22.450.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	2 dokumen	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	2 dokumen	1.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	19.632.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	18.450.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun																
2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	3.195.103.000	3.199.903.000	2.993.529.000					100 Persen	3.680.771.000		
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	3.145.003.000	3.145.003.000	2.948.117.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	14 kali	3.625.871.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	48.600.000	53.400.000	44.012.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	53.400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	1 dokumen	1.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	36.742.000	5.794.000	5.794.000					100 Persen	36.742.000		
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	36.742.000	5.794.000	5.794.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	1 kali	36.742.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	341.231.000	341.231.000	731.160.000					100 Persen	293.006.000		
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.524.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	128.731.000	128.731.000	469.421.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	DPMPTSP	12 bulan	88.700.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
		Jumlah peralatan dan				14 unit	108 unit								108 unit			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		perlengkapan gedung kantor yang diadakan								Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				Pintu	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.503.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	45.000.000	45.000.000	69.206.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	11 bulan	45.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	35.006.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	60.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				60 orang/kali	100 orang/kali	100.000.000	100.000.000	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	100 orang/kali	91.806.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>509.296.000</b>	<b>568.896.000</b>	<b>558.835.000</b>						100 Persen	<b>504.156.000</b>	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	12.267.000	12.267.000	7.230.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	7.127.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	300.000.000	350.000.000	349.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DPMPTSP	12 bulan	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.			Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	197.029.000	206.629.000	202.205.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	197.029.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>1.029.375.000</b>	<b>1.530.575.000</b>	<b>1.428.771.000</b>					100 Persen	<b>89.580.000</b>		
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	140.302.000	141.502.000	113.762.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	825.863.000	1.325.863.000	1.285.601.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	1 Unit	19.580.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	1 Unit								1 Unit			
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	63.210.000	63.210.000	29.408.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTSP	12 bulan	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<b>92.852.000</b>	<b>92.852.000</b>	<b>90.852.000</b>						1 dokumen	<b>118.112.000</b>	
2.18.02.2.01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Peraturan penanaman modal yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<b>36.852.000</b>	<b>36.852.000</b>	<b>40.852.000</b>						1 dokumen	<b>48.112.000</b>	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Audit ISO yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	36.852.000	36.852.000	40.852.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang	DPMPTSP	1 dokumen	48.112.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah peraturan penanaman modal disusun				1 peraturan	1 peraturan								1 peraturan			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
															Berkualitas dan Berkeadilan	mampu berdaya saing.		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal yang disusun/disosialisasikan	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	56.000.000	56.000.000	50.000.000				1 dokumen	70.000.000			
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	36.000.000	36.000.000	34.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTSP	1 dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil Peluang dan Potensi investasi yang disusun dan di-update				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	15.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTSP	1 Dokumen	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen		50,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	83.567.000	83.567.000	42.567.000						100,00 persen	81.770.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	83.567.000	83.567.000	42.567.000						100 persen	81.770.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran/Event Investasi Penanaman Modal				2 Kali	1 Kali	83.567.000	83.567.000	42.567.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Investor	1 Kali	81.770.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500 dokumen		2500 dokumen	2500 dokumen	2500 dokumen	921.652.000	874.760.000	950.420.000						2500 dokumen	924.271.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Persentase Penyelesaian Perizinan secara elektronik sesuai Standar Pelayanan	94 persen		94 persen	94 persen	94 persen	921.652.000	874.760.000	950.420.000						94 persen	924.271.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	<b>Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>																	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah laporan perizinan dan non perizinan yang disusun				12 Laporan	12 Laporan	555.820.000	499.328.000	498.328.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	12 Laporan	555.682.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan				25 dokumen	25 dokumen	237.200.000	246.800.000	246.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	25 dokumen	237.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan yang disusun Jumlah sosialisasi Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan				4 Dokumen	3 Dokumen	108.632.000	108.632.000	85.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	3 Dokumen 12 Laporan 1 Kali	111.389.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan				24 Kali	24 Kali	20.000.000	20.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat di Kota Pekalongan	24 Kali	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Nilai Investasi Baru pertahun	40,53 Miliar Rupiah		6,42 Miliar Rupiah	6,68 Miliar Rupiah	6,68 Miliar Rupiah	<b>460.606.000</b>	<b>455.090.000</b>	<b>454.090.000</b>						6,68 Miliar Rupiah	<b>434.243.000</b>	
2.18.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Objek Pengawasan/ Pengendalian Penanaman Modal	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>460.606.000</b>	<b>455.090.000</b>	<b>454.090.000</b>						100 persen	<b>434.243.000</b>	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimbingan Teknis/ Sosialisasi implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko				3 Kegiatan	3 Kegiatan	392.626.000	388.150.000	366.916.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif,	Perusahaan di Kota Pekalongan	3 Kegiatan	267.231.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2.23.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,58 indeks		15,77 indeks	16,09 indeks	16,09 indeks	<b>629.644.000</b>	<b>12.293.487.000</b>	<b>12.600.238.000</b>					16,09 indeks	<b>528.024.000</b>			
2.23.02.2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	3.33 persen		1.33 persen	1.33 persen	1.33 persen	<b>479.544.000</b>	<b>1.469.312.000</b>	<b>1.443.036.000</b>					1.33 persen	<b>335.024.000</b>			
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah alihmedia konten digital perpustakaan / ePustaka iPekalongankota				900 Konten	900 Konten	99.096.000	407.616.000	395.678.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemerataan & pnnktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlin daskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	900 Konten	92.335.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-an-Reguler-Perpustakaan Daerah			1 Perpustakaan				
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	-	503.720.000	502.970.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-an-Reguler-Perpustakaan Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemerataan & pnnktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlin daskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	1 Perpustakaan		0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah kunjungan monitoring perpustakaan yang dilaksanakan				50 kali	50 kali	99.380.000	72.008.000	72.008.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemerataan & pnnktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnktn kualts penddkn disttai pnguatan srn prsna	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	50 kali	26.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Jumlah layanan perpustakaan diluar jam kerja yang dilaksanakan				64 Perpustakaan	64 Perpustakaan								64 Perpustakaan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
																penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlin daskan nilai2 religiusitas.		
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang diberikan pendampingan				130 Perpustakaan	130 Perpustakaan	58.000.000	58.000.000	54.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	130 Perpustakaan	45.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan keliling yang dilaksanakan				480 kali	480 kali	126.677.000	131.147.000	121.559.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	480 kali	114.389.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Perpustakaan yang disinkronkan dengan UCS Kota Pekalongan				4 perpustakaan	0 perpustakaan									0 perpustakaan		
		Jumlah pojok online yang dilaksanakan				1 lokasi	0 lokasi									0 lokasi		
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Penambahan koleksi buku cetak/ebook				396 Eksemplar	0 Eksemplar	96.391.000	296.821.000	296.821.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	0 Eksemplar	56.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Penambahan koleksi buku cetak/ebook				300 buku	100 buku									100 buku		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Jumlah Penambahan koleksi buku cetak/ebook dana DAK				1625 Eksemplar	1625 Eksemplar					DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Publik	kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		1625 Eksemplar		
2.23.02.2.02	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kenaikan Nilai Budaya Baca	34,45 persen		32.78 persen	33.4 persen	33.4 persen	<b>150.100.000</b>	<b>10.824.175.000</b>	<b>11.157.202.000</b>						33.4 persen	<b>193.000.000</b>	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah permasyarakatan gemar membaca di masyarakat (IKK Output)				1 Kali	1 Kali	29.100.000	29.100.000	23.445.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	1 Kali	28.400.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	0 Perpustakaan	56.000.000	10.463.475.000	10.830.157.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn distrai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 Perpustakaan	55.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2.23.02. 2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Lomba Perpustakaan Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 kegiatan	0 kegiatan	25.000.000	25.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndng pngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	0 kegiatan	31.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.02. 2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kegiatan literasi yg diselenggarakan				15 kegiatan	15 kegiatan	40.000.000	306.600.000	303.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngktn kompetensi penddk & tenaga kpndkn utk mndng pngktn kualts penddkn distrtai pnguatan srn prsna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyarakat Kota Pekalongan	15 kegiatan	77.800.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>							<b>14.768.690.000</b>	<b>3.836.822.000</b>	<b>3.681.664.000</b>							<b>3.611.305.125</b>		
2.24.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>14.254.729.000</b>	<b>3.272.461.000</b>	<b>3.150.366.000</b>							<b>100 persen</b>	<b>3.105.269.000</b>	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen										<b>100 persen</b>		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen										<b>100 persen</b>		
2.24.01.	<b>Perencanaan,</b>	Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>13.000.000</b>							<b>100</b>	<b>8.350.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.01	<b>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen			persen	persen								persen			
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	2 Dokumen	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	2 Dokumen	1.350.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	9.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	7.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
2.24.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>2.356.917.000</b>	<b>2.361.717.000</b>	<b>2.269.003.000</b>					100 persen	<b>2.305.962.000</b>		
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	2.321.417.000	2.321.417.000	2.228.703.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	14 kali	2.257.162.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	34.200.000	39.000.000	39.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 Bulan	47.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Dinarpus	1 Dokumen	1.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	SKPD										Utara, Panjang Wetan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
2.24.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	9.500.000	5.000.000	5.000.000					100 persen	9.500.000		
2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik			1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	1 kali	9.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	167.496.000	175.328.000	162.302.000						100 persen	218.953.000		
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 bulan	12 bulan	4.755.000	4.755.000	1.755.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	4.686.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos			12 bulan	12 bulan	60.000.000	67.832.000	60.306.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	109.655.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan			8 unit	7 unit										7 unit		
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga			12 bulan	12 bulan	1.894.000	1.894.000	1.894.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	1.686.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman			11 Bulan	11 Bulan	40.000.000	40.000.000	34.250.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	11 Bulan	53.281.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	8.347.000	8.347.000	6.847.000		Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 Bulan	5.931.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	2.186.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				50 orang/kali	50 orang/kali	50.000.000	50.000.000	54.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	50 orang/kali	41.527.400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>508.452.000</b>	<b>515.652.000</b>	<b>515.652.000</b>						100 persen	<b>390.109.000</b>	
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	1.800.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	364.500.000	364.500.000	364.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	305.879.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	142.752.000	149.952.000	149.952.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	82.430.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>196.364.000</b>	<b>198.764.000</b>	<b>185.409.000</b>						100 persen	<b>172.395.000</b>	
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	88.568.000	87.368.000	86.768.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	77.073.800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01.	Pemeliharaan/Rehabilita	Jumlah gedung kantor yang				2 unit	2 unit	80.196.000	83.796.000	76.066.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Dinarpus	2 unit	67.855.300	Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.09.09	si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpelihara secara rutin/berkala									Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			dan Perpustakaan	
2.24.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			12 bulan	12 bulan	27.600.000	27.600.000	22.575.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinarpus	12 bulan	27.465.900	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	66,67 persen		33,33 persen	46,67 persen	46,67 persen	<b>339.338.000</b>	<b>382.538.000</b>	<b>374.567.000</b>					46,67 persen	<b>347.462.000</b>		
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	52,50 indeks		40,00 indeks	45,00 indeks	45,00 indeks								45,00 indeks			
2.24.02.2.01	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	32,26 persen		32,26 persen	32,26 persen	32,26 persen	<b>72.628.000</b>	<b>108.628.000</b>	<b>107.074.000</b>					32,26 persen	<b>48.336.645</b>		
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah OPD yang telah mendapatkan pembinaan penyusunan arsip aktif (IKK Output)			6 OPD	6 OPD	47.628.000	47.628.000	47.553.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	6 OPD	33.500.478	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		jumlah OPD yang telah mendapatkan pembinaan penyusunan arsip in-aktif (IKK output)			3 OPD	3 OPD									3 OPD			
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilaksanakan Audit Kearsipan / monitoring			30 OPD	30 OPD	25.000.000	61.000.000	59.521.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	30 OPD	14.836.167	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.24.02.2.02	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	20 persen		10 persen	14 persen	14 persen	<b>43.483.000</b>	<b>43.483.000</b>	<b>45.983.000</b>					14 persen	<b>45.745.355</b>		
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (IKK Output)			16 Naskah	0 Naskah	43.483.000	43.483.000	45.983.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	0 Naskah	45.745.355	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Jumlah fumigasi arsip yang dilaksanakan			1 Kali	1 Kali									1 Kali			
		jumlah OPD yang telah			1 OPD	1 OPD									1 OPD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		dibuatkan sarana bantu temu balik arsip untuk statis (IKK output)																
		Jumlah pemeliharaan arsip dalam 1 tahun				12 Kali	4 Kali								4 Kali			
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	90 persen		50 persen	70 persen	70 persen	223.227.000	230.427.000	221.510.000						70 persen	253.380.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inhouse training yang diselenggarakan Arsip tentang Kearsipan				1 Kali	0 Kali	223.227.000	230.427.000	221.510.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	0 Kali	253.380.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah sosialisasi kearsipan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	174.623.000	181.823.000	156.731.000						100 persen	158.574.125	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	102.787.000	106.387.000	81.061.000						100 persen	94.916.925	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dinilai dan ditetapkan untuk dimusnahkan				1000 Berkas	500 Berkas	75.655.000	78.055.000	53.151.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	500 Berkas	75.706.575	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan				1000 berkas	500 berkas	27.132.000	28.332.000	27.910.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	500 berkas	19.210.350	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	71.836.000	75.436.000	75.670.000						100 persen	63.657.200	
2.24.03	Penilaian dan Penetapan	Autentikasi arsip statis dan				600	600	71.836.000	75.436.000	75.670.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Pengelola	600	63.657.200	Dinas Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.04.02	Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah yang sesuai NSPK (IKK Output) hasil alih media kabupaten/kota				Berkas	Berkas				Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	arsip kota pekalongan	Berkas		dan Perpustakaan
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
3.25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>							9.829.654.000	9.953.154.000	9.395.729.000							9.216.475.000	
3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	4.723.237.000	4.784.855.000	4.443.024.000						100 persen	5.145.552.000	
3.25.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	12.327.000						100 Persen	22.500.000	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.016.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	2 dokumen	2.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	997.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	2 dokumen	1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	9.314.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	18.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				1 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
3.25.01.	<b>Administrasi Keuangan</b>	Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100	3.526.830.000	3.531.630.000	3.352.146.000						100	4.062.954.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.02	<b>Perangkat Daerah</b>	administrasi keuangan perangkat daerah	persen			Persen	Persen								Persen			
3.25.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	3.470.310.000	3.470.310.000	3.300.671.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	14 kali	4.001.454.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	55.020.000	59.820.000	50.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	955.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	1 dokumen	1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01. 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>9.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>						100 Persen	<b>9.500.000</b>	
3.25.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Karnaval batik dan hari jadi Kelengkapannya				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	1 kali	9.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01. 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>261.249.000</b>	<b>415.621.000</b>	<b>385.227.000</b>						100 persen	<b>239.250.000</b>	
		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen											
3.25.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	7.800.000	7.800.000	6.488.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	7.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	78.230.000	232.602.000	196.437.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	DKP	12 bulan	41.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
												Publik	elayanan publik.					
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit	8 unit							8 unit				
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	4.500.000	4.500.000	3.982.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	4.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	60.763.000	60.763.000	58.743.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	11 bulan	67.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	7.456.000	7.456.000	7.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	7.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	2.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 orang/kali	100 orang/kali	100.000.000	100.000.000	109.847.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	100 orang/kali	109.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>452.775.000</b>	<b>459.721.000</b>	<b>477.951.000</b>						100 Persen	<b>254.166.000</b>	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	1.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.	Penyediaan Jasa	Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan	140.425.000	130.571.000	160.571.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	DKP	12 bulan	148.316.000	Dinas Kelautan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.02	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			dan Perikanan	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	310.650.000	327.450.000	315.680.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	104.050.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>456.883.000</b>	<b>356.883.000</b>	<b>210.373.000</b>						100 Persen	<b>557.182.000</b>	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	112.595.000	112.595.000	110.095.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	110.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	1 Unit	17.400.000	17.400.000	12.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	1 Unit	16.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	296.700.000	196.700.000	67.690.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	1 unit	397.994.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	30.188.000	30.188.000	20.188.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DKP	12 bulan	33.188.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen		1,00 persen	1,00 persen	1,00 persen	<b>3.110.029.000</b>	<b>2.802.342.000</b>	<b>2.586.748.000</b>						1,00 persen	<b>2.675.733.000</b>	
3.25.03.2.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan</b>	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	5 persen		5 persen	5 persen	5 persen	<b>298.048.000</b>	<b>181.200.000</b>	<b>98.950.000</b>						5 persen	<b>242.115.000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	<b>Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kota																
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	76.334.000	41.200.000	29.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	1 dokumen	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				3 Unit	107.428.000	140.000.000	69.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	3 Unit	92.115.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.25.03.2.02	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	10 persen		10 persen	10 persen	<b>186.643.000</b>	<b>223.600.000</b>	<b>180.890.000</b>						10 persen	<b>92.350.000</b>		
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan yang dibina			33 KUB	9 KUB	71.418.000	143.700.000	134.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	9 KUB	34.350.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang dibina			4 kelompok	4 kelompok	71.258.000	50.000.000	32.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	4 kelompok	45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan			5 nelayan	3 KUB	43.967.000	29.900.000	14.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	3 KUB	13.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3.25.03.	<b>Pengelolaan dan</b>	Peningkatan Nilai Produksi	6,07		1 persen	1 persen	<b>2.552.187.000</b>	<b>2.371.638.000</b>	<b>2.306.004.000</b>						1 persen	<b>2.308.268.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.03	<b>Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	persen															
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI				12 bulan	12 bulan	2.552.187.000	2.371.638.000	2.306.004.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan, pedagang ikan	12 bulan	2.308.268.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03.2.04	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah permohonan kapal yang didaftarkan	48.33 persen		40 persen	43.33 persen	43.33 persen	<b>51.904.000</b>	<b>25.904.000</b>	<b>904.000</b>					43.33 persen	<b>23.000.000</b>		
3.25.03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendampingan kepada nelayan pemilik kapal 0 - 5 GT				20 dokumen	45 nelayan	40.904.000	25.904.000	904.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	45 nelayan	12.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	6.15 persen		1,00 persen	1,00 persen	1,00 persen	<b>1.290.398.000</b>	<b>1.391.177.000</b>	<b>1.584.723.000</b>					1,00 persen	<b>327.234.000</b>		
3.25.04.2.02	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	Persentase Pembudidaya yang dibina	79.36 persen		38.66 persen	61.92 persen	61.92 persen	<b>443.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>3.850.000</b>					61.92 persen	<b>80.000.000</b>		
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan				4 kategori	1 kali	443.000.000	14.500.000	3.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pokdakan dan Poklaksar	1 kali	47.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>847.398.000</b>	<b>1.376.677.000</b>	<b>1.580.873.000</b>					100 persen	<b>222.234.000</b>		
3.25.04.	Penyediaan Data dan	Jumlah dokumen data bidang				1	1	115.000.000	9.000.000	5.945.000	Kota	Dana	Memperkuat	9. Peningkatan	Pembudida,	1	15.000.000	Dinas Kelautan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.04.01	Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	budidaya yang disusun				dokumen	dokumen				Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pengolah, pemasar ikan	dokumen		dan Perikanan
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Budidaya Ikan 2 Gabungan Kelompok (GAPOKDAKAN)				1 unit	2 unit	520.633.000	718.317.000	938.317.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudida, Pengolah, pemasar ikan	2 unit	67.234.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Udang 2 Kelompok				1 unit	2 unit					DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				2 unit		
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan Balai Benih Ikan (BBI) Jumlah Kelompok yang difasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya				1 BBI 1 unit	12 bulan 27 kelompok	174.505.000	620.100.000	614.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudida, Pengolah, pemasar ikan	12 bulan 27 kelompok	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah benih ikan yang diadakan				750 ekor	4000 ekor	37.260.000	29.260.000	22.261.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudida, Pengolah, pemasar ikan	4000 ekor	90.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen		12,2 persen	12,20 persen	12,20 persen	<b>705.990.000</b>	<b>974.780.000</b>	<b>781.234.000</b>						12,20 persen	<b>1.067.956.000</b>	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen		70 persen	70 persen	70 persen	<b>705.990.000</b>	<b>974.780.000</b>	<b>781.234.000</b>						70 persen	<b>1.004.357.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Kabupaten/ Kota</b>																	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi pelaku usaha perikanan di kawasan technopark (SIDa)				12 bulan	12 bulan	705.990.000	974.780.000	781.234.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	12 bulan	1.004.357.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah gedung technopark yang terpelihara secara rutin				1 Kawasan	1 Kawasan											
		Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan (SIDa)				1 kali	2 kali											
		Jumlah rehab gedung dikawasan technopark				2 unit	1 unit											
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
2.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							9.048.880.000	9.519.179.000	9.629.722.000						3.404.251.000		
2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	95,24 persen	91,95 persen	93,69 persen	93,69 persen	2.335.573.000	1.566.272.000	1.641.272.000						93,69 persen	1.046.470.000		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)	0,99 Persen	0,39 Persen	0,64 Persen	0,64 Persen	1.111.801.000	150.000.000	373.500.000						0,64 Persen	950.700.000		
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang		-	0	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemuda	30 Orang	500.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah generasi muda yang dibina				300 Orang	300 Orang	636.801.000	150.000.000	358.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Pemuda	300 Orang	450.700.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi				2 Kegiatan	0 Kegiatan				Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		0 Kegiatan		
		Jumlah Kejuaraan Lomba Kepemudaan				2 Kegiatan	0 Kegiatan									0 Kegiatan		
		Jumlah pemuda yang ikut kemah bakti pemuda				300 Orang	0 Orang									0 Orang		
		Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan				300 Orang	0 Orang									0 Orang		
		Jumlah peserta yang dikirim mengikuti upacara tingkat provinsi				30 Orang	0 Orang									0 Orang		
2.19.02.2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)	0.621 Persen		0.259 Persen	0.445 Persen	0.445 Persen	<b>1.223.772.000</b>	<b>1.416.272.000</b>	<b>1.267.772.000</b>						0.445 Persen	<b>95.770.000</b>	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi pemuda yang dibina				200 Orang	200 Orang	1.223.772.000	1.416.272.000	1.267.772.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	200 Orang	95.770.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	42,86 persen		11,43 persen	34,29 persen	34,29 persen	<b>6.713.307.000</b>	<b>7.952.907.000</b>	<b>7.988.450.000</b>						34,29 persen	<b>2.357.781.000</b>	
2.19.03.2.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan	80,95 Persen		47,62 Persen	71,43 Persen	71,43 Persen	<b>1.080.510.000</b>	<b>1.190.110.000</b>	<b>1.350.110.000</b>						71,43 Persen	<b>659.984.000</b>	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga				4 Lokasi	4 Lokasi	1.080.510.000	1.190.110.000	1.350.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	4 Lokasi	659.984.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah sarana prasarana olahraga yang direhabilitasi sedang/berat				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah sarpras olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala				3 Lokasi	3 Lokasi									3 Lokasi		
2.19.03.	<b>Penyelenggaraan</b>	Peningkatan prestasi	47,62		23,81 Persen	33,33	33,33	<b>1.870.000.000</b>	<b>1.670.000.000</b>	<b>1.415.543.000</b>						33,33	<b>935.000.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.02	<b>Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	olahraga tingkat kota	Persen			Persen	Persen								Persen			
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga masyarakat yang dipertandingkan				10 Cabor	10 Cabor	1.670.000.000	1.470.000.000	1.235.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Altet	10 Cabor	735.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina				21 Cabor	21 Cabor									21 Cabor		
		Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan				16 Cabor	16 Cabor									16 Cabor		
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengikuti Kejuaraan				71 Sekolah	71 Sekolah	200.000.000	200.000.000	180.543.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Altet	71 Sekolah	200.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	205 orang		10 orang	37 orang	14.28 %	<b>3.019.890.000</b>	<b>4.469.890.000</b>	<b>4.619.890.000</b>						14.28 %	<b>519.890.000</b>	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tk. provinsi				250 orang	250 orang	215.800.000	215.800.000	215.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Altet	250 orang	215.800.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet yang dibina di PPLOPD				72 Orang	72 Orang	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Altet	72 Orang	120.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina				6 Cabor	0 Cabor	2.684.090.000	4.134.090.000	4.284.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Altet	0 Cabor	184.090.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Cabang Olahraga yang difasilitasi Pengembangannya				5 Cabor	3 Cabor									3 Cabor		
		Jumlah Induk Cabang Olahraga Prestasi yang dibina				0 Orang	2 induk cabor									2 induk cabor		
2.19.03.2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	Jumlah Prestasi Olahraga (IKK Outcome)	24 medali		4 medali		4 medali	<b>40.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>						4 medali	<b>40.000.000</b>	
2.19.03.	Pengembangan	Jumlah Organisasi				2 Cabor	0 Cabor	40.000.000	20.000.000	0	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Atlet	0 Cabor	40.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.04.02	Organisasi Keolahragaan	Keolahragaan yang dikembangkan									Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.03.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	24 Event		4 Event	4 Event	57.14 %	<b>702.907.000</b>	<b>602.907.000</b>	<b>602.907.000</b>					57.14 %	<b>202.907.000</b>		
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga yang dikembangkan			5 Cabor	5 Cabor		602.907.000	602.907.000	602.907.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Atlet	5 Cabor	102.907.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.22	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>4.267.140.000</b>	<b>4.206.740.000</b>	<b>4.109.583.000</b>						<b>3.611.028.000</b>		
2.22.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>2.566.877.000</b>	<b>1.831.877.000</b>	<b>1.694.720.000</b>					100 persen	<b>1.777.130.000</b>		
2.22.02.2.01	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	32 Event		2 Event	6 Event	6 Event	<b>1.523.720.000</b>	<b>1.313.720.000</b>	<b>1.279.720.000</b>					6 Event	<b>1.000.000.000</b>		
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan			4 Kegiatan	5 Kegiatan		1.523.720.000	1.313.720.000	1.279.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Masyarakat	5 Kegiatan	1.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi			40 Komunitas	40 Komunitas									40 Komunitas			
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan kerjasama budaya yang difasilitasi			5 event	6 event									6 event			
2.22.02.2.02	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	52 Event		2 Event	10 Event	10 Event	<b>1.043.157.000</b>	<b>518.157.000</b>	<b>415.000.000</b>					10 Event	<b>777.130.000</b>		
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah cabang seni yang dilombakan			4 Cabang	4 Cabang		1.010.000.000	485.000.000	415.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Masyarakat	4 Cabang	747.130.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan yang diselenggarakan dalam pelindungan, pengembangan			8 Event	8 Event									8 Event			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya																
		Jumlah komunitas yang terfasilitasi				20 Komunitas	20 Komunitas								20 Komunitas			
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek								3 Objek			
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangka pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan				1 Lomba	0 Lomba	33.157.000	33.157.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Masyarakat	0 Lomba	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	339.188.000	342.788.000	402.788.000					100,00 persen	538.138.000		
2.22.03.2.01	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	165 komunitas		5 komunitas	26 komunitas	26 komunitas	339.188.000	342.788.000	402.788.000					26 komunitas	538.138.000		
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah cabang seni yang dibintekkan				3 Cabang Seni	3 Cabang Seni	90.248.000	90.248.000	100.248.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Komunitas/Sanggar Kesenian	3 Cabang Seni	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)				90 Orang	90 Orang								90 Orang			
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi melalui DKKP				26 Komunitas/sanggar kesenian	40 Komunitas/sanggar kesenian	248.940.000	252.540.000	302.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Komunitas/Sanggar Kesenian	40 Komunitas/sanggar kesenian	498.138.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah lembaga kesenian tradisional yang dibina				1 Lembaga	1 Lembaga								1 Lembaga			
		Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya yang difasilitasi melalui DKKP					3 Kegiatan								3 Kegiatan			
2.22.04	<b>PROGRAM</b>	Persentase pembinaan	100,00		100,00	100,00	100,00	46.426.000	46.426.000	26.426.000					100,00	68.141.000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	<b>PEMBINAAN SEJARAH</b>	Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	persen		persen	persen	persen								persen			
2.22.04.2.01	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	46.426.000	46.426.000	26.426.000					100 Persen	68.141.000		
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang terpublikasi			2 Dokumen	1 Dokumen	46.426.000	46.426.000	26.426.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Masyarakat	1 Dokumen	68.141.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.22.05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	97,52 persen		88,65 persen	92,20 persen	92,20 persen	27.500.000	27.500.000	27.500.000					92,20 persen	19.534.000		
2.22.05.2.01	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.19 Persen		1.42 Persen	2.13 Persen	2.13 Persen	27.500.000	27.500.000	27.500.000					2.13 Persen	19.534.000		
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Obyek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan dan ditetapkan dengan SK Walikota			3 Objek	3 Objek	27.500.000	27.500.000	27.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya	Masyarakat Kota Pekalongan	3 Objek	19.534.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah Pemberian tanda bukti kepemilikan dan keaslian cagar budaya			3 Buah	3 Buah									3 Buah			
2.22.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Persentase pengunjung museum batik	4,80 persen		4,55 persen	4,66 persen	4,66 persen	1.287.149.000	1.958.149.000	1.958.149.000					4,66 persen	1.208.085.000		
2.22.06.2.01	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pengunjung museum batik	139000 Orang		25000 Orang	27000 Orang	27000 Orang	1.287.149.000	1.958.149.000	1.958.149.000					27000 Orang	1.208.085.000		
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Bulan Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Batik			12 Bulan	12 Bulan	240.688.000	240.047.000	240.047.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Pengunjung Museum Batik	12 Bulan	210.684.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			1307 Koleksi	1307 Koleksi					DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				1307 Koleksi			
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kegiatan yang Diselenggarakan dalam Pengelolaan Batik (SIDa)			8 Kegiatan	8 Kegiatan	925.250.000	1.003.059.000	1.003.059.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Revolusi Mental dan Pembangunan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama	Pengunjung Museum Batik	8 Kegiatan	876.190.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Kebudayaan	komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.			Kepemudaan dan Olahraga	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum				12 Bulan	12 Bulan	121.211.000	715.043.000	715.043.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Pengunjung Museum Batik	12 Bulan	121.211.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
3.26	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>							11.901.280.000	13.020.780.000	12.090.051.000							12.699.959.000	
3.26.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	5.628.630.000	6.417.130.000	6.186.384.000					100 persen	5.642.402.000		
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen								100 persen			
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen								100 persen			
3.26.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	16.000.000					100 Persen	22.850.000		
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinparbudpora	2 Dokumen	2.750.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
										Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				dan Olahraga	
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	2 dokumen	1.650.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	18.450.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen												
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan												
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen												
3.26.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>4.550.208.000</b>	<b>4.405.008.000</b>	<b>4.077.459.000</b>					100 Persen	<b>4.715.791.000</b>		
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	4.467.108.000	4.317.108.000	3.997.659.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	14 kali	4.633.691.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	81.600.000	86.400.000	78.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	80.450.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	1 dokumen	1.650.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>9.500.000</b>	<b>405.000.000</b>	<b>479.523.000</b>					100 Persen	<b>9.500.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				1 Kali	1 Kali	9.500.000	105.000.000	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	1 Kali	9.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	400 Orang	-	300.000.000	374.523.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	400 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>315.620.000</b>	<b>365.620.000</b>	<b>383.140.000</b>					100 Persen	<b>289.827.000</b>		
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	5.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	7.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	12 Bulan	70.500.000	120.500.000	129.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				6 Unit	6 Unit									6 Unit		
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	11 Bulan	55.300.000	55.300.000	61.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	11 Bulan	58.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	19.500.000	19.500.000	9.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 bulan	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	2.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				155 orang/kali	155 orang/kali	152.820.000	152.820.000	168.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	155 orang/kali	151.327.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>567.200.000</b>	<b>528.000.000</b>	<b>567.260.000</b>						100 Persen	<b>447.400.000</b>	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	2.400.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	268.000.000	268.000.000	332.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	268.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	296.800.000	257.600.000	232.860.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 bulan	177.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>170.102.000</b>	<b>697.502.000</b>	<b>663.002.000</b>						100 Persen	<b>157.034.000</b>	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	84.456.000	85.656.000	101.156.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 bulan	74.840.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01.	Pemeliharaan/Rehabilita	Jumlah gedung kantor yang				1 Unit	1 Unit	65.646.000	591.846.000	541.846.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Dinparbudpora	1 Unit	62.194.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2.09.09	si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpelihara secara rutin/berkala									Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	a			Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga	
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbudpora	12 Bulan	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12,50 persen		10,00 persen	11,00 persen	11,00 persen	<b>3.946.296.000</b>	<b>4.584.696.000</b>	<b>4.474.296.000</b>						11,00 persen	<b>5.444.537.000</b>		
3.26.02.2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>140.000.000</b>	<b>205.000.000</b>	<b>142.000.000</b>						100 Persen	<b>2.914.126.000</b>		
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	190.000.000	132.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Usaha Pariwisata	1 Dokumen		0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring				48 Lokasi	32 Lokasi	15.000.000	15.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Usaha Pariwisata	32 Lokasi	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga	
3.26.02.2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>3.786.296.000</b>	<b>4.359.696.000</b>	<b>4.330.296.000</b>						100 Persen	<b>2.510.411.000</b>		
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerjaan untuk Pengembangan Obyek Wisata yang dilaksanakan				2 Pekerja an	2 Pekerja an	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata,	Destinasi Wisata	2 Pekerja an	400.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.			Kepemudaan dan Olahraga	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Obyek Wisata yang dipelihara secara rutin/berkala				2 Lokasi	2 Lokasi	570.000.000	589.400.000	590.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata	2 Lokasi	460.411.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang diterapkan				1 Lokasi	1 Lokasi	2.766.296.000	3.320.296.000	3.290.296.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata	1 Lokasi	1.600.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Obyek Wisata yang dipelihara	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi													
3.26.02.2.04	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.000.000</b>						100 Persen	<b>20.000.000</b>	
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah usaha Pariwisata yang direkomendasi				10 Lokasi	1 Lokasi	20.000.000	20.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Usaha Pariwisata	1 Lokasi	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	46,98 persen		21,98 persen	31,98 persen	31,98 persen	<b>1.141.926.000</b>	<b>1.045.526.000</b>	<b>952.776.000</b>						31,98 persen	<b>1.047.887.000</b>	
3.26.03.2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	25 Persen		25 Persen	25 Persen	25 Persen	<b>1.141.926.000</b>	<b>1.045.526.000</b>	<b>952.776.000</b>						25 Persen	<b>1.047.887.000</b>	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bulan promosi pariwisata kota pekalongan				12 bulan	12 bulan	53.500.000	253.500.000	226.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan,	wisatawan nusantara	12 bulan	53.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Jumlah Dokumen Calender of Event yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen				Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	dan jasa yang mampu berdaya saing.		1 Dokumen		
		Jumlah media promosi pariwisata kota Pekalongan (SIDa)				4 media	4 media									4 media		
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pameran nasional dan regional yang diikuti				2 Pameran	2 Pameran	224.000.000	224.000.000	214.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	wisatawan nusantara	2 Pameran	224.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemilihan Duta Wisata Tk. Kota dan Provinsi yang diselenggarakan				2 Kegiatan	1 Kegiatan	429.226.000	232.826.000	232.826.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	wisatawan nusantara	1 Kegiatan	275.387.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah event Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang diselenggarakan				1 event	1 event	435.200.000	335.200.000	279.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	wisatawan nusantara	1 event	495.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Kegiatan Besih, Indah, Sehat, Aman (BISA) yang diselenggarakan				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah Kegiatan Roadshow Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah Stakeholder Mitra Pariwisata yang difasilitasi				1 Mitra	1 Mitra									1 Mitra		
3.26.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk bereksprei, berpromosi dan berinteraksi	59,52 persen		30,30 persen	30,30 persen	30,30 persen	<b>494.262.000</b>	<b>283.262.000</b>	<b>23.775.000</b>						30,30 persen	<b>292.566.000</b>	
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan	Jumlah Penyelenggaraan EKRAF EXPO	6 event		1 event	100 persen	100 persen	<b>464.262.000</b>	<b>253.262.000</b>	<b>23.775.000</b>						100 persen	<b>272.566.000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	<b>Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	464.262.000	253.262.000	23.775.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Insan Kreatif, Masyarakat	1 Unit	272.566.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.04.2.02	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Cakupan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	90 persen		75 persen	75 persen	75 persen	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>						75 persen	<b>20.000.000</b>	
3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah UKM Ekraf yang terfasilitasi pendaftaran dan Pengembangan Merk HAKI (SIDa)				30 UMKM	30 UMKM	30.000.000	30.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku Ekraf	30 UMKM	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100 persen		40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen	<b>690.166.000</b>	<b>690.166.000</b>	<b>452.820.000</b>						40,00 persen	<b>272.567.000</b>	
3.26.05.2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	14.29 Persen		18.18 Persen	18.18 Persen	18.18 Persen	<b>690.166.000</b>	<b>690.166.000</b>	<b>452.820.000</b>						18.18 Persen	<b>272.567.000</b>	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif tingkat dasar dikembangkan kompetensinya (SIDa)				60 Pelaku Ekraf	90 Pelaku Ekraf	30.000.000	30.000.000	26.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	90 Pelaku Ekraf	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Festival Kreatif yang diselenggarakan				1 event	1 event	218.560.000	218.560.000	208.770.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	1 event	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah komunitas kemitraan yang terfasilitasi				0 komunitas	1 komunitas									1 komunitas		
		Jumlah updating data EKRAF				1 Kegiatan	0 Kegiatan									0 Kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (masyarakat, guru, pelajar) yang terfasilitasi pelatihan (SIDa)				60 Orang	80 Orang	28.890.000	28.890.000	23.890.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	80 Orang	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif yang terfasilitasi pelatihan sertifikasi				30 Orang	30 Orang	50.000.000	50.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	30 Orang	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif yang tersertifikasi (SIDa)				5 Orang	5 Orang									5 Orang		
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah FGD komunitas yang diselenggarakan				0 kali	0 kali	314.160.000	314.160.000	164.160.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	0 kali	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan expo yang dilaksanakan				1 Expo	1 Expo									1 Expo		
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi proses kreasi, produksi, konsumsi dan konservasi				0 Pelaku	25 Pelaku									25 Pelaku		
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dikembangkan kompetensinya				20 Pelaku	20 Pelaku	38.556.000	38.556.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	20 Pelaku	32.567.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dimonitoring				40 Pelaku	7 event	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	7 event	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							768.650.000	396.850.000	438.706.000					787.087.000			
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	4,80 persen		3,80 persen	4,40 persen	4,40 persen	708.840.000	265.040.000	318.676.000				4,40 persen	726.214.000			
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	82.980.000	82.980.000	142.376.000				100 persen	69.400.000			
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Dinperpa	1 dokumen	20.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kegiatan penyaluran hibah uang yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	47.980.000	47.980.000	112.101.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Dinperpa	1 kegiatan	32.600.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah produk olahan pangan berbahan baku lokal yang diujicoba dalam pelatihan				2 produk	2 produk				Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton				2 produk			
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pemantauan harga pangan pokok strategis yang disusun				12 dokumen	12 dokumen	15.000.000	15.000.000	10.275.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Dinperpa	12 dokumen	16.800.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan daerah	5625 Kg		4500 Kg	5150 Kg	5150 Kg	101.260.000	102.460.000	99.500.000					5150 Kg	126.814.000		
		Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100								100			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	persen			persen	persen							persen				
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyaluran cadangan pangan daerah yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	86.260.000	87.460.000	87.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Dinperpa	1 kegiatan	101.814.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah dokumen penyusunan PPH Konsumsi yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	12.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengenda lian penyakit.	Dinperpa	1 dokumen	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.03.2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan	20 kegiatan		7 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	<b>524.600.000</b>	<b>79.600.000</b>	<b>76.800.000</b>						2 kegiatan	<b>530.000.000</b>	
		Persentase kegiatan pendampingan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentasi capaian konsumsi energi dan protein perkapita/tahun	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	524.600.000	79.600.000	76.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	kelompok pemberdayaan pekarangan	2 kali	530.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>17.970.000</b>	<b>53.970.000</b>	<b>45.840.000</b>						100,00 persen	<b>18.171.000</b>	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	4 kecamatan		4 kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan	<b>17.970.000</b>	<b>53.970.000</b>	<b>45.840.000</b>						4 kecamatan	<b>18.171.000</b>	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan	Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	17.970.000	53.970.000	45.840.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	1. Penguatan pencegahan faktor risiko,	Dinperpa	1 dokumen	18.171.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	dan Kerentanan Pangan										Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.				
2.09.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	88,00 persen		80,00 persen	83,20 persen	83,20 persen	41.840.000	77.840.000	74.190.000					83,20 persen	42.702.000		
2.09.05.2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	174 sample		24 sample	25 sample	25 sample	41.840.000	77.840.000	74.190.000					25 sample	42.702.000		
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan Jumlah kegiatan sosialisasi keamanan pangan bagi anak sekolah dan pengelola kantin yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	41.840.000	77.840.000	74.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinperpa	1 kegiatan	42.702.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
3.27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>							6.941.311.000	7.250.746.000	6.593.160.000						8.453.561.000		
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen 100 persen 100 persen		100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	5.635.939.000	5.645.939.000	5.277.603.000					100 persen 100 persen 100 persen	7.194.188.000		
3.27.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	16.000.000	16.000.000	16.000.000					100 persen	22.850.000		
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Dinperpa	2 dokumen	3.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	2 dokumen	1.650.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	17.700.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen													
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen													
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen													
3.27.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>4.875.407.000</b>	<b>4.881.507.000</b>	<b>4.689.507.000</b>					100 persen	<b>6.013.676.000</b>		
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	4.792.586.000	4.792.586.000	4.600.586.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	14 kali	5.930.855.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	81.171.000	87.271.000	87.271.000	Kota Pekalongan, Kelurahan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	81.171.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Kelurahan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	1 dokumen	1.650.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>9.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>					100 persen	<b>9.500.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	1 kali	9.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>192.750.000</b>	<b>192.750.000</b>	<b>213.794.000</b>					100 persen	<b>149.374.000</b>		
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	1.250.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan 2 unit	12 bulan 2 unit	36.500.000	36.500.000	36.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan 2 unit	36.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	2.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	11 bulan	40.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	10.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dinperpa	12 bulan	2.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan									Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				115 orang/kali	160 orang/hari	100.000.000	100.000.000	121.044.000	Kota Pekalongan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	160 orang/hari	56.624.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>						100 persen	<b>676.230.000</b>	
3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ pekerjaan konstruksi yang terbangun				4 unit	0 unit	200.000.000	200.000.000	0	Kota Pekalongan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	0 unit	676.230.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>277.268.000</b>	<b>285.668.000</b>	<b>286.668.000</b>						100 persen	<b>265.858.000</b>	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	2.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	120.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	155.268.000	163.668.000	164.668.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	143.858.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>65.014.000</b>	<b>65.014.000</b>	<b>66.634.000</b>						100 persen	<b>56.700.000</b>	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	46.514.000	46.514.000	46.514.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	38.200.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	8.500.000	8.500.000	8.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	1 unit	8.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	11.620.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	10.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Nilai produksi pertanian pertahun	55.84 Miliar Rupiah		55.56 Miliar Rupiah	55.67 Miliar Rupiah	55.67 Miliar Rupiah	<b>309.795.000</b>	<b>408.695.000</b>	<b>401.690.000</b>						55.67 Miliar Rupiah	<b>237.083.000</b>	
		Nilai produksi peternakan pertahun	203.65 Miliar Rupiah		184.46 Miliar Rupiah	191.91 Miliar Rupiah	191.91 Miliar Rupiah									191.91 Miliar Rupiah		
3.27.02.2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>109.037.000</b>	<b>105.537.000</b>	<b>108.732.000</b>						100 persen	<b>106.565.000</b>	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bulan pengelolaan lahan tanaman pangan dan hortikultura Jumlah dokumen perekapan RDKK tingkat Kota yang disusun				12 bulan	12 bulan	109.037.000	105.537.000	108.732.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	12 bulan	106.565.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.02.2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>76.097.000</b>	<b>77.297.000</b>	<b>64.597.000</b>						100 persen	<b>76.670.000</b>	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bulan pengelolaan lab kultur jaringan yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	51.097.000	52.297.000	52.297.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan,	lab kultur jaringan Dinperpa	12 bulan	51.670.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kertoharjo	Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	dan jasa yang mampu berdaya saing.				
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	25.000.000	25.000.000	12.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	lab kultur jaringan Dinperpa	1 kali	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.02.2.03	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29 kali		4 kali	5 kali	5 kali	<b>37.661.000</b>	<b>88.861.000</b>	<b>91.361.000</b>						5 kali	<b>36.848.000</b>	
		Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah bulan perawatan bibit ternak yang diadakan				12 bulan	12 bulan	17.161.000	18.361.000	20.861.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	12 bulan	16.348.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelatihan pengolahan pakan ternak yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	20.500.000	70.500.000	70.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	1 kegiatan	20.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.02.2.05	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kenaikan pelayanan ULIB	34,01 persen		5 persen	5 persen	5 persen	<b>87.000.000</b>	<b>137.000.000</b>	<b>137.000.000</b>						5 persen	<b>17.000.000</b>	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak yang dilayani kawin suntik				200 ekor	200 ekor	87.000.000	137.000.000	137.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata,	petani, peternak	200 ekor	17.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
3.27.03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	611.847.000	636.847.000	400.347.000				100,00 persen	637.518.000			
3.27.03.2.02	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	611.847.000	636.847.000	400.347.000				100 persen	637.518.000			
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang direhab			1 unit	1 unit		220.000.000	245.000.000	245.000.000	Kota Pekalongan, Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Kelompok tani, Dinperpa	1 unit	249.518.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun			1 unit	0 unit		340.347.000	340.347.000	155.347.000	Kota Pekalongan, Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Kelompok tani, Dinperpa	0 unit	20.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah rumah potong hewan yang dipelihara			2 unit	2 unit					Kota Pekalongan, Selatan, Kuripan Kertoharjo					2 unit		
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun			1 unit	0 unit		51.500.000	51.500.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Kelompok tani, Dinperpa	0 unit	53.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen		5,00 persen	5,00 persen	5,00 persen	235.382.000	399.417.000	397.417.000					5,00 persen	230.318.000		
3.27.04.2.01	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah</b>	Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani	800 kasus		800 kasus	800 kasus	800 kasus	56.000.000	56.200.000	56.200.000					800 kasus	56.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	<b>Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>																	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penganggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang divaksinasi dan diobati di lapangan (luar kandang)				2500 ekor	2500 ekor	56.000.000	56.200.000	56.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	2500 ekor	56.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.04.2.02	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak	100 persen		100 persen	100 persen		<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>11.000.000</b>						100 persen	<b>15.000.000</b>	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran penjualan ternak yang dilaksanakan				6 kali	6 kali	15.000.000	15.000.000	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak, pedagang	6 kali	15.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.04.2.03	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN	3.000 ekor		500 ekor	500 ekor	1500 ekor	<b>35.000.000</b>	<b>185.575.000</b>	<b>185.575.000</b>						1500 ekor	<b>35.000.000</b>	
		Persentase hewan yang tertangani di PUSKESWAN	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang diobati di PUSKESWAN				1000 ekor	1500 ekor	35.000.000	185.575.000	185.575.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak	1500 ekor	35.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.04.2.04	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>129.382.000</b>	<b>142.642.000</b>	<b>144.642.000</b>						100 persen	<b>124.318.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan operasional RPH yang diadakan				12 bulan	12 bulan	91.882.000	105.142.000	107.142.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	pelaku usaha	12 bulan	86.818.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan pemantauan keamanan bahan pangan asal hewan segar yang diadakan				12 bulan	12 bulan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	pelaku usaha	12 bulan	37.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah panitia qurban yang dilatih tentang tata cara penanganan hewan qurban yang ASUH				50 orang	56 orang											
		Jumlah sosialisasi Kesmavet yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah wilayah yang dilakukan pemantauan kesehatan hewan qurban				27 kelurahan	27 kelurahan										27 kelurahan	
3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>55.711.000</b>	<b>55.711.000</b>	<b>43.961.000</b>						100,00 persen	<b>54.513.000</b>	
3.27.05.2.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>55.711.000</b>	<b>55.711.000</b>	<b>43.961.000</b>						100 persen	<b>54.513.000</b>	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelatihan pembuatan pestisida hayati yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000	25.000.000	15.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani / kelp Tani	1 kegiatan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana yang difasilitasi				2 kali	2 kali	30.711.000	30.711.000	28.711.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani / kelp Tani	2 kali	29.513.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	persentase usaha pertanian/peternakan yang	100,00 persen		50,00 persen	50,00 persen	50,00 persen	<b>32.498.000</b>	<b>32.498.000</b>	<b>23.498.000</b>						50,00 persen	<b>31.799.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		memiliki ijin																
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin	26,49 persen		5 persen	5 persen	5 persen	32.498.000	32.498.000	23.498.000				5 persen	31.799.000			
3.27.06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan				6 kegiatan	6 kegiatan	32.498.000	32.498.000	23.498.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	peternak, dinperpa	6 kegiatan	31.799.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen		5,00 persen	5,00 persen	5,00 persen	60.139.000	71.639.000	48.644.000				5,00 persen	68.142.000			
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	60.139.000	71.639.000	48.644.000				100 persen	68.142.000			
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah bulan pendampingan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	25.000.000	36.500.000	26.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani / Kelp Tani / KTNA	12 bulan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen program penyuluhan tingkat kota yang disusun				1 dokumen	1 dokumen					Ketahanan Pangan dan Pertanian				1 dokumen		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas				4 poktan/tahun	4 poktan/tahun	35.139.000	35.139.000	22.444.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Petani / Kelp Tani / KTNA	4 poktan/tahun	43.142.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Munas KTNA yang difasilitasi				1 kali	1 kali									1 kali		
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							10.421.481.000	10.371.559.000	9.816.509.000					10.986.625.000			
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	8.486.289.000	8.642.789.000	8.079.489.000				100 persen	8.834.957.000			
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen						
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen						
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	16.000.000				100 Persen	22.850.000			
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	2 dokumen	2.750.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	2 dokumen	1.650.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	18.450.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen													
	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen													
	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen													
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	7.217.832.000	7.222.632.000	6.659.532.000				100 Persen	7.608.387.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	7.157.982.000	7.157.982.000	6.594.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	14 kali	7.533.537.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	58.200.000	63.000.000	63.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	73.200.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	1 dokumen	1.650.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>9.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>					100 Persen	<b>14.500.000</b>		
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	1 kali	14.500.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>307.374.000</b>	<b>407.374.000</b>	<b>440.374.000</b>					100 Persen	<b>317.450.000</b>		
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	4.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	12 Bulan	74.924.000	174.924.000	173.124.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 Bulan	47.500.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				17 unit	17 unit									17 unit		
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	7.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Dindagkop UKM	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Barat, Podosugih	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Kecil dan Menengah
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	64.950.000	64.950.000	83.300.000	Kota Pekalongan, Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	11 bulan	64.950.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Pekalongan, Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	60.000.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 kali	100 kali	100.000.000	100.000.000	109.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	100 kali	137.500.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>475.603.000</b>	<b>531.803.000</b>	<b>516.203.000</b>						100 Persen	<b>517.330.000</b>	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	2.400.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	333.185.000	383.185.000	367.585.000	Kota Pekalongan, Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	414.517.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan				12 bulan	12 bulan	140.018.000	146.218.000	146.218.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dindagkop UKM	12 bulan	100.413.000	Dinas Perdagangan,Ko

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		peralatan/bahan kebersihan kantor									Pekalongan Barat, Podosugih	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			perasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	459.980.000	459.980.000	442.380.000					100 Persen	354.440.000		
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	409.980.000	409.980.000	377.180.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	304.440.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	2 unit	30.000.000	30.000.000	34.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	2 unit	30.000.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	31.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindagkop UKM	12 bulan	20.000.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	33,23 persen		24,59 persen	30,94 persen	30,94 persen	87.400.000	91.000.000	99.250.000					30,94 persen	171.400.000		
2.17.03.2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	65,29 persen		62,81 persen	62,81 persen	62,81 persen	87.400.000	91.000.000	99.250.000					62,81 persen	171.400.000		
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,				100 Koperasi	100 Koperasi	87.400.000	91.000.000	99.250.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata,	Koperasi	100 Koperasi	171.400.000	Dinas Perdagangan,Ko perasi, Usaha

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.			Kecil dan Menengah	
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	59,68 persen		38,36 persen	58,31 persen	58,31 persen	667.792.000	497.770.000	497.770.000					58,31 persen	631.070.000		
2.17.05.2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1,39 persen		0,36 persen	0,77 persen	0,77 persen	667.792.000	497.770.000	497.770.000					0,77 persen	631.070.000		
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Manajemen Perkoperasian				35 Koperasi	35 Koperasi	667.792.000	497.770.000	497.770.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM Koperasi	35 Koperasi	631.070.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Packaging/Kemasan				35 koperasi	35 koperasi					DAK Non Fisik-PK2UKM			35 koperasi			
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Penyusunan AD/ART Koperasi				35 Koperasi	35 Koperasi								35 Koperasi			
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian				50 koperasi	50 koperasi								50 koperasi			
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan SAK ETAP Berbasis Digital				35 Koperasi	35 Koperasi								35 Koperasi			
		Jumlah UMKM yang mendapat Fasilitas Pelatihan dan Sertifikasi Halal				30 UMKM	25 UMKM								25 UMKM			
		Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula				35 UMKM	35 UMKM								35 UMKM			
		Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Proses Produksi Bersih					25 UMKM								25 UMKM			
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,37 persen		11,85 persen	12,06 persen	12,06 persen	1.180.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000					12,06 persen	1.349.198.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	7.26 UMKM		1.25 UMKM	3.65 UMKM	3.65 UMKM	1.180.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000					3.65 UMKM	1.349.198.000		
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah event pekan batik yang terselenggara				1 event	1 event	1.180.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	UMKM	1 event	1.349.198.000	Dinas Perdagangan, Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah UMKM terfasilitasi bantuan sarana pemaasaran				47 UMKM	47 UMKM								47 UMKM			
		Jumlah UMKM yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran (SIDa)				90 UMKM	90 UMKM								90 UMKM			
		Jumlah UMKM yang mendapat Pelatihan Digital Marketing				40 UMKM	40 UMKM								40 UMKM			
		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				100 UMKM	65 UMKM								65 UMKM			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							7.206.585.000	7.395.406.000	8.478.215.000						11.399.800.000		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	77,70 persen		73,93 persen	75,42 persen	75,42 persen	2.786.000	2.786.000	5.316.000					75,42 persen	2.726.000		
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.786.000	1.786.000	4.316.000					100 persen	1.726.000		
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin				3 perizinan	3 perizinan	1.786.000	1.786.000	4.316.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan	3 perizinan	1.726.000	Dinas Perdagangan, Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											Berkualitas dan Berkeadilan	mampu berdaya saing.					
3.30.02.2.02	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.000.000	1.000.000	1.000.000				100 persen	1.000.000			
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)				1 perijinan	2 perijinan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Perusahaan	2 perijinan	1.000.000	Dinas Perdagangan, Kooperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100,00 persen		75,00 persen	81,25 persen	81,25 persen	5.739.616.000	6.186.437.000	7.342.337.000					81,25 persen	9.954.203.000		
3.30.03.2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18.75 persen		6.25 persen	6.25 persen	6.25 persen	5.589.616.000	5.961.437.000	7.117.337.000					6.25 persen	9.832.203.000		
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah aplikasi sistem Informasi Database dan Pengelolaan pedagang pasar yang dibangun dan dipelihara				1 sistem aplikasi	1 sistem aplikasi	5.589.616.000	5.961.437.000	7.117.337.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	pasar rakyat	1 sistem aplikasi	6.832.203.000	Dinas Perdagangan, Kooperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		jumlah jasa tenaga kontrak di pasar berdasarkan SK Walikota				63 orang	63 orang								63 orang			
		Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar				84 orang	84 orang								84 orang			
		Jumlah petugas kebersihan, keamanan dan pengelolaan pasar yang ditingkatkan kapasitas SDM nya				157 orang	157 orang								157 orang			
		Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dan dipelihara				11 pasar	11 pasar								11 pasar			
3.30.03.2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	68.97 Persen		11.49 Persen	34.48 Persen	34.48 Persen	150.000.000	225.000.000	225.000.000					34.48 Persen	122.000.000		
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah lokasi kawasan Foodstreet (SIDa)				1 lokasi	1 lokasi	150.000.000	225.000.000	225.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan,	Petugas retribusi pasar, pedagang, PK5	1 lokasi	122.000.000	Dinas Perdagangan, Kooperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan dan penataan kawasan PK5				120 orang	120 orang				Kelurahan	Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	dan jasa yang mampu berdaya saing.		120 orang		
		Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya				120 orang	120 orang									120 orang		
3.30.04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	100,00 persen		80,00 persen	88,00 persen	88,00 persen	<b>493.949.000</b>	<b>138.767.000</b>	<b>138.767.000</b>						88,00 persen	<b>481.987.000</b>	
3.30.04.2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	100 persen		27,27 persen	54,55 persen	54,55 persen	<b>488.949.000</b>	<b>133.767.000</b>	<b>133.767.000</b>						54,55 persen	<b>476.987.000</b>	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga				95 komoditas	95 komoditas	131.367.000	133.767.000	133.767.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagang	95 komoditas	130.000.000	Dinas Perdagangan, Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04.2.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>						100 persen	<b>5.000.000</b>	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pupuk dan pestisida yang terawasi penyalurannya				586 Ton	586 Ton	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyarakat	586 Ton	5.000.000	Dinas Perdagangan, Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Persentase peningkatan volume ekspor	8,19 persen		7,24 persen	7,60 persen	7,60 persen	<b>93.441.000</b>	<b>93.441.000</b>	<b>75.591.000</b>						7,60 persen	<b>117.748.000</b>	
3.30.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah</b>	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir	27 pelaku usaha		22 pelaku usaha	24 pelaku usaha	24 pelaku usaha	<b>93.441.000</b>	<b>93.441.000</b>	<b>75.591.000</b>						24 pelaku usaha	<b>117.748.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	<b>Kabupaten/Kota</b>																	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan produk Ekspor (Sida)				30 UMKM	30 UMKM	93.441.000	93.441.000	75.591.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Eksportir	30 UMKM	117.748.000	Dinas Perdagangan, Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	83,99 persen		73,99 persen	77,99 persen	77,99 persen	<b>366.766.000</b>	<b>376.566.000</b>	<b>363.775.000</b>						77,99 persen	<b>372.506.000</b>	
3.30.06.2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	83,99 persen		73,99 persen	77,99 persen	77,99 persen	<b>366.766.000</b>	<b>376.566.000</b>	<b>363.775.000</b>						77,99 persen	<b>372.506.000</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera /Tera Ulang				4912 UTTP	4912 UTTP	331.766.000	341.566.000	341.316.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagog	4912 UTTP	332.506.000	Dinas Perdagangan, Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha Tersosialisasi Kemetrolgian Legal				81 Orang	50 Orang	35.000.000	35.000.000	22.459.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagog	50 Orang	40.000.000	Dinas Perdagangan, Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah Potensi UTTP Legal Yang Terawasi				4912 UTTP	4912 UTTP									4912 UTTP		
3.30.07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran (IKK Output)	7,50 persen		2,09 persen	4,26 persen	4,26 persen	<b>510.027.000</b>	<b>597.409.000</b>	<b>552.429.000</b>						4,26 persen	<b>470.630.000</b>	
3.30.07.2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen		7,14 persen	4 persen	4 persen	<b>510.027.000</b>	<b>597.409.000</b>	<b>552.429.000</b>						4 persen	<b>470.630.000</b>	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat	Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produknya melalui Showroom				180 UMKM	130 UMKM	409.053.000	411.453.000	404.923.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata,	Pelaku usaha mikro	130 UMKM	370.000.000	Dinas Perdagangan, Ko perasi, Usaha

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Kabupaten/Kota	Dekranasda									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.			Kecil dan Menengah	
		Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah				12 UMKM	20 UMKM									20 UMKM		
		Jumlah UMKM yang Mengikuti Sosialisasi Promosi Produk melalui E-Market Place				30 UMKM	30 UMKM									30 UMKM		
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan e-catalog				25 UMKM	25 UMKM	45.974.000	45.974.000	7.524.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Pelaku usaha mikro	25 UMKM	50.630.000	Dinas Perdagangan, Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah video pemasaran produk unggulan Kota Pekalongan yg dibuat				3 Video	3 Video									3 Video		
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui Pemasaran Online (SIDa)				60 UMKM	60 UMKM	55.000.000	139.982.000	139.982.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pelaku usaha mikro	60 UMKM	50.000.000	Dinas Perdagangan, Ko perasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
2.07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>							<b>2.836.788.000</b>	<b>4.012.046.000</b>	<b>4.251.627.000</b>						<b>3.915.431.140</b>		
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,55 persen		0,33 persen	0,42 persen	0,42 persen	<b>2.074.978.000</b>	<b>2.989.036.000</b>	<b>3.243.467.000</b>						0,42 persen	<b>2.435.591.140</b>	
2.07.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.879.948.000</b>	<b>2.741.606.000</b>	<b>3.098.227.000</b>						100 persen	<b>2.116.190.000</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi				80 orang	80 orang	1.794.288.000	2.655.946.000	3.059.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan	Pencari Kerja	80 orang	1.805.088.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pengangguran yang difasilitasi pelatihan				1972 orang	2140 orang									2140 orang		
		Jumlah perusahaan yang mengadakan kemitraan MOU dengan BLK melalui kios 3in1 (SIDa)				16 perusahaan	16 perusahaan									16 perusahaan		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				128 Orang	128 Orang								128 Orang			
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah bulan pemeliharaan bangunan BLK Jumlah Instruktur yang dinilai Jumlah Kejuruan yang alat-alat pelatihannya dirawat				12 bulan 14 instruktur 11 kejuruan	12 bulan 14 instruktur 5 kejuruan	85.660.000	85.660.000	38.935.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	12 bulan 14 instruktur 5 kejuruan	111.102.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 persen		70 persen	70 persen	70 persen	<b>83.500.000</b>	<b>133.500.000</b>	<b>51.000.000</b>					70 persen	<b>134.243.000</b>		
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Instruktur yang mengikuti pelatihan kompetensi (SIDa) Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Ketrampilan Kerja di Kelurahan Jumlah orang yang mengikuti workshop tata kelola LPKS (SIDa) Jumlah volume kunjungan monitoring ke LPKS selama 1 (satu) tahun				20 orang 80 orang 30 orang 24 kali	0 orang 80 orang 0 orang 0 kali	83.500.000	133.500.000	51.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0 orang 80 orang 0 orang 0 kali	134.243.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.03.2.04	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	Jumlah kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan Persentase produktivitas pada perusahaan kecil	36 tenant 100 persen		6 tenant 100 persen	6 tenant 100 persen	6 tenant 100 persen	<b>81.530.000</b>	<b>83.930.000</b>	<b>83.930.000</b>					6 tenant 100 persen	<b>98.507.140</b>		
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah tenant yang memperoleh pembinaan (SIDa)				6 tenant	6 tenant	81.530.000	83.930.000	83.930.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia	Perusahaan Kecil	6 tenant	98.507.140	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	53.33 persen		53.33 persen	33.33 persen	33.33 persen	30.000.000	30.000.000	10.310.000									
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah alumni siswa pelatihan yang termonitor				600 alumni siswa	160 alumni siswa	30.000.000	30.000.000	10.310.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja	160 alumni siswa	86.651.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah peminat magang Jepang yang mengikuti pembekalan				15 orang	0 orang									0 orang			
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	29,93 persen		19,93 persen	23,93 persen	23,93 persen	243.500.000	419.700.000	252.700.000						23,93 persen	996.046.000		
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	14.08 persen		8.52 persen	10.75 persen	10.75 persen	85.000.000	85.000.000	0						10.75 persen	436.105.000		
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi					0 Orang	25.000.000	25.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha	Pencari Kerja	0 Orang	85.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah sosialisasi ketenagakerjaan yang dilaksanakan				3 kali	0 kali									0 kali			
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan					0 Orang	25.000.000	25.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah	Pencari Kerja	0 Orang	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja				160 siswa	0 siswa									0 siswa			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
																dengan dunia usaha.			
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan				20 orang	0 orang	10.000.000	10.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 orang	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah dokumen RTKD yang disusun					0 Dokumen	25.000.000	25.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 Dokumen	296.105.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah lokasi pelaksanaan padat karya				3 lokasi	0 lokasi												
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota (Transmigrasi)(IKK Output)				1 perjanjian	0 perjanjian												
		Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)				3 orang	0 orang												
		Jumlah tenaga kerja non formal terdaftar dalam satu Kab/Kota (WUB)				10 orang	0 orang												
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	72 buku		12 buku	12 buku	12 buku	115.500.000	266.700.000	191.700.000						12 buku	158.814.000		
		Persentase Ketercapaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen			
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					0 Dokumen	30.500.000	31.700.000	31.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 Dokumen	31.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kab/Kota (IKK Output)				12 orang	12 bulan									12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.07.04. 2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah layanan informasi pasar kerja yang dilaksanakan				700 layanan	700 layanan	10.000.000	160.000.000	160.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	700 layanan	16.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah leaflet antar kerja yang dicetak				4 rim	4 rim									4 rim		
		Jumlah orang yang difasilitasi pelayanan online sistem antar Kerja / AK I				1000 orang	1000 orang									1000 orang		
2.07.04. 2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja					0 Orang	75.000.000	75.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pencari Kerja	0 Orang	111.314.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam pelaksanaan job fair				50 perusahaan	0 perusahaan									0 perusahaan		
2.07.04. 2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	249 orang		29 orang	39 orang	39 orang	<b>36.000.000</b>	<b>61.000.000</b>	<b>61.000.000</b>						39 orang	<b>392.041.000</b>	
		Persentase CPMI yang terlayani secara legal	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2.07.04. 2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output)				60 orang	60 orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pekerja Migran Indonesia (PMI)	60 orang	307.041.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata (IKK Output)				40 orang	40 orang									40 orang		
2.07.04. 2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang terfasilitasi rekomendasi paspor				75 orang	75 orang	16.000.000	41.000.000	41.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	4. Penempatan dan pemberdayaan	Pekerja Migran Indonesia	75 orang	85.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.					
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (SIDa)				30 perusahaan	30 perusahaan	12.000.000	12.000.000	11.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Perusahaan	30 perusahaan	18.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				0 Laporan	0 Laporan	379.605.000	304.605.000	275.505.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Perusahaan	0 Laporan	277.450.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pekerja informal yang menerima bantuan premi				1000 orang	1000 orang									1000 orang		
		Jumlah perusahaan yang didata ketenagakerjaannya				72 perusahaan	72 perusahaan									72 perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan pengupahan				40 Perusahaan	40 Perusahaan									40 Perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi UMK				45 Perusahaan	45 Perusahaan									45 Perusahaan		
		Jumlah perusahaan yang mengikuti workshop struktur skala upah				40 Perusahaan	40 Perusahaan									40 Perusahaan		
		Jumlah rekomendasi UMK yang disusun				1 Rekomendasi UMK	1 Rekomendasi UMK									1 Rekomendasi UMK		
		Jumlah sidang/ rapat Dewan Pengupahan				8 kali	8 kali									8 kali		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	80.06 persen		48.57 persen	68.07 persen	68.07 persen	111.155.000	271.155.000	454.005.000						68.07 persen	163.344.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.05. 2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mengikuti dialog pencegahan perselisihan Hubungan Industrial/HI				35 perusahaan	35 perusahaan	7.500.000	107.500.000	107.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	35 perusahaan	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05. 2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi mediasi				28 kasus	28 kasus	8.500.000	8.500.000	7.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	28 kasus	12.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.07.05. 2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi					0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.000.000	20.000.000	12.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	22.344.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/ Pengusaha/ Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yg mengikuti pembinaan				80 pengurus	40 pengurus									40 pengurus		
2.07.05. 2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				0 Lembaga	0 Lembaga	66.405.000	86.405.000	286.405.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan	Tenaga Kerja, Perusahaan	0 Lembaga	99.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah peserta yang mengikuti porseni tripartit				150 orang	150 orang									150 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit				8 kali	8 kali											
2.07.05. 2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja				55 perusahaan	55 perusahaan	8.750.000	48.750.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenaga Kerja, Perusahaan	55 perusahaan	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
3.31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>							<b>7.903.827.000</b>	<b>8.359.458.000</b>	<b>7.824.070.000</b>						<b>7.030.215.000</b>		
3.31.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>7.319.827.000</b>	<b>7.466.858.000</b>	<b>7.143.804.000</b>						100 persen	<b>6.618.947.000</b>	
3.31.01. 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>						100 persen	<b>22.049.000</b>	
3.31.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	2 dokumen	2.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	2 dokumen	1.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinperinaker	12 bulan	18.049.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
3.31.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	6.274.726.000	6.279.526.000	5.852.562.000						100 persen	5.753.073.000	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	6.226.626.000	6.226.626.000	5.799.662.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	14 kali	5.689.573.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	46.600.000	51.400.000	51.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	62.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	1 dokumen	1.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	9.500.000	5.000.000	5.000.000						100 persen	8.631.000	
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	1 kali	8.631.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	179.040.000	179.040.000	198.761.000						100 persen	232.954.000	
3.31.01.	Penyediaan Komponen	Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota	Dana	Memperkuat	12. Penerapan	Dinperinaker	12 bulan	3.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.06.01	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Perindustrian dan Tenaga Kerja	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	53.690.000	53.690.000	67.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	56.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit	8 unit									8 unit		
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	5.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	31.000.000	31.000.000	31.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	11 bulan	44.954.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	7.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	3.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				83 orang/kali	85 orang/kali	75.000.000	75.000.000	82.061.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	85 orang/kali	114.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>297.120.000</b>	<b>297.120.000</b>	<b>294.520.000</b>						100 persen	<b>29.074.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.31.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan bangunan yang diadakan Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan				1 dokumen	0 dokumen	297.120.000	297.120.000	294.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	0 dokumen 1 Pekerjaan	29.074.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>422.968.000</b>	<b>432.668.000</b>	<b>495.258.000</b>					Dinperinaker	100 persen	<b>474.810.000</b>	
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	2.400.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				10 bulan	12 bulan	185.000.000	185.000.000	247.590.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	228.710.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	235.568.000	245.268.000	245.268.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	243.700.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>120.473.000</b>	<b>257.504.000</b>	<b>281.703.000</b>					Dinperinaker	100 persen	<b>98.356.000</b>	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	51.973.000	89.004.000	99.504.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	12 bulan	35.556.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	2 unit	50.000.000	150.000.000	162.899.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperinaker	2 unit	42.800.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan				12 bulan	12 bulan	18.500.000	18.500.000	19.300.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Dinperinaker	12 bulan	20.000.000	Dinas Perindustrian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor secara rutin/berkala									Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			dan Tenaga Kerja	
3.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	21,04 persen		20,59 persen	20,43 persen	20,43 persen	473.000.000	681.600.000	476.066.000					20,43 persen	271.800.000		
3.31.02.2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.5 persen		2.0 persen	3 persen	3 persen	473.000.000	681.600.000	476.066.000					3 persen	271.800.000		
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen evaluasi RIPIK yang disusun (SIDa) Jumlah sentra yang difasilitasi kelembagaan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Industri	1 Dokumen 1 Sentra	20.800.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM Batik/Kuliner/Kraft/Jamu/ Bordir/Canting/ Kemasan yang mengikuti pelatihan pengembangan produk (SIDa) Jumlah IKM yang dilatih produksi bersih/industri hijau (SIDa)				30 IKM	30 IKM	20.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Industri	30 IKM 30 IKM	21.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah bangunan yang dirawat/dipelihara				1 unit	0 unit	348.000.000	351.600.000	137.816.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	0 unit	130.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah IKM yang dilatih Peningkatan Manajemen Mutu					2 Dokumen								2 Dokumen 0 IKM			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah SDM IKM yang dilatih Pelatihan Kemas				25 IKM	25 IKM	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	25 IKM	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM/Perusahaan yang mengikuti sosialisasi SIINas Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Peningkatan Teknologi Digitalisasi IKM (SIDa)				30 IKM/Perusahaan	30 IKM/Perusahaan	15.000.000	115.000.000	123.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	Industri	30 IKM/Perusahaan 30 IKM	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	26,00 persen		23,00 persen	24,00 persen	24,00 persen	<b>66.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>64.200.000</b>						24,00 persen	<b>13.628.000</b>	
3.31.03.2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	33 persen		23 persen	25 persen	25 persen	<b>66.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>64.200.000</b>						25 persen	<b>13.628.000</b>	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota					2 Dokumen	66.000.000	66.000.000	64.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	2 Dokumen	13.628.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>45.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>140.000.000</b>						100,00 persen	<b>125.840.000</b>	
3.31.04.2.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk</b>	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi	35 persen		23 persen	28 persen	28 persen	<b>45.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>140.000.000</b>						28 persen	<b>125.840.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	<b>Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan																
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang diupdate guna meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengembangan usaha (SIDa)				2000 IKM	2000 IKM	40.000.000	140.000.000	140.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	2000 IKM	120.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Evaluasi RPIK yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	5.000.000	5.000.000	0	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Industri	1 kali	5.840.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							13.925.697.000	13.925.697.000	13.394.771.000							14.048.634.000	
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	13.925.697.000	13.925.697.000	13.394.771.000						100 persen	14.048.634.000	
4.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	13.925.697.000	13.925.697.000	13.394.771.000						100 persen	14.048.634.000	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 kali	14 kali	13.925.697.000	13.925.697.000	13.394.771.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	14 kali	14.048.634.000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							954.076.000	1.004.076.000	875.268.000							921.872.000	
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN</b>	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	954.076.000	1.004.076.000	875.268.000						100,00 persen	921.872.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	<b>RAKYAT</b>																	
4.01.02.2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitas pelaksanaan otonomi daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	872.076.000	890.076.000	773.321.000					100 persen	842.872.000		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan evaluasi capaian SPM yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	19.119.000	58.119.000	54.219.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 dokumen	388.782.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah bulan perawatan/pemeliharaan patok tapal batas wilayah				12 bulan	12 bulan	659.292.000	649.292.000	531.217.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 bulan	254.390.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen Monografi Kelurahan yang disusun				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah Kegiatan Lomba K 3 yang diselenggarakan				3 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan dana kelurahan yang dilaksanakan				2 kegiatan	0 kegiatan									0 kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Sarasehan K 3 yang dilaksanakan				22 kegiatan	15 kegiatan									15 kegiatan		
		Jumlah Kelurahan yang dilakukan Pembinaan Administrasi				27 kelurahan	27 kelurahan									27 kelurahan		
		Jumlah Rakor dan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				12 kegiatan	12 kegiatan									12 kegiatan		
		Jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di Kota Pekalongan				4 unsur	4 unsur									4 unsur		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Buku LPPD Kota Pekalongan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	193.665.000	182.665.000	187.885.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	1 dokumen	199.700.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Dokumen Buku LKPJ Walikota Pekalongan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
4.01.02.2.04	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	Persentase efektivitas kerja sama daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	82.000.000	114.000.000	101.947.000					100 persen	79.000.000		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak lain skala lokal/regional/nasional/internasional (SIDA)				70 kerja sama	20 kerja sama	82.000.000	114.000.000	101.947.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	ASN dan Masyarakat	20 kerja sama	79.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							1.020.615.000	1.070.015.000	802.015.000							779.942.000	
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.020.615.000	1.070.015.000	802.015.000					100,00 persen		779.942.000	
4.01.02.2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.020.615.000	1.070.015.000	802.015.000					100 persen		779.942.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah kajian peraturan perundang undangan daerah yang disusun				4 raperda/p erda	4 raperda/p erda	119.215.000	191.215.000	161.215.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Hukum, Masyarakat dan Perangkat Daerah	4 raperda/ perda	119.215.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah produk hukum daerah yang disusun (SIDA)				9 produk hukum	9 produk hukum								9 produk hukum			
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah laporan RANHAM/Kota peduli HAM di Kota Pekalongan yang disusun				2 laporan	2 laporan	821.900.000	796.900.000	558.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Hukum, Masyarakat dan Perangkat Daerah	2 laporan	579.727.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah masyarakat yang mengikuti fasilitasi pelayanan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat				500 orang	500 orang								500 orang			
		Jumlah pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang dilaksanakan				3 perkara	1 perkara								1 perkara			
		Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani				12 kali	12 kali								12 kali			
		Jumlah perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan				6 kali	6 kali								6 kali			
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pengadaan buku perundang-undangan yang diadakan				11 buku	11 buku	79.500.000	81.900.000	81.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Bagian Hukum, Masyarakat dan	11 buku	81.000.000	Sekretariat Daerah



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
											Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangkat Daerah				
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																		
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>360.829.000</b>	<b>385.829.000</b>	<b>297.369.000</b>							<b>406.396.000</b>		
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>360.829.000</b>	<b>385.829.000</b>	<b>297.369.000</b>							100 persen	<b>406.396.000</b>	
4.01.01.2.13	<b>Penataan Organisasi</b>	Indeks Kelembagaan Kota	81 indeks		76 indeks	78 indeks	78 indeks	<b>360.829.000</b>	<b>385.829.000</b>	<b>297.369.000</b>							78 indeks	<b>406.396.000</b>	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	93.679.000	105.659.000	84.532.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah		2 dokumen	112.396.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen			
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang mengusulkan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SIDa)				2 OPD	8 OPD	137.700.000	150.720.000	110.556.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah		8 OPD	156.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah OPD yang menyusun Peta Proses Bisnis (SIDa)				10 OPD	10 OPD										10 OPD		
		Jumlah OPD yang menyusun SOP (SIDa)				3 OPD	3 OPD										3 OPD		
		Jumlah OPD yang terfasilitasi Penyusunan SP (SIDa)				1 OPD	2 OPD										2 OPD		
		Jumlah unit kerja yang disurvei IKM (SIDa)				65 Unit Kerja	76 Unit Kerja										76 Unit Kerja		
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	129.450.000	129.450.000	102.281.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Organisasi - Sekretariat Daerah		1 Dokumen	138.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen LKJIP Kota Pekalongan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		
		Jumlah kegiatan pembinaan internalisasi nilai-nilai budaya kerja yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali										1 Kali		
		Jumlah laporan capaian kinerja OPD yang disusun				31 Dokumen	31 Dokumen										31 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah OPD yang menerapkan pembangunan Zona Integritas				2 OPD	0 OPD							0 OPD				
		Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pendampingan penerapan ZI menuju WBK/WBBM					11 Satuan Kerja							11 Satuan Kerja				
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							314.365.000	351.565.000	305.565.000					918.373.000			
4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	314.365.000	351.565.000	305.565.000				100,00 persen	918.373.000			
4.01.03.2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	243.865.000	281.065.000	225.065.000				100 persen	262.665.000			
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BLUD yang dimonitoring Jumlah BUMD yang difasilitasi				16 BLUD 4 BUMD	16 BLUD 4 BUMD	64.000.000	64.000.000	49.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	16 BLUD 4 BUMD	76.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah bulan pelaksanaan Rakor Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan Jumlah Penyedia Gas Elpiji yang dimonitoring Jumlah Penyedia Pupuk Bersubsidi yang dimonitoring Jumlah Rakor Bidang Ekonomi yang dilaksanakan				2 kali 6 Penyedia 4 Penyedia 12 bulan	12 bulan 6 Penyedia 4 Penyedia 2 kali	80.000.000	116.000.000	101.155.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	12 bulan 6 Penyedia 4 Penyedia 2 kali	88.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Rakor Monev Pemantauan Pengelolaan KUR yang dilaksanakan Jumlah barang cetak kegiatan aktivasi dan publikasi branding yang				4 kali 4475 buah	4 kali 4485 buah	99.865.000	101.065.000	74.625.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Kota Pekalongan	4 kali 4485 buah	98.665.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
															Publik	pelayanan publik.		
		diadakan																
		Jumlah Rakor Monev Komite Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan			4 kali	4 kali						4 kali						
		Jumlah Rakor TPAKD yang dilaksanakan			6 kali	3 kali						3 kali						
4.01.03.2.04	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Persentase Ketercapaian kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	70.500.000	70.500.000	80.500.000			100 persen	655.708.000				
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah OPD pengelola DBHCHT yang dimonitoring			6 OPD	6 OPD	70.500.000	70.500.000	80.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	6 OPD	655.708.000	Sekretariat Daerah	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							674.794.000	713.194.000	603.438.000					617.475.000			
4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen		7,00 persen	6,00 persen	6,00 persen	674.794.000	713.194.000	603.438.000				6,00 persen	617.475.000			
4.01.03.2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	112.678.000	152.770.000	83.426.000				100 persen	109.935.000			
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah FGD yang dilaksanakan			1 kali	1 kali	45.351.000	85.443.000	41.016.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	1 kali	42.935.000	Sekretariat Daerah	
		Jumlah Monev yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun			12 kali	2 kali								2 kali				
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan			3 kali	1 kali	67.327.000	67.327.000	42.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	1 kali	67.000.000	Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.03	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	562.116.000	560.424.000	520.012.000				100 persen	507.540.000			
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (IKK Outcome)			60 pekerjaan	40 pekerjaan	263.714.000	302.114.000	266.912.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	OPD di lingkungan Pemerintah	40 pekerjaan	219.686.000	Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Jumlah Sosialisasi Terkait Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan				1 kali	1 kali				Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 kali		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Sewa Bandwitch yang dilaksanakan dalam satu tahun				1 kali	1 kali	298.402.000	258.310.000	253.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan	1 kali	287.854.000	Sekretariat Daerah
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (IKK Outcome)				100 persen	100 persen									100 persen		
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>18.525.259.000</b>	<b>20.251.459.000</b>	<b>19.823.842.000</b>							<b>16.025.435.000</b>	
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>18.525.259.000</b>	<b>20.251.459.000</b>	<b>19.823.842.000</b>						100,00 persen	<b>16.025.435.000</b>	
4.01.02.2.02	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>18.525.259.000</b>	<b>20.251.459.000</b>	<b>19.823.842.000</b>						100 persen	<b>16.025.435.000</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Guru TPQ/MADIN Kota Pekalongan yang difasilitasi jasa tenaga pendidik, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan				7830 orang /kali	7870 orang /kali	16.500.404.000	18.725.404.000	18.430.942.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	7870 orang/kali	14.422.865.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah kegiatan Fasilitasi Haji				2 kegiatan	2 kegiatan									2 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) tingkat Kota Pekalongan				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Hari Santri Nasional				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan MTQ STQ tingkat Kota Pekalongan, untuk pelajar dan umum				2 kegiatan	0 kegiatan									0 kegiatan		
		Jumlah kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenasah				2 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah kegiatan PHBI				5 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
		Jumlah Kyai yang difasilitasi jasa/insentif				300 orang /kali	300 orang /kali									300 orang/kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan hibah				119 lembaga	127 lembaga								127 lembaga			
		Jumlah petugas TKHD dan TPHD kegiatan fasilitasi BPIH Kota Pekalongan				3 orang	3 orang								3 orang			
		Jumlah Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe jenasah (non-PNS) yang difasilitasi jasa/insentif				9063 orang/kali	9082 orang/kali								9082 orang/kali			
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga yang difasilitasi pemberian bantuan sosial berupa beras kepada panti asuhan, yayasan dan pondok pesantren				170 lembaga/kali	320 lembaga/kali	678.075.000	678.075.000	599.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	320 lembaga/kali	660.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Takmir musholla dan Lebe jenasah non PNS yang mendapat santunan kematian				2351 orang	2174 orang								2174 orang			
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah bulan kegiatan fasilitasi BP4				12 bulan	12 bulan	1.346.780.000	847.980.000	793.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat Kota Pekalongan	12 bulan	942.570.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah kegiatan fasilitasi Houli Habib				2 kegiatan	2 kegiatan								2 kegiatan			
		Jumlah kegiatan Istigashah Hari Jadi				1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
		Jumlah kegiatan Khotmil Quran Hari Jadi				1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
		Jumlah kegiatan Pengajian Akbar				1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
		Jumlah kegiatan Pengajian Rutin/Ngaji Bareng				11 kegiatan	11 kegiatan								11 kegiatan			
		Jumlah kegiatan Senam Aerobik Jumat Pagi di Lapangan Setda dan Minggu Pagi (bersama masyarakat) di Lapangan Mataram				45 kegiatan	45 kegiatan								45 kegiatan			
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>30.668.749.000</b>	<b>17.844.552.000</b>	<b>21.542.880.000</b>						<b>29.430.330.000</b>		
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>30.668.749.000</b>	<b>17.844.552.000</b>	<b>21.542.880.000</b>					100 persen	<b>29.430.330.000</b>		
4.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>67.000.000</b>	<b>67.000.000</b>	<b>67.000.000</b>					100 persen	<b>75.250.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 dokumen	3.500.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Hukum				2 dokumen	2 dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 dokumen	12.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Organisasi				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian PBJ dan Minbang				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Pemerintahan				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Perekonomian dan SDA				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang disusun pada Bagian Umum				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	52.000.000	52.000.000	52.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 Bulan	59.750.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Hukum				2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Organisasi				2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian PBJ dan Minbang				2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Perekonomian dan SDA				2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) pada Bagian Umum				2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen								5 Dokumen			
4.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	219.150.000	257.550.000	254.100.000					100 persen	14.279.734.000		
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian hukum				12 bulan	12 bulan	199.650.000	238.050.000	234.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	211.600.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Kesejahteraan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Rakyat																
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Organisasi				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Pemerintahan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian protokol dan komunikasi pimpinan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Bagian Umum				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian hukum				1 dokumen	1 dokumen	19.500.000	19.500.000	19.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	19.500.000	1 dokumen	Sekretariat Daerah
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Kesejahteraan Rakyat				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Organisasi				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian PBJ dan minbang				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Pemerintahan				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Perekonomian dan SDA				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Protokol dan komunikasi pimpinan				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun pada bagian Umum				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	91.750.000	87.250.000	87.250.000				100 persen	87.250.000			
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik Jumlah pakaian dinas yang diadakan				1 kali 65 buah	1 kali 65 buah	91.750.000	87.250.000	87.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	1 kali 65 buah	87.250.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	6.676.223.000	7.704.323.000	10.715.892.000				100 persen	6.294.556.000			
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	80.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Hukum Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian organisasi Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian PBJ dan minbang Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Pemerintahan Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Perekonomian dan SDA Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Umum Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 unit	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 unit	1.040.725.000	1.415.725.000	1.819.265.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 unit	1.040.725.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		yang diadakan pada Bagian Hukum																
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				3 unit	3 unit								3 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Organisasi				4 unit	4 unit								4 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian PBJ dan Minbang				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Pemerintahan				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Perekonomian dan SDA				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Bagian Umum				10 unit	10 unit								10 unit			
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	170.000.000	170.000.000	170.000.000	m	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	170.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian hukum				11 bulan	11 bulan	1.591.721.000	1.586.321.000	1.492.413.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	11 bulan	1.591.721.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Kesejahteraan rakyat				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Organisasi				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian PBJ dan Minbang				11 bulan	11 bulan								11 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Pemerintahan				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Perekonomian dan SDA				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Bagian Umum				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Hukum				12 bulan	12 bulan	66.831.000	66.831.000	62.681.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	257.500.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Organisasi				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Pemerintahan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Umum				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Hukum				12 bulan	12 bulan	77.500.000	77.500.000	77.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	77.500.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
												Publik	pelayanan publik.					
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Organisasi				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Pemerintahan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Bagian Umum				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	12 bulan	1.085.258.000	1.085.258.000	1.685.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.085.258.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Hukum				120 orang/kali	120 orang/kali	2.564.188.000	3.222.688.000	5.328.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	120 orang/kali	1.991.852.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah fasilitasi rapat				304	304									304		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				orang/kali	orang/kali								orang/kali			
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Organisasi				50 orang/kali	50 orang/kali								50 orang/kali			
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian PBJ dan Minbang				25 orang/kali	25 orang/kali								25 orang/kali			
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Pemerintahan				60 orang/kali	60 orang/kali								60 orang/kali			
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA				115 orang/kali	115 orang/kali								115 orang/kali			
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				87 orang/kali	87 orang/kali								87 orang/kali			
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah pada Bagian Umum				900 orang/kali	900 orang/kali								900 orang/kali			
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	2.396.180.000	2.476.780.000	2.709.585.000					100 persen	2.396.180.000		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Hukum				12 bulan	12 bulan	26.600.000	26.600.000	26.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	26.600.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Organisasi				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian pemerintahan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Bagian Umum				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	969.000.000	969.000.000	1.210.157.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	969.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	1.400.580.000	1.481.180.000	1.472.828.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.400.580.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>5.025.272.000</b>	<b>4.964.172.000</b>	<b>5.421.576.000</b>					100 persen	<b>4.803.766.000</b>		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	1.600.541.000	1.588.291.000	1.525.373.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	1.456.080.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				7 unit	7 unit	3.024.231.000	2.992.881.000	3.618.203.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	7 unit	2.947.186.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Hukum				12 bulan	12 bulan	400.500.000	383.000.000	278.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	400.500.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Organisasi																
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Pemerintahan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Bagian Umum				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
4.01.01.2.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>827.477.000</b>	<b>847.477.000</b>	<b>847.477.000</b>					100 persen	<b>683.594.000</b>		
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah				14 kali	14 kali	807.477.000	807.477.000	807.477.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	14 kali	653.594.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	20.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	2 kali	30.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Persentase ketercapaian fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 persen		100 persen		100 persen	<b>1.440.000.000</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>1.440.000.000</b>					100 persen	<b>810.000.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah				12 bulan	12 bulan	840.000.000	840.000.000	840.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	480.000.000	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah				12 bulan	12 bulan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	330.000.000	Sekretariat Daerah	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																		
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>1.334.362.000</b>	<b>1.327.750.000</b>	<b>1.383.705.000</b>							<b>1.227.756.000</b>		
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen		100 persen		100 persen	<b>1.334.362.000</b>	<b>1.327.750.000</b>	<b>1.383.705.000</b>							100 persen	<b>1.227.756.000</b>	
4.01.01.2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokol, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	100 persen		100 persen		100 persen	<b>1.334.362.000</b>	<b>1.327.750.000</b>	<b>1.383.705.000</b>							100 persen	<b>1.227.756.000</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokoleran dalam kegiatan kedinasan				12 bulan	12 bulan	253.022.000	236.810.000	233.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	274.540.000	Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kinerja KDH dan Wa. KDH yang terbit pada media massa regional dan lokal				180 kali terbit	180 kali terbit	765.900.000	765.900.000	833.790.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	180 kali terbit	603.216.000	Sekretariat Daerah	
		Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun				1 kali	1 kali										1 kali		
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah bulan fasilitasi dokumentasi tugas pimpinan				12 bulan	12 bulan	315.440.000	325.040.000	316.705.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	12 bulan	350.000.000	Sekretariat Daerah	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4.02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>							50.774.945.000	54.914.445.000	61.331.063.000						47.539.100.000		
4.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	31.488.032.000	34.835.132.000	35.276.750.000					100 persen	28.115.194.000		
4.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	16.000.000					100 Persen	16.500.000		
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	2 dokumen	7.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	2 dokumen	1.500.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	8.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen								2 dokumen			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen								5 dokumen			
4.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	2.918.853.000	2.923.653.000	2.867.971.000					100 Persen	3.183.992.000		
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD				12 bulan	12 bulan	53.900.000	58.700.000	58.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	SetDPRD	12 bulan	70.400.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
												Publik	pelayanan publik.					
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	1 dokumen	1.500.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>9.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>						100 Persen	<b>9.500.000</b>	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	1 kali	9.500.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>2.752.266.000</b>	<b>4.364.966.000</b>	<b>5.039.966.000</b>						100 Persen	<b>2.709.662.000</b>	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	25.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan 18 Unit	12 bulan 18 Unit	255.000.000	1.716.000.000	1.716.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan 18 Unit	255.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	25.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (s				11 bulan	11 bulan	644.766.000	646.466.000	646.466.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	11 bulan	627.162.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	142.500.000	142.500.000	142.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	SetDPRD	12 bulan	142.500.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
										Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.					
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	35.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	12 bulan	300.000.000	450.000.000	450.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				450 orang/kali	450 orang/kali	1.325.000.000	1.325.000.000	2.000.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	450 orang/kali	1.300.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>901.800.000</b>	<b>953.200.000</b>	<b>985.200.000</b>						100 Persen	<b>894.965.000</b>	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	1.800.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	200.000.000	200.000.000	232.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	200.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	700.000.000	751.400.000	751.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	693.165.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>1.559.613.000</b>	<b>2.681.313.000</b>	<b>1.553.813.000</b>						100 Persen	<b>1.428.752.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Daerah</b>	Pemerintahan Daerah																
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	1.039.613.000	1.061.313.000	1.128.813.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	908.752.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala				2 unit	2 unit	400.000.000	1.500.000.000	305.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	2 Unit	400.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	SetDPRD	12 bulan	120.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>22.330.000.000</b>	<b>22.891.000.000</b>	<b>23.808.800.000</b>						100 Persen	<b>18.871.823.000</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD				12 Bulan	12 Bulan	21.250.000.000	21.811.000.000	23.148.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	12 Bulan	17.841.823.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				140 Stel	140 Stel	550.000.000	550.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	140 Stel	500.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Fasilitas perawatan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD				35 orang/kali	35 orang/kali	530.000.000	530.000.000	460.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	35 orang/kali	530.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>						100 Persen	<b>1.000.000.000</b>	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi/pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD				12 Bulan	12 Bulan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DPRD	12 Bulan	400.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD				12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	12 Bulan	600.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>19.286.913.000</b>	<b>20.079.313.000</b>	<b>26.054.313.000</b>						100,00 persen	<b>19.423.906.000</b>		
4.02.02.2.01	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>8.300.000.000</b>	<b>8.560.000.000</b>	<b>11.035.000.000</b>						100 Persen	<b>8.300.000.000</b>		
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan				12 Perda	12 Perda	3.000.000.000	3.270.000.000	3.270.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	12 Perda	3.000.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Pendampingan/pengkajian Raperda yang dilaksanakan				20 Kali	20 Kali	5.300.000.000	5.290.000.000	7.765.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	20 Kali	5.300.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Jumlah pembahasan dokumen anggaran dan evaluasi	30 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	<b>417.837.000</b>	<b>417.837.000</b>	<b>417.837.000</b>						5 dokumen	<b>408.849.000</b>		
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Fasilitas Pembahasan KUA PPAS				2 kali	2 kali	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas plynan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	2 kali	150.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang dilaksanakan				2 kali	2 kali	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas plynan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	2 kali	150.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi				1 kali	1 kali	117.837.000	117.837.000	117.837.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Pemerintah Kota Pekalongan	1 kali	108.849.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
4.02.02.2.04	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.550.000.000	3.082.400.000	3.082.400.000					100 Persen	3.150.000.000		
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	1.150.000.000	1.680.000.000	1.680.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 kali	2.000.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi Produk hukum yang disosialisasikan				60 kali	60 kali	1.050.000.000	1.052.400.000	1.052.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	60 kali	800.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah rapat dengar pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta tokoh agama yang dilaksanakan				20 kali	20 kali	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	20 kali	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah kegiatan penyusunan program Kerja/Agenda kerja DPRD yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	50.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.700.000.000	1.700.000.000	1.600.000.000					100 Persen	1.700.000.000		
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi				96 kali	96 kali	300.000.000	300.000.000	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	96 kali	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses daerah wilayah pemilihan yang difasilitasi				3 kali	3 kali	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	3 kali	1.400.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.319.076.000	6.319.076.000	9.919.076.000					100 Persen	5.865.057.000		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi Adeksi yang dilaksanakan Jumlah Kunjungan kerja Alat Kelengkapan dewan yang difasilitasi				2 kali 50 kali	2 kali 50 kali	6.319.076.000	6.319.076.000	9.919.076.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPRD	2 kali 50 kali	5.865.057.000	Sekretariat DPRD
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
5.01	<b>PERENCANAAN</b>							7.598.308.000	6.720.508.000	6.717.579.000						8.054.099.000		
5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	6.025.190.000	5.305.390.000	5.285.940.000					100 persen	6.463.227.000		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	741.000.000	16.000.000	15.000.000					100 persen	318.906.000		
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	2 dokumen	2.717.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	2 dokumen	1.630.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				12 bulan 4 dokumen 2 dokumen 5 dokumen	12 bulan 4 dokumen 2 dokumen 5 dokumen	12.000.000	12.000.000	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan 4 dokumen 2 dokumen 5 dokumen	314.559.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	4.605.337.000	4.610.137.000	4.279.165.000					100 persen	5.572.053.000		
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN			14 kali	14 kali	4.567.187.000	4.567.187.000	4.236.515.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	14 kali	5.526.989.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan			12 bulan	12 bulan	36.450.000	41.250.000	40.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	43.530.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	1 dokumen	1.534.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	9.500.000	5.000.000	5.000.000						100 persen	8.631.000		
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik			1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	1 kali	8.631.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	405.891.000	405.891.000	726.105.000						100 persen	331.969.000		
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 bulan	12 bulan	1.700.000	1.700.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	1.357.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda-benda pos			12 bulan	12 bulan	79.428.000	79.428.000	224.658.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	59.203.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor			6 unit	6 unit					Bantuan Keuanga				6 unit			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		yang diadakan																
		Jumlah sarpras pendukung yang diadakan dalam menunjang penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (bankeu)					20 unit						20 unit					
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	2.914.000	2.914.000	2.914.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	2.716.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	55.473.000	55.473.000	55.473.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	11 bulan	48.878.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	13.876.000	13.876.000	13.876.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	13.577.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	2.580.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				170 orang/kali	170 orang/kali	250.000.000	250.000.000	424.284.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	170 orang/kali	203.658.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>162.870.000</b>	<b>166.570.000</b>	<b>159.270.000</b>						100 persen	<b>153.308.000</b>	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.550.000	1.550.000	850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	1.362.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	75.000.000	75.000.000	68.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	66.942.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	86.320.000	90.020.000	90.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	85.004.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>100.592.000</b>	<b>101.792.000</b>	<b>101.400.000</b>						100 persen	<b>78.360.000</b>	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	75.392.000	76.592.000	81.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	57.918.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	25.200.000	25.200.000	20.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	20.442.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>665.724.000</b>	<b>705.324.000</b>	<b>926.309.000</b>						100,00 persen	<b>727.715.000</b>	
5.01.02.2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>551.974.000</b>	<b>508.924.000</b>	<b>761.574.000</b>						100 persen	<b>609.354.000</b>	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	551.974.000	508.924.000	761.574.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	609.354.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen perubahan RKPD 2023 yang disusun				1 dokumen	1 dokumen					Bantuan Keuangan Khusus dari				1 dokumen		
		Jumlah dokumen Ranwal RKPD 2025 yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Jumlah dokumen Ranwal RPJPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		Jumlah dokumen RKPD 2024 yang disusun				1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan (bankeu)					1 kegiatan							1 kegiatan				
		Jumlah pertemuan Asosiasi Kepala Bappeda se-Jawa Tengah yang dilaksanakan (bankeu)					1 kegiatan							1 kegiatan				
5.01.02.2.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	24.250.000	24.250.000	23.250.000				100 persen	11.811.000			
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDA)				1 dokumen	1 dokumen	24.250.000	24.250.000	23.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	11.811.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	89.500.000	172.150.000	141.485.000				100 persen	106.550.000			
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	89.500.000	172.150.000	141.485.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	4 dokumen	106.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen laporan evaluasi RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005 - 2025 yang disusun					1 dokumen							1 dokumen				
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun				4 dokumen	4 dokumen							4 dokumen				
		Jumlah kegiatan refleksi kinerja KDH yang dilaksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	907.394.000	709.794.000	505.330.000				100,00 persen	863.157.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	259.264.000	210.464.000	156.000.000					100 persen	198.645.000		
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	9.006.000	9.006.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 Laporan	8.688.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								Kota Pekalongan	1 kali		
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	72.043.000	72.043.000	57.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	69.506.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen laporan bidang pemerintahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen								Kota Pekalongan	1 dokumen		
		Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan									Kota Pekalongan	1 kegiatan	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	27.015.000	27.015.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	26.064.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembangunan manusia yang disusun				1 dokumen	1 dokumen								Kota Pekalongan	1 dokumen		
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									Kota Pekalongan	1 kali	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan manusia yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	151.200.000	102.400.000	77.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	94.387.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	176.200.000	177.400.000	87.400.000				100 persen	255.664.000			
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA yang disusun				1 dokumen	0 dokumen	176.200.000	177.400.000	87.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	0 dokumen	255.664.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah laporan kegiatan bidang perekonomian dan SDA yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah seminar, workshop atau FGD bidang perekonomian dan SDA yang dilaksanakan				1 kali	0 kali								0 kali			
5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	471.930.000	321.930.000	261.930.000				100 persen	408.848.000			
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Revisi Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	240.000.000	129.500.000	129.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 dokumen	199.881.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Kajian Pasca Kegiatan Penanganan Banjir dan Rob Kali Loji dan Kali Banger yang disusun				1 dokumen	0 dokumen	231.930.000	192.430.000	132.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	0 dokumen	208.967.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Dokumen Kajian Sistem Drainase Kota Pekalongan yang Disusun					1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Kewilayahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
5.05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							1.213.225.000	1.066.825.000	924.380.000						1.248.015.000		
5.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.213.225.000	1.066.825.000	924.380.000				100,00 persen	1.248.015.000			
5.05.02.2.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang</b>	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	267.500.000	268.700.000	263.220.000				100 persen	255.433.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan																
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi (SIDa)				5 riset	5 riset	175.000.000	175.000.000	179.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	5 riset	178.076.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah bulan pengelolaan website kelitbangan (SIDa)					12 bulan	92.500.000	93.700.000	83.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	12 bulan	77.357.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan				1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen									
		Jumlah website kelitbangan yang dikelola (SIDa)				1 website	0 website		0 website									
5.05.02.2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>285.725.000</b>	<b>383.125.000</b>	<b>244.410.000</b>						100 persen	<b>298.826.000</b>	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					0 Dokumen	285.725.000	383.125.000	244.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	0 Dokumen	298.826.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SIDa)				3 kali	3 kali		3 kali									
		Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa)				3 riset	2 riset		2 riset									
		Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)				4 kali	0 kali		0 kali									
5.05.02.2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SIDa)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>660.000.000</b>	<b>415.000.000</b>	<b>416.750.000</b>						100 persen	<b>693.756.000</b>	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional (SIDa)				1 event	1 event	650.000.000	405.000.000	411.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 event	693.756.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida (SIDa)				4 kali	4 kali		4 kali									
		Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi (SIDa)				1 kali	1 kali		1 kali									
		Jumlah Pemenang Krenova (SIDa)				5 pemenang	2 pemenang		2 pemenang									
		Jumlah seleksi apresiasi inovasi OPD yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali		1 Kali									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Sosialisasi HKI yang dilaksanakan (SIDa)				1 kali	1 kali	10.000.000	10.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 kali	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
5.02	<b>KEUANGAN</b>							<b>27.136.267.000</b>	<b>31.296.267.000</b>	<b>31.981.258.000</b>							<b>23.282.915.000</b>	
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																	
5.02.01		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>16.546.686.000</b>	<b>21.481.838.000</b>	<b>21.513.289.000</b>						100 persen	<b>14.344.890.000</b>	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
5.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>						100 Persen	<b>18.150.000</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	4.700.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	2.250.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	11.200.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Jumlah dokumen SPIIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen							5 dokumen				
5.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	12.846.334.000	12.831.934.000	12.981.261.000				100 Persen	12.591.960.000			
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	12.709.084.000	12.709.084.000	12.858.411.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	14 kali	12.454.710.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	135.000.000	120.600.000	120.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	135.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 dokumen	2.250.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	9.500.000	5.000.000	5.000.000				100 Persen	9.500.000			
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 kali	9.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	811.868.000	1.288.920.000	1.461.230.000				100 Persen	754.082.000			
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	7.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	273.868.000	740.920.000	676.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	BPKAD	12 bulan	241.082.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Aset Daerah	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				10 unit	38 unit								38 unit			
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	18.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	110.000.000	120.000.000	123.690.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	11 bulan	110.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	50.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	2.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				200 orang/kali	300 orang/kali	350.000.000	350.000.000	583.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	300 orang/kali	325.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	<b>1.455.000.000</b>	<b>5.715.000.000</b>	<b>5.258.700.000</b>					100 Persen	<b>0</b>		
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan				4 unit	7 unit	1.200.000.000	2.910.000.000	2.709.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	BPKAD	7 unit	0	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
												Publik	elayanan publik.					
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 3 yang diadakan Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan				9 unit	8 unit	255.000.000	2.805.000.000	2.549.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	8 unit	0	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>718.736.000</b>	<b>757.536.000</b>	<b>795.350.000</b>					100 Persen	<b>720.913.000</b>		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	4.594.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	3.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	506.400.000	506.400.000	542.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	506.400.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	209.336.000	248.136.000	248.136.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	211.513.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>689.248.000</b>	<b>867.448.000</b>	<b>995.748.000</b>					100 Persen	<b>250.285.000</b>		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	149.248.000	150.448.000	153.748.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	135.285.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	500.000.000	675.000.000	800.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	BPKAD	1 unit	75.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	keualitas pelayanan publik.				
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	40.000.000	42.000.000	42.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	40.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,26 persen		11,91 persen	8,08 persen	8,08 persen	<b>6.921.134.000</b>	<b>5.924.434.000</b>	<b>6.902.308.000</b>						8,08 persen	<b>6.083.042.000</b>	
5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.237.850.000</b>	<b>1.167.650.000</b>	<b>1.092.650.000</b>						100 persen	<b>924.853.600</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	35.000.000	28.820.000	19.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	35.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	35.000.000	28.985.000	20.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	35.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	62.000.000	62.000.000	30.368.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	62.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	890.000.000	855.968.000	832.346.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	4 dokumen	628.699.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun				2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen		
		Jumlah Peraturan Daerah					0									0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Dokumen							Dokumen				
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan sidang Raperda dan Raperwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun				4 dokumen	4 dokumen	124.600.000	109.237.000	97.506.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	4 dokumen	138.154.600	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun				2 dokumen	2 dokumen							2 dokumen				
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan				12 bulan	12 bulan	91.250.000	82.640.000	92.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	26.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan				16 kali	16 kali							16 kali				
5.02.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>267.740.000</b>	<b>467.840.000</b>	<b>424.549.000</b>						100 persen	<b>262.900.000</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan				67 OPD	0 OPD	89.149.000	286.549.000	261.549.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 OPD	87.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan					8500 Dokumen									8500 Dokumen		
		Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan				3 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan				12 kali	12 kali									12 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		keuangan daerah yang dilaksanakan																
		Jumlah terlaksananya pendampingan jasa konsultasi pajak					12 Kali							12 Kali				
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun				30 laporan	26 laporan	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	26 laporan	23.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah pelaksanaan pelatihan transaksi non tunai					0 kali	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 kali	25.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah pelaksanaan pelatihan transaksi non tunai					2 kali									2 kali		
		Jumlah pelatihan/monitoring transaksi non tunai yang dilaksanakan				2 kali	0 kali									0 kali		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji ASN Kota Pekalongan yang disusun					3455 data	73.591.000	58.291.000	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3455 data	70.900.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan yang dilaksanakan				14 kali	14 kali									14 kali		
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen/Perwal KKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	25.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 dokumen	25.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi penatausahaan keuangan daerah yang dilaksanakan					3 kali	32.000.000	50.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3 kali	32.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan				3 kali	0 kali									0 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	415.544.000	433.944.000	360.109.000						100 persen	395.288.400	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan yang disusun			7 laporan	7 laporan	59.000.000	49.000.000	39.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	7 laporan	59.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD yang disusun			68 laporan	68 laporan									68 laporan			
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun			13 laporan	13 laporan	8.000.000	8.000.000	6.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	13 laporan	8.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun			7 laporan	7 laporan	95.000.000	105.000.000	81.980.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	7 laporan	95.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan			5 kali	5 kali									5 kali			
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun			2 dokumen	0 dokumen	90.000.000	90.000.000	73.585.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 dokumen	90.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		Jumlah dokumen Raperda dan Raperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun				2 dokumen									2 dokumen			
		Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan			1 kali	1 kali									1 kali			
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun			12 laporan	12 laporan	10.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 laporan	10.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	20.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	BPKAD	1 dokumen	20.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah										Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Aset Daerah	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	133.544.000	153.944.000	140.944.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	4 kali	113.288.400	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pelaporan dana bergulir				4 unit kerja	4 unit kerja									4 unit kerja		
5.02.02.2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>5.000.000.000</b>	<b>3.855.000.000</b>	<b>5.025.000.000</b>						100 persen	<b>4.500.000.000</b>	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah bulan penyediaan dana BTT				12 bulan	12 bulan	5.000.000.000	3.855.000.000	5.025.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	12 bulan	4.500.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.505.497.000</b>	<b>1.365.497.000</b>	<b>1.496.880.000</b>						100 persen	<b>1.194.067.000</b>	
5.02.03.2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.505.497.000</b>	<b>1.365.497.000</b>	<b>1.496.880.000</b>						100 persen	<b>1.194.067.000</b>	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku standar harga yang disusun				2 buku	2 buku	55.000.000	55.000.000	147.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 buku	55.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan BMD dan Pemeliharaan BMD yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	30.000.000	30.000.000	18.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 dokumen	30.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD dan Rencana Pemeliharaan BMD yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat yang diajukan				250 bidang	250 bidang	455.000.000	303.000.000	271.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	250 bidang	155.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD				3 jenis	3 jenis	65.000.000	140.550.000	154.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3 jenis	65.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					0 Dokumen	325.480.000	253.530.000	353.530.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 Dokumen	325.480.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang/berat				1 unit	1 unit									1 unit		
		Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	2 unit									2 unit		
		Jumlah lelang garapan tanah eks bengkok yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat				4 unit	4 unit									4 unit		
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan				80 laporan	81 laporan	575.017.000	583.417.000	553.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	81 laporan	563.587.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	0.05 persen		0.05 persen	0.05 persen	0.05 persen	<b>2.162.950.000</b>	<b>2.524.498.000</b>	<b>2.068.781.000</b>						0.05 persen	<b>1.660.916.000</b>	
5.02.04.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	5.0 persen		4.5 persen	4.7 persen	4.7 persen	<b>2.162.950.000</b>	<b>2.524.498.000</b>	<b>2.068.781.000</b>						4.7 persen	<b>1.660.916.000</b>	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	75.000.000	77.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 Dokumen	85.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
												Publik	elayanan publik.					
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Gebyar Pajak Daerah yang dilaksanakan				2 kali	1 kali	184.992.000	180.000.000	180.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 kali	154.344.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Laporan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang disusun				12 laporan	12 laporan									12 laporan		
		Jumlah rakor bidang pendapatan pajak dan retribusi yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah sosialisasi pajak atau retribusi daerah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata				1500 objek	1500 objek	30.000.000	55.300.000	55.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1500 objek	30.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring				1140 objek	1140 objek									1140 objek		
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi baru yang diadakan				1 aplikasi	1 aplikasi	355.941.000	351.750.000	299.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	1 aplikasi	57.202.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan					5 aplikasi									5 aplikasi		
		Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan				8 aplikasi	8 aplikasi									8 aplikasi		
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan				2000 berkas	2000 berkas	353.100.000	653.100.000	347.232.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2000 berkas	176.550.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Buku DHKP PBB yang disusun				94 buku	94 buku									94 buku		
		Jumlah Buku SK Walikota Klasifikasi NJOP PBB yang disusun					4 buku									4 buku		
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB				4 buku	0 buku									0 buku		
		Jumlah Data Objek Pajak PBB yang diupdate					11250 objek									11250 objek		
		Jumlah hibah yang difasilitasi				1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Objek Pajak PBB yang diupdate				11250 objek	0 objek								0 objek			
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan				94000 lembar	94000 lembar	300.000.000	300.000.000	295.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	94000 lembar	300.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat				19000 lembar	19000 lembar								19000 lembar			
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				1 orang/bulan	0 orang/bulan	386.348.000	371.948.000	337.384.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	0 orang/bulan	389.525.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani				14400 WP/ WR	0 WP/ WR								0 WP/ WR			
		Jumlah wajib pajak dan wajib retribusi yang dilayani					14400 WP/ WR								14400 WP/ WR			
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas BPHTB yang diteliti dan diverifikasi				2000 berkas	2000 berkas	65.388.000	55.000.000	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2000 berkas	66.114.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan				3060 surat	3060 surat	227.681.000	310.200.000	264.365.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	3060 surat	227.681.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi pajak daerah yang dilaksanakan					180 kali	159.500.000	121.200.000	114.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	180 kali	159.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah				50 kali	0 kali								0 kali			
		Jumlah wajib pajak dan retribusi daerah yang diperiksa				8 wajib pajak	140 wajib pajak								140 wajib pajak			
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	51.000.000	42.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPKAD	2 Laporan	15.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
5.03	<b>KEPEGAWAIAN</b>							<b>6.643.803.000</b>	<b>6.441.489.000</b>	<b>5.763.608.000</b>						<b>6.942.810.000</b>		
5.03.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>4.864.209.000</b>	<b>5.218.045.000</b>	<b>4.703.330.000</b>						100 persen	<b>5.385.833.000</b>	
5.03.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>						100 persen	<b>12.850.000</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	2 Dokumen	2.750.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	2 dokumen	1.650.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	8.450.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen								2 dokumen			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen								5 dokumen			
5.03.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>4.065.448.000</b>	<b>4.070.248.000</b>	<b>3.550.482.000</b>						100 persen	<b>4.236.888.000</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	4.011.798.000	4.011.798.000	3.499.232.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	14 bulan	4.185.238.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	52.000.000	56.800.000	49.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 Bulan	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	1 dokumen	1.650.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>9.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>						100 persen	<b>9.500.000</b>	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 Kali	1 Kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	1 Kali	9.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>314.408.000</b>	<b>411.844.000</b>	<b>428.029.000</b>						100 persen	<b>661.218.000</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	75.445.000	172.881.000	172.881.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	67.690.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				62 unit	62 unit									62 unit		
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	1.000.000	1.000.000	2.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	1.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	62.045.000	62.045.000	62.045.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	11 bulan	70.028.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
																Sumber Daya Manusia		
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	20.418.000	20.418.000	20.418.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	20.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				115 orang/kali	115 orang/kali	150.000.000	150.000.000	164.985.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	115 orang/kali	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>325.180.000</b>	<b>331.280.000</b>	<b>320.946.000</b>						100 persen	<b>369.500.000</b>	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	198.780.000	198.780.000	187.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	124.000.000	130.100.000	130.766.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	167.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>133.673.000</b>	<b>383.673.000</b>	<b>382.873.000</b>						100 persen	<b>95.877.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Daerah</b>	Pemerintahan Daerah																
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	41.407.000	41.407.000	45.607.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	35.877.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	2 unit	80.266.000	330.266.000	324.869.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	2 unit	48.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.397.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BKPSDM	12 bulan	12.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 persen		80,00 persen	80,00 persen	80,00 persen	<b>1.779.594.000</b>	<b>1.223.444.000</b>	<b>1.060.278.000</b>						80,00 persen	<b>1.556.977.000</b>	
5.03.02.2.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Persentase ketersediaan data PNS	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>773.275.000</b>	<b>228.075.000</b>	<b>267.160.000</b>						100 persen	<b>765.319.000</b>	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah formasi pengadaan PPPK				4 Orang	4 Orang	600.000.000	50.000.000	97.085.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 Orang	655.969.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola				16 Aplikasi	16 Aplikasi	173.275.000	178.075.000	170.075.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	16 Aplikasi	109.350.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	110 persen		110 persen	110 persen	110 persen	<b>176.175.000</b>	<b>251.175.000</b>	<b>383.744.000</b>						110 persen	<b>19.694.000</b>	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang dikelola kenaikan pangkatnya				550 orang	550 orang	22.468.000	22.468.000	22.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	550 orang	19.600.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas				90 Orang	52 Orang								52 Orang			
		Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Penyesuaian Ijasah				10 Orang	18 Orang								18 Orang			
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					0 Dokumen	153.707.000	228.707.000	361.276.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Dokumen	94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang di lantik				50 Orang	75 Orang								75 Orang			
		Jumlah pejabat tinggi pratama yang lulus seleksi				3 orang	5 orang								5 orang			
5.03.02.2.03	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	42 persen		42 persen	42 persen	42 persen	<b>592.100.000</b>	<b>448.100.000</b>	<b>127.480.000</b>					42 persen	<b>629.366.000</b>		
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang mengikuti Assesment				310 orang	24 orang	441.220.000	273.220.000	49.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	24 orang	400.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas (S1)				12 Orang	12 Orang	86.680.000	110.680.000	59.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	12 Orang	165.166.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PNS yang diberikan bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas (S2)				4 Orang	2 Orang								2 Orang			
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah kepala sekolah yang difasilitasi peningkatan kompetensi manajerial				2 Orang	2 Orang	9.200.000	9.200.000	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	2 Orang	9.200.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.03.09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah laporan evaluasi diklat yang disusun				1 laporan	1 laporan	36.000.000	36.000.000	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	1 laporan	36.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Pejabat fungsional yang difasilitasi diklat				10 Orang	10 Orang								10 Orang			
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	1 kali	19.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tingkat Disiplin ASN	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	238.044.000	296.094.000	281.894.000					100 persen	142.598.000		
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapat Penghargaan ASN Award Jumlah PNS yang diberikan penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS					10 Orang 86 Orang	48.000.000	48.000.000	33.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	10 Orang 86 Orang	33.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah CPNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan				319 Orang 46 Orang	319 Orang 46 Orang	176.400.000	234.450.000	234.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	319 Orang 46 Orang	102.098.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah CPNS yang difasilitasi mengikuti sumpah PNS Jumlah kasus kepegawaian yang diselesaikan				322 orang 4 kasus	322 orang 4 kasus	13.644.000	13.644.000	13.644.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	322 orang 4 kasus	7.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>							<b>3.349.750.000</b>	<b>2.023.264.000</b>	<b>1.539.204.000</b>						<b>2.958.800.000</b>		
5.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							<b>3.349.750.000</b>	<b>2.023.264.000</b>	<b>1.539.204.000</b>						<b>2.958.800.000</b>		
5.04.02.2.01	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	Persentase Penyelenggaraan, Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.222.750.000</b>	<b>1.881.204.000</b>	<b>1.490.324.000</b>					100 persen	<b>856.500.000</b>		
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah Pejabat eselon IV yang difasilitasi pelatihan kepemimpinan, PKP Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti diklat teknis dan fungsional (SIDa)					0 Orang 30 Orang 100 Orang	700.000.000	1.358.454.000	1.154.784.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	0 Orang 30 Orang 100 Orang	768.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pejabat eselon II, III dan IV yang difasilitasi pelatihan kepemimpinan, PKN,PKA,PKP				15 Orang	15 Orang	522.750.000	522.750.000	335.540.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	15 Orang	88.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250 orang		207 orang		80 persen	<b>2.127.000.000</b>	<b>142.060.000</b>	<b>48.880.000</b>						80 persen	<b>2.102.300.000</b>	
		Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250 orang		207 orang	200 orang	200 orang									200 orang		
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi				10 Orang	10 Orang	50.000.000	50.000.000	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	10 Orang	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah calon pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan pelatihan dasar				2 Orang	2 Orang	2.043.000.000	58.060.000	33.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	2 Orang	2.043.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah PPPK yang difasilitasi mengikuti orientasi				146 orang	146 orang									146 orang		
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan	Jumlah monitoring analisis kebutuhan diklat				300 org/kl	300 org/kl	34.000.000	34.000.000	0	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	300 org/kl	9.300.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah monitoring pasca diklat				288 org/kl	288 org/kl									288 org/kl		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
6.01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						5.884.152.000	6.252.552.000	6.025.233.000						5.719.509.000			
6.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	5.426.159.000	5.682.559.000	5.657.894.000				100 persen	5.270.664.000			
6.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.000.000	16.000.000	11.000.000				100 Persen	12.719.000			
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	2 Dokumen	2.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	2 Dokumen	1.219.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	9.500.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen								2 dokumen			
		Jumlah dokumen SPIP ( 1 Dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP) , 4 Laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen								5 Dokumen			
6.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	5.000.070.000	5.004.870.000	5.004.870.000				100 Persen	4.852.101.000			
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Kali	14 Kali	4.965.570.000	4.965.570.000	4.965.570.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Inspektorat	14 Kali	4.817.601.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	12 Bulan	33.000.000	37.800.000	37.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 Bulan	33.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	1 dokumen	1.500.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>40.500.000</b>	<b>143.000.000</b>	<b>102.100.000</b>						100 Persen	<b>8.631.000</b>	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 Kali	1 Kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	1 Kali	1.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	0 Dokumen	1.000.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Laporan PAK Tenaga Fungsional				2 Laporan	2 Laporan									2 Laporan		
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	30.000.000	130.000.000	89.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	0 Orang	6.631.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah pelatihan/diklat APIP yang dilaksanakan				6 kali	5 kali									5 kali		
6.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>181.172.000</b>	<b>259.041.000</b>	<b>304.166.000</b>						100 Persen	<b>203.340.000</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	2.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Inspektorat	12 bulan	2.500.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
										Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.					
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	24.297.000	73.166.000	75.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	40.000.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				8 Unit	8 Unit								8 Unit			
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	7.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	32.000.000	32.000.000	32.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	11 bulan	40.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	12.875.000	12.875.000	12.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	8.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	2.700.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				53 orang/kali	75 orang/kali	100.000.000	126.500.000	168.971.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	75 orang/kali	103.140.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>58.425.000</b>	<b>91.256.000</b>	<b>78.656.000</b>					100 Persen	<b>60.867.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	5.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	33.925.000	47.400.000	34.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	34.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	21.000.000	40.356.000	40.356.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	21.867.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>129.992.000</b>	<b>168.392.000</b>	<b>157.102.000</b>						100 Persen	<b>133.006.000</b>	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	74.992.000	113.392.000	119.842.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	70.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	30.000.000	30.000.000	12.260.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	1 unit	33.006.000	Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Inspektorat	12 bulan	30.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen		85,00 persen	85,00 persen	85,00 persen	<b>115.316.000</b>	<b>127.816.000</b>	<b>94.201.000</b>						85,00 persen	<b>114.932.000</b>	
6.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>101.388.000</b>	<b>113.888.000</b>	<b>87.203.000</b>						100 persen	<b>100.395.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang terbit tepat waktu				64 Laporan	64 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	64 Laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				0 Laporan	0 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	0 Laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang disusun				35 laporan	35 laporan									35 laporan		
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang disusun				80 laporan	80 laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	80 laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang disusun				40 Laporan	40 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	40 Laporan	10.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang disusun				2 laporan	2 laporan	8.888.000	21.388.000	21.388.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	2 laporan	9.500.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					0 Dokumen	52.500.000	52.500.000	25.815.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	0 Dokumen	50.895.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang disusun				7 laporan	5 laporan									5 laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	13.928.000	13.928.000	6.998.000						100 persen	14.537.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Bulan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	3.064.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	OPD di Kota Pekalongan	12 bulan	7.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Bulan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 bulan	12 bulan	7.928.000	7.928.000	3.934.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD di Kota Pekalongan	12 bulan	7.537.000	Inspektorat Daerah
6.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai		3,00 nilai	3,00 nilai	3,00 nilai	342.677.000	442.177.000	273.138.000						3,00 nilai	333.913.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	31.850.000	121.850.000	69.350.000						100 persen	32.435.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi tentang Pengawasan (PKPT/Jakwas) yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	28.850.000	28.850.000	18.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	3 Dokumen	29.435.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Dokumen Peraturan/Pedoman/SOP tentang peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Laporan Dokumen RAD PPK yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah Laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun				2 laporan	0 laporan									0 laporan		
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan				1 Aplikasi	1 Aplikasi	3.000.000	93.000.000	50.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	1 Aplikasi	3.000.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun				3 laporan	3 laporan							3 laporan				
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	98 persen		93 persen	95 persen	95 persen	310.827.000	320.327.000	203.788.000					95 persen	301.478.000		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	30.000.000	30.000.000	9.466.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	31 perangkat daerah	33.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang disusun				10 Laporan	10 Laporan	25.000.000	25.000.000	13.026.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	10 Laporan	15.000.000	Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					0 Kegiatan	128.237.000	164.237.000	84.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	0 Kegiatan	128.478.000	Inspektorat Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun				8 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
		Jumlah Laporan Monitoring LHKASN yang disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
		Jumlah Laporan Monitoring LHKPN yang disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi penegakan integritas yang disusun				4 Laporan	4 Laporan	127.590.000	101.090.000	96.916.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan	4 Laporan	125.000.000	Inspektorat Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7.01	KECAMATAN							10.071.237.000	10.687.993.000	9.867.076.000						9.559.053.000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	9.646.110.000	10.242.066.000	9.428.920.000					100 persen	9.002.290.000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	122.500.000	122.500.000	121.840.000						100 persen	124.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	2 dokumen	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	2 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Panjang				12 bulan	12 bulan	116.000.000	116.000.000	115.340.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	12 bulan	116.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen								2 dokumen			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen								5 dokumen			
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	6.982.937.000	7.021.337.000	7.021.337.000					100 persen	7.472.273.000		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	6.781.937.000	6.781.937.000	6.781.937.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	14 kali	7.271.273.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	198.000.000	236.400.000	236.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	198.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>16.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>						100 persen	<b>16.500.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	1 kali	16.500.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	1 kali	16.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>438.600.000</b>	<b>634.700.000</b>	<b>639.150.000</b>						100 persen	<b>440.890.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	8.600.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Panjang Baru																
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	152.000.000	332.300.000	337.620.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	152.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kecamatan Pekalongan Utara				11 unit	11 unit								11 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Bandengan				5 unit	5 unit								5 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor				20 unit	20 unit								20 unit			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		yang diadakan pada Kelurahan Degayu																
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Kandang Panjang				8 unit	8 unit								8 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Krapyak				5 unit	5 unit								5 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Padukuhan Kraton				6 unit	6 unit								6 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Panjang Baru				9 unit	9 unit								9 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Panjang Wetan				5 unit	5 unit								5 unit			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	12.750.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kecamatan Pekalongan Utara				11 bulan	11 bulan	195.000.000	205.800.000	203.180.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	11 bulan	195.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Bandengan				11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan								
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Degayu				11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan								
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Kandang Panjang				11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan								
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Krapyak				11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan								
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Padukuhan Kraton				11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan								
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Panjang Baru				11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan								
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Panjang Wetan				11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan								
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	40.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan								
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan								
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan								
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan								
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 Bulan	20.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Bandengan				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Degayu				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Krapyak				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				20 Orang/Kali	20 Orang/Kali	12.500.000	17.500.000	19.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Kecamatan Pekalongan Utara	20 Orang/Kali	12.540.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
											Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	807.475.000	822.531.000	822.640.000					100 persen	709.352.000		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	125.884.000	125.884.000	125.884.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	125.884.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	671.091.000	686.147.000	686.256.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	572.968.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Bandenga					12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Degayu					12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Kandang Panjang					12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Krapyak					12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Padukuhan Kraton					12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Panjang Baru					12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Panjang Wetan					12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.278.098.000	1.628.998.000	811.953.000						100 persen	239.275.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	135.798.000	135.798.000	139.848.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	115.775.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun				1 Unit	1 Unit	1.097.300.000	1.448.200.000	627.105.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Unit	78.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Gedung Kantor yang direhab				2 Unit	2 Unit								2 Unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Utara				2 unit	1 unit								1 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Bandengan				1 unit	1 unit								1 unit			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Degayu				1 unit	1 unit								1 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Kandang Panjang				1 unit	1 unit								1 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Krapyak				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Padukuhun Kraton				3 unit	3 unit								3 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Panjang Baru				2 Unit	2 Unit								2 Unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Panjang Wetan				2 unit	2 unit								2 unit			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Utara				12 bulan	12 bulan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Utara	12 bulan	45.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Bandengan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Degayu				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kandang Panjang				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Krapyak				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Padukuhan Kraton				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Panjang Baru				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Panjang Wetan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.834.000</b>					100,00 persen	<b>69.933.000</b>		
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>					100 persen	<b>51.333.000</b>		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kecamatan yang dilaksanakan				7 Kelurahan	1 Kali	-	<b>0</b>	4.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Kali	51.333.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.834.000</b>					100 persen	<b>18.600.000</b>		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	12.000.000	12.000.000	9.834.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Kelurahan	4 kali	18.600.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>119.943.000</b>	<b>129.943.000</b>	<b>116.838.000</b>					100 persen	<b>221.824.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>17.563.000</b>	<b>17.563.000</b>	<b>17.563.000</b>					100 persen	<b>0</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	17.563.000	17.563.000	17.563.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Masyarakat	1 dokumen	0	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan				1 kali	1 kali				Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		1 kali		
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	19.880.000	29.880.000	29.880.000						100 persen	110.481.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan TP PKK				12 bulan	12 bulan	19.880.000	29.880.000	29.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	110.481.000	Kecamatan Pekalongan Utara
	Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali		2 Kali													
	Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali		4 Kali													
7.01.03.2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	82.500.000	82.500.000	69.395.000						100 persen	111.343.000	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematan yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	82.500.000	82.500.000	69.395.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	111.343.000	Kecamatan Pekalongan Utara
	Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan	4 kali	4 kali		4 kali													
	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan													
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	284.984.000	295.784.000	299.284.000						100,00 persen	258.755.000	
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	284.984.000	295.784.000	299.284.000						100 persen	258.755.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				25 Hari	25 Hari	284.984.000	295.784.000	299.284.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	25 Hari	258.755.000	Kecamatan Pekalongan Utara
	Jumlah kegiatan upacara 17 agustus yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali		1 Kali													
	Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan	52 Kali	52 Kali		52 Kali													
	Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan	36 Kali	36 Kali		36 Kali													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	8.200.000	8.200.000	8.200.000						100,00 persen	6.251.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	8.200.000	8.200.000	8.200.000						100 persen	6.251.000	
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	8.200.000	8.200.000	8.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	6.251.000	Kecamatan Utara
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							463.501.000	483.680.000	475.340.000							410.601.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	463.501.000	483.680.000	475.340.000						100 persen	410.601.000	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	463.501.000	483.680.000	475.340.000						100 persen	410.601.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	168.246.000	169.446.000	159.106.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	127.296.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang di cor				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah papan nama kelurahan dan LKK yang diadakan				8 buah	8 buah								8 buah			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi hibah sarpras				2 RT/RW	2 RT/RW								2 RT/RW			
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	282.755.000	301.734.000	303.734.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	270.805.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bakti lingkungan yang dilaksanakan				39 kali	39 kali								39 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali								4 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali								12 Kali			
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali								4 Kali			
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali								2 Kali			
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali								1 kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting				1 laporan	1 laporan								1 laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Kelurahan yang disusun																
		Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				66 buah	66 buah								66 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				79 RT/RW	79 RT/RW								79 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>463.228.000</b>	<b>738.006.000</b>	<b>729.666.000</b>						<b>428.017.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>463.228.000</b>	<b>738.006.000</b>	<b>729.666.000</b>					100 persen	<b>428.017.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>463.228.000</b>	<b>738.006.000</b>	<b>729.666.000</b>					100 persen	<b>428.017.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	120.608.000	301.808.000	291.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	70.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah Gapura yang dibangun				3 unit	3 unit									3 unit		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah RW yang difasilitasi pengadaan sound system, layos, dan kursi				2 RW	2 RW									2 RW		
		Jumlah Sarana dan				0 Unit	1 Unit									1 Unit		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Prasarana Kelurahan yang Terbangun																
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	330.120.000	423.698.000	425.698.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	345.517.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				39 kali	39 kali								39 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali								12 kali			
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah lembaga yang difasilitasi hibah				1 Lembaga	1 Lembaga								1 Lembaga			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rembug Stunting					1 kali								1 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Tingkat Kelurahan																
		Jumlah pelatihan hantaran yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				102 box	102 box								102 box			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang diasuransikan				92 RT/RW	92 RT/RW								92 RT/RW			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				92 RT/RW	92 RT/RW								92 RT/RW			
		Jumlah sosialisasi yang diadakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah strip kolesterol, jarum dan swab alkohol yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>490.768.000</b>	<b>496.094.000</b>	<b>488.404.000</b>						<b>339.457.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>490.768.000</b>	<b>496.094.000</b>	<b>488.404.000</b>					100 persen	<b>339.457.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>490.768.000</b>	<b>496.094.000</b>	<b>488.404.000</b>					100 persen	<b>339.457.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	11.150.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	255.608.000	237.708.000	229.368.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	68.857.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	222.660.000	245.886.000	247.886.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	258.100.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan											
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan											
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				27 kali	27 kali									27 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah kegiatan Rembug Stunting Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah kegiatan Rembug Stunting Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang dilaksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				441 buah	441 buah									441 buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				48 RT/RW	48 RT/RW								48 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, jarum dan swab alkohol yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>334.268.000</b>	<b>336.506.000</b>	<b>328.166.000</b>						<b>328.868.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>334.268.000</b>	<b>336.506.000</b>	<b>328.166.000</b>					100 persen	<b>328.868.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>334.268.000</b>	<b>336.506.000</b>	<b>328.166.000</b>					100 persen	<b>328.868.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	120.608.000	121.808.000	111.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	137.718.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah lokasi jalan yang ditingkatkan				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	201.160.000	202.198.000	204.198.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	178.650.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				18 Kali	18 Kali									18 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali								12 Kali			
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali								1 kali			
		Jumlah kegiatan update data ATS yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah pelatihan Public Speaking yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah PMT yang diadakan				12 buah	12 buah								12 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali								6 Kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				33 RT/RW	33 RT/RW								33 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							795.044.000	826.782.000	818.442.000						563.744.000		
7.01.03	<b>PROGRAM</b>	Persentase ketercapaian	100		100 persen	100	100	795.044.000	826.782.000	818.442.000				100		563.744.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	pemberdayaan masyarakat kelurahan	persen			persen	persen								persen			
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>795.044.000</b>	<b>826.782.000</b>	<b>818.442.000</b>					100 persen	<b>563.744.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	345.608.000	347.708.000	337.368.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	123.858.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan yang ditingkatkan				2 Lokasi	2 Lokasi									2 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	436.936.000	466.574.000	468.574.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	427.386.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				60 kali	60 kali									60 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan								4 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 Kali								1 Kali			
		Jumlah kegiatan syawalan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah Pelatihan Digital Marketing yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah PMT yang diadakan				156 buah	156 buah								156 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				126 RT/RW	126 RT/RW								126 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>464.588.000</b>	<b>466.418.000</b>	<b>458.078.000</b>						<b>447.377.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>464.588.000</b>	<b>466.418.000</b>	<b>458.078.000</b>					100 persen	<b>447.377.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>464.588.000</b>	<b>466.418.000</b>	<b>458.078.000</b>					100 persen	<b>447.377.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pembangunan di Kelurahan										Padukuhan Kraton	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	123.608.000	124.808.000	114.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	68.857.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan permukiman yang ditingkatkan				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	328.480.000	329.110.000	331.110.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	366.020.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				45 kali	45 kali									45 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah Kegiatan karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan				2 kali	2 kali									2 kali		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan																
		Jumlah Kegiatan rembug stunting Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan				0 Pokmas / Ormas	1 kali								1 kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan			
		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				93 RT/RW	93 RT/RW								93 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				120 box	120 box								120 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>403.693.000</b>	<b>467.980.000</b>	<b>459.640.000</b>					<b>393.141.000</b>			
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>403.693.000</b>	<b>467.980.000</b>	<b>459.640.000</b>					100 persen	<b>393.141.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>403.693.000</b>	<b>467.980.000</b>	<b>459.640.000</b>					100 persen	<b>393.141.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	120.608.000	121.808.000	111.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	135.975.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	8 Kali								8 Kali			
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang				1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		ditingkatkan																
		Jumlah Taman Baca Yang Di Fasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	270.585.000	333.672.000	335.672.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	244.666.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				30 Kali	30 Kali								30 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali								4 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali								12 Kali			
		Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman/ (KOTAKU) yang dilaksanakan					0 Kegiatan								0 Kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali								4 Kali			
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali								2 Kali			
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 Kali								1 Kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah pelatihan hantaran yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan				1 Kali	0 Kali								0 Kali			
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				54 buah	54 buah								54 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali								6 Kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				71 RT/RW	71 RT/RW								71 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>8.184.556.000</b>	<b>8.402.412.000</b>	<b>8.168.812.000</b>						<b>8.433.940.000</b>		
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>7.789.125.000</b>	<b>7.989.581.000</b>	<b>7.824.147.000</b>					100 persen	<b>8.078.258.000</b>		
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>111.500.000</b>	<b>111.500.000</b>	<b>98.260.000</b>					100 persen	<b>102.667.000</b>		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 dokumen	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 Dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	105.000.000	105.000.000	91.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	94.667.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen								2 dokumen			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	6.147.047.000	6.180.647.000	6.178.547.000					100 persen	6.725.473.000		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	5.969.447.000	5.969.447.000	5.969.447.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	14 kali	6.547.873.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	174.600.000	208.200.000	206.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	174.600.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		pada Kelurahan Buaran Kradenan																
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>16.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>					100 persen	<b>18.489.000</b>		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi kelengkapannya				1 kali	1 kali	16.500.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	18.489.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>355.416.000</b>	<b>443.216.000</b>	<b>444.785.000</b>					100 persen	<b>345.830.000</b>		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	7.800.000	7.800.000	7.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	7.800.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	136.000.000	209.200.000	219.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	136.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kecamatan Pekalongan				4 unit	5 unit								5 unit			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Selatan																
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Banyurip				5 unit	5 unit								5 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Buaran Kradenan				6 unit	6 unit								6 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Jenggot				4 unit	4 unit								4 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				6 unit	6 unit								6 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				4 unit	4 unit								4 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Sokoduwet				4 unit	7 unit								7 unit			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	9.500.000	9.500.000	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	9.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kecamatan Pekalongan Selatan				11 bulan	11 bulan	137.116.000	147.916.000	141.316.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	11 bulan	127.530.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Banyurip	11 bulan	11 bulan				11 bulan										
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Buaran Kradenan	11 bulan	11 bulan				11 bulan										
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Jenggot	11 bulan	11 bulan				11 bulan										
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo	11 bulan	11 bulan				11 bulan										
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Kuripan Yosorejo	11 bulan	11 bulan				11 bulan										
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Sokoduwet	11 bulan	11 bulan				11 bulan										
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	35.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Banyurip	12 bulan	12 bulan				12 bulan										
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Buaran Kradenan	12 bulan	12 bulan				12 bulan										
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Jenggot	12 bulan	12 bulan				12 bulan										
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo	12 bulan	12 bulan				12 bulan										
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo	12 bulan	12 bulan				12 bulan										
		Jumlah bulan penyediaan	12 bulan	12 bulan				12 bulan										



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Sokoduwet																
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	17.500.000	16.300.000	15.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	17.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Buaran kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				14 orang/kali	14 orang/kali	12.500.000	17.500.000	16.099.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	14 orang/kali	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	788.480.000	836.036.000	829.916.000						100 persen	698.055.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	9.300.000	9.300.000	9.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	9.300.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	98.720.000	98.720.000	91.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	86.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Sokoduwet																
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	680.460.000	728.016.000	729.616.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	602.755.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>220.182.000</b>	<b>406.182.000</b>	<b>260.639.000</b>						100 persen	<b>187.744.000</b>	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	118.182.000	124.182.000	122.582.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	85.744.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Selatan				2 Unit	2 Unit	62.000.000	242.000.000	98.057.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	2 Unit	62.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Banyurip				1 Unit	1 Unit								1 Unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Buaran Kradenan				1 Unit	1 Unit								1 Unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Jenggot				1 Unit	1 Unit								1 Unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				1 Unit	1 Unit								1 Unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				2 Unit	2 Unit								2 Unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Sokoduwet				1 Unit	1 Unit								1 Unit			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah papan nama kelurahan yang diadakan				1 Unit	0 Unit								0 Unit			
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Selatan				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	40.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Banyurip				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Jenggot				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				0 Unit	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Sokoduwet				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan	0 bulan								0 bulan			
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>10.800.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>6.500.000</b>					100,00 persen	<b>9.812.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	10.800.000	10.800.000	6.500.000						100 persen	0	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan			4 kali	3 kali	10.800.000	10.800.000	6.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kelurahan	3 kali	0	Kecamatan Pekalongan Selatan	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	118.669.000	128.669.000	92.823.000						100 persen	110.934.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	17.099.000	17.099.000	16.199.000						100 persen	0	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	17.099.000	17.099.000	16.199.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	0	Kecamatan Pekalongan Selatan	
		Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan			1 kali	1 kali									1 kali			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	19.070.000	29.070.000	24.540.000						100 persen	110.934.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan TP PKK			12 bulan	12 bulan	19.070.000	29.070.000	24.540.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	110.934.000	Kecamatan Pekalongan Selatan	
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan			2 kali	1 kali									1 kali			
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan			4 kali	4 kali									4 kali			
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	82.500.000	82.500.000	52.084.000						100 persen	0	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan			12 bulan	12 bulan	82.500.000	82.500.000	52.084.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Selatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan									3 kegiatan		
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	257.962.000	265.362.000	237.842.000						100,00 persen	223.670.000	
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	257.962.000	265.362.000	237.842.000						100 Persen	223.670.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				25 hari	0 hari	257.962.000	265.362.000	237.842.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	0 hari	223.670.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
	Jumlah kegiatan upacara 17 agustus yang dilaksanakan	1 kali	1 kali					1 kali										
	Jumlah layanan pengantaran RA KESEL MLAKU yang dilaksanakan	48 kali	48 kali					48 kali										
	Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan	36 kali	36 kali					36 kali										
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	8.000.000	8.000.000	7.500.000						100,00 persen	11.266.000	
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	8.000.000	8.000.000	7.500.000						100 Persen	11.266.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	8.000.000	8.000.000	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	11.266.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							414.513.000	432.341.000	430.001.000							397.013.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	414.513.000	432.341.000	430.001.000						100 persen	397.013.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	414.513.000	432.341.000	430.001.000					100 persen	397.013.000		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan			12 bulan	12 bulan	175.608.000	131.808.000	127.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	147.513.000	Kecamatan Pekalongan Selatan	
		Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan			8 kali	0 kali									0 kali			
		Jumlah lokasi jalan lingkungan yang dibangun			2 lokasi	1 lokasi									1 lokasi			
		Jumlah lokasi jalan lingkungan yang ditingkatkan			2 lokasi	0 lokasi									0 lokasi			
		Jumlah lokasi saluran drainase lingkungan yang direhab/terpelihara			2 lokasi	3 lokasi									3 lokasi			
		Jumlah Sarpras Pengelolaan Persampahan yang dihibahkan				1 Unit									1 Unit			
		Jumlah sarpras yang dihibahkan			3 unit	4 unit									4 unit			
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi			1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Bulan Fasilitasi BOP BKM			12 bulan	12 bulan	269.864.000	288.033.000	290.033.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	237.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan	
		Jumlah Bulan Fasilitasi BOP LPM			12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah Bulan Fasilitasi Sekretariat BKM			12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan			33 kali	33 kali									33 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan			4 kali	4 kali									4 kali			
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan			23 kali	18 kali									18 kali			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali								12 kali			
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali								1 kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah Pelatihan Kader BKB yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Pelatihan Pengolahan Sampah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Pelatihan Tata Boga yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah peningkatan kapasitas hansip/linmas yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah PMT yang diadakan				210 buah	210 buah								210 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				65 RT/RW	65 RT/RW								65 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							457.972.000	466.959.000	460.517.000							386.011.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	457.972.000	466.959.000	460.517.000					100 persen	386.011.000		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	457.972.000	466.959.000	460.517.000					100 persen	386.011.000		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan Jumlah gapuro yang dibangun Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki Jumlah sound system yang dihibahkan Jumlah taman baca yang difasilitasi				12 bulan	12 bulan	175.608.000	176.808.000	166.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	89.107.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	269.864.000	277.651.000	281.549.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	284.404.000	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali								12 kali			
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali								1 kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah pelatihan servis HP yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah pelatihan servis motor yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah PMT yang diadakan				96 buah	68 buah								68 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				62 RT/RW	63 RT/RW								63 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				73 box	73 box								73 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							364.838.000	374.430.000	366.090.000						321.027.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	364.838.000	374.430.000	366.090.000						100 persen	321.027.000	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	364.838.000	374.430.000	366.090.000						100 persen	321.027.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	140.608.000	146.808.000	136.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	88.857.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah lokasi jalan permukiman yang dipaving				5 lokasi	5 lokasi									5 lokasi		
		Jumlah mesin potong rumput yang dihibahkan				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
		Jumlah sound system yang dihibahkan				3 Unit	3 Unit									3 Unit		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	211.730.000	215.122.000	217.122.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	219.670.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				30 kali	30 kali									30 kali		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan FKSS Yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali								12 kali			
		jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan				0 Pokmas / Ormas	1 kali								1 kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah Pelatihan Kewirausahaan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Lansia yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Penyuluhan Bina Keluarga Remaja yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah Penyuluhan Pus Un Meetned yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah PMT yang diadakan				102 buah	102 buah								102 buah			
		Jumlah Posyandu Lansia yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				37 RT/RW	37 RT/RW								37 RT/RW			
		Jumlah RT yang difasilitasi hibah sarpras				1 RT	1 RT								1 RT			
		Jumlah Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas bagi Remaja yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>452.017.000</b>	<b>455.004.000</b>	<b>446.664.000</b>							<b>384.806.000</b>	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	<b>452.017.000</b>	<b>455.004.000</b>	<b>446.664.000</b>					100 persen		<b>384.806.000</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	<b>452.017.000</b>	<b>455.004.000</b>	<b>446.664.000</b>					100 persen		<b>384.806.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	141.246.000	142.446.000	132.106.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	96.495.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	8 kali									8 kali		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				3 Lokasi	3 Lokasi									3 Lokasi		
		Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah sound system yang diadakan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
		Jumlah taman baca yang di fasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	298.271.000	300.058.000	302.058.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	275.811.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali								12 kali			
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah laporan aksi konvergensi stunting kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah pelatihan komputer yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah pelatihan rias pengantin yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				685 buah	685 buah								685 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	0 kali								0 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				62 RT/RW	62 RT/RW								62 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>366.855.000</b>	<b>378.830.000</b>	<b>376.490.000</b>					<b>371.912.000</b>			
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	<b>366.855.000</b>	<b>378.830.000</b>	<b>376.490.000</b>				100 persen	<b>371.912.000</b>			
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	<b>366.855.000</b>	<b>378.830.000</b>	<b>376.490.000</b>				100 persen	<b>371.912.000</b>			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun			1 dokumen	1 dokumen		12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah Kelurahan				12 bulan	12 bulan	128.246.000	129.446.000	122.406.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	96.495.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali									0 kali		
		Jumlah kegiatan pengelolaan persampahan yang dilaksanakan					1 kegiatan									1 kegiatan		
		Jumlah lokasi jalan permukiman yang ditingkatkan				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah yang tersedia					2 buah									2 buah		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	226.109.000	236.884.000	241.584.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	262.917.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti				33 kali	39 kali									39 kali		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		lingkungan yang dilaksanakan																
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali							4 kali				
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali							3 kali				
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali							12 kali				
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali							4 kali				
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan							4 kegiatan				
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali							2 kali				
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali							1 kali				
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan							1 laporan				
		Jumlah pelatihan tata boga yang dilaksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				120 buah	120 buah							120 buah				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					0 Pokmas / Ormas							0 Pokmas / Ormas				
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali							6 kali				
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				50 RT / RW	50 RT / RW							50 RT / RW				
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box							35 box				
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							411.179.000	419.655.000	417.315.000						572.197.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	411.179.000	419.655.000	417.315.000						100 persen	572.197.000	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen		100 persen	411.179.000	419.655.000	417.315.000						100 persen	572.197.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun					1 Dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 Dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	128.246.000	129.446.000	125.106.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	148.518.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan					1 Kali									1 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dilakukan perbaikan jalan aspal					1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan					1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah papan nama RT/RW yang diadakan				66 Buah	66 Buah									66 Buah		
		Jumlah Plastik PE yang diadakan					20 Pak									20 Pak		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				0 Unit	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan					1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah Sarung Tangan Latex yang diadakan					12 Pasang									12 Pasang		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah Tempat Sampah yang diadakan					10 Buah									10 Buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 Bulan	270.433.000	277.709.000	279.709.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	411.179.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM					12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM					12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun					1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah Dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun					1 Dokumen									1 Dokumen		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan					30 Kali									30 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan					30 Kali									30 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan					4 Kali									4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan					3 Kali									3 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan					12 Kali									12 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan					12 Kali									12 Kali		
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan					3 Kali									3 Kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan					3 Kali									3 Kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil Pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan					2 Kali									2 Kali		
		Jumlah Kegiatan Rembug					1 Kali									1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Stunting Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan																
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan					1 Kali								1 Kali			
		Jumlah laporan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting kelurahan yang disusun					1 Laporan								1 Laporan			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun					1 Laporan								1 Laporan			
		Jumlah pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah PMT yang diadakan				78 Buah	78 Buah								78 Buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan					4 Kali								4 Kali			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan					6 Kali								6 Kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi					66 RT/RW								66 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, jarum dan swab alkohol yang diadakan					35 Box								35 Box			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan					35 Box								35 Box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>9.482.613.000</b>	<b>9.887.203.000</b>	<b>9.537.294.000</b>						<b>531.604.000</b>		
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>9.142.576.000</b>	<b>9.533.366.000</b>	<b>9.241.199.000</b>					100 persen	<b>192.086.000</b>		
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>122.500.000</b>	<b>122.500.000</b>	<b>122.500.000</b>					100 Persen	<b>0</b>		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun			2 dokumen	2 dokumen		3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Kec. Pekalongan Barat	2 dokumen	<b>0</b>	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
											Barat, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	2 dokumen	0	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	116.000.000	116.000.000	116.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Barat pada Kelurahan Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan PKK				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Tirta				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokoume n	2 dokoume n									2 dokoume n		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah dokumen SPIIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen								5 dokumen			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	7.362.371.000	7.400.771.000	7.238.050.000					100 Persen	3.000.000		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	7.162.721.000	7.162.721.000	7.000.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	14 kali	0	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	196.650.000	235.050.000	235.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Medono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan PKK				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Podosogih				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Pringrejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Tirta				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	16.500.000	12.000.000	12.000.000					100 Persen	0		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik				1 kali	1 kali	16.500.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	1 kali	0	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	432.426.000	659.716.000	643.243.000					100 Persen	189.086.000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Medono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Pasir Kraton Kramat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Podosugih				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Pringrejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
		kantor pada Kelurahan Tirto																	
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	149.500.000	360.990.000	355.807.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan		0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kecamatan Pekalongan Barat				5 unit	55 unit									55 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Bendan Kergon				6 unit	5 unit									5 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Medono				6 unit	6 unit									6 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Pasirkratonkramat				6 unit	6 unit									6 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Podosugih				5 unit	11 unit									11 unit			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Pringrejo				6 unit	5 unit								5 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Sapuro Kebulen				7 unit	7 unit								7 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Tirta				8 unit	7 unit								7 unit			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan		0 Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kel. Tirta				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kecamatan Pekalongan Barat				11 bulan	11 bulan	191.326.000	202.126.000	189.086.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	11 bulan	189.086.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Bendan Kergon				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Medono				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada				11 bulan	11 bulan								11 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
		Kel. Pasirkratonkramat																	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Pringrejo				11 bulan	11 bulan								11 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Sapuro Kebulen				11 bulan	11 bulan								11 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Tirto				11 bulan	11 bulan								11 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kel. Podosugih				11 bulan	11 bulan								11 bulan				
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan		0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada kel. Medono				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan								12 bulan				
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan		0	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan					Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.		12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kel. Tirta				12 bulan	12 bulan									12 bulan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				10 org/kl	11 org/kl	12.500.000	17.500.000	19.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	11 org/kl		0	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>893.443.000</b>	<b>933.043.000</b>	<b>929.543.000</b>						100 Persen		<b>0</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan		0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan									12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kel. Tirta				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	105.000.000	116.000.000	112.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan		0 Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kel.				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
		Tirto																	
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kecamatan Pekalongan Barat Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Bendan Kergon Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Medono Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Pasirkratonkramat Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada kel. podosugih Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Pringrejo Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Sapuro Kebulen Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan	777.943.000	806.543.000	806.543.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan		0	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.01. 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	<b>315.336.000</b>	<b>405.336.000</b>	<b>295.863.000</b>						100 Persen		<b>0</b>	
7.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada kecamatan Pekalongan Barat Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan	125.836.000	125.836.000	132.923.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan		0	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kel. Tirta				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Barat				2 unit	2 unit	144.500.000	234.500.000	117.940.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	2 unit		0 Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Bendan Kergon				1 unit	1 unit								1 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Medono				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Pasirkratonkramat				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Podosugih				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Pringrejo				2 unit	2 unit								2 unit			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Sapuro Kebulen				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kel. Tirto				2 unit	2 unit								2 unit			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Barat				12 bulan	12 bulan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Barat	12 bulan		0 Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Bendan Kergon				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Medono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Podosugih				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Pringrejo				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kel. Tirto				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.871.000</b>					100,00 persen	<b>22.600.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	0	0	4.000.000					100 persen	4.000.000		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Rembug stunting Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan				1 kali		-	0	4.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	4.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	12.000.000	12.000.000	5.871.000					100 persen	18.600.000		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	2 kali	12.000.000	12.000.000	5.871.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	2 kali	18.600.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	119.943.000	129.943.000	101.860.000					100 persen	111.343.000		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	17.563.000	17.563.000	14.935.000					100 persen	0		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokumen Lembaga Kemasyarakatan	1 dokumen Lembaga Kemasyarakatan	17.563.000	17.563.000	14.935.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan				1 kali	0 kali								0 kali			
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 Persen	100 Persen	19.880.000	29.880.000	25.570.000					100 Persen	0		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan TP PKK				12 bulan	12 bulan	19.880.000	29.880.000	25.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	0	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				2 kali	1 kali								1 kali			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
7.01.03.2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	82.500.000	82.500.000	61.355.000					100 persen	111.343.000		
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	82.500.000	82.500.000	61.355.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluarga/Masyarakat	12 Bulan	111.343.000	Kecamatan Pekalongan Barat
						4 kali	4 kali								4 kali			
						3 kegiatan	3 kegiatan								3 kegiatan			
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Presentase Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	199.894.000	203.694.000	176.164.000					100,00 persen	205.575.000		
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	199.894.000	203.694.000	176.164.000					100 persen	205.575.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan Jumlah kegiatan upacara 17 agustus yang dilaksanakan Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				25 hari	25 hari	199.894.000	203.694.000	176.164.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	25 hari	205.575.000	Kecamatan Pekalongan Barat
						1 kali	1 kali								1 kali			
						52 kali	0 kali								0 kali			
						36 kali	31 kali								31 kali			
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	8.200.000	8.200.000	8.200.000					100,00 persen	0		
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	8.200.000	8.200.000	8.200.000					100 persen	0		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	8.200.000	8.200.000	8.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Masyarakat	1 kali	0	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>478.861.000</b>	<b>560.599.000</b>	<b>527.259.000</b>							<b>433.546.000</b>	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>478.861.000</b>	<b>560.599.000</b>	<b>527.259.000</b>					100 persen		<b>433.546.000</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 Persen	<b>478.861.000</b>	<b>560.599.000</b>	<b>527.259.000</b>					100 Persen		<b>433.546.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun					1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	166.096.000	237.296.000	201.956.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	128.496.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	0 Kali									0 Kali		
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah papan nama RT/RW yang diadakan				92 unit	92 unit									92 unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 RT/RW	4 RT/RW									4 RT/RW		
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan					1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 Bulan	300.265.000	310.803.000	312.803.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	292.550.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM					12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah Fasilitasi kegiatan BBGRM dan Kerja Bakti Lingkungan yang dilaksanakan					36 Kali									36 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan					36 kali								36 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan					4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan					4 Kali								4 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan					3 kali								3 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan					32 Kali								32 Kali			
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan					12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan					12 kali								12 kali			
		Jumlah fasilitasi Sekretariat BKM					12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan								4 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan lomba LBS yang difasilitasi				1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pelatihan kerajinan tangan dan lomba krenova				2 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas Linmas yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan								3 kegiatan			
		Jumlah kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan					2 Kali								2 Kali			
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan					2 kali								2 kali			
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 Kali								1 Kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan Update data ATS yang dilaksanakan					1 Kali									1 Kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah laporan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting kelurahan yang disusun					1 Laporan									1 Laporan		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun					1 laporan									1 laporan		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan					36 buah	36 buah								36 buah		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan					6 kali									6 kali		
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan					6 Kali									6 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi					92 RT/RW									92 RT/RW		
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan					34 box	34 box								34 box		
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>375.791.000</b>	<b>435.956.000</b>	<b>437.956.000</b>							<b>350.391.000</b>	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen		100 persen	<b>375.791.000</b>	<b>435.956.000</b>	<b>437.956.000</b>						100 persen	<b>350.391.000</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen		100 Persen	<b>375.791.000</b>	<b>435.956.000</b>	<b>437.956.000</b>						100 Persen	<b>350.391.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun					1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	148.246.000	159.446.000	159.446.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	142.941.000	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali									8 kali			
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				2 lokasi	2 lokasi								2 lokasi			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2 Unit								2 Unit			
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	215.045.000	264.010.000	266.010.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	194.950.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM					12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM					12 bulan								12 bulan			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan					27 kali								27 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan					4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan					3 kali								3 kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan					12 kali								12 kali			
		Jumlah kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan								4 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan					2 kali								2 kali			
		Jumlah kegiatan Rembug Stunting dilaksanakan					1 kali								1 kali			
		Jumlah kegiatan update data ATS yang dilaksanakan					1 kali								1 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun					1 laporan								1 laporan			
		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan				5 kali	5 kali								5 kali			
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				723 buah	72 buah								72 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan					6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi					50 RT/RW								50 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				74 box	74 box								74 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>738.441.000</b>	<b>390.270.000</b>	<b>392.270.000</b>						<b>378.041.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>738.441.000</b>	<b>390.270.000</b>	<b>392.270.000</b>					100 persen	<b>378.041.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>738.441.000</b>	<b>390.270.000</b>	<b>392.270.000</b>					100 persen	<b>378.041.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	483.246.000	130.346.000	130.346.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	148.191.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	8 kali								8 kali			
		Jumlah lokasi jalan permukiman yang ditingkatkan				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 unit	1 unit								1 unit			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	242.695.000	247.424.000	249.424.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	217.350.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan											
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan											
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				27 kali	27 kali											
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali											
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali											
		Jumlah Fasilitasi Peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali											
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali											
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali											
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali											
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali											
		Jumlah Kegiatan rembug Stunting Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan					1 kali											
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali											
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan											
		Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali											
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				36 buah	36 buah											
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				54 RT/RW	54 RT/RW								54 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				23 box	23 box								23 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>552.388.000</b>	<b>562.161.000</b>	<b>558.999.000</b>						<b>12.500.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>552.388.000</b>	<b>562.161.000</b>	<b>558.999.000</b>					100 persen	<b>12.500.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>552.388.000</b>	<b>562.161.000</b>	<b>558.999.000</b>					100 persen	<b>12.500.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	215.608.000	250.808.000	243.748.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan		0 Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	5 kali								5 kali			
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
		Jumlah lokasi makam yang diurug				2 lokasi	2 lokasi								2 lokasi			
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
		Jumlah lokasi tembok makam yang dibangun				1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang difasilitasi				3 lokasi	3 lokasi								3 lokasi			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	324.280.000	298.853.000	302.751.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Masyarakat	12 bulan		0 Kecamatan Pekalongan Barat



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan				Barat, Sapuro, Kebulen	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				48 kali	48 kali									48 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali									12 kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali									3 kali		
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Kader Tanggap Bencana yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Multimedia yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali									2 kali		
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas LKK yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
		Jumlah kegiatan rebug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali									1 kali		
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali									1 kali		
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan									1 laporan		
		Jumlah PMT dan Vitamin				24 buah	24 buah									24 buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		yang diadakan																
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				76 kali	77 kali								77 kali			
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				2 RT	3 RT								3 RT			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				56 box	56 box								56 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>623.048.000</b>	<b>667.858.000</b>	<b>659.518.000</b>						<b>491.087.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>623.048.000</b>	<b>667.858.000</b>	<b>659.518.000</b>					100 persen	<b>491.087.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 Persen	<b>623.048.000</b>	<b>667.858.000</b>	<b>659.518.000</b>					100 Persen	<b>491.087.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun					1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	235.608.000	271.808.000	261.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	masyarakat	12 bulan	99.107.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali								0 kali			
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				3 lokasi	3 lokasi								3 lokasi			
		Jumlah Pos Kampling yang dibangun				1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			
		Jumlah Posyandu yang difasilitasi Hibah sarpras				2 lokasi	2 lokasi								2 lokasi			
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				5 RT	5 RT								5 RT			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Sarpras Posbindu yang diadakan				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi					1 lokasi								1 lokasi			
		Jumlah tempat sampah yang diadakan				25 Unit	25 Unit								25 Unit			
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	374.940.000	383.550.000	385.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyarakat	12 bulan	379.480.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				54 kali	54 kali								54 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan					4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali								12 kali			
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan					2 kali								2 kali			
		Jumlah Kegiatan Penguatan kapasitas kelembagaan LKK yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali								1 kali			
		jumlah kegiatan senam PKK yang dilaksanakan				30 kali	30 kali								30 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan					1 kali								1 kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun					1 laporan								1 laporan			
		Jumlah Pelatihan pengolahan barang bekas dari limbah rumah tangga yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				102 buah	102 buah								102 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi					118 kali								118 kali			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				23 box	23 box								23 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>545.896.000</b>	<b>548.013.000</b>	<b>539.681.000</b>						<b>549.886.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>545.896.000</b>	<b>548.013.000</b>	<b>539.681.000</b>					100 persen	<b>549.886.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>545.896.000</b>	<b>548.013.000</b>	<b>539.681.000</b>					100 persen	<b>549.886.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkr amat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	131.246.000	132.446.000	122.114.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkr amat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	110.000.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali								0 kali			
		Jumlah lokasi jalan permukiman yang ditingkatkan				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi											
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi											
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	402.150.000	403.067.000	405.067.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkr amat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	427.386.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan											
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan											
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				54 Kali	54 Kali											
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali											
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali											
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali											
		jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali											
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali											
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan											
		Jumlah kegiatan pelatihan SDM LKK kelurahan Pasirkratonkr amat sesuai dengan Perwal 63 tahun 2021 tentang LKK yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan											
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali											
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali											
		Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan stunting bagi warga kelurahan Pasirkratonkr amat yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah PMT yang diadakan				294 buah	294 buah								294 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali								6 Kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				112 RT/RW	112 RT/RW								112 RT/RW			
		Jumlah RT yang difasilitasi hibah sarpras				1 RT	1 RT								1 RT			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							576.515.000	576.047.000	629.207.000						505.215.000		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	576.515.000	576.047.000	629.207.000					100 persen	505.215.000		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	576.515.000	576.047.000	629.207.000					100 persen	505.215.000		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Barat
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	185.608.000	176.808.000	226.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	148.113.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	0 Kali								0 Kali			
		Jumlah lokasi jalan permukiman yang ditingkatkan				2 Lokasi	2 Lokasi								2 Lokasi			
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				2 RT	2 RT								2 RT			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah RW yang difasilitasi hibah sarpras				1 RW	1 RW								1 RW			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	378.407.000	386.739.000	390.239.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	344.602.000	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				60 Kali	60 Kali								60 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali								12 Kali			
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan								4 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan pelatihan pemasaran online yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali								2 Kali			
		Jumlah kegiatan rembug stunting tingkat kelurahan yang dilaksanakan					1 kali								1 kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan				1 laporan	1 laporan								1 laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun																
		Jumlah pelatihan tataboga yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah PMT yang diadakan				90 buah	90 buah								90 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali								6 Kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi					120 RT/RW								120 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							9.529.576.000	10.714.920.000	10.760.363.000						9.909.710.000		
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	9.220.513.000	10.412.813.000	10.480.916.000					100 persen	9.422.330.000		
7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	122.500.000	122.500.000	122.500.000					100 persen	112.570.000		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	2 dokumen	10.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	2 dokumen	7.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	116.000.000	116.000.000	116.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	95.570.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Kalibaros				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi				12 bulan	12 bulan								12 bulan			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Perangkat Daerah pada Kelurahan Gamer																
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen								2 dokumen			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen								5 dokumen			
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>7.269.779.000</b>	<b>7.308.179.000</b>	<b>7.443.445.000</b>					100 persen	<b>7.780.984.000</b>		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 kali	14 kali	7.065.479.000	7.065.479.000	7.200.745.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	14 kali	7.743.984.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	201.300.000	239.700.000	239.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	34.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	1 dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>16.500.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>						100 persen	<b>18.489.000</b>	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				2 kali	1 kali	16.500.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	1 kali	18.489.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>485.670.000</b>	<b>617.970.000</b>	<b>532.192.000</b>						100 persen	<b>398.134.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	208.435.000	324.935.000	241.157.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	131.134.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kecamatan Pekalongan Timur				5 unit	5 unit								5 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Gamer				3 unit	3 unit								3 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Kalibaros				2 unit	2 unit								2 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Kauman				1 unit	1 unit								1 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Klego				5 unit	5 unit								5 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Noyontaansari				5 unit	5 unit								5 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Poncol				1 unit	1 unit								1 unit			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kelurahan Setono				12 unit	12 unit								12 unit			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Pncol				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kecamatan Pekalongan Timur				11 bulan	11 bulan	185.635.000	196.435.000	194.435.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	11 bulan	185.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Gamer				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Kalibaros				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Kauman				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Klego				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Noyontaansari				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Poncol				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pada Kelurahan Setono				11 bulan	11 bulan								11 bulan			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada				12 bulan	12 bulan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	32.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Kecamatan Pekalongan Timur									Timur, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kalibaros					12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	16.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Kauman																
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				7 orang/kali	7 orang/kali	12.500.000	17.500.000	17.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	7 orang/kali	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.043.308.000</b>	<b>1.089.408.000</b>	<b>1.106.808.000</b>					100 persen	<b>896.152.000</b>		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Kaliabaros				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Kelurahan Noyontaansari																
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	101.430.000	101.430.000	118.830.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	85.605.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan	931.378.000	977.478.000	977.478.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	800.047.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan				12 bulan	12 bulan								12 bulan			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		kantor pada Kecamatan Pekalongan Timur																
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan						12 bulan					
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Kalibaros				12 bulan	12 bulan						12 bulan					
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan						12 bulan					
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan						12 bulan					
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan						12 bulan					
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan						12 bulan					
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>282.756.000</b>	<b>1.262.756.000</b>	<b>1.263.971.000</b>			100 persen	<b>216.001.000</b>				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JJumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Klego				12 bulan	12 bulan	165.256.000	165.256.000	165.256.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	141.001.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Gamer				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada				12 bulan	12 bulan								12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		Kelurahan Kalibaros																
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Kauman				12 bulan	12 bulan						12 bulan					
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Noyontaansari				12 bulan	12 bulan						12 bulan					
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Poncol				12 bulan	12 bulan						12 bulan					
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional pada Kelurahan Setono				12 bulan	12 bulan						12 bulan					
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Timur				2 unit	2 unit	72.500.000	1.052.500.000	1.052.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	2 Unit	45.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Gamer				1 unit	1 unit							1 unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Kalibaros				1 Unit	1 Unit							1 Unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Kauman				1 Unit	1 Unit							1 Unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Klego				1 Unit	1 Unit							1 Unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Noyontaansari				1 unit	1 unit							1 unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Poncol				1 Unit	1 Unit							1 Unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala pada Kelurahan Setono				1 Unit	1 Unit							1 Unit				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kecamatan Pekalongan Timur				12 bulan	12 bulan	45.000.000	45.000.000	46.215.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalongan Timur	12 bulan	30.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Gamer					12 bulan	12 bulan				12 bulan								
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kalibaros					12 bulan	12 bulan				12 bulan								
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Kauman					12 bulan	12 bulan				12 bulan								
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Klego					12 bulan	12 bulan				12 bulan								
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Noyontaansari					12 bulan	12 bulan				12 bulan								
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Poncol					12 bulan	12 bulan				12 bulan								
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala pada Kelurahan Setono					12 bulan	12 bulan				12 bulan								
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>14.800.000</b>						100,00 persen	<b>49.672.000</b>	
7.01.02. 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>						100 persen	<b>31.072.000</b>	
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	jumlah kelurahan yang dibina tertib administrasinya				7 keluraha	7 kelurahan	-	0	4.000.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Kelurahan	7 keluraha	31.072.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					n					Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		n		Timur
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	12.000.000	12.000.000	10.800.000						100 persen	18.600.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan monitoring dan tertib administrasi kelurahan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	12.000.000	12.000.000	10.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 kali	18.600.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	119.943.000	129.943.000	110.283.000						100 persen	228.848.000	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	17.563.000	17.563.000	14.943.000						100 persen	17.563.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan yang disusun Jumlah kegiatan FDKP yang dilaksanakan				1 dokumen	1 dokumen	17.563.000	17.563.000	14.943.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	17.563.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	19.880.000	29.880.000	25.540.000						100 persen	99.942.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bulan fasilitasi kegiatan TP PKK Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	19.880.000	29.880.000	25.540.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	99.942.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	82.500.000	82.500.000	69.800.000						100 persen	111.343.000	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber	Jumlah fasilitasi distribusi bansos kematian yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat				12 bulan	12 bulan	82.500.000	82.500.000	69.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan	Masyarakat	12 bulan	111.343.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
	Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	kecamatan yang dilaksanakan								Kelurahan	Umum	Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik.					
		Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kegiatan	3 kegiatan								3 kegiatan			
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>168.920.000</b>	<b>151.964.000</b>	<b>146.164.000</b>						100,00 persen	<b>202.500.000</b>		
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	<b>168.920.000</b>	<b>151.964.000</b>	<b>146.164.000</b>						100 persen	<b>202.500.000</b>		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				25 hari	25 hari	168.920.000	151.964.000	146.164.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	25 hari	202.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah kegiatan upacara 17 agustus yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah layanan pengantaran Si_aAP yang dilaksanakan				52 kali	52 kali								52 kali			
		Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				36 kali	36 kali								36 kali			
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>8.200.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.200.000</b>						100,00 persen	<b>6.360.000</b>		
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	<b>8.200.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.200.000</b>						100 persen	<b>6.360.000</b>		
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkompinca yang dilaksanakan				1 kali	1 kali	8.200.000	8.200.000	8.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 kali	6.360.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>						<b>542.123.000</b>	<b>560.137.000</b>	<b>562.137.000</b>							<b>505.512.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	<b>542.123.000</b>	<b>560.137.000</b>	<b>562.137.000</b>						100 persen	<b>505.512.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	<b>542.123.000</b>	<b>560.137.000</b>	<b>562.137.000</b>						100 persen	<b>505.512.000</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	<b>Kelurahan</b>																	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	90.722.100	91.623.000	91.623.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	92.217.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	8 Kali									8 Kali		
		Jumlah lokasi jalan permukiman yang ditingkatkan				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		
		Jumlah lokasi saluran drainase yang direhab				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi									1 Lokasi		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	438.900.900	456.014.000	458.014.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	400.795.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				54 Kali	54 Kali									54 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali									4 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali									2 Kali		
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali									12 Kali		
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali									4 kali		
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali									3 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali								2 Kali			
		Jumlah Kegiatan Rembuk Stunting					1 Kegiatan								1 Kegiatan			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan			
		Jumlah pelatihan EKOPRINT yang dilaksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah pelatihan tata rias yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				66 buah	66 buah								66 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali								6 Kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				126 RT/RW	126 RT/RW								126 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				180 box	180 box								180 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>626.141.000</b>	<b>569.522.000</b>	<b>561.182.000</b>						<b>427.135.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>626.141.000</b>	<b>569.522.000</b>	<b>561.182.000</b>					100 persen	<b>427.135.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>626.141.000</b>	<b>569.522.000</b>	<b>561.182.000</b>					100 persen	<b>427.135.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki Jumlah Lokasi yang difasilitasi pembangunan gapura dan pengadaan gerobak sampah Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan Jumlah taman baca yang difasilitasi				12 Bulan	12 Bulan	168.246.000	169.446.000	159.106.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	138.873.000	Kecamatan Pekalongan Timur
						8 kali	8 kali								8 kali			
						1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
						1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			
						1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
						1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	445.395.000	387.576.000	389.576.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	275.762.000	Kecamatan Pekalongan Timur
						12 bulan	12 bulan								12 bulan			
						12 bulan	12 bulan								12 bulan			
						29 kali	29 kali								29 kali			
						4 kali	4 kali								4 kali			
						3 kali	3 kali								3 kali			
						12 kali	12 kali								12 kali			
						4 kali	4 kali								4 kali			
						3 kali	3 kali								3 kali			
						4 Kegiatan	4 Kegiatan								4 Kegiatan			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah Lembaga yang difasilitasi hibah sarpras				1 Lembaga	1 Lembaga								1 Lembaga			
		Jumlah pelatihan komputer yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah pelatihan marketing online yang dilaksanakan				1 kali	1 kali								1 kali			
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				377 buah	377 buah								377 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				82 RT/RW	82 RT/RW								82 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				45 box	45 box								45 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>427.975.000</b>	<b>446.014.000</b>	<b>437.674.000</b>						<b>373.914.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>427.975.000</b>	<b>446.014.000</b>	<b>437.674.000</b>					100 persen	<b>373.914.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>427.975.000</b>	<b>446.014.000</b>	<b>437.674.000</b>					100 persen	<b>373.914.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	155.608.000	156.808.000	146.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Masyarakat	12 Bulan	82.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali	8 Kali				Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.		8 Kali			
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang ditingkatkan				1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			
		Jumlah RT yang difasilitasi Hibah Sarpras				1 RT	1 RT								1 RT			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	259.867.000	276.706.000	278.706.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	279.414.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan				Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego				12 Bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				24 Kali	24 Kali								24 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali								12 Kali			
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Senam Sehat yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan								4 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Tentang Kebersihan Lingkungan dan Penanganan Sampah yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				651 Bulan	651 Bulan								651 Bulan			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah Rembuk Stunting					1 kali								1 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				63 RT/RW	63 RT/RW								63 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box								35 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>348.843.000</b>	<b>342.386.000</b>	<b>344.386.000</b>						<b>348.843.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>348.843.000</b>	<b>342.386.000</b>	<b>344.386.000</b>					100 persen	<b>348.843.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>348.843.000</b>	<b>342.386.000</b>	<b>344.386.000</b>					100 persen	<b>348.843.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah				12 bulan	12 bulan	117.858.000	119.058.000	119.058.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Masyarakat	12 bulan	117.858.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		kelurahan									Timur, Gamer	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	8 kali								8 kali			
		Jumlah lokasi jalan permukiman yang ditingkatkan				4 lokasi	4 lokasi								4 lokasi			
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi hibah sarpras alat tensi				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	218.485.000	210.828.000	212.828.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	218.485.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan								12 bulan			
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				27 kali	27 kali								27 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali								3 kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali								12 Kali			
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali								2 kali			
		Jumlah Kegiatan Pencegahan dan				2 kali	2 kali								2 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan																
		Jumlah Kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah yang dilaksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
		Jumlah kegiatan sosialisasi penyuluhan kesehatan bagi warga gamer yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan							1 kegiatan				
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan							1 laporan				
		Jumlah pelatihan menjahit yang dilaksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
		Jumlah PMT yang diadakan				12 buah	12 buah							12 buah				
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali							6 kali				
		Jumlah Rembuk Stunting					1 kali							1 kali				
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				42 RT/RW	42 RT/RW							42 RT/RW				
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				35 box	35 box							35 box				
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							676.513.000	670.946.000	662.606.000							404.302.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen			676.513.000	670.946.000	662.606.000				100 persen			404.302.000	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen			676.513.000	670.946.000	662.606.000				100 persen			404.302.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi				12 Bulan	12 Bulan	325.608.000	326.778.000	316.438.000	Kota Pekalongan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara	Masyarakat	12 Bulan	97.515.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
	Kelurahan	pembangunan wilayah kelurahan									Pekalongan Timur, Noyontaansari	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	0 kali								0 kali			
		Jumlah lokasi jalan permukiman yang ditingkatkan				3 Lokasi	3 Lokasi								3 Lokasi			
		Jumlah lokasi saluran drainase yang diperbaiki				1 Lokasi	1 Lokasi								1 Lokasi			
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi Hibah Sarpras				5 Lokasi	5 Lokasi								5 Lokasi			
		Jumlah Lokasi yang difasilitasi Pembangunan Gapura				2 Lokasi	2 Lokasi								2 Lokasi			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi								1 lokasi			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	12 Bulan	338.405.000	331.668.000	333.668.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 Bulan	294.287.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan	12 Bulan								12 Bulan			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				42 Kali	42 Kali								42 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 Kali	4 Kali								4 Kali			
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna				4 kali	4 kali								4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali	3 Kali								3 Kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali	12 Kali								12 Kali			
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan								4 kegiatan			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 Kali	2 Kali								2 Kali			
		Jumlah kegiatan rakor					1 kali								1 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		rembug stunting																
		Jumlah kegiatan sosialisasi NAPZA yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan			
		Jumlah kegiatan sosialisasi pengolahan sampah yang dilaksanakan				1 kegiatan	1 kegiatan								1 kegiatan			
		Jumlah kegiatan sosialisasi TB yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan								1 Kegiatan			
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 Kali	1 Kali								1 Kali			
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan			
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				1890 buah	1890 buah								1890 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 Kali	6 Kali								6 Kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				74 RT/RW	74 RT/RW								74 RT/RW			
		Jumlah strip kolestrol,, jarum dan swab alkohol yang diadakan				269 Box	269 Box								269 Box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>664.448.000</b>	<b>739.313.000</b>	<b>730.973.000</b>							<b>445.387.000</b>	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>664.448.000</b>	<b>739.313.000</b>	<b>730.973.000</b>					100 persen		<b>445.387.000</b>	
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>664.448.000</b>	<b>739.313.000</b>	<b>730.973.000</b>					100 persen		<b>445.387.000</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan	273.291.000	335.391.000	325.051.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	77.638.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman				8 kali	8 kali								8 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		(KOTAKU) yang dilaksanakan																
		Jumlah gapura yang dibangun				2 lokasi	2 lokasi							2 lokasi				
		Jumlah lokasi jalan pemukiman yang dipaving				2 lokasi	2 lokasi							2 lokasi				
		Jumlah lokasi yang difasilitasi hibah sarpras				2 lokasi	2 lokasi							2 lokasi				
		Jumlah sarpras PLPBK yang dilakukan pemeliharaan				1 lokasi	1 lokasi							1 lokasi				
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi							1 lokasi				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	378.657.000	391.422.000	393.422.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	12 bulan	355.249.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan							12 bulan				
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan							12 bulan				
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bhakti lingkungan yang dilaksanakan				45 kali	45 kali							45 kali				
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali							4 kali				
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 kali	3 kali							3 kali				
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali							12 kali				
		Jumlah kegiatan karang taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali							4 kali				
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan							4 kegiatan				
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali							2 kali				
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang di laksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan				1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun																
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				126 DOS	126 DOS								126 DOS			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				6 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah Rembuk Stunting					1 kali								1 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				93 RT/RW	93 RT/RW								93 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				63 box	63 box								63 box			
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7.01	<b>KECAMATAN</b>							<b>435.392.000</b>	<b>476.284.000</b>	<b>478.284.000</b>						<b>695.946.000</b>		
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>435.392.000</b>	<b>476.284.000</b>	<b>478.284.000</b>					100 persen	<b>695.946.000</b>		
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>435.392.000</b>	<b>476.284.000</b>	<b>478.284.000</b>					100 persen	<b>695.946.000</b>		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat, RT/RW, Kelompok Senam, LPM, BKM, PKK, Karang Taruna, FKSS, Kelompok Tani, Baduta Stunting	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah APAR terisi				1 paket	1 paket	178.608.000	204.808.000	204.808.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat, RT/RW, Kelompok Senam, LPM, BKM, PKK, Karang Taruna, FKSS, Kelompok Tani, Baduta Stunting	1 paket	306.865.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali	8 kali									8 kali		
		Jumlah lokasi jembatan yang diperbaiki				1 lokasi	1 lokasi									1 lokasi		
		Jumlah lokasi MCK yang				2 lokasi	2 lokasi									2 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
		diperbaiki																
		Jumlah RT / RW yang difasilitasi hibah sarpras				4 RT/RW	4 RT/RW							4 RT/RW				
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi	1 lokasi							1 lokasi				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	12 bulan	244.284.000	258.976.000	260.976.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat, RT/RW, Kelompok Senam, LPM, BKM, PKK, Karang Taruna, FKSS, Kelompok Tani, Baduta Stunting	12 bulan	374.081.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan	12 bulan							12 bulan				
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan	12 bulan							12 bulan				
		Jumlah dokumen RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun				1 dokumen	1 dokumen							1 dokumen				
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM dan kerja bakti lingkungan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali							4 kali				
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali	4 kali							4 kali				
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
		Jumlah fasilitasi peningkatan keterampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali	12 kali							12 kali				
		Jumlah Kegiatan Karang Taruna yang dilaksanakan				4 kali	4 kali							4 kali				
		Jumlah Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan				3 kali	3 kali							3 kali				
		Jumlah kegiatan koordinasi hasil pendataan ATS dan validasi data ATS yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan							4 kegiatan				
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				2 kali	2 kali							2 kali				
		Jumlah kegiatan rembug stunting yang dilaksanakan					1 kali							1 kali				
		Jumlah Kegiatan update data ATS yang dilaksanakan				1 kali	1 kali							1 kali				
		Jumlah kelompok yang difasilitasi senam sehat				2 kelompok	2 kelompok							2 kelompok				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
		Jumlah Laporan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan yang disusun				1 laporan	1 laporan								1 laporan			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				186 buah	186 buah								186 buah			
		Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan				4 kali	6 kali								6 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				46 RT/RW	46 RT/RW								46 RT/RW			
		Jumlah strip kolesterol, swab alkohol dan blood lancet yang diadakan				73 box	73 box								73 box			
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																	
8.01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							<b>5.874.400.000</b>	<b>6.788.475.000</b>	<b>6.434.383.000</b>						<b>3.502.637.000</b>		
8.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>2.304.517.000</b>	<b>2.282.692.000</b>	<b>2.108.302.000</b>					100 persen	<b>1.886.872.000</b>		
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100.00 Persen	100.00 Persen								100.00 Persen			
8.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>					100 persen	<b>10.902.000</b>		
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	2 dokumen	2.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	2 dokumen	1.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Badan Kesbangpol	12 bulan	6.902.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
		jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen	4 dokumen											4 dokumen	
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen	2 dokumen											2 dokumen	
		Jumlah dokumen SPIP yang disusun (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemanatauan RTP ) yang disusun				5 dokumen	5 dokumen											5 dokumen	
8.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>1.795.706.000</b>	<b>1.800.506.000</b>	<b>1.643.130.000</b>							100 persen	<b>1.672.501.000</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 kali	14 kali	1.760.306.000	1.760.306.000	1.601.130.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol		14 kali	1.638.001.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	33.900.000	38.700.000	40.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	12 bulan	33.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Kesbangpol	1 dokumen	1.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>9.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>							100 persen	<b>9.500.000</b>	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi Kelengkapannya				1 kali	1 kali	9.500.000	5.000.000	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	1 kali	9.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>113.800.000</b>	<b>150.799.000</b>	<b>135.185.000</b>							100 persen	<b>93.416.000</b>	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan				12 bulan	12 bulan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai	Kesbangpol	12 bulan	3.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	Bangunan Kantor	kantor									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Dan Transformasi Pelayanan Publik	upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan	12 bulan	30.000.000	46.033.000	24.058.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	4.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	11 bulan	18.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	8.300.000	8.300.000	8.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	8.300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	2.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				58 orang/kali	58 orang/kali	50.000.000	70.966.000	77.327.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	58 orang/kali	27.116.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>310.632.000</b>	<b>251.508.000</b>	<b>251.508.000</b>						100 persen	<b>60.419.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJMD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	1.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	29.600.000	50.000.000	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	29.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	280.032.000	200.508.000	200.508.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	29.819.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>58.879.000</b>	<b>58.879.000</b>	<b>57.479.000</b>						100 persen	<b>40.134.000</b>	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kendaraan dinas/operasional				12 bulan	12 bulan	42.879.000	42.879.000	41.679.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	24.134.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	8.000.000	8.000.000	7.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	1 unit	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala				12 bulan	12 bulan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbangpol	12 bulan	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>1.255.849.000</b>	<b>1.892.149.000</b>	<b>1.819.249.000</b>						100,00 persen	<b>321.633.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korps musik	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.255.849.000	1.892.149.000	1.819.249.000					100 persen	321.633.000		
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kegiatan pembinaan karakter kebangsaan bagi aparaturnya yang dilaksanakan			3 kali	3 kali	42.850.000	517.850.000	517.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kembangpol, Masyarakat, Pelajar dan CPNS	3 kali	40.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Jumlah kegiatan pembinaan Paskibraka Kota Pekalongan untuk 70 orang			1 kali	1 kali	1 kali											
		Jumlah lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan yang dilaksanakan			2 kali	2 kali	2 kali											
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binaka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	232.372.000	292.272.000	281.372.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kembangpol, Masyarakat, Pelajar dan CPNS	0 Orang	140.300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Jumlah pembinaan korps musik yang dilaksanakan			25 kali	20 kali	20 kali											
		jumlah upacara tingkat kota yang dilaksanakan			15 kali	15 kali	15 kali											
8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0 Keluarga	980.627.000	1.082.027.000	1.020.027.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kembangpol, Masyarakat, Pelajar dan CPNS	0 Keluarga	100.533.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat dan Generasi Muda yang dilaksanakan			2674 orang	2548 orang	2548 orang											
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga		16,00 lembaga	16,00 lembaga	16,00 lembaga	1.230.743.000	1.221.943.000	1.166.372.000					16,00 lembaga	856.583.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	1.230.743.000	1.221.943.000	1.166.372.000						100 persen	856.583.000	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Parpol				9 parpol	9 parpol	769.900.000	769.900.000	764.697.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Parpol, Masyarakat	9 parpol	774.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					0 Orang	460.843.000	452.043.000	401.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Parpol, Masyarakat	0 Orang	81.883.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah sekolah yang difasilitasi sosialisasi pendidikan politik				30 Sekolah	30 Sekolah									30 Sekolah		
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	665.000.000	680.000.000	695.000.000						100,00 persen	136.283.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	665.000.000	680.000.000	695.000.000						100 persen	136.283.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	<b>Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	pengawasan organisasi kemasyarakatan																
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kelembagaan ormas yang dibina  Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				7 lembaga/ ormas	21 lembaga/ ormas	665.000.000	680.000.000	695.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Ormas	21 lembaga/ ormas	136.283.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							180 Orang									180 Orang		
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen		100 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>363.193.000</b>	<b>620.593.000</b>	<b>562.403.000</b>						100,00 persen	<b>209.693.000</b>	
8.01.05.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	<b>363.193.000</b>	<b>620.593.000</b>	<b>562.403.000</b>						100 persen	<b>209.693.000</b>	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  jumlah sosialisasi FORKOMKON dan pembinaan ormas yang dilaksanakan  jumlah sosialisasi kerukunan antar umat beragama yang dilaksanakan  Jumlah sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	363.193.000	620.593.000	562.403.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	ormas, masyarakat	0 Orang	209.693.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						6 kali	6 kali									6 kali		
						2 kali	2 kali									2 kali		
						17 kali	17 kali									17 kali		
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN</b>	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	<b>55.098.000</b>	<b>91.098.000</b>	<b>83.057.000</b>						100,00 persen	<b>91.573.000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
	<b>KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>																	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	55.098.000	91.098.000	83.057.000					100 persen	91.573.000		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing yang disusun Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah jumlah sosialisasi pemahaman kewaspadaan dini yang dilaksanakan jumlah sosialisasi pemahaman penanganan konflik sosial yang dilaksanakan				4 dokumen	4 dokumen 45 Orang	55.098.000	91.098.000	83.057.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, dan Masyarakat	4 dokumen 45 Orang 1 kali 1 kali	91.573.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>TOTAL</b>								<b>1.029.014.024.000</b>	<b>1.008.395.478.000</b>	<b>1.060.070.466.000</b>						<b>1.058.177.281.162</b>		

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

## 5.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Pekalongan bertambah sebesar Rp.51.674.988.000 dari semula Rp.1.008.395.478.000 (APBD Penetapan) menjadi Rp.1.060.070.466.000 (Perubahan RKPD). Kerangka pendanaan untuk tahun 2023 secara lengkap disajikan dalam Tabel 5.2 berikut.

**Tabel 5.2 Perubahan Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023**

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>990.014.024.000</b>	<b>967.818.978.000</b>	<b>1.008.849.238.000</b>	<b>18.835.214.000</b>	<b>41.030.260.000</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>242.248.392.000</b>	<b>240.805.592.000</b>	<b>249.829.667.710</b>	<b>7.581.275.710</b>	<b>9.024.075.710</b>
Pajak Daerah	97.750.000.000	99.450.000.000	100.200.000.000	2.450.000.000	750.000.000
Retribusi Daerah	24.867.002.000	21.674.202.000	21.983.402.000	-2.883.600.000	309.200.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.473.378.000	6.473.378.000	6.604.200.000	130.822.000	130.822.000
Lain-lain PAD yang Sah	113.158.012.000	113.208.012.000	121.042.065.710	7.884.053.710	7.834.053.710
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>747.765.632.000</b>	<b>724.763.386.000</b>	<b>756.769.570.290</b>	<b>9.003.938.290</b>	<b>32.006.184.290</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>637.762.334.000</b>	<b>652.383.034.000</b>	<b>651.645.019.290</b>	<b>13.882.685.290</b>	<b>-738.014.710</b>
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	28.676.925.000	29.844.124.000	31.088.726.000	2.411.801.000	1.244.602.000
Dana Alokasi Umum	426.399.738.000	447.688.903.000	447.688.903.000	21.289.165.000	0
Dana Alokasi Khusus	177.989.411.000	164.905.768.000	162.923.151.290	-15.066.259.710	-1.982.616.710
Dana Insentif Daerah	4.696.260.000	9.944.239.000	9.944.239.000	5.247.979.000	0
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>110.003.298.000</b>	<b>72.380.352.000</b>	<b>105.124.551.000</b>	<b>-4.878.747.000</b>	<b>32.744.199.000</b>
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	74.045.298.000	72.380.352.000	82.064.551.000	8.019.253.000	9.684.199.000
Bantuan Keuangan Provinsi	35.958.000.000	0	23.060.000.000	-12.898.000.000	23.060.000.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>0</b>

Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH DENGAN RKPD	SELISIH DENGAN APBD
1	2	3	4	5(4-2)	6(4-3)
Pendapatan Hibah	0	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	0
<b>BELANJA</b>	<b>1.029.014.024.000</b>	<b>1.008.395.478.000</b>	<b>1.060.070.466.000</b>	<b>31.056.442.000</b>	<b>51.674.988.000</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>844.598.845.529</b>	<b>853.904.211.000</b>	<b>880.901.275.000</b>	<b>36.302.429.471</b>	<b>26.997.064.000</b>
Belanja Pegawai	405.194.236.500	402.374.077.000	401.689.577.000	-3.504.659.500	-684.500.000
Belanja Barang dan Jasa	413.908.124.887	419.190.116.000	438.694.127.000	24.786.002.113	19.504.011.000
Belanja Hibah	21.574.310.142	29.205.077.000	38.069.966.000	16.495.655.858	8.864.889.000
Belanja Bantuan Sosial	3.922.174.000	3.134.941.000	2.447.605.000	-1.474.569.000	-687.336.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>179.440.178.471</b>	<b>150.661.267.000</b>	<b>174.169.191.000</b>	<b>-5.270.987.471</b>	<b>23.507.924.000</b>
Belanja Modal Tanah	3.132.548.000	3.205.785.000	3.375.350.000	242.802.000	169.565.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.196.533.471	40.259.231.000	40.313.856.000	10.117.322.529	54.625.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.614.107.150	57.851.865.000	55.854.513.000	-2.759.594.150	-1.997.352.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.794.159.206	46.413.735.000	72.330.088.000	-10.464.071.206	25.916.353.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.702.830.644	2.930.651.000	2.295.384.000	-2.407.446.644	-635.267.000
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>4.975.000.000</b>	<b>3.780.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1.220.000.000</b>
Belanja Tidak Terduga	4.975.000.000	3.780.000.000	5.000.000.000	25.000.000	1.220.000.000
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000.000</b>
Belanja Bantuan Keuangan	0	50.000.000	0	0	-50.000.000
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>39.000.000.000</b>	<b>40.576.500.000</b>	<b>51.221.228.000</b>	<b>12.221.228.000</b>	<b>10.644.728.000</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.000.000.000</b>	<b>51.826.500.000</b>	<b>63.121.328.575</b>	<b>15.121.328.575</b>	<b>11.294.828.575</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.000.000.000	51.826.500.000	63.120.549.575	15.120.549.575	11.294.049.575
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	779.000	779.000	779.000
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>11.250.000.000</b>	<b>11.900.100.575</b>	<b>2.900.100.575</b>	<b>650.100.575</b>
Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000	6.000.000.000	6.650.100.575	650.100.575	650.100.575
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	5.250.000.000	5.250.000.000	2.250.000.000	0

Sumber: Bappeda, BPKAD Kota Pekalongan, 2023



## BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun guna mengakomodir dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan kebijakan Pusat maupun Provinsi, perkembangan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

Penyesuaian dilakukan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan Kota Pekalongan. Selanjutnya, Perubahan RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Tahun 2023.

Akhirnya, Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 28 Juli 2023

WALIKOTA PEKALONGAN



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



# DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2023.

[www.pekalongankota.bps.go.id](http://www.pekalongankota.bps.go.id), 2023.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), 2023.



**BAPPEDA**  
**M**embangun  
**B**ersama  
**M**asyarakat



*City Of Crafts  
and Folk Art*

**Kota Pekalongan**

Designed UNESCO  
Creative City In 2014

